



Pemerintah Kabupaten Tapin

RPJMD

**Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023**





BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

25. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 - 2025;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 - 2021;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin;
41. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati

Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

42. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

dan

BUPATI TAPIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2018 - 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Reublik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tapin.

BAB IV
MASA BERLAKU

Pasal 4

RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku selama 5 (lima) tahun masa jabatan Bupati terpilih periode 2018 - 2023.

BAB V
PERUBAHAN

Pasal 5

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar yang diakibatkan oleh keadaan darurat (*force majeure*); dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (4) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

- (5) RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019



Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2019 NOMOR 04



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur yang tak terhingga atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 telah selesai disusun dan menjadi Lampiran Peraturan Daerah (Perda) tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 merupakan hasil dari proses penyusunan mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, konsultasi publik, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Kabupaten Tapin hingga menjadi rancangan akhir. RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini akan menjadi lampiran atau bagian tidak terpisahkan dari Perda Kabupaten Tapin tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang berisikan Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis Daerah; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam upaya penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini kami mengucapkan terimakasih dan semoga dokumen semua yang tertera dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 ini dapat menjadi pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. “Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.”

BUPATI TAPIN,

M ARIFIN ARPAN

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	xiii
Bab I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	1-6
1.4 Maksud dan Tujuan	1-9
1.5 Sistematika Penulisan	1-10
Bab II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-57
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-59
Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-1
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-15
3.3 Kerangka Pendanaan	III-30
Bab IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH	IV-1
4.1 Permasalahan Pembangunan	IV-1
4.2 Isu Strategis	IV-9
Bab V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	V-1
5.1 Visi dan Misi	V-1
5.2 Tujuan dan Sasaran	V-8



Bab VI	STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	VI-1
	6.1. Strategi dan Arah Kebijakan	VI-1
	6.2. Program Pembangunan Daerah	VI-5
Bab VII	KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
Bab VIII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
Bab IX	PENUTUP	IX-1
	9.1. Kaidah Pelaksanaan	IX-1
	9.2. Pedoman Transisi	IX-2

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan Di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian Di Kabupaten Tapin Tahun 2016	II-4
Tabel 2.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng Di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-4
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-25
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-27
Tabel 2.6	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-28
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-29
Tabel 2.8	Jumlah dan Persebaran Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-30
Tabel 2.9	Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-31
Tabel 2.10	Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-31
Tabel 2.11	Jenis Pekerjaan Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2015	II-32
Tabel 2.12	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-35
Tabel 2.13	Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-36
Tabel 2.14	Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2012-2017	II-38
Tabel 2.15	Perkembangan PDRB Per Kapita di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-39
Tabel 2.16	Perkembangan PDRB Per Kapita di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016	II-39



Tabel 2.17	Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2012-2017	II-40
Tabel 2.18	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-43
Tabel 2.19	Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-44
Tabel 2.20	Persentase Buta Huruf dan Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-45
Tabel 2.21	Perkembangan Balita Gizi Buruk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-49
Tabel 2.22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2017	II-49
Tabel 2.23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015 dan 2017	II-50
Tabel 2.24	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-51
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2017	II-51
Tabel 2.26	Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-52
Tabel 2.27	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2012-2015	II-53
Tabel 2.28	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.29	Kontribusi Sektor Pertanian ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-54
Tabel 2.30	Kontribusi Sektor Kehutanan ADHB di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-55
Tabel 2.31	Kontribusi Sektor Pertambangan ADHB Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-55
Tabel 2.32	Kontribusi Sektor Perdagangan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.33	Kontribusi Sektor Industri Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-56
Tabel 2.34	Persentase Konsumsi RT di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-57



Tabel 2.35	Angka Kriminalitas di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2017	II-58
Tabel 2.36	Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-59
Tabel 2.37	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-61
Tabel 2.38	Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-61
Tabel 2.39	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-62
Tabel 2.40	Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-63
Tabel 2.41	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-63
Tabel 2.42	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.43	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-64
Tabel 2.44	Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-65
Tabel 2.45	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-66
Tabel 2.46	Perkembangan Angka Partisipasi Murni di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-66
Tabel 2.47	Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-67
Tabel 2.48	Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-68
Tabel 2.49	Jumlah Posyandu dan Balita di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016	II-68
Tabel 2.50	Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-69



Tabel 2.51	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-69
Tabel 2.52	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-70
Tabel 2.53	Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-70
Tabel 2.54	Jumlah Tenaga Medis di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2017	II-71
Tabel 2.55	Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan di Kabupaten Tapin Tahun 2017	II-71
Tabel 2.56	Panjang Jaringan Jalan Kabupaten di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-72
Tabel 2.57	Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-73
Tabel 2.58	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Tapin 2013-2016	II-74
Tabel 2.59	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016	II-74
Tabel 2.60	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kabupaten Tapin 2013-2016	II-75
Tabel 2.61	Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.62	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-75
Tabel 2.63	Persentase Rumah Layak Huni di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-76
Tabel 2.64	Persentase Lingkungan Kumuh di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016	II-76
Tabel 2.65	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-77
Tabel 2.66	Rasio Jumlah Linmas Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-78
Tabel 2.67	PMKS Penerima Bantuan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-78
Tabel 2.68	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-79



Tabel 2.69	Rasio Lulusan Sarjana di Kabupaten Tapin Tahun 2015	II-80
Tabel 2.70	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-80
Tabel 2.71	Rasio KDRT Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016	II-81
Tabel 2.72	Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-81
Tabel 2.73	Lahan Bersertifikat di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-82
Tabel 2.74	Penanganan Sampah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-83
Tabel 2.75	Persentase Kepemilikan KTP di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.76	Persentase Kepemilikan Akte Lahir di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-84
Tabel 2.77	Persentase Anak Berumur di bawah 18 Tahun menurut Jenis Kelamin Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017	II-84
Tabel 2.78	Persentase PKK Aktif di Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016	II-85
Tabel 2.79	Jumlah LSM di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-86
Tabel 2.80	Rasio Akseptor KB Kabupaten Tapin Tahun 2013–2016	II-86
Tabel 2.81	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-87
Tabel 2.82	Persentase Angkutan Darat di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016	II-87
Tabel 2.83	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kabupaten Tapin Tahun 2013–2016	II-88
Tabel 2.84	Jaringan Komunikasi Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-89
Tabel 2.85	Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-89
Tabel 2.86	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-90
Tabel 2.87	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tapin Tahun 2012–2016	II-90



Tabel 2.88	Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun di Kabupaten Tapin 2012-2016	II-91
Tabel 2.89	Jumlah BPR/LKM Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-91
Tabel 2.90	Jumlah Investor PMDN/PMA di Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016	II-92
Tabel 2.91	Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2014	II-92
Tabel 2.92	Jumlah Organisasi Pemuda di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016	II-93
Tabel 2.93	Jumlah Organisasi Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-93
Tabel 2.94	Jumlah Kegiatan Kepemudaan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-94
Tabel 2.95	Jumlah Kegiatan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-95
Tabel 2.96	Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Tapin 2012-2016	II-96
Tabel 2.97	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-97
Tabel 2.98	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-97
Tabel 2.99	Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-98
Tabel 2.100	Jumlah Perpustakaan di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016	II-98
Tabel 2.101	Produksi Perikanan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-100
Tabel 2.102	Konsumsi Ikan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.103	Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-101
Tabel 2.104	Produktivitas Padi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-102
Tabel 2.105	Produktivitas Karet di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-102



Tabel 2.106	Penetapan APBD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-104
Tabel 2.107	Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-105
Tabel 2.108	Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-105
Tabel 2.109	Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.110	Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-106
Tabel 2.111	Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-107
Tabel 2.112	Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.113	Jumlah Informasi Manajemen Pemda Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-108
Tabel 2.114	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016	II-109
Tabel 2.115	Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017	II-110
Tabel 3.1	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-4
Tabel 3.2	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-6
Tabel 3.3	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-8
Tabel 3.4	Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-10
Tabel 3.5	Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-13
Tabel 3.6	Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-20
Tabel 3.7	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-22
Tabel 3.8	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-24
Tabel 3.9	Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-25



Tabel 3.10	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017	III-27
Tabel 3.11	Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017	III-28
Tabel 3.12	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-29
Tabel 3.13	Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017	III-30
Tabel 3.14	Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-32
Tabel 3.15	Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-34
Tabel 3.16	Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-35
Tabel 3.17	Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-37
Tabel 3.18	Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	III-39
Tabel 4.1	Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan di Kabupaten Tapin	IV-6
Tabel 4.2	Sektor Prioritas MEA	IV-10
Tabel 4.3	Proyeksi Target Indikatif Pembangunan 2020-2024	IV-16
Tabel 4.4	Telaahan RPJMD Daerah Sekitar Tapin	IV-20
Tabel 4.5	Arah Kebijakan Tahap Ketiga dan Keempat RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025	IV-24
Tabel 4.6	Permasalahan, Isu dan Alternatif Skenario KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Tapin	IV-46
Tabel 5.1	Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2019-2023	V-2
Tabel 5.2	Penyusunan Penjelasan Visi	V-4
Tabel 5.3	Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2019-2023	V-5
Tabel 5.4	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	V-11



Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Tapin 2018-2023	VI-2
Tabel 6.2	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VI-7
Tabel 6.3	Integrasi SPM dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VI-44
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Tapin	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VII-3
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	VIII-6

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II-3
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-37
Gambar 2.3	Perbandingan Koefisien Gini Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-41
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-42
Gambar 2.5	IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017	II-44
Gambar 2.6	Perbandingan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-45
Gambar 2.7	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-47
Gambar 2.8	Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017	II-48
Gambar 4.1	Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024	IV-17
Gambar 4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025	IV-23
Gambar 6.1	Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Tapin 2019-2023	VI-5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Amanat ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tahun 2018 ini merupakan tahun yang penting dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten Tapin. Pada tahun ini dilaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023. Dengan dilantiknnya **Drs. H.M Arifin Arpan, MM** sebagai **Bupati** dan **H. Syafrudin Noor, SE, S.Sos** sebagai **Wakil Bupati Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023** pada Tanggal 19 September 2018, maka penyusunan Rancangan Awal RPJMD mulai dilakukan. Sesuai dengan amanat Pasal 264 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin meliputi beberapa tahapan, yaitu: a. persiapan penyusunan; b. penyusunan rancangan awal; c. penyusunan rancangan; d. pelaksanaan Musrenbang; e. perumusan rancangan akhir; dan f. penetapan. Tahap persiapan



dilaksanakan sebelum pemilihan kepala daerah. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam tahap persiapan yaitu penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa pendekatan dalam penyusunan rencana pembangunan terdiri dari 4 (empat) pendekatan berorientasi pada proses, yaitu:

1. **Pendekatan teknokratis** menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. **Pendekatan partisipatif** dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. **Pendekatan politis** dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
4. **Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas** merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin yang diawali dengan Rancangan Teknokratik RPJMD, juga menerapkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, yaitu menggunakan pendekatan: holistik-tematik; integratif; dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran,



strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, mengingat bahwa RPJMD dilaksanakan melalui Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), maka penyusunan rancangan awal RPJMD juga bersamaan dengan penyusunan rancangan Renstra PD.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD Kabupaten Tapin menjadi acuan dan dijabarkan setiap tahun ke dalam RKPD Kabupaten Tapin mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, yang selanjutnya menjadi pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, maka program pemerintah daerah yang disusun dalam RKPD harus konsisten dengan program, indikator kinerja *outcome*, serta Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang RPJMD. Hal ini bertujuan agar janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang disampaikan pada saat kampanye dapat diwujudkan sesuai dengan harapan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang memuat ketentuan secara langsung terkait dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4287);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

**RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023**

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis



Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2014–2034; dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW serta memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, dan RPJMD daerah sekitar. Penjelasan tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya diuraikan berikut ini:



a. RPJMD dengan RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun. Dokumen RPJPD memuat arah kebijakan pembangunan jangka menengah, yang akan menjadi pedoman penyusunan RPJMD. Pembangunan jangka menengah 2018-2023 merupakan pelaksanaan dari RPJPD Kabupaten Tapin untuk tahap/periode keempat.

Penelaahan RPJPD dilakukan dengan menelaah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta tingkat capaian kinerja sampai dengan periode penyusunan RPJMD. Hasil penelaahan sampai dengan periode terakhir dibandingkan dengan target kinerja sasaran pokok periode RPJMD yang akan disusun, menjadi bahan bagi penyusunan tujuan dan sasaran RPJMD.

b. RPJMD dengan RTRW

Perencanaan pembangunan daerah pada prinsipnya bertujuan mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RTRW untuk menjamin agar arah kebijakan dalam RPJMD selaras dengan, atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW.

Penelaahan rencana tata ruang dalam RTRW bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah rencana struktur ruang, menelaah rencana pola ruang dan menelaah indikasi program pemanfaatan ruang.

c. RPJMD dengan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Penelaahan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat

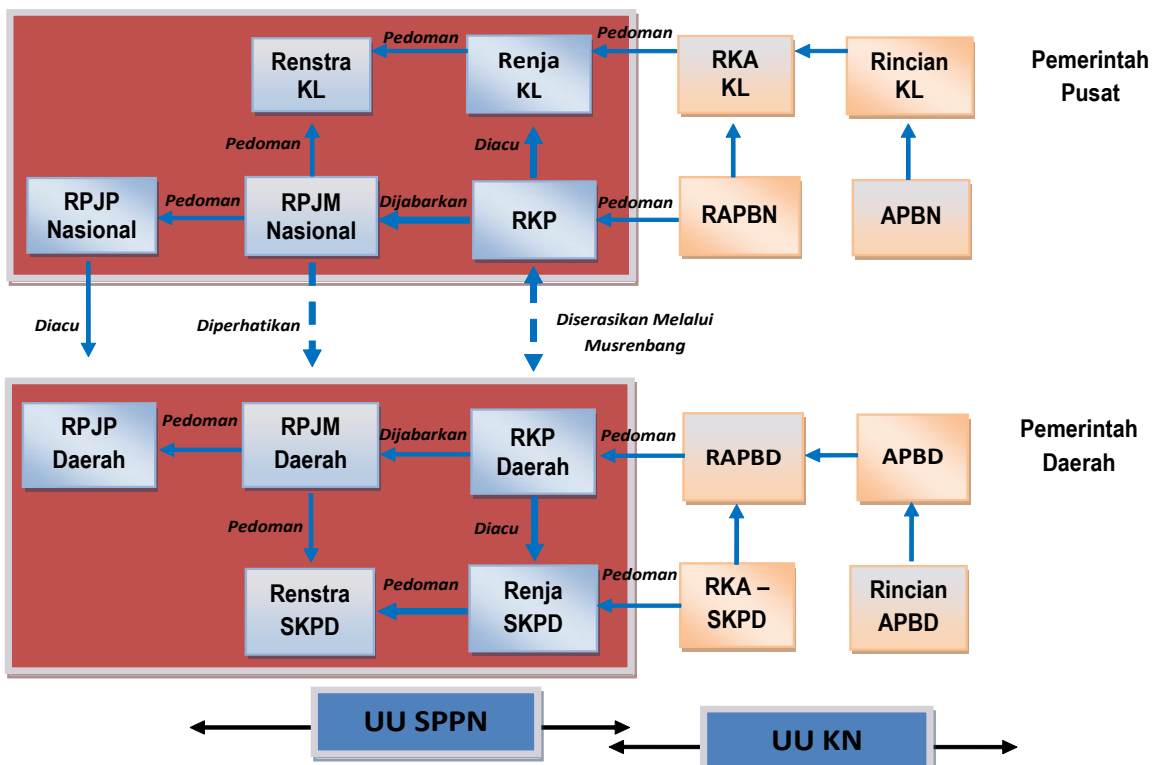


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

d. RPJMD dengan RPJMD kabupaten/kota Lain

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan dokumen RPJMD daerah lainnya agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah.



Gambar 1.1
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Lain

e. RPJMD dengan Renstra-PD, RKPD dan Renja-PD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) oleh setiap perangkat daerah. Renstra-PD merupakan rencana operasional dari RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai periode RPJMD.

Arah pembangunan 5 (lima) tahun yang dimuat dalam RPJMD menjadi



pedoman dalam penyusunan RKPD. Penyusunan Rancangan Awal RKPD berpedoman pada RPJMD, Renstra-PD dan juga perkembangan kondisi terkini daerah dan faktor eksternal lain. RKPD merupakan perencanaan tahunan yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD, dan akan menjadi pedoman penyusunan Renja-PD serta RAPBD.

f. RPJMD dengan KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Lebih lanjut, KLHS merupakan kajian yang memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tapin selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, sebagai penjabaran dari visi dan misi bupati dan wakil bupati, serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah kinerja pembangunan Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir pada periode pembangunan 2013-2017.
2. Menelaah kinerja keuangan masa lalu dan menganalisis kerangka pendanaan daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan.
3. Merumuskan permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Tapin.
4. Menjabarkan visi dan misi ke tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan daerah secara fokus.
5. Menetapkan program perangkat daerah yang disertai dengan target



indikator dan pagu selama 5 (lima) tahun kedepan.

6. Menetapkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci yang disertai target per tahun selama 5 (lima) tahun sebagai instrumen penilaian kinerja pembangunan daerah Kabupaten Tapin.

1.5. Sistematika Penulisan

Penyajian RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan RPJMD terdiri dari latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah yang dihadapi sampai dengan saat ini dan isu strategis yang akan dihadapi 5 (tahun) akan datang.

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini memuat visi dan misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin. Penyajian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan indikator kinerja dan target per tahun selama 5 (lima) tahun.



BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini memuat penjabaran dari sasaran kedalam strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah. Lebih lanjut, strategi dan arah kebijakan menjadi dasar bagi pemilihan program pembangunan daerah, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan.

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat rancangan program perangkat daerah yang disertai kerangka pendanaan selama lima tahun kedepan sampai dengan Tahun 2023.

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX. PENUTUP

Bab ini kaidah pelaksanaan RPJMD dan pedoman transisi pada saat periode RPJMD ini berakhir.



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah memuat kondisi riil Kabupaten Tapin. Data dan informasi disajikan berdasarkan Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing yang menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambaran umum kondisi Kabupaten Tapin didukung dengan data capaian selama 5 (lima) tahun terakhir.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 2.174,95 km², yang merupakan 4,23% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.



Pada Tahun 2017 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

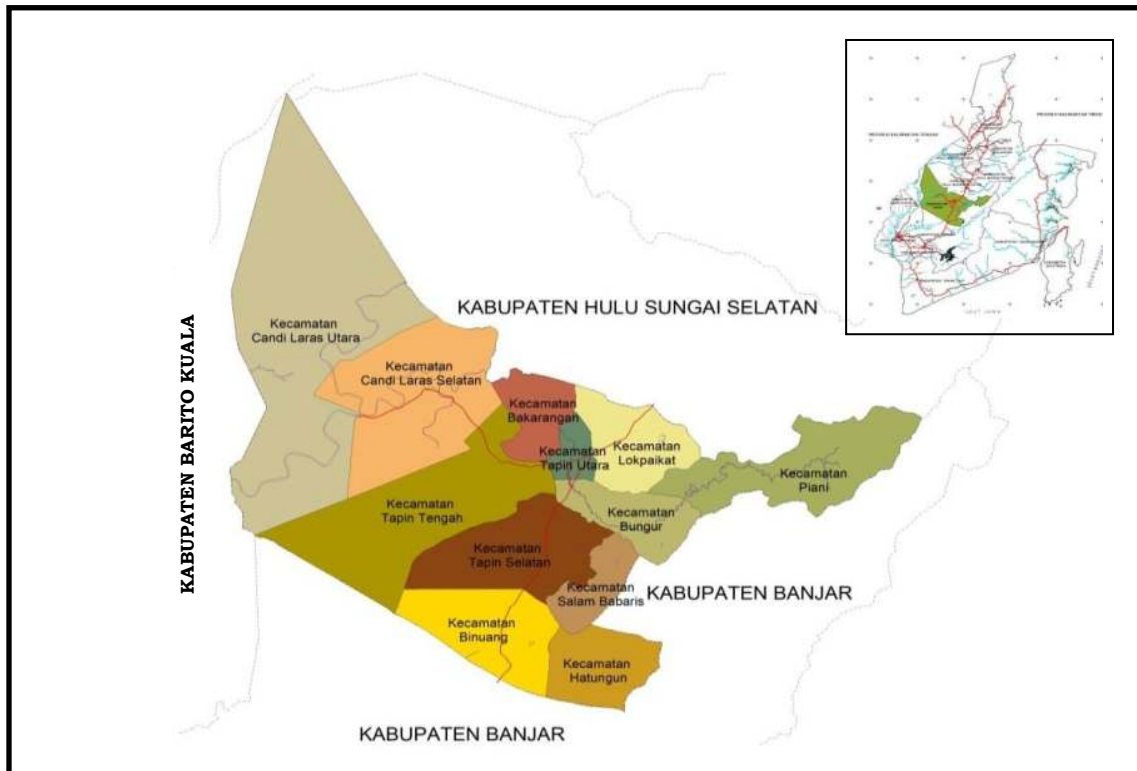
No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	132.39	8	3
2	Hatungun	95.60	8	0
3	Tapin Selatan	153.44	10	1
4	Salam Babaris	72.80	6	0
5	Tapin Tengah	309.56	17	0
6	Bungur	91.26	12	0
7	Piani	200.09	8	0
8	Lokpaikat	93.89	8	1
9	Tapin Utara	32.34	12	4
10	Bakarangan	62.57	12	0
11	Candi Laras Selatan	249.61	12	0
12	Candi Laras Utara	681.40	13	0
	Kabupaten Tapin	2,174.95	126	9

Sumber: BPS Kabupaten Tapin dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2^o11'40" – 3^o11'50" Lintang Selatan dan 114^o4'27" – 115^o3'20" Bujur Timur. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin

2.1.1.3. Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.



Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian
di Kabupaten Tapin Tahun 2016

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	> 500 m	
Binuang	8,258	3,911	940	130	0	0	13,239
Hatungun	0	0	3,344	4,093	2,123	0	9,560
Tapsel	6,566	2,975	5,803	0	0	0	15,344
Salba	0	0	6,411	869	0	0	7,280
Tapteng	29,552	1,404	0	0	0	0	30,956
Bungur	0	3,747	4,182	1,197	0	0	9,126
Piani	0	0	3,640	7,260	6,488	2,621	20,009
Lokpaikat	1,854	3,495	3,719	321	0	0	9,389
Tapin Utara	867	2,143	224	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	146,455	17,675	28,263	13,870	8,611	2,621	217,495
Persentase	67.34%	8.13%	12.99%	6.38%	3.96%	1.21%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel 2.3
Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25%	>25-40%	>40%	
Binuang	12,915	0	0	30	294	0	13,239
Hatungun	0	264	6,070	2,110	250	860	9,560
Tapsel	15,184	160	0	0	0	0	15,344
Salba	4,854	576	730	500	160	460	7,280
Tapteng	30,956	0	0	0	0	0	30,956
Bungur	5,476	0	0	2,780	440	430	9,126
Piani	0	1,090	3,510	8,909	2,360	4,140	20,009
Lokpaikat	7,369	250	860	580	330	0	9,389
Tapin Utara	3,234	0	0	0	0	0	3,234
Bakarangan	6,257	0	0	0	0	0	6,257
CLS	24,961	0	0	0	0	0	24,961
CLU	68,140	0	0	0	0	0	68,140
Jumlah	179,346	2,340	11,170	14,909	3,840	5,890	217,495
Persentase	82.46%	1.08%	5.14%	6.85%	1.76%	2.71%	100.00%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2018



2.1.1.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada di wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.1.1.5. Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan



itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 10,40-22,08 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Januari dan tertinggi pada bulan April.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 28 -32 °C Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari, April, Juni, Juli, Agustus, September, November, dan Desember. Adapun rata-rata suhu tertinggi pada bulan Maret. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 68,4 – 85,2%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, Kabupaten Tapin memiliki rencana pola ruang terdiri dari:

1. Kawasan Lindung

Kawasan Lindung meliputi:

a. kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung seluas kurang lebih 11.362 (sebelas ribu tiga ratus enam puluh dua) hektar berada di Kecamatan Piani, Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Hatungan.

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air:

- Kecamatan Salam Babaris;
- Kecamatan Hatungan;
- Hulu Sungai Tapin meliputi:
 1. Kecamatan Piani;
 2. Kecamatan Bungur; dan
 3. Kecamatan Tapin Utara.
- Hulu Sungai Negara meliputi:
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan



2. Kecamatan Candi Laras Selatan

c. kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

• **Kawasan Sempadan Sungai**

1. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) hektar;
2. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 548 (lima ratus empat puluh delapan) hektar;
3. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 843 (delapan ratus empat puluh tiga) hektar;
4. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar;
5. Kecamatan Binuang seluas kurang lebih 40 (empat puluh) hektar;
6. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 879 (delapan ratus tujuh puluh sembilan) hektar; dan
7. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 840 (delapan ratus empat puluh) hektar

• **Kawasan Sekitar Danau dan Waduk**

1. Danau Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat;
2. Waduk Tapin di Kecamatan Piani; dan
3. Waduk Tapin di Kecamatan Bungur

• **Kawasan Sekitar Mata Air**

1. mata air di Desa Hatungan, Desa Batu Hapu, Desa Gunung Ulin, Desa Kembang Kuning, dan Kecamatan Binuang;
2. mata air di Desa Baramban, Desa Bagandah, Desa Batu Ampar, Desa Harakit, Desa Balawaian, Desa Batung-Lapin, Desa Miawa, Desa Gunung Barung, Desa Buni'in Kecamatan Piani;
3. mata air di Desa Rantau Bujur, Desa Hangui, Desa Linuh, Desa Limpana, Kecamatan Bungur; dan



4. mata air di Desa Matang Batas, Desa Asam Randah, Desa Bagak, Sarang Burung Tungkap Kecamatan Hatungun. kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di lokasi hulu sungai dan mata air

- **Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan**

Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu berbentuk satu hamparan, jalur, atau kombinasi dari bentuk hamparan dan jalur, serta didominasi tumbuhan, terdapat di kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten dengan ketentuan luas minimal 30 (tiga puluh) % dari luas kawasan perkotaan yang terdiri atas 20 (dua puluh) % ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) % ruang terbuka hijau privat.

d. Kawasan cagar budaya

Kawasan cagar budaya meliputi:

- Situs Candi Laras di Desa Candi Laras Kecamatan Candi Laras Utara;
- Masjid Al Mukkarramah di Desa Banua Halat Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Al Istiqamah di Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Datu Sanggul di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Rumah Adat Banjar Bubungan Tinggi Lawahan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Datu Suban di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
- Makam Syech Salman Al-Farisi Desa Gadung Kecamatan Bakarangan;
- Makam Tasan Panyi di Kecamatan Tapin Utara;
- Masjid Baiturrahman di Desa Pandahan Kecamatan Tapin Tengah;
- Makam Datu Syarifah Aminah di Desa Binuang Kecamatan Binuang;
- Makam Haji Muhammad di Desa Batalas Kecamatan Candi Laras Utara;



- Makam Nursitiwana di Desa Pabaungan Kecamatan Candi Laras Selatan;
- Mesjid An Nur di Desa Parigi Kecamatan Bakarangan;
- Makam HM. Sa'ad di Desa Kesumagiri Kecamatan Bungur;
- Makam Duta Nuraya di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan; dan
- Mesjid Asura di Desa Labung Kecamatan Tapin Tengah

e kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- **kawasan rawan longsor**
 1. Kecamatan Bungur;
 2. Kecamatan Piani; dan
 3. Kecamatan Hatungun
- **kawasan rawan banjir**
 1. Kecamatan Candi Laras Utara;
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 3. Kecamatan Tapin Tengah

f. kawasan lindung lainnya

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan Konservasi Perairan (KKP) daratan Bakarangan seluas kurang lebih 35 (tiga puluh lima) hektar di Kecamatan Bakarangan.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya terdiri atas:

a. kawasan peruntukan hutan produksi

- **Hutan Produksi Tetap (HP)**

Hutan Produksi Tetap (HP) seluas kurang lebih 6.859 (enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan) hektar meliputi:

1. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 621 (enam ratus dua puluh satu) hektar;



2. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) hektar;
3. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) hektar;
4. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 1.030 (seribu tiga puluh) hektar.

- **Hutan Produksi Konversi (HPK)**

Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas kurang lebih 7.292 (tujuh ribu dua ratus sembilan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Candi laras Utara.

- **Hutan Produksi Terbatas (HPT)**

Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 924 (sembilan ratus dua puluh empat) hektar berada di Kecamatan Hatungun.

b. kawasan peruntukan pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri atas:

- **kawasan peruntukan tanaman pangan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan terdiri atas:

1. **kawasan pertanian lahan basah**

Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 64.098 (enam puluh empat ribu sembilan puluh delapan) hektar.

2. **kawasan pertanian lahan kering**

Kawasan pertanian lahan kering seluas kurang lebih 8.281 (delapan ribu dua ratus delapan puluh satu) hektar yang terdiri dari lahan tegal/kebun ditambah lading/huma yang meliputi:

- i. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 1.297 (seribu dua ratus sembilan puluh tujuh) hektar;
- ii. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 912 (sembilan ratus dua belas) hektar;
- iii. Kecamatan Hatungun seluas kurang lebih 2.426 (dua ribu empat ratus dua puluh enam) hektar;
- iv. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 1.053 (seribu lima puluh tiga) hektar;



- v. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 747 (tujuh ratus empat puluh tujuh) hektar;
- vi. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 1.451 (seribu empat ratus lima puluh satu) hektar; dan
- vii. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar.

3. **kawasan tanaman pangan berkelanjutan**

Kawasan peruntukan tanaman pangan yang akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan pertanian lahan basah yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

• **kawasan peruntukan hortikultura**

Kawasan peruntukan hortikultura meliputi:

- a. komoditas jeruk seluas 1.151 (seribu seratus lima puluh satu) hektar meliputi:
 1. Kecamatan Benuang seluas kurang lebih 81 (delapan puluh satu) hektar;
 2. Kecamatan Tapin Selatan seluas kurang lebih 74 (tujuh puluh empat) hektar;
 3. Kecamatan Salam Babaris seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar;
 4. Kecamatan Tapin Tengah seluas kurang lebih 39 (tiga puluh sembilan) hektar;
 5. Kecamatan Bungur seluas kurang lebih 121 (seratus dua puluh satu) hektar;
 6. Kecamatan Piani seluas kurang lebih 43 (empat puluh tiga) hektar;
 7. Kecamatan Lokpaikat seluas kurang lebih 110 (seratus sepuluh) hektar;
 8. Kecamatan Tapin Utara seluas kurang lebih 26 (dua puluh enam) hektar;



9. Kecamatan Bakarangan seluas kurang lebih 36 (tiga puluh enam) hektar;
 10. Kecamatan Candi Laras Selatan seluas kurang lebih 294 (dua ratus sembilan puluh empat) hektar; dan
 11. Kecamatan Candi Laras Utara seluas kurang lebih 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) hektar.
- b. komoditas pisang berada di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun; dan
 - c. komoditas cabe besar berada di Desa Kaladan Kecamatan Candi Laras Utara.
- **kawasan peruntukan peternakan**
Kawasan peruntukan peternakan diperuntukkan bagi kegiatan ternak besar, kecil dan unggas, tidak dikembangkan dalam bentuk padang penggembalaan ternak sehingga batasan lokasinya tidak dapat dipetakan secara tegas yang diarahkan secara terpadu dan terintegrasi bercampur dengan kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:
 - a. ternak besar dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan dalam arti luas meliputi:
 1. ternak sapi potong terdapat di Kecamatan Binuang, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Salam Babaris, Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani, dan Kecamatan Tapin Utara; dan
 2. ternak kerbau terdapat di Kecamatan Bungur, Kecamatan Tapin Tengah, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Candi Laras Selatan, dan Kecamatan Candi Laras Utara.
 - b. ternak kecil berupa ternak kambing dan domba dikembangkan secara berkelompok maupun individu tergabung dalam



permukiman perdesaan, peruntukan pertanian dan perkebunan meliputi:

1. Kecamatan Binuang;
2. Kecamatan Hatungun;
3. Kecamatan Tapin Selatan;
4. Kecamatan Salam Babaris;
5. Kecamatan Bungur;
6. Kecamatan Piani; dan
7. Kecamatan Tapin Utara.

c. ternak unggas dikembangkan dalam bentuk usaha ternak ayam ras, ayam buras dan itik diarahkan untuk tidak berdampingan langsung dengan kawasan permukiman, sebarannya meliputi:

1. Kecamatan Bungur;
2. Kecamatan Tapin Tengah;
3. Kecamatan Bakarangan;
4. Kecamatan Lokpaikat;
5. Kecamatan Piani;
6. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
7. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
8. Kecamatan Tapin Utara.

d. aneka ternak dikembangkan dalam bentuk usaha ternak kelinci dan burung puyuh dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:

1. Kecamatan Binuang;
2. Kecamatan Hatungun;
3. Kecamatan Tapin Tengah; dan
4. Kecamatan Bakarangan.

e. kawasan pengembangan ternak terpadu dikembangkan secara berkelompok maupun individu di kawasan peruntukan permukiman, pertanian dan perkebunan meliputi:

1. Kecamatan Tapin Tengah;



2. Kecamatan Bakarangan;
3. Kecamatan Lokpaikat; dan
4. Kecamatan Hatungun

- **kawasan peruntukan perkebunan**

Kawasan budidaya perkebunan seluas kurang lebih 94.422 (sembilan puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua) hektar terdiri atas:

- a. kawasan perkebunan besar;
- b. kawasan perkebunan rakyat.

c. kawasan peruntukan perikanan

- (1) Kawasan peruntukan perikanan di wilayah Kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budidaya; dan
 - c. kawasan pengolahan ikan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap terdapat di:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara;
 - c. Kecamatan Bakarangan;
 - d. Kecamatan Tapin Tengah;
 - e. Kecamatan Tapin Selatan;
 - f. Kecamatan Tapin Utara;
 - g. Kecamatan Lokpaikat;
 - h. Kecamatan Binuang; dan
 - i. Kecamatan Bungur.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budidaya berupa kawasan budidaya kolam, keramba dan minapadi tersebar di seluruh kecamatan.
- (4) Kawasan pengolahan ikan meliputi:
 - a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
 - b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 - c. Kecamatan Bakarangan



d. kawasan peruntukan pertambangan

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
 - a. mineral logam;
 - b. mineral bukan logam;
 - c. batuan; dan
 - d. batubara.
- (2) Mineral logam meliputi:
 - a. emas meliputi:
 1. Desa Kelumpang Kecamatan Salam Babaris; dan
 2. Desa Miawa Kecamatan Piani.
 - b. mangan terdapat di Kecamatan Piani; dan
 - c. besi terdapat di Kecamatan Piani.
- (3) Mineral bukan logam meliputi:
 - a. intan berada di Desa Miawa Kecamatan Piani;
 - b. kaolin meliputi:
 1. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 2. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 3. Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat;
 4. Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat; dan
 5. Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris.
 - c. batu lempung (clay, blay clay, fire clay) meliputi:
 1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 2. Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris;
 3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 4. Desa Bungur Kecamatan Bungur;
 5. Desa Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan;
 6. Desa Sidodadi Kecamatan Lokpaikat.
 - d. batu gamping kapur meliputi:
 1. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 2. Desa Batu Hapu Kecamatan Hatungun;
 3. Desa Pualamsari Kecamatan Binuang;
 4. G. Tarungin Kecamatan Hatungun;
 5. G. Kapayang;



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

6. G. Batu Dinding Kecamatan Bungur;
 7. G. Talikur Kecamatan Bungur;
 8. G. Barung Kecamatan Piani;
 9. G. Pulankapitu Kecamatan Piani;
 10. Desa Beramban Kecamatan Piani;
 11. Desa Talikur Kecamatan Bungur;
 12. Desa Pantai walang Kecamatan Bungur;
 13. G. Lampinit Kecamatan Bungur;
 14. Sandar Kecamatan Salam Babaris;
 15. Desa Batu Ampar Kecamatan Piani;
 16. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan; dan
 17. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris.
- e. batu pasir kuarsa meliputi:
1. Desa Kambang Kuning Kecamatan Binuang;
 2. G. Gambir Kecamatan Tapin Selatan;
 3. G. Galumbang;
 4. Desa Tungkap Kecamatan Binuang;
 5. Sido Mukti Kecamatan Hatungun;
 6. Desa Suato Kecamatan Tapin Selatan;
 7. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 8. Karang Nangka Kecamatan Hatungun;
 9. Tungkap Kecamatan Binuang;
 10. Desa Burakai Kecamatan Hatungun;
 11. Desa Kambang Habang Kecamatan Salam Babaris;
 12. Desa Sawang Kecamatan Tapin Selatan;
 13. Desa Tampung Hulu Kecamatan Bungur;
 14. Desa Banua Padang Kecamatan Bungur; dan
 15. Desa Harapan Masa Kecamatan Bungur.
- f. fosfat meliputi:
1. Desa Beramban Kecamatan Piani;
 2. Desa Talikur Kecamatan Piani;
 3. G. Lampinit Kecamatan Bungur;



4. Kecamatan Piani; dan
 5. Kecamatan Salam Babaris.
- (4) Batuan meliputi:
- a. granit meliputi:
 1. G. Batu Dikalang Kecamatan Piani;
 2. G. Karau Kecamatan Piani;
 3. G. Datar Gatus Kecamatan Piani;
 4. G. Hatalayang Kecamatan Piani;
 5. Desa Harakit Kecamatan Piani;
 6. Desa Batung Kecamatan Piani;
 7. Desa Bagandah Kecamatan Piani;
 8. Desa Belawaian Kecamatan Piani; dan
 9. Desa Ranai Kecamatan Piani.
 - b. andesit meliputi:
 1. G. Bagak – Asam Randah Kecamatan Hatungun;
 2. G. Batu Belawang;
 3. G. Haripit Kecamatan Hatungun;
 4. G. Batuago Kecamatan Hatungun;
 5. Desa Hariaman Kecamatan Piani;
 6. Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani; dan
 7. Desa Sambung Makmur Kecamatan Piani;
 - c. marmer meliputi
 1. Gunung Talikur Kecamatan Piani; dan
 2. Gunung Talikur Kecamatan Hatungun.
 - d. pasir meliputi:
 1. Desa Shabah Kecamatan Bungur;
 2. Desa Tampunang Hilir Kecamatan Bungur;
 3. Desa Timbung Kecamatan Bungur; dan
 4. Desa Banua Padang Hilir Kecamatan Bungur.
 - e. tanah urug meliputi:
 1. Desa Parandakan Kecamatan Lokpaikat;
 2. Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 3. Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang;



4. Desa Karangan Putih Kecamatan Binuang;
 5. Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat; dan
 6. Desa Bataratat Kecamatan Lokpaikat.
- (5) Batu bara berada di Format Warukin dan Format Tanjung meliputi:
- a. Kecamatan Binuang;
 - b. Kecamatan Tapin Selatan;
 - c. Kecamatan Bungur;
 - d. Kecamatan Salam Babaris; dan
 - e. Kecamatan Lokpaikat.
- (6) Kawasan pertambangan seluas kurang lebih 6.188 (enam ribu seratus delapan puluh delapan) hektar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan lokasinya tersebar setelah mendapatkan perijinan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. kawasan peruntukan permukiman

- (1) Kawasan peruntukan permukiman seluas kurang lebih 10.855 (sepuluh ribu delapan ratus lima puluh lima) hektar terdiri atas:
- a. permukiman perkotaan; dan
 - b. permukiman perdesaan.
- (2) Permukiman perkotaan meliputi:
- a. permukiman baru skala besar yang dikembangkan meliputi:
 1. Kecamatan Tapin Utara;
 2. Kecamatan Binuang; dan
 3. Kecamatan Candilaras Selatan.
 - b. kawasan permukiman perkotaan diimbangi dengan tersedianya pusat pelayanan yang terkonsentrasi di sekitar perkotaan PKLp, PPK dan PPL meliputi:
 1. Kecamatan Bakarangan;
 2. Kecamatan Lokpaikat;
 3. Kecamatan Bungur;
 4. Kecamatan Piani;
 5. Kecamatan Salam Babaris;
 6. Kecamatan Hatungun;



7. Kecamatan Tapin Selatan;
8. Kecamatan Tapin Tengah; dan
9. Kecamatan Candilaras Utara.

- (3) Permukiman perdesaan terdiri atas:
- a. kawasan permukiman perdesaan kegiatan pertanian yang menyebar di sekitar daerah pertanian meliputi seluruh desa di Kabupaten; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan yang akan dikembangkan bersama kegiatan industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

f. kawasan peruntukan industri

- (1) Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- a. industri besar;
 - b. industri menengah; dan
 - c. industri kecil dan mikro.
- (2) Kawasan industri besar seluas 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) hektar di Kecamatan Candi Laras Utara.
- (3) kawasan industri menengah meliputi:
- a. industri minyak Kelapa Sawit meliputi:
 1. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
 2. Kecamatan Candi Laras Selatan.
 - b. industri pengolahan karet *crumb rubber* di Kecamatan Tapin Selatan; dan
 - c. industri bricket batu bara di Kecamatan Tapin Selatan.
- (4) Kawasan industri kecil dan mikro meliputi:
- a. kerajinan keramik di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan;
 - b. agro-industri di Kecamatan Candilaras Utara dan Kecamatan Candilaras Selatan;
 - c. sentra industri kecil di Kecamatan Binuang;
 - d. industri perikanan terbatas di Kecamatan Candilaras Utara; dan
 - e. industri non polutan di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Candi Laras Selatan.



Kawasan industri tertentu untuk industri besar, industri menengah dan skala mikro, kecil dapat didirikan terpadu dengan kawasan permukiman dengan memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. kawasan peruntukan pariwisata

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata di wilayah kabupaten terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan pariwisata alam;
 - b. kawasan peruntukan pariwisata budaya; dan
 - c. kawasan peruntukan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan peruntukan pariwisata alam meliputi:
 - a. wisata alam Rute Miawa Loksado di Kecamatan Piani;
 - b. wisata alam Binuang di Kecamatan Binuang;
 - c. wisata alam Pandahan di Kecamatan Tapin Tengah;
 - d. wisata alam air terjun Hangui di Kecamatan Bungur;
 - e. wisata alam air terjun Mandian Junit di Kecamatan Piani;
 - f. wisata alam air terjun Durian Takah di Kecamatan Piani;
 - g. wisata alam Paranginan Ratu di Kecamatan Lokpaikat;
 - h. wisata alam Gunung Lampinit di Kecamatan Bungur;
 - i. wisata alam Gunung Bilanang di Kecamatan Bungur;
 - j. wisata alam Tirta Sungai Margasari di Kecamatan Candi laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara;
 - k. wisata Goa Batu Hapu di Kecamatan Binuang; dan
 - l. wisata Goa Baramban di Kecamatan Piani.
- (3) Kawasan peruntukan pariwisata budaya terdiri atas:
 - a. kawasan wisata budaya:
 1. perahu naga di Kecamatan candi laras Utara;
 2. maayun anak di Kecamatan Tapin Utara;
 3. situs candi Laras di Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
 4. aruh ganal di Kecamatan Piani.
 - b. kawasan wisata religius:
 1. makam Datuk Sanggul di Kecamatan Tapin Selatan;
 2. makam Syech Salman Al Parisi di Kecamatan Bakarangan; dan



3. majelis ta'lim di Kecamatan Tapin Tengah.
- (4) Kawasan peruntukan pariwisata buatan terdiri atas wisata agro SMK Negeri I Tapin di Kecamatan Tapin Selatan dan kerajinan anyaman di kecamatan Candi Laras Selatan.

h. kawasan peruntukan lainnya

- (1) Kawasan peruntukan lainnya, meliputi:
 - a. kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman;
 - b. kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - c. kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Kawasan peruntukan fasilitas penunjang permukiman terdiri atas:
 - a. fasilitas perkantoran pemerintahan meliputi:
 1. fasilitas perkantoran pemerintahan skala wilayah Kabupaten yang tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru;
 2. fasilitas perkantoran pemerintahan skala kecamatan yang tersebar di Kawasan Perkotaan Ibukota Kecamatan; dan
 3. fasilitas perkantoran pemerintahan skala desa/kelurahan yang tersebar di tiap pusat-pusat desa/kelurahan.
 - b. fasilitas pendidikan meliputi:
 1. fasilitas pendidikan tinggi Salman Al-Farisi berada di Kecamatan Tapin Selatan;
 2. fasilitas pendidikan menengah meliputi SMP, SMA dan sejenisnya mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung; dan
 3. fasilitas pendidikan dasar mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.
 - c. fasilitas kesehatan meliputi:
 1. fasilitas kesehatan pelayanan wilayah tersebar di Kawasan Perkotaan Rantau Baru, Margasari Baru, dan Binuang Baru;
 2. fasilitas kesehatan skala pelayanan kecamatan mempertahankan fasilitas yang telah ada dan menambah fasilitas sesuai ketentuan jumlah penduduk pendukung.



- d. fasilitas peribadatan dikembangkan dengan mempertahankan fasilitas peribadatan yang telah ada yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah kabupaten dan pengembangan fasilitas peribadatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jumlah penduduk pendukung;
 - e. fasilitas rekreasi dan olah raga meliputi:
 1. Taman-Taman Kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kotaterdiri atas taman lingkungan perumahan, taman skala RT/RW, taman skala desa, taman skala kecamatan dan taman skala kota;
 2. Lapangan umum atau lapangan olah raga skala RT/RW, skala desa, skala kecamatan dan skala kabupaten atau skala kota;
 3. Lapangan olah raga skala kecil seperti lapangan sepak bola, volley, basket, bulu tangkis, futsal, tenis dan lainnya tersebar di dalam kawasan permukiman; dan
 4. Stadion Mini Binuang di Kecamatan Binuang;
 5. Stadion Internasional Binuang di Kecamatan Binuang;
 6. Sirkuit Balipat di Kecamatan Binuang;
 7. Lapangan Tennnis Indoor di Kecamatan Binuang;
 8. Stadion Datu Muning di Kecamatan Tapin Utara;
 9. Gedung Sultan Kuning di Kecamatan Tapin Utara; dan
 10. Sirkuit Tebing Tinggi di Kecamatan Bungur.
- (3) Kawasan fasilitas perdagangan dan jasa meliputi:
- a. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan wilayah sepertipasar wilayah, pusat pertokoan, atau perdagangan moderndiarahkan tersebar di:
 1. Kawasan Rantau Baru;
 2. Kawasan Margasari Baru;
 3. Kawasan Binuang Baru; dan
 4. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting.
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan sepertipasar kecamatan, kelompok pertokoan, maupun perdagangan



- modern skala kecamatan tersebar di kawasan perkotaan berfungsi PPK atau kawasan perdesaan berfungsi PPL; dan
- c. fasilitas perdagangan dan jasa skala pelayanan lokal seperti pasar desa, kelompok pertokoan tersebar di tiap desa atau tiap lingkungan permukiman.
- (4) Kawasan pertahanan dan keamanan terdiri atas:
- a. Kawasan Militer Angkatan Darat berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat;
 - b. Komando Rayon Militer tersebar di wilayah Kabupaten; dan
 - c. Kawasan Kepolisian meliputi: Kepolisian Resort berada di Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat dan Kepolisian Sektor tersebar di wilayah Kabupaten.

2.1.1.7. Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

2.1.1.8. Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.



Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak adayang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan longsor; dan
- b. kawasan rawan banjir.

Kawasan rawan longsor meliputi:

- a. Kecamatan Bungur;
- b. Kecamatan Piani; dan
- c. Kecamatan Hatungun.

Kawasan rawan banjir meliputi:

- a. Kecamatan Candi Laras Utara;
- b. Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah

2.1.3 Demografi

2.1.4.1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2017 sebanyak 186.672 jiwa, yang terdiri dari 94.220 jiwa laki-laki dan 92.452 jiwa perempuan. Jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 184,330 jiwa.



Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Total
2012	87,572	86,297	173,869
2013	88,918	87,550	176,468
2014	90,391	88,775	179,166
2015	91,692	90,086	181,778
2016	93,011	91,319	184,330
2017	94,220	92.452	186.672

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

Rasio penduduk Kabupaten Tapin tahun 2017 sebesar 101,91. Dari rasio tersebut yang lebih besar dari 100 maka penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (*imigrasi*) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-



tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

- 2) Migrasi keluar (*emigrasi*) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin selama tahun 2012–2016 adalah: 1,49 persen, 1,53 persen, 1,46 persen, dan 1,49 persen. Laju pertumbuhan penduduk terus berfluktuasi selama periode tahun 2012–2016.

Bila ditinjau berdasarkan kecamatan, penduduk Tapin paling banyak berada di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Utara pada Tahun 2017. Sementara penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Piani. Perkembangan jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.5
Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapi Tahun 2012-2017

Kecamatan	2012			2013			2014			2015			2016			2017		
	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio	L	P	Rasio
Binuang	14.400	14.111	102	14.679	14.327	102	14.962	14.556	103	15.212	14.796	103	15.461	15.020	103	15.687	15.223	103
Hatungun	4.132	4.176	99	4.173	4.169	100	4.247	4.237	100	4.315	4.312	100	4,386	4.385	100	4.454	4.455	100
Tapsel	9.314	9.419	99	9.470	9.626	98	9.644	9.782	99	9.799	9.948	99	9.955	10.103	99	10.098	10.245	99
Salba	5.05	5.568	106	5.983	5.653	106	6.079	5.732	106	6.163	5.817	106	6.249	5.896	106	6.329	5.969	106
Tapteng	9.221	8.967	103	9.246	8.970	103	9.391	9.080	103	9.518	9.195	104	9.644	9.307	104	9.764	9.409	104
Bungur	6.177	5.997	103	6.276	6.117	103	6.404	6.229	103	8.521	6.348	103	6.639	6.461	103	6.749	6.567	103
Piani	2.842	2.736	104	2.885	2.755	105	2.933	2.796	105	2.974	2.838	105	3.015	2.878	105	3.052	2.913	105
Lokpaikat	4.644	4.627	100	4.661	4.754	98	4.741	4.824	98	4.811	4.898	98	4.882	4.967	98	4.945	5.029	98
Tapin Utara	12.173	11.903	102	12.204	11.892	103	12.426	12.078	103	12.638	12.289	103	12.865	12.499	103	13.084	12.704	103
Bakarangan	4.397	4.489	98	4.534	4.601	99	4.581	4.646	99	4.637	4.692	99	4.683	4.733	99	4.722	4.769	99
CLS	6.201	6.160	101	6.374	6.289	101	6.441	6.340	102	6.495	6.396	102	6.548	6.444	102	6.591	6.485	102
CLU	8.323	8.274	101	8.433	8.397	100	8.532	8.475	101	8.609	8.557	101	8.684	8.626	102	8.745	8.684	101
Total	87.729	86.427	102	88.918	88.918	87.550	90.391	88.775	102	91.692	90.086	102	93.011	91.319	102	94.220	92.452	102

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS



Penduduk berdasarkan kelompok umur disajikan pada tabel dibawah. Data Tahun 2017 menunjukkan penduduk tapin paling banyak berada pada kelompok umur 5-49 tahun. Ini mengindikasikan penduduk usia produktif cukup mendominasi.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	17,836	18,015	18,132	18,007	17,799	17,577
5-9	15,912	16,128	16,363	16,736	17,095	17,349
0-14	15,134	15,238	15,384	15,565	15,756	15,954
15-19	14,566	14,570	14,600	14,650	14,731	14,823
20-24	14,730	14,677	14,630	14,579	14,550	14,538
25-29	15,338	15,311	15,308	15,316	15,317	15,285
30-34	14,687	14,697	14,710	14,680	14,691	14,665
35-39	14,737	14,897	15,031	15,167	15,203	15,234
40-44	13,176	13,533	13,860	14,130	14,388	14,577
45-49	11,069	11,472	11,883	12,284	12,686	13,067
50-54	8,844	9,234	9,634	10,050	10,441	10,835
55-59	5,977	6,363	6,753	7,119	7,506	7,867
60-64	4,493	4,728	5,006	5,327	5,671	6,050
65-69	2,948	3,071	3,216	3,382	3,537	3,709
70-74	2,325	2,387	2,452	2,519	2,610	2,714
75+	2,097	2,147	2,204	2,267	2,349	2,428
Total	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS

Ditinjau dari tabel di atas, di tahun 2017 penduduk yang berusia produktif (15 tahun – 64 tahun) sebesar 126,941 orang masih lebih banyak dari penduduk yang berusia tidak produktif (0 tahun – 14 tahun) sebesar 50,880 orang dan (65 tahun-75 tahun ke atas) sebesar 8.851 orang.

Lebih lanjut, dari kelompok umur diatas, jumlah penduduk Tapin dapat dipilah berdasarkan jenis kelamin. Hasil pemilahan jenis kelamin terlihat bahwa penduduk laki-laki paling banyak berada di kelompok umur 0-4, lalu diikuti oleh kelompok umur 5-9 dan 10-14. Hal yang sama terjadi juga pada penduduk perempuan. Data ini disajikan pada tabel dibawah.



Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Kelompok Umur	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
0-4	8.390	7.927	9.081	8.676	9.369	8.916	9.914	8.813	9.090	8.709	8.978	8.599
5-9	8.311	7.929	8.071	7.822	8.331	8.043	8.495	8.241	8.653	8.442	8.763	8.586
10-14	7.900	7.576	7.676	7.336	7.926	7.545	7.969	7.596	8.070	7.686	8.171	7.783
15-19	7.499	7.228	7.287	7.069	7.522	7.270	7.465	7.185	7.513	7.218	7.562	7.261
20-24	7.386	7.274	7.355	7.109	7.589	7.310	7.449	7.130	7.454	7.096	7.469	7.069
25-29	7.668	7.659	7.708	7.383	7.952	7.589	7.887	7.429	7.909	7.408	7.911	7.374
30-34	7.752	7.677	7.203	7.282	7.430	7.489	7.322	7.358	7.346	7.345	7.361	7.304
35-39	7.465	7.332	7.357	7.322	7.593	7.530	7.569	7.598	7.572	7.631	7.575	7.659
40-44	6.700	6.582	6.716	6.616	6.933	6.808	7.108	7.022	7.228	7.160	7.312	7.265
45-49	5.598	5.456	5.713	5.587	5.900	5.751	6.210	6.074	6.413	6.273	6.603	6.464
50-54	4.579	4.334	4.728	4.366	4.884	4.495	5.209	4.841	5.405	5.036	5.604	5.231
55-59	3.223	2.953	3.220	3.048	3.326	3.138	3.641	3.478	3.824	3.682	3.994	3.873
60-64	2.093	2.224	2.282	2.373	2.356	2.446	2.643	2.684	2.828	2.843	3.018	3.032
65-69	1.386	1.725	1.306	1.717	1.350	1.768	1.498	1.884	1.581	1.956	1.682	2.027
70-74	935	1.210	1030	1.320	1.065	1.361	1.119	1.400	1.173	1.437	1.226	1.488
75+	844	1.347	839	1.271	865	1.316	914	1.353	952	1.397	991	1.437
Total	87.729	86.427	87.572	86.297	90.391	88.775	91.692	90.086	93.011	91.139	94.220	92.452

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS



Berikutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini yang menunjukkan persebaran penduduk di Kabupaten Tapin.

Tabel 2.8
Jumlah dan Persebaran Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Kecamatan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Binuang	28.503	29.006	29.518	30.008	30.481	30.910
Hatungun	8.210	8.342	8.484	8.627	8.771	8.909
Tapsel	18.777	19.096	19.426	19.747	20.058	20.343
Salba	11.470	11.636	11.811	11.98	12.145	12.298
Tapteng	17.974	18.216	18.471	18.713	18.951	19,173
Bungur	12.159	12.393	12.633	12.869	13.100	13.316
Piani	5.553	5.64	5.729	5.812	5.893	5.965
Lokpaikat	9.267	9.415	9.565	9.709	9.849	9.974
Tapin Utara	23.726	24.096	24.504	24.927	25.364	25.788
Bakarangan	9.032	9.135	9.237	9.329	9.416	9.491
CLS	12.546	12.663	12.781	12.891	12.992	13.076
CLU	16.652	16.83	17.007	17.166	17.310	17.429
Total	173,869	176.468	179.166	181.778	184.330	186.672

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS

Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2017 lebih banyak bertempat tinggal di Kecamatan Binuang, Kecamatan Tapin Utara, dan Kecamatan Tapin Selatan. Sementara tingkat kepadatan penduduk tertinggi selama periode 2012-2017 terdapat di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Binuang, dengan kecenderungan meningkat setiap tahun. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara. Data sebaran dan kepadatan penduduk Tapin pada Tahun 2017 disajikan pada tabel dibawah.



Tabel 2.9
Sebaran dan Kepadatan Penduduk Menurut Luas Wilayah
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km ²)
1	Binuang	132,39	30.910	233
2	Hatungun	95,60	8.909	93
3	Tapin Selatan	153,44	20.343	133
4	Salam Babaris	72,80	12.298	169
5	Tapin Tengah	309,56	19,173	62
6	Bungur	91,26	13.316	146
7	Piani	200,09	5.965	30
8	Lokpaikat	93,89	9.974	106
9	Tapin Utara	32,34	25.788	797
10	Bakarangan	62,57	9.491	152
11	Candi Laras Selatan	249,61	13.076	52
12	Candi Laras Utara	681,40	17.429	26
Kabupaten Tapin		2.174,95	186.672	86

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

2.1.4.2. Tingkat Pendidikan Penduduk

Pada tahun 2016, data tingkat pendidikan pekerja di Kabuapten Tapin masih didominasi oleh para pekerja dengan lulusan sekolah dasar. Oleh karena itu, kondisi tingkat pendidikan sumber daya manusia di Kabupaten Tapin harus menjadi perhatian.

Tabel 2.10
Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun Keatas
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

NO	Tingkat Pendidikan	2017
1	Tidak/ belum tamat SD/Tamat SD	50.467
2	Tamat SMP/MTs Sederajat	14.750
3	Tamat SMU/MA Sederajat	14.856
4	Tamat Diploma I/II/III	2.710
5	Tamat Diploma IV/S1	6.089
	Jumlah	93.726

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2018



Data diatas menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia Kabupaten Tapin ditinjau dari tingkat pendidikan masih harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi tantangan kemajuan masa yang akan datang. Penduduk Tapin paling banyak memiliki tingkat pendidikan tidak/belum tamat/tamat SD/MI sederajat. Sedangkan penduduk Tamat SMU/MA sederajat menempati urutan kedua terbanyak.

2.1.4.3. Jenis Pekerjaan Penduduk

Pada tahun 2013 sampai 2016 penduduk Kabupaten Tapin sebagian besar bekerja di Sektor Pertanian, Industri Pengolahan dan Jasa. Berdasarkan data bahwa penduduk yang bekerja di Sektor Pertanian sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus.

Tabel 2.11
Jenis Pekerjaan Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2015

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN		
		2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	57,46	59,82	49,90
2	Industri Pengolahan	14,11	2,08	11,38
3	Jasa-jasa	27,43	38,10	38,72

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

2.1.4 Potensi Sumber Daya

Berdasarkan dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Tapin dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten. Rencana penetapan kawasan strategis yang ada di wilayah Kabupaten terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang ada di Kabupaten terdiri atas:



- a. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi; dan
- b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan ekonomi berada di Kawasan Rawa Batang Banyu yang meliputi:

- a. Kecamatan Candi Laras Selatan;
- b. Kecamatan Candi Laras Utara; dan
- c. Kecamatan Tapin Tengah.

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berada di kawasan tertentu di Pegunungan Meratus sebagai daerah pertahanan darat dan daerah pertahanan udara, daerah basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi, gudang amunisi dan daerah ujicoba persenjataan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) terdiri atas:

- a. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya;
- c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri dari:

- a. Kawasan Rantau Baru;
- b. Kawasan Binuang Baru;
- c. Kawasan Margasari Baru;
- d. Kawasan Pelabuhan Sungai Puting;
- e. Km 94 Kecamatan Binuang; dan
- f. Km 101 Kecamatan Tapin Selatan.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut kepentingan sosial budaya berada di Kawasan Pelestarian Budaya Adat Maayun Anak di Kecamatan Tapin Utara.



Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi berupa Waduk Tapin sebagai Pembangkit Energi Listrik berada di Desa Pipitak Jaya Kecamatan Piani.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup berupa Hutan Lindung di Kecamatan Piani.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Di bidang pembangunan ekonomi, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian produk domestik regional bruto (PDRB) dibedakan dalam dua jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua sektor kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu gambaran dari peningkatan pendapatan yang berakibat pada peningkatan kemakmuran dan taraf hidup.

Berikut adalah angka PDRB Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016 atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).



Tabel 2.12
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Konstan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

(dalam juta rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	961,598	20.88%	958,546	19.68%	1,008,644	19.64%	1,076,567	20.15%	1,144,707	20.41	1,207,734	20.49
B	Pertambangan dan Penggalian	1,600,796	34.76%	1,801,864	36.99%	1,875,614	36.52%	1,863,836	34.88%	1,916,201	34.17	2,026,049	34.37
C	Industri Pengolahan	358,111	7.78%	313,436	6.44%	324,257	6.31%	333,334	6.24%	354,860	6.33	366,232	6.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,660	0.06%	2,779	0.06%	3,311	0.06%	4,365	0.08%	4,562	0.08	4,623	0.08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,422	0.29%	13,999	0.29%	14,710	0.29%	15,535	0.29%	16,611	0.30	17,387	0.29
F	Konstruksi	233,560	5.07%	243,877	5.01%	257,124	5.01%	273,170	5.11%	289,212	5.16	303,426	5.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	347,397	7.54%	371,175	7.62%	405,400	7.89%	437,361	8.18%	475,774	8.48	506,660	8.59
H	Transportasi dan Pergudangan	134,067	2.91%	142,120	2.92%	150,739	2.94%	160,958	3.01%	170,499	3.04	176,546	2.99
I	Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	88,970	1.93%	96,748	1.99%	103,998	2.02%	112,027	2.10%	119,395	2.13	125,613	2.13
J	Informasi dan Komunikasi	154,351	3.35%	166,868	3.43%	181,451	3.53%	197,604	3.70%	206,256	3.68	213,996	3.63
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	41,901	0.91%	47,557	0.98%	50,929	0.99%	53,672	1.00%	56,628	1.01	59,563	1.01
L	Real Estate	63,089	1.37%	66,585	1.37%	69,680	1.36%	73,214	1.37%	78,285	1.40	80,743	1.37
M,N	Jasa Perusahaan	4,530	0.10%	4,714	0.10%	5,055	0.10%	5,419	0.10%	5,758	0.10	5,848	0.10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	300,368	6.52%	318,209	6.53%	336,456	6.55%	365,594	6.84%	373,055	6.65	381,261	6.47
P	Jasa Pendidikan	196,502	4.27%	209,005	4.29%	228,591	4.45%	243,433	4.56%	257,939	4.60	274,783	4.66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	67,766	1.47%	75,144	1.54%	79,200	1.54%	85,158	1.59%	92,282	1.65	96,353	1.63
R,S,T,U	Jasa lainnya	36,696	0.80%	38,009	0.78%	40,544	0.79%	42,234	0.79%	45,897	0.82	48,355	0.82
	PDRB	4,605,780	100%	4,870,635	100%	5,135,704	100%	5,343,481	100%	5,607,922	100%	5,895,172	100%

Sumber: www.tapin.bps.go.id, dan www.kalsel.bps.go.id



Tabel 2.13
Nilai dan Kontribusi Sektor PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

(dalam juta rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2012		2013		2014		2015		2016		2017	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
A	Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan	1,015,630	20.11%	1,051,836	19.23%	1,193,460	19.43%	1,373,821	21.22	1,519,401	22.01%	1,624,791	21.86%
B	Pertambangan dan Penggalian	1,764,832	34.94%	1,977,387	36.16%	2,165,066	35.25%	1,942,357	30.00	1,913,015	27.71%	2,065,706	27.79%
C	Industri Pengolahan	393,290	7.79%	353,368	6.46%	397,930	6.48%	443,209	6.85	482,529	6.99%	522,257	7.03%
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,359	0.05%	2,345	0.04%	2,993	0.05%	4,702	0.07	5,962	0.09%	6,842	0.09%
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	14,904	0.30%	15,914	0.29%	17,929	0.29%	20,127	0.31	21,799	0.32%	23,413	0.31%
F	Konstruksi	252,869	5.01%	271,358	4.96%	309,617	5.04%	356,624	5.51	405,434	5.87%	426,354	5.74%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	395,495	7.83%	435,814	7.97%	511,908	8.33%	582,076	8.99	659,737	9.55%	732,860	9.87%
H	Transportasi dan Pergudangan	147,476	2.92%	163,791	2.99%	185,977	3.03%	204,346	3.16	221,213	3.20%	237,333	3.20%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	99,377	1.97%	114,840	2.10%	127,252	2.07%	144,323	2.23	157,787	2.29%	169,101	2.27%
J	Informasi dan Komunikasi	167,866	3.32%	183,473	3.35%	210,444	3.43%	231,753	3.58	246,419	3.57%	263,652	3.55%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	47,312	0.94%	57,063	1.04%	65,082	1.06%	71,730	1.11	77,740	1.13%	85,133	1.15%
L	Real Estate	68,119	1.35%	73,551	1.34%	82,515	1.34%	89,330	1.38	98,944	1.43%	104,308	1.40%
M,N	Jasa Perusahaan	4,991	0.10%	5,652	0.10%	6,629	0.11%	7,511	0.12	8,256	0.12%	8,626	0.0001%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	343,567	6.80%	391,525	7.16%	440,203	7.17%	521,088	8.05	546,437	7.91%	572,362	7.70%
P	Jasa Pendidikan	216,801	4.29%	239,882	4.39%	276,415	4.50%	309,957	4.79	348,336	5.04%	383,557	5.16%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,194	1.51%	87,737	1.60%	98,160	1.60%	113,918	1.76	127,343	1.84%	136,517	1.84%
R,S,T,U	Jasa lainnya	40,370	0.80%	43,288	0.79%	50,368	0.82%	57,973	0.90	64,341	0.93%	70,461	0.95%
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,051,452	100%	5,468,824	100%	6,141,945	100%	6,474,845	100%	6,904,693	100%	7,433,274	100%

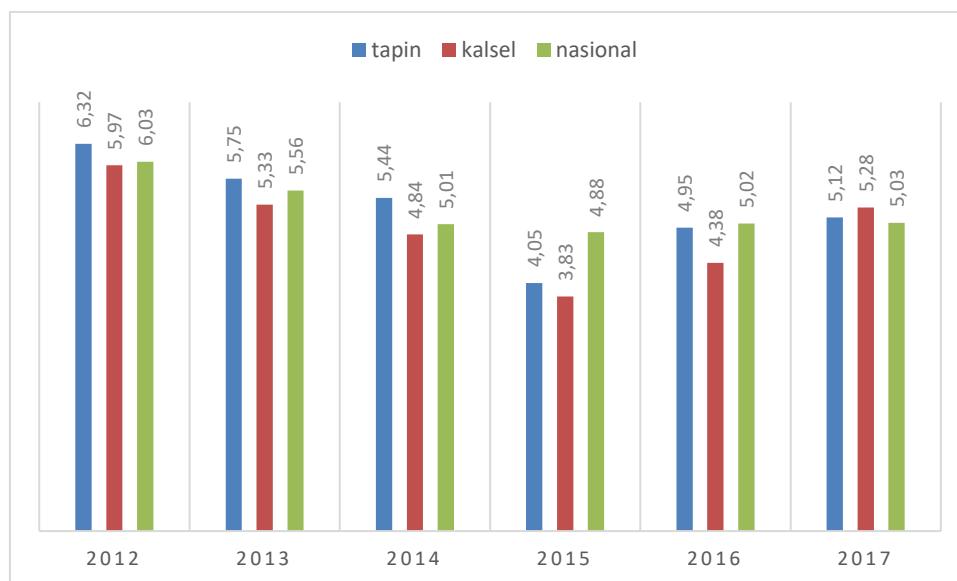
Sumber: www.tapin.bps.go.id, dan www.kalsel.bps.go.id



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 sampai dengan Tahun 2017, Kabupaten Tapin mampu meningkatkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dari Rp. 5.607.922 juta menjadi Rp 5.895.172 juta. Adapun PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) meningkat dari Rp. 6.904.693 juta menjadi Rp 7.433.274 juta.

Lebih lanjut, dapat diketahui bahwa selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perikanan, serta Sektor Pertambangan dan Penggalan merupakan penopang utama perekonomian Kabupaten Tapin.



Gambar 2.2

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, BPS RI, diolah 2018

Data di atas menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin selama beberapa tahun terakhir pada umumnya menunjukkan posisi di atas Provinsi Kalimantan Selatan, namun sedikit berada di bawah nasional. Angka terakhir Tahun 2017 menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi nasional berada di angka 5,03 persen, sementara LPE Tapin sebesar 5,12 persen dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,28 persen.



2.2.2 Laju Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan

Perhitungan tingkat inflasi Kota Rantau, bahkan kota-kota di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan, mengikuti perhitungan tingkat inflasi Kota Banjarmasin dengan asumsi memiliki struktur perubahan harga yang relatif sama.

Pada tahun 2016, secara umum laju inflasi Kota Banjarmasin mencapai tingkat terendah 3,68 persen, di mana laju tertinggi inflasi tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Sedangkan jika dibandingkan dengan nilai inflasi Nasional pada tahun 2015, 2016, dan 2017, nilai inflasi Kota Banjarmasin lebih tinggi dari nilai inflasi Nasional.

Perkembangan tingkat inflasi Kota Banjarmasin di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.14
Perkembangan Nilai Inflasi Tahun 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kota Banjarmasin	5,96	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82
Provinsi Kalimantan Selatan	n/a	n/a	n/a	5,14	3,57	3,82
Nasional	4,30	8,38	8,36	3,35	3,02	3,61

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan BPS Pusat

2.2.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Dari tahun 2012-2016 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tapin mengalami kenaikan terus menerus. PDRB ADHB per kapita tahun 2012 sebesar 29,05 juta menjadi 37,43 juta di tahun 2016. Adapun PDRB ADHK per kapita tahun 2012 sebesar 26,49 juta menjadi 30,39 juta di tahun 2016.

Kondisi PDRB per kapita tersajikan dalam tabel perkembangan sebagai berikut.



Tabel 2.15
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016
ADHB					
Nilai PDRB (Rp)	5,051,452	5,468,823.60	6,141,944.93	6,473,528.53	6,900,018.89
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	29,05	30,99	34,28	35,61	37,43
ADHK					
Nilai PDRB (Rp)	4,605,780	4,870,635.30	5,135,704.36	5,343,467.13	5,602,697.64
Jumlah Penduduk (jiwa)	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	26,49	27,60	28,66	29,40	30,39

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Tapin masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan perhitungan ADHB dan ADHK. Berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita ADHB, penduduk Kabupaten Tapin memiliki pendapatan per kapita sebesar 29,05 juta di tahun 2012 dan 37,43 juta di tahun 2016. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 28,20 juta di tahun 2012 dan 36,08 juta di tahun 2016.

Tabel 2.16
Perkembangan PDRB Per Kapita
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

	2012	2013	2014	2015	2016
ADHB					
Nilai PDRB (Rp)	106,725,429.30	115,858,201.60	127,882,282.38	137,392,495.09	146,325,615.23
Jumlah Penduduk (jiwa)	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	28.20	30.06	32.60	34.44	36.08
ADHK					
Nilai PDRB (Rp)	96,697,838.70	101,850,536.40	106,779,397.64	110,867,877.85	115,727,546.78
Jumlah Penduduk (jiwa)	3,784,981	3,854,485	3,922,790	3,989,793	4,055,479
PDRB Per Kapita (Rp/jiwa)	25.55	26.42	27.22	27.79	28.54

Sumber: www.kalsel.go.id

Berdasarkan perhitungan pendapatan per kapita ADHK, penduduk Kabupaten Tapin memiliki pendapatan per kapita sebesar 26,49 juta di tahun



2012 dan 30,39 juta di tahun 2016. Adapun pendapatan per kapita penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 25,55 juta di tahun 2012 dan 28,54 juta di tahun 2016.

2.2.4 Indeks Gini/Koefisien Gini

Tingkat pemerataan distribusi pendapatan sering diukur dengan koefisien gini. Koefisien gini adalah ukuran ketidakseimbangan atau ketimpangan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pengelompokan nilai Koefisien Gini adalah:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Dalam menghitung nilai koefisien gini, maka dibutuhkan data-data seperti Jumlah rumah tangga atau penduduk dan rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Berikut adalah data perkembangan koefisien gini tahun 2012-2017.

Tabel 2.17
Perkembangan Koefisien Gini Tahun 2012-2017

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Tapin	0,30	0,28	0,26	0,35	0,32	0,33
Provinsi Kalimantan Selatan	0,36	0,36	0,33	0,35	0,35	0,35
Nasional	0,413	0,406	0,414	0,402	0,394	0,391

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan

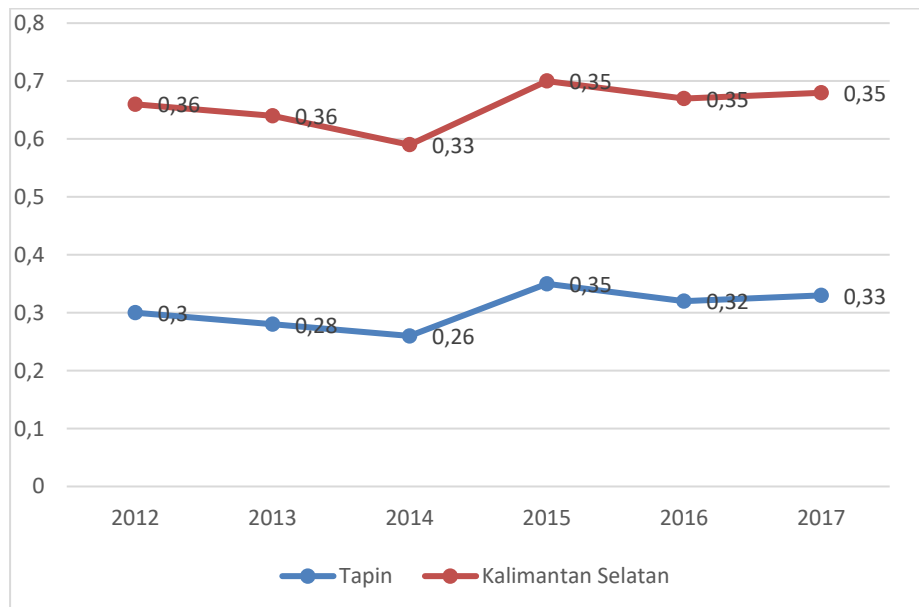
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketimpangan pendapatan Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi selama periode 2012-2017. Ketimpangan di Kabupaten Tapin berada di level rendah dan sedang. Ketimpangan tertinggi di Kabupaten Tapin sebesar 0,35 di tahun 2015, sedangkan ketimpangan terendah sebesar 0,26 di tahun 2014.

Ketimpangan di Provinsi Kalimantan Selatan selalu lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017, kecuali di



tahun 2016 sebesar 0,35. Angka ketimpangan tersebut sama nilainya dengan angka ketimpangan di Kabupaten Tapin.

Ketimpangan di Kabupaten Tapin lebih rendah dibandingkan ketimpangan Nasional selama periode tahun 2012-2017. Di tahun 2012, ketimpangan di Kabupaten Tapin sebesar 0,30, sedangkan ketimpangan Nasional sebesar 0,413. Di tahun 2017, ketimpangan di Kabupaten Tapin sebesar 0,33, sedangkan ketimpangan Nasional sebesar 0,391. Ketimpangan Nasional cenderung menurun, sedangkan ketimpangan di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi.

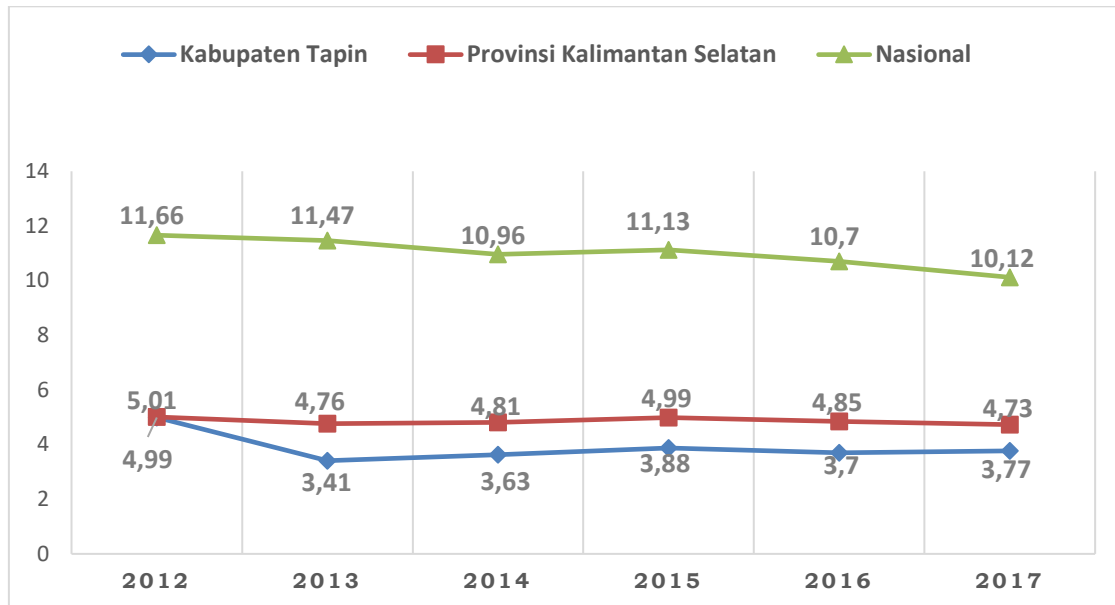


Gambar 2.3
Perbandingan Koefisien Gini
Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan www.tapinkab.bps.go.id

2.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.



Gambar 2.4

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan dan BPS Indonesia, diolah 2018

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, kemiskinan di Kabupaten Tapin menunjukkan kecenderungan yang berfluktuasi naik dan turun. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin tertinggi sebesar 4,99 persen di tahun 2012, sedangkan terendah sebesar 3,41 persen di tahun 2013. Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapin dari kurun waktu tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 selalu berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional.

Selain indikator persentase penduduk miskin, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2017, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tapin sebesar 0,40, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,25. Peningkatan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata



pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Tapin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Lebih lanjut dari data yang ada, diketahui Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Tapin sebesar 0,08, meningkat dari tahun 2016 yang sebesar 0,03. Peningkatan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar.

Tabel 2.18
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	8.717	6.045	6.518	7.010	6.810	7.011
Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153	390.488
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4,99	3,41	3,63	3,88	3,7	3,77
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) (%)	0,48	0,34	0,37	0,46	0,25	0,40
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) (%)	0,08	0,05	0,06	0,08	0,03	0,08

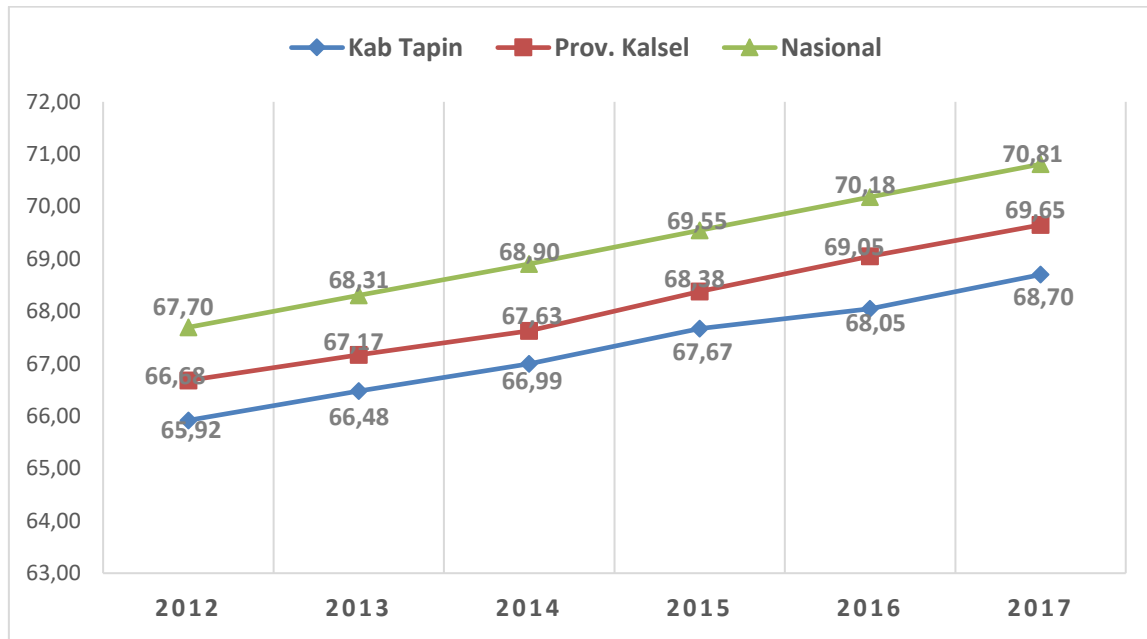
Sumber: BPS Indonesia Tahun 2017

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks komposit untuk mengukur pencapaian upaya pembangunan manusia dari berbagai perspektif, yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

Data beberapa tahun terakhir menunjukkan nilai IPM Kabupaten Tapin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2012 sebesar 65,92 sedangkan di tahun 2017 sebesar 68,70. Bila dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan, maka IPM Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017 lebih rendah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Posisi terakhir di tahun 2017, IPM Kabupaten Tapin adalah 68,70, sedangkan IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 69,65.

Tidak jauh berbeda dengan provinsi Kalimantan Selatan, nilai IPM Kabupaten Tapin selalu berada dibawah dari IPM nasional. IPM nasional Tahun 2017 mencapai 70,81, lebih tinggi dibanding IPM Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin



Gambar 2.5
IPM Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2012-2017

Sumber: BPS Indonesia, diolah 2018

2.2.7 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (dewasa) adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Melek Huruf adalah 100%. Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.19
Perkembangan Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Angka Melek Huruf	96,87	93,00	93,29	97,10	98,34	98,87

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi. Angka Melek Huruf tertinggi sebesar 98,87 di tahun 2017, sedangkan terendah sebesar 93,00 di tahun 2013.



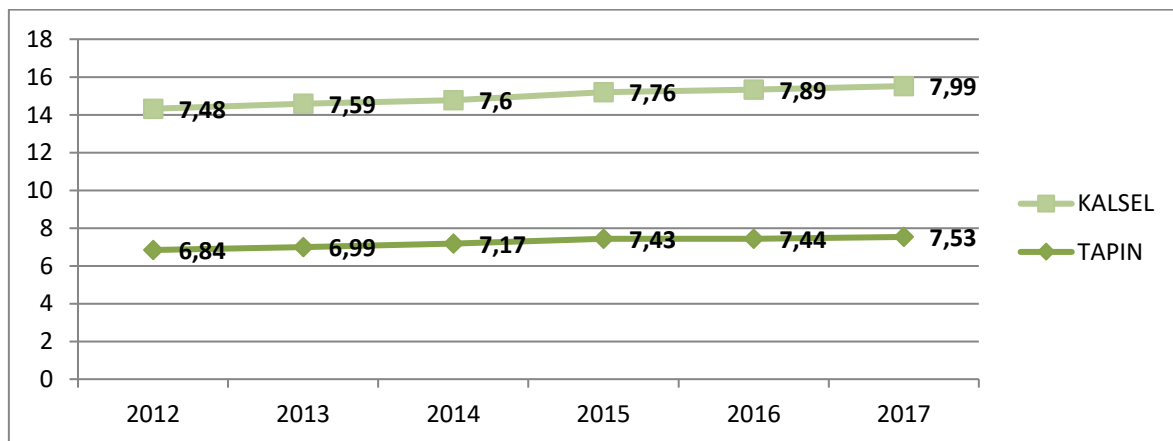
Tabel 2.20
Persentase Buta Huruf dan Melek Huruf Penduduk 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Buta Huruf (%)	2,90	1,66	1,13
Laki-laki	1,43	0,79	0,46
Perempuan	4,39	2,50	1,79
Melek Huruf (%)	97,10	98,34	98,87
Laki-Laki	98,57	99,21	99,54
Perempuan	95,61	97,50	96,27

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

2.2.8 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 5 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Sesuai standar global (UNDP) nilai maksimum Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah 15 tahun atau setingkat Diploma III.



Gambar 2.6
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id

Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung meningkat. Pada tahun 2017 Angka Rata-rata Lama Sekolah penduduk Kabupaten Tapin adalah 7,53 artinya rata-rata penduduk di Kabupaten Tapin bersekolah



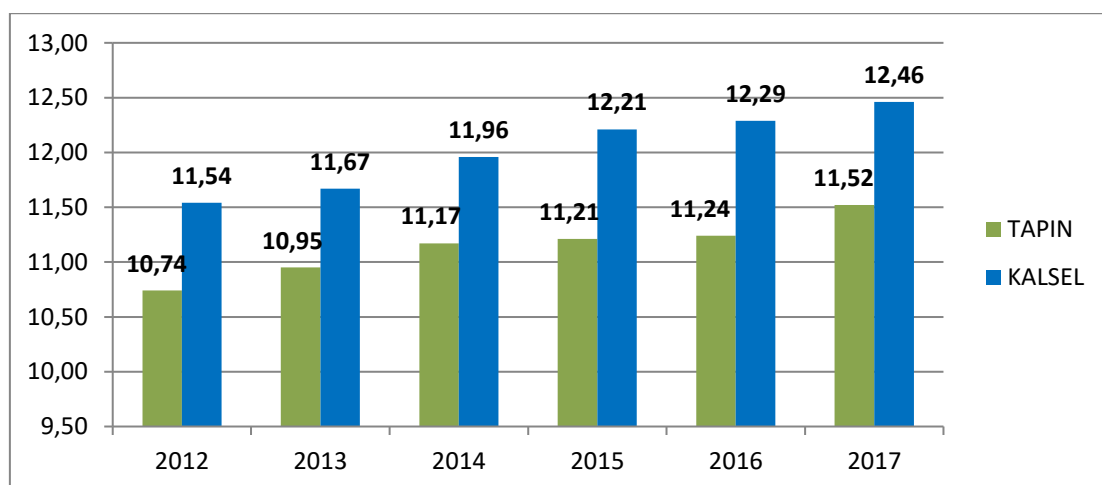
sampai 7 tahun 5 bulan atau setingkat Kelas 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).

Angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2017. Pada tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,48 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 6,84. Data tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,99 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,53.

2.2.9 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dari data beberapa tahun terakhir, dapat diketahui bahwa Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung meningkat setiap tahunnya. Harapan lama sekolah di tahun 2012 sebesar 10,74 meningkat menjadi 11,52 di tahun 2017.

Berdasarkan data harapan lama sekolah, Kabupaten Tapin berada di bawah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode tahun 2012-2017. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin perlu meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah agar bisa setaraf dengan Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 2.7
Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tapin dengan
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

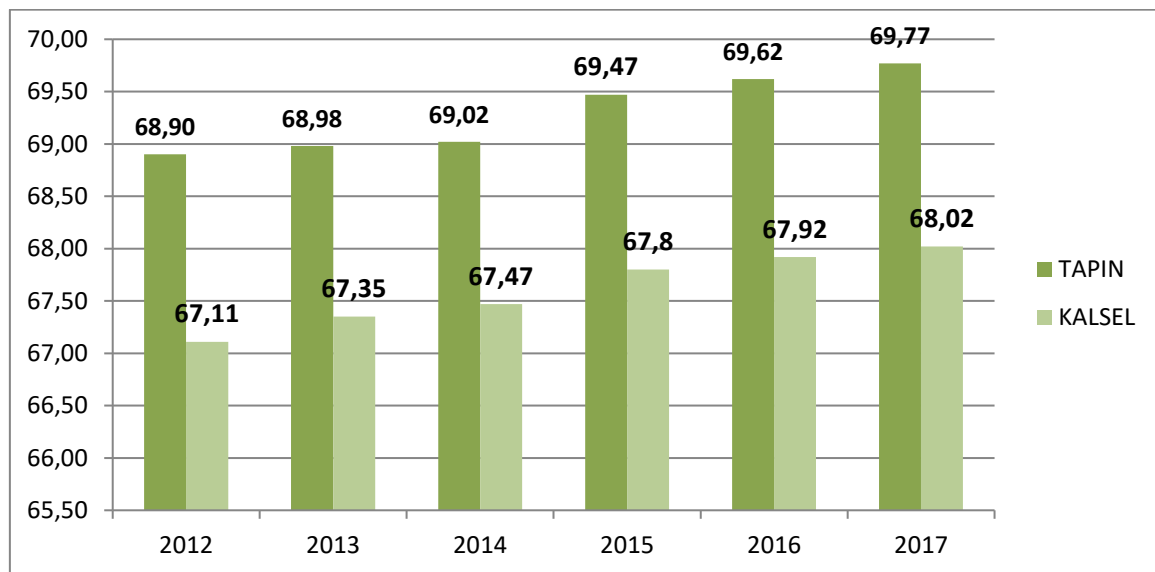
Sumber: www.kalsel.bps.go.id

2.2.10 Angka Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.

AHH pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya.

AHH di Kabupaten Tapin lebih selama periode tahun 2012-2017 lebih tinggi dibandingkan dengan AHH di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini berlangsung selama beberapa tahun terakhir, dan pada tahun 2017, AHH Kabupaten Tapin mencapai 69,77 tahun sementara AHH Provinsi Kalimantan Selatan berada di angka 68,02 tahun.



Gambar 2.8

Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Tapin dengan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Sumber: www.kalsel.bps.go.id

2.2.11 Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari



berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu:

- a. rendah = di bawah 10 %
- b. sedang = 10-19 %
- c. tinggi = 20-29 %
- d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan jumlah balita gizi buruk di Kabupaten Tapin terlihat dalam tabel berikut.



Tabel 2.21
Perkembangan Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Balita Gizi Buruk	-	268	182	182	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas bahwa selama periode tahun 2012-2016 jumlah balita gizi buruk tertinggi sebesar 268 di tahun 2013, sedangkan Tahun 2014 dan 2015 stabil di angka 182.

2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Berdasarkan publikasi ILO (*International Labour Organization*), penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja dikatakan juga sebagai penduduk usia kerja, yaitu penduduk usia 15 tahun. Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari kerja. Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja.

Tabel 2.22
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2017

TPAK	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab. Tapin	67,52	69,89	71,29	71,75	-	71,92
Prov. Kalimantan Selatan	72,01	69,31	69,46	69,73	71,57	70,06

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan tabel di atas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Tapin meningkat dari 67,52 persen di tahun 2012 menjadi 71,92 persen di tahun 2017. TPAK di Kabupaten Tapin selalu lebih tinggi dibandingkan TPAK di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2012-2017, kecuali di tahun 2012. Pada tahun 2012, TPAK di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 72,01, sedangkan TPAK di Kabupaten Tapin sebesar 67,52.

Tabel 2.23
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015 dan 2017

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	2015	2017
Laki-laki	84,61	85,50
Perempuan	58,77	58,14
Total	71,75	71,92

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) laki-laki meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2017 yaitu dari 84,61 persen menjadi 85,50 persen. Sebaliknya TPAK perempuan mengalami penurunan yaitu dari 58,77 menjadi 58,14.

2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Berdasarkan data, pada tahun 2017 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin berdasarkan jenis kelamin laki-laki sedikit mengalami peningkatan, yaitu dari 4,39 persen di tahun 2015 menjadi 4,93 persen di tahun 2017, dan sebaliknya untuk perempuan mengalami penurunan.



Tabel 2.24
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Jenis Kelamin
Di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2015	2016	2017
Laki-laki	4,39		4,93
Perempuan	6,22		3,57
Total	5,14		4,39

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berikut ini adalah data pengangguran yang terjadi di Kabupaten Tapin dalam enam tahun terakhir.

Tabel 2.25
Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2012-2017

Tingkat Pengangguran Terbuka	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Tapin	6,69	5,24	1,79	5,14	-	4,39
Provinsi Kalimantan Selatan	5,14	3,66	3,80	4,92	5,45	4,77
Nasional	6,13	6,17	5,94	5,81	5,61	5,50

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, BPS Provinsi Kalimantan Selatan, dan BPS Pusat

Dari tabel di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi dari tahun 2012 sampai tahun 2017. Di tahun 2014 merupakan posisi TPT paling rendah di Kabupaten Tapin sebesar 1,79 persen, sedangkan TPT tertinggi sebesar 6,69 persen di tahun 2012.

Posisi TPT di Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2012, 2013, dan 2015. Di tahun 2012, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 6,69 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,14 persen. Di tahun 2013, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 5,24 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,66 persen. Di tahun 2015, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 5,14 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,92 persen.

Sementara itu, TPT Kabupaten Tapin lebih rendah dibandingkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2014, dan 2017. Di tahun 2014,



TPT di Kabupaten Tapin sebesar 1,79 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 3,80 persen. Di tahun 2017, TPT di Kabupaten Tapin sebesar 4,39 persen, sedangkan TPT di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,77 persen. Bila dibandingkan dengan nasional, TPT Kabupaten Tapin lebih rendah jika dibandingkan dengan TPT Nasional selama periode tahun 2012-2017. TPT di Kabupaten Tapin cenderung berfluktuasi, sedangkan TPT Nasional cenderung menurun.

2.2.14 Rasio Penduduk Yang Bekerja

Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja diartikan sebagai peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing.

Kesempatan Kerja (*demand for labour*) adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja). Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja. Sementara itu, angkatan kerja (*labour force*) didefinisikan sebagai bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang produktif atau disebut juga sumber daya manusia.

Tabel 2.26
Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Penjelasan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Penduduk yang bekerja	79,042	84,326	90,766	89,760	-	93,726
Angkatan Kerja	84,706	88,991	92,425	94,619	-	98,027
Rasio	93,31%	94,76%	98,21%	94,86%	-	95,61%

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan BPS Provinsi Kalimantan Selatan



Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rasio tertinggi 98,21 persen di tahun 2014 dan rasio terendah sebesar 93,31 persen di tahun 2012.

2.2.15 Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Data periode 2012 sampai dengan 2015 baik IPG maupun IDG Kabupaten Tapin menunjukkan peningkatan. Kondisi terakhir Tahun 2015 yang dipublikasikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan BPS menunjukkan IPG Kabupaten tapin sebesar 83,80 dan IDG sebesar 72,88.

Bila dibandingkan dengan IPG Provinsi Kalimantan Selatan (88,55), maka posisi IPG Kabupaten Tapin masih lebih rendah. Namun untuk IDG, posisi Kabupaten Tapin lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Selatan. IDG Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 70,05.

Tabel 2.27
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2015

No.	Uraian	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Tapin					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	82,88	83,41	83,54	83,80
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	75,39	71,60	72,76	72,88
Provinsi Kalimantan Selatan					
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	88,33	88,33	88,46	88,55
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,40	65,60	68,22	70,05

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2016, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS



2.2.16 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2012-2016 menunjukkan prestasi yang meningkat. Opini BPK untuk tahun 2012-2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP), sedangkan tahun 2015-2016 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.28
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Opini BPK	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.2.17 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Sektor pertanian adalah sektor utama pemberi kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tapin. Dalam hal ini yang termasuk dengan sektor pertanian adalah tanaman pangan, palawija, kehutanan dan perkebunan. Berdasarkan tabel di bawah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih mengalami peningkatan dan memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Tapin.

Tabel 2.29
Kontribusi Sektor Pertanian ADHB
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Sub Sektor Pertanian	920,160.78	950,859.74	1,081,274.76	1,221,355.81	1,350,982.23
PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
Kontribusi	18,22	17,39	17,60	18,87	19,58

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB berfluktuasi selama tahun 2012-2016. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tertinggi sebesar 19,58 persen di tahun 2016, terendah sebesar 17,39 persen di tahun 2013.

2.2.18 Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Melihat data di bawah, menunjukkan bahwa sektor kehutanan memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDRB ADHB dan cenderung menurun sampai dengan tahun 2016. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tertinggi sebesar 0,31 persen di tahun 2013, terendah sebesar 0,28 persen di tahun 2012 dan 2016.

Tabel 2.30
Kontribusi Sektor Kehutanan ADHB
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
PDRB Sub Sektor Kehutanan	15,234.45	16,829.38	17,901.90	18,956.74	19,470.92
PDRB Total	5,468,824	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
Kontribusi	0,28	0,31	0,29	0,29	0,28

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

2.2.19 Kontribusi Sektor Pertambangan

Pada sektor energi dan sumber daya mineral, kontribusi sektor pertambangan selama periode tahun 2012-2016 terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor pertambangan di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.31
Kontribusi Sektor Pertambangan ADHB
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Pertambangan	1,764,832	1,977,387	2,165,066	1,944,870	1,916,063
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi	34,94	36,16	35,25	30,04	27,77

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tertinggi sebesar 36,16 persen di tahun 2013, terendah sebesar 27,77 persen di tahun 2016.

2.2.20 Kontribusi Sektor Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2016 terus mengalami kenaikan. Tahun 2012, PDRB ADHB Kabupaten Tapin sektor perdagangan sebesar 7,83 persen, sedangkan di tahun 2016 telah mencapai 9,56 persen.

Tabel 2.32
Kontribusi Sektor Perdagangan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Perdagangan	395,495	435,814	511,908	582,076	659,737
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi (%)	7,83	7,97	8,33	8,99	9,56

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

2.2.21 Kontribusi Sektor Industri

Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Kontribusi sektor perindustrian di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.33
Kontribusi Sektor Industri
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

(dalam juta rupiah)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	PDRB Sektor Perindustrian	393,290	353,368	397,930	443,209	482,529
2	PDRB Total	5,051,452	5,468,824	6,141,945	6,473,529	6,900,019
3	Kontribusi (%)	7,79	6,46	6,48	6,85	6,99

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan PDRB Kabupaten Tapin Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016



Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tapin tertinggi sebesar 7,79 persen di tahun 2012, terendah sebesar 6,46 persen di tahun 2013.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.3.1 Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Angka konsumsi RT per kapita)

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi RT per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Tabel 2.34
Persentase Konsumsi RT
di Kabupaten Tapin Tahun 2015–2017

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Total Pengeluaran RT Pangan	469,969	587,216	582.228
2	Total Pengeluaran RT non Pangan	458,849	554,529	450.585
3	Total Pengeluaran	928,818	1,141,745	1.032.813

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun Tahun 2016, 2017



Berdasarkan tabel di atas, besar konsumsi RT lebih tinggi untuk sektor pangan dibandingkan non pangan selama periode tahun 2015-2017.

2.3.2 Angka kriminalitas yang tertangani

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir.

Tabel 2.35
Angka Kriminalitas
di Kabupaten Tapin Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
Jumlah Kriminalitas	296	284	220	316
Jumlah Penduduk	179,166	181,778	184,330	186,672
Angka Kriminalitas	16,52	15,62	11,94	16,93

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2016, 2017, 2018

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 110.000 penduduk.

2.3.3 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja



yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Pada Tahun 2012 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 46,72 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,69 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas).

Adapun tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 47,25 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 47,25 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

Tabel 2.36
Rasio Ketergantungan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	48,003	49,381	49,879	50,308	50,650
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	7,441	7,605	7,872	8,168	8,496
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	55,444	56,986	57,751	58,476	59,146
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	118,682	119,482	121,415	123,302	125,184
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)	46,72	47,69	47,56	47,43	47,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek pelayanan umum terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut adalah tabel urusan pemerintah daerah yang kemudian akan dibahas masing-masing fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.



A. Layanan Urusan Wajib

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun tidak terkait pelayanan dasar. Berikut adalah pembahasan fokus layanan urusan wajib untuk tiap urusan wajib.

2.4.1 Pendidikan

1. Pendidikan Dasar

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

Di Indonesia, proporsi penduduk muda sendiri semakin menurun akibat semakin rendahnya angka fertilitas (lihat bagian fertilitas). Penurunan ini akan menyebabkan semakin menurunnya jumlah anak-anak yang masuk sekolah dasar. Bila ukuran seperti perubahan jumlah murid digunakan, bisa jadi ditemukan penurunan jumlah murid di sekolah dasar dengan interpretasi terjadi penurunan partisipasi sekolah. Namun, bila digunakan APS, maka akan ditemukan peningkatan partisipasi di tingkat SD yang disebabkan semakin rendahnya jumlah penduduk usia SD.

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Berikut Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Tapin dari tahun 2013-2017.



Tabel 2.37
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur 7-12 tahun (%)	98,42	98,00	100	98,76	99,98	99,98
Umur 13-15 tahun (%)	63,83	82,06	94,99	87,13	92,02	92,49

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin Tahun 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas APS umur 7-12 tahun mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2016. APS tertinggi sebesar 100 di tahun 2014, sedangkan terendah sebesar 98 persen di tahun 2013. Untuk APS umur 13-15 tahun juga mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2017. APS tertinggi sebesar 94,99 persen di tahun 2014, sedangkan terendah sebesar 63,83 persen di tahun 2012.

Tabel 2.38
Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur dan Jenis
Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2015	2016	2017
Umur 7-12 tahun (%)	98,76	99,98	99,98
Laki-laki	99,11	99,98	99,98
Perempuan	98,37	99,98	99,98
Umur 13-15 tahun (%)	87,13	92,02	93,96
Laki-laki	90,60	87,50	95,70
Perempuan	84,12	98,37	92,32
Umur 16-18 tahun (%)	54,19	58,86	59,84
Laki-laki	58,05	62,54	59,51
Perempuan	50,49	56,00	60,11

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel di atas APS pada jenis kelamin laki-laki mengalami peningkatan persentasenya pada umur 7-12 tahun dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun dan 16-18 tahun. Sedangkan pada jenis kelamin



perempuan mengalami peningkatan pada umur 7-12 tahun dan 16-18 tahun dan mengalami fluktuasi pada umur 13-15 tahun.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu, rasio guru/murid juga indikator untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Untuk menghitung rasio guru terhadap murid dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.39
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SD/MI					
Jumlah Guru	1,835	1,735	2,383	1,788	1,788
Jumlah Murid	20,931	20,841	20,526	20,088	20,133
Rasio	87.67	83.25	116.10	89.01	88.81
SMP/MTs					
Jumlah Guru	717	711	706	692	692
Jumlah Murid	7,240	7,337	7,986	7,560	8,075
Rasio	99,03	96,91	88,40	91,53	85,70

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru terhadap murid untuk pendidikan dasar menunjukkan tren yang berfluktuasi naik dan turun selama periode tahun 2012-2016. Kondisi tahun 2016 menunjukkan untuk 1.000 siswa SD/MI tersedia 88 orang guru, dan untuk siswa SMP/MTs tersedia 85 orang guru.

2. Pendidikan Menengah

a. Angka Partisipasi Sekolah

APS pendidikan menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.



Tabel 2.40
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan SMA/MA/SMK
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Sekolah	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umur 16-18 tahun (%)	38,18	57,84	69,10	54,19	58,86	59,84

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, angka partisipasi sekolah untuk pendidikan SMA/MA/SMK terus mengalami fluktuasi naik dan turun. Angka partisipasi sekolah tertinggi di tahun 2014 sebesar 69,10 persen. Adapun angka partisipasi sekolah terendah di tahun 2012 sebesar 38.18 persen.

b. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1.000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar.

Rasio guru terhadap murid untuk jenjang pendidikan menengah di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

Tabel 2.41
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	2016
SLTA/MA/SMK					
Jumlah Guru	325	367	129	429	429
Jumlah Murid	4,971	5,268	1,393	5,561	5,778
Rasio	65,38	69,67	92,61	77,14	74,25

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan www.kalsel.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas, rasio guru terhadap murid untuk pendidikan menengah menunjukkan tren yang berfluktuasi naik dan turun selama periode tahun 2013-2016. Rasio guru terhadap murid tertinggi di tahun 2014 sebesar 92,61. Adapun rasio terhadap murid terendah di tahun 2012 sebesar 65,38.



3. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Kasar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	103,28	106,07	109,54	114,99	116,04	111,23
SLTP/MTs (%)	84,49	81,95	81,77	76,39	90,05	83,26
SLTA/MA/SMK (%)	43,22	59,71	85,86	55,90	63,12	75,62

Sumber: www.kalsel.bps.go.id, dan BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APK di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016 cenderung meningkat pada jenjang SD/MI. Namun di tahun 2017 menurun 4.81%. Sedangkan pada jenjang SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK cenderung berfluktuasi naik turun.

Tabel 2.43
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Kasar	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	104,47	108,81	110,52	111,14	111,63	110,30
SLTP/MTs (%)	84,55	79,52	82,45	82,81	85,78	85,70
SLTA/MA/SMK (%)	66,75	62,14	71,36	73,88	76,88	77,44

Sumber: www.kalsel.bps.go.id dan BPS Indonesia



APK Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APK Kabupaten Tapin untuk semua jenjang pendidikan selama periode tahun 2012-2017. APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa tahun dan jenjang pendidikan tertentu. Uraian APK Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APK Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- ✓ APK SD/MI untuk tahun 2015 dan 2016;
- ✓ APK SLTP/MTs untuk tahun 2013 dan 2016;
- ✓ APK SLTA/SMK/MA untuk tahun 2014.

Tabel 2.44
Tabel Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017
SD/MI (%)	114,99	116,04	111,23
Laki-Laki	117,05	115,34	110,48
Perempuan	112,78	116,04	112,35
SLTP/MTs (%)	76,39	90,05	83,26
Laki-Laki	71,92	100,91	86,36
Perempuan	80,27	82,31	80,32
SLTA/MA/SMK (%)	55,90	63,12	75,62
Laki-Laki	60,95	62,76	78,50
Perempuan	51,05	63,40	73,29

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Jenis Kelamin Laki-laki mengalami penurunan pada jenjang pendidikan SD/MI, mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SLTA/MA/SMK dan mengalami fluktuasi pada SLTP/MTs. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan pada jenjang Pendidikan SLTA/MA/SMK dan fluktuasi pada jenjang pendidikan SD/MI dan SLTP/MTs.



4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. APM adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.45
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Murni	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	93,16	95,68	97,71	98,76	97,36	99,98
SLTP/MTs (%)	69,81	64,36	72,91	67,63	71,33	72,72
SLTA/MA/SMK (%)	32,69	44,62	62,05	44,32	48,31	48,73

Sumber: www. kalsel.bps.go.id, dan BPS Indonesia

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa APM di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017 cenderung berfluktuasi untuk seluruh jenjang pendidikan. APM tertinggi terdapat pada jenjang SD/MI dan APM terendah pada jenjang SLTA/MA/SMK. Hal ini menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah siswa yang masih sekolah pada usia yang sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Tabel 2.46
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2017

Angka Partisipasi Murni	2012	2013	2014	2015	2016	2017
SD/MI (%)	93,16	96,74	97,44	97,75	98,05	98,45
SLTP/MTs (%)	66,94	69,57	72,40	72,51	72,70	73,37
SLTA/MA/SMK (%)	49,39	50,05	55,04	55,58	55,91	57,15

Sumber: www. kalsel.bps.go.id dan BPS Indonesia

APM Provinsi Kalimantan Selatan masih lebih tinggi dibandingkan dengan APM Kabupaten Tapin untuk semua jenjang pendidikan selama periode tahun 2012-2017. APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM



Provinsi Kalimantan Selatan di beberapa tahun dan jenjang pendidikan tertentu. Uraian APM Kabupaten Tapin lebih tinggi dari APM Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

- ✓ APM SD/MI untuk tahun 2014 dan 2015;
- ✓ APM SLTP/MTs untuk 2014;
- ✓ APM SLTA/SMK/MA untuk tahun 2014.

Tabel 2.47
Angka Partisipasi Murni (APM) menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017
SD/MI (%)	98,76	97,36	99,98
Laki-laki	99,11	96,97	99,98
Perempuan	98,37	97,83	99,98
SLTP/MTs (%)	67,63	71,33	72,72
Laki-laki	59,37	64,76	74,00
Perempuan	74,80	80,56	71,51
SLTA/MA/SMK (%)	44,32	48,31	48,73
Laki-laki	44,64	46,05	47,65
Perempuan	44,02	50,05	49,60

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) pada Jenis Kelamin Laki-laki mengalami peningkatan pada jenjang pendidikan SLTP/MTs dan SLTA/MA/SMK, dan mengalami mengalami fluktuasi pada jenjang Pendidikan SD/MI. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan mengalami fluktuasi pada semua jenjang Pendidikan.

2.4.2 Kesehatan

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka Kelangsungan Hidup Bayi = (1-Angka Kematian Bayi (AKB)).



Berikut ini akan ditampilkan AKHB dan AKB selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.48
Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
AKB	17,8	20	23	18	17
AKHB	982,2	980	977	972	973

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin 2016

Berdasarkan tabel di atas, angka kelangsungan hidup bayi mengalami fluktuasi naik turun selama periode 2012-2016. AKHB terendah di tahun 2015 sebesar 977, sedangkan AKHB tertinggi di tahun 2013 sebesar 982.2.

2. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) per Satuan Balita

Posyandu merupakan suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Tabel 2.49
Jumlah Posyandu dan Balita
di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Posyandu	211	194	194	194	194
2	Jumlah Balita	12,852	18,015	18,132	18,007	17,799
3	Rasio	16,42	10,77	10,70	10,77	10,90

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



3. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu

Ketersediaan puskesmas, poliklinik dan pustu dalam kurun waktu tahun 2012-2016 tidak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2012 sampai tahun 2017, tidak difasilitasi dengan adanya peningkatan dalam jumlah puskesmas yang jumlahnya tetap tiap tahun.

Tabel 2.50
Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13	13
2	Jumlah Pustu	47	36	37	37	37	37
3	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186.672
4	Rasio Puskesmas pe rsatuan penduduk	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070
5	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,270	0,204	0,207	0,204	0,201	0,198

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

4. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Data menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Tapin dari tahun 2013 ke 2016, tidak disertai dengan adanya peningkatan rumah sakit yang jumlahnya tetap tiap tahun.

Tabel 2.51
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1	1	1	1
2	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah					
3	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/ AL/POLRI					
4	Jumlah Rumah Sakit Daerah					
5	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1	1	1	1
6	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
7	Rasio	0,0058	0,0057	0,0056	0,0055	0,0054

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017



Berdasarkan tabel di atas rasio rumah sakit per satuan penduduk terus mengalami penurunan dari 0.0058 di tahun 2012 menjadi 0.0054 di tahun 2016.

5. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk menerangkan ketersediaan dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Dokter	21	13	23	23	21	27
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672
3	Rasio	0,121	0,074	0,128	0,127	0,114	0,145

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Berdasarkan tabel di atas rasio dokter per satuan penduduk terendah di tahun 2013 sebesar 0.074 dan tertinggi di tahun 2017 sebesar 0,145.

Tabel 2.53
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
1	Binuang	30.910	1	0.032
2	Hatungun	8.909	2	0.224
3	Tapin Selatan	20.343	1	0.049
4	Salam Babaris	12.298	2	0.163
5	Tapin Tengah	19,173	2	0.104
6	Bungur	13.316	1	0.075
7	Piani	5.965	1	0.168
8	Lokpaikat	9.974	2	0.201
9	Tapin Utara	25.788	10	0.388
10	Bakarangan	9.491	2	0.211
11	Candi Laras Selatan	13.076	2	0.153
12	Candi Laras Utara	17.429	1	0.057
	JUMLAH	186,672	27	0.145

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017, 2018



Berdasarkan tabel rasio dokter di atas menunjukkan bahwa profesi dokter di Kabupaten Tapin masih sangat jarang. Adanya peningkatan jumlah penduduk, tidak didukung dengan jumlah dokter yang tersedia. Untuk tingkat kecamatan, rasio terendah berada di Kecamatan Tapin Selatan sebesar 0,050, dan rasio tertinggi berada di Kecamatan Candi Laras Selatan.

6. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Rasio tenaga medis per satuan penduduk menerangkan ketersediaan tenaga medis untuk setiap 1.000 penduduk, seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Tenaga Medis
di Kabupaten Tapin Tahun 2012- 2017

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Tenaga Medis	565	507	541	541	544	635
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330	186,672
3	Rasio	3,25	2,87	3,02	2,98	2,95	3,40

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Sedangkan jumlah tenaga medis yang tersebar di seluruh kecamatan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.55
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Binuang	30.910	75	2.426
2	Hatungun	8.909	45	5.051
3	Tapin Selatan	20.343	34	1.671
4	Salam Babaris	12.298	11	0.894
5	Tapin Tengah	19,173	58	3.025
6	Bungur	13.316	44	3.304
7	Piani	5.965	31	5.197
8	Lokpaikat	9.974	28	2.807
9	Tapin Utara	25.788	180	6.980
10	Bakarangan	9.491	31	3.266
11	Candi Laras Selatan	13.076	30	2.294



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
12	Candi Laras Utara	17.429	68	3.902
		186,672	635	3.402

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

2.4.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik

Aspek pelayanan umum dari Kabupaten Tapin juga dapat dilihat dari sarana prasarana umum seperti jaringan jalan. Proporsi jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan seluruhnya.

Kondisi jalan di Kabupaten Tapin dibedakan atas jalan kabupaten, provinsi, dan nasional. Pembagian jalan tersebut dibedakan atas kewenangannya. Berikut ini adalah data proporsi panjang jaringan jalan di Kabupaten Tapin. Panjang jaringan jalan kabupaten meningkat dari 505,07 km di tahun 2012 menjadi 617,15 km di tahun 2015. Dari 617,15 km panjang jaringan jalan pada Tahun 2017, yang memiliki kondisi baik sebanyak 275,82 km. Angka ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 307,08 km. Sementara jalan dalam kondisi sedang pada Tahun 2017 juga mengalami penurunan dari 72,99 km pada Tahun 2016 menjadi 59,39 km pada Tahun 2107. Hal yang sama terjadi juga untuk ruas jalan dalam kondisi rusak.

Tabel 2.56
Panjang Jaringan Jalan Kabupaten
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

NO	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (km)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kondisi Baik	282,8	162,27	266,45	300,98	307,08	275,82
2	Kondisi Sedang	64,4	194,62	66,80	73,49	72,99	59,39
3	Kondisi Rusak	88,07	70,80	92,68	168,52	165,80	100,92
4	Kondisi Rusak Berat	68,0	155,78	191,22	74,15	71,28	181,02
5	Total Jalan	505,07	584,18	617,15	617,15	617,15	617,15

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018



Dengan panjang jalan yang tidak bertambah sejak Tahun 2013 sampai Tahun 2107, terlihat bahwa komposisi jalan dalam kondisi rusak berat mengalami kecenderungan peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan ruas jalan dengan kondisi rusak berat pada Tahun 2017 meningkat drastis dari 71,28 km pada Tahun 2016 menjadi 181,02 km pada Tahun 2017. Kondisi ini sangat dipengaruhi dengan kondisi keuangan daerah yang terbatas untuk pemeliharaan jalan.

Tabel 2.57
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

Jenis Jalan Dalam Kondisi Baik		Persentase					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jalan Kabupaten ¹	53 %	28 %	43,17%	48,77%	49,76 %	44,69 %
2	Jalan Provinsi	56,77%	56,77%	56,77%	63,61%	63,61%	
3	Jalan Nasional	95,29%	95,29%	95,29%	76,74%	76,74%	

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

¹Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2018

Berdasarkan data pada tabel di atas, proporsi jalan kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016, persentase kondisi jalan dalam kondisi baik hanya 49,76 persen dan menurun menjadi 44,69 persen pada tahun berikutnya. Kondisi ini perlu menjadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin karena sangat menurun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 53 persen. Sementara untuk jalan provinsi mengalami peningkatan selama beberapa tahun terakhir. Namun untuk jalan nasional cenderung menurun dan stagnan pada Tahun 2015 dan 2016.

2. Rasio Jaringan Irigasi

Setelah jaringan jalan, berikutnya adalah pelayanan umum pada jaringan irigasi. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik cenderung meningkat dan stagnan pada angka 65 persen. Data Rasio Jaringan Irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016 disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.58
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik
di Kabupaten Tapin 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	82,63	46,00	65,00	65,00

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Akses air minum merupakan kebutuhan primer masyarakat. Semakin tinggi akses penduduk terhadap air minum maka semakin baik tingkat pelayanan daerah terhadap kebutuhan primer masyarakat. Berdasarkan pada tabel dibawah, diketahui bahwa persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih masih sebesar 55,48% di tahun 2016.

Berikut ini adalah data persentase penduduk berakses air bersih di Kabupaten Tapin.

Tabel 2.59
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

No	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih	13.430	15.037	15.037	28.017
2	Jumlah rumah tangga	47.826	45.980	45.980	50.343
3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih	40,00	32,70	32,70	55,48

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Selama periode tahun 2013-2016, persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami fluktuasi. Tahun 2014 menyentuh posisi paling rendah yaitu 29,69 persen dan meningkat menjadi 62,76 persen pada tahun 2015. Posisi Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada Tahun 2016 sebesar 55,48 persen. Kondisi rumah tinggal yang bersanitasi di Kabupaten Tapin pada periode 2012 sampai 2016 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.60
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi
di Kabupaten Tapin 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Rumah Tangga Per Sanitasi	56,00	29,69	62,76	55,48

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

5. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah menjadi hal yang penting dalam urusan lingkungan. Dapat dilihat fasilitas tempat pembuangan sampah per satuan penduduk sebagai berikut.

Tabel 2.61
Rasio Tempat Pembuangan Sampah terhadap Jumlah Penduduk di
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	-	0,48	0,79	0,81	1,17

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk mengalami peningkatan selama periode tahun 2012-2016. Rasio sebesar 0,48 di tahun 2013 dan sebesar 1,17 di tahun 2016.

6. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah

Dalam urusan penataan ruang, aspek pelayanan umum dapat dilihat dari kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan memperhatikan luas wilayah seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.62
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	-	11,00	11,00	29,96	29,96

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Berdasarkan tabel di atas rasio RTH per satuan wilayah mengalami peningkatan selama periode tahun 2012-2016. Rasio sebesar 11,00 persen di tahun 2013, dan sebesar 29.96 persen di tahun 2016.

2.4.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1. Rasio Rumah Layak Huni

Dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, salah satu indikator yang dapat dilihat adalah rumah layak huni.

Tabel 2.63
Persentase Rumah Layak Huni
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Rumah Layak Huni	-	90,00	91,57	92,23	97,18

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, persentase rumah layak huni terus menerus mengalami peningkatan. Persentase rumah layak huni sebesar 90,00 persen di tahun 2013, dan sebesar 97,18 persen di tahun 2016.

Tabel 2.64
Persentase Lingkungan Kumuh
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Uraian	2013	2014	2015	2016
Lingkungan Permukiman Kumuh	6,27	0,24	0,0068	0,0067

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, persentase lingkungan kumuh terus mengalami penurunan.



2.4.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

1. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Jumlah polisi pamong praja dihitung dari jumlah aparatur pada satuan polisi pamong praja yang ditetapkan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.65
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah polisi pamong praja	79	73	106	105	105
2	Jumlah penduduk	173.869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	4,53	4.14	5.92	5.78	5.70

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas penda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Semakin besar rasio jumlah polisi pamong praja maka akan semakin besar ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Satuan ini memiliki peran penting dalam ketertiban masyarakat secara luas.



Tabel 2.66
Rasio Jumlah Linmas
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Linmas	328	330	304	310	310
2	Jumlah penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	18,83	18,70	16,97	17,05	16,82

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, rasio jumlah linmas berfluktuasi selama periode tahun 2012-2016. Rasio terendah sebesar 16,82 di tahun 2016, dan rasio tertinggi sebesar 18,83 di tahun 2012.

2.4.6 Sosial

1. Sarana sosial

Sarana sosial meliputi panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi di Kabupaten Tapin dari tahun 2012-2016 memiliki jumlah yang sama, yaitu 8 unit.

2. PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.67
PMKS Penerima Bantuan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah PMKS penerima bantuan	208	870	906	2,108	4,389

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan sejak tahun 2012 sampai 2016. Pada tahun 2012 sebanyak 208 orang PMKS yang memperoleh bantuan dan jumlah ini meningkat menjadi 4.389 pada tahun 2016.



B. Layanan Urusan Wajib Non Dasar

2.4.7 Tenaga Kerja

1. Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja (*man power*) adalah penduduk dalam usia kerja (dalam literatur 15-64 tahun). Tenaga kerja adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tabel 2.68
Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	12,21	30,24	48,41	49,00

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Tahun Tahun 2016

Persentase pencari kerja yang ditempatkan terus mengalami peningkatan dari 12,21 persen di tahun 2013 menjadi 49 persen di tahun 2016. Ini menunjukkan makin banyak pencari kerja di Kabupaten Tapin yang memperoleh pekerjaan.

2. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan tingkat sarjana.



Tabel 2.69
Rasio Lulusan Sarjana
di Kabupaten Tapin Tahun 2015

NO	Uraian	2015
1	Jumlah lulusan Sarjana Muda	1,985
2	Jumlah lulusan Sarjana Lengkap	5,098
3	Jumlah lulusan Sarjana Muda dan Sarjana Lengkap	7,083
4	Jumlah penduduk	181,778
5	Rasio lulusan (3/4)	3,90

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2017

2.4.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan dalam rangka pemberdayaan untuk menuju kesetaraan gender. Untuk mengetahui peran aktif perempuan dapat diukur dari partisipasi perempuan di lembaga pemerintah maupun swasta, besarnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

1. Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah menunjukkan jumlah perempuan yang berada di lembaga pemerintahan. Perkembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.70
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	-	10,41	11,18	11,17	9,43

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami fluktuasi. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah terendah di tahun 2016 yaitu 9,43 persen, dan persentase tertinggi di tahun 2014 yaitu 11,8 persen.



2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data tersebut rasio KDRT mengalami fluktuasi selama periode tahun 2012-2016. Rasio KDRT tertinggi sebesar 0,022 di tahun 2015, sedangkan terendah sebesar 0,010 di tahun 2016.

Tabel 2.71
Rasio KDRT Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah KDRT	-	6	1	10	5
2	Jumlah Rumah Tangga	-	47,826	45,980	45,980	50,343
3	Rasio KDRT	-	0,013	0,002	0,022	0,010

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2016, 2017

2.4.9 Pangan

1. Ketersediaan pangan utama

Dalam hal urusan ketahanan pangan, Pemerintah Kabupaten Tapin mengukur kesejahteraan masyarakat melalui ketersediaan pangan utama di masyarakat. Berikut adalah data pangan utama di Kabupaten Tapin tahun 2012-2016.

Tabel 2.72
Ketersediaan Pangan Utama
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Ketersediaan pangan utama (ton)	158,544	154,135	201,662	201,662	278,582
2	Jumlah Penduduk	173,869	176,468	179,166	181,778	184,330
3	Persentase	91,19	87,34	112,56	110,94	151,13

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Persentase ketersediaan pangan utama selama tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Persentase tertinggi sebesar 151,13 persen di tahun 2016, sedangkan terendah sebesar 87,34 persen di tahun 2013.

2.4.10 Pertanian

1. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Indikator pertanian ini bertujuan untuk mengetahui tertib administrasi sebagai kepastian dalam kepemilikan.

Hak Milik (HM) merupakan hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sifat-sifat hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya adalah hak yang “terkuat dan terpenuh”, maksudnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat dan penuh.

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) adalah hak untuk mengelola lahan yang hanya diberikan atas tanah negara yang dikuasai oleh Badan Pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tabel 2.73
Lahan Bersertifikat
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Lahan Bersertifikat	-	0,40	0,85	0,85	1,17

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



2.4.11 Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Berdasarkan data, terlihat bahwa penanganan sampah di Tapin semakin baik. Hal ini ditunjukkan dengan terjadi peningkatan capaian persentase penanganan sampah yang tertangani, dan pada tahun 2016 mencapai 47,18 persen. Namun walaupun menunjukkan peningkatan, masih perlu ditingkatkan dan mejadi perhatian untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Penanganan sampah di Kabupaten Tapin selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.74
Penanganan Sampah
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Penanganan Sampah	-	19,21	20,28	42,00	47,18

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan merupakan urusan yang sangat penting dalam tata pemerintahan nasional. Data administrasi kependudukan akan menjadi rujukan penting bagi kebijakan-kebijakan di sektor lain bidang politik, sosial, dan ekonomi.

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.



Tabel 2.75
Persentase Kepemilikan KTP
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan KTP	-	86,68	85,07	85,07	94,00

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan data di atas, kepemilikan KTP masih berfluktuasi dengan persentase tertinggi 94,00 persen di tahun 2016. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan KTP dapat ditingkatkan dan mencapai angka 100 persen.

2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Berdasarkan data yang ada, kepemilikan akta lahir di Tapin masih sangat kecil sekali dengan persentase tertinggi sebesar 36,04 persen di tahun 2014 dan 2015. Hal ini harus menjadi perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Tapin agar kepemilikan akta lahir dapat ditingkatkan.

Tabel 2.76
Persentase Kepemilikan Akte Lahir
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk	-	26,40	36,04	36,04	34,67

Sumber: Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017

Tabel 2.77
Persentase Anak Berumur di bawah 18 Tahun menurut Jenis Kelamin
Berdasarkan Kepemilikan Akta Kelahiran
di Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Indikator	2015	2016	2017
Memiliki Akta Kelahiran	71,89	73,00	81,89
Laki-laki		37,52	42,37
Perempuan		35,48	39,52
Tidak Memiliki Akta Kelahiran	28,11	27,00	18,11



Indikator	2015	2016	2017
Laki-laki		12,91	9,40
Perempuan		14,09	8,71

Sumber: Statistik Gender dan Anak Kabupaten Tapin Tahun 2015-2017

Berdasarkan tabel diatas, Kepemilikan Akta Kelahiran baik pada jenis kelamin laki-laki maupun pada jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan ditahun 2015 samapi dengan tahun 2017.

2.4.13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tabel 2.78
Persentase PKK Aktif
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 – 2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase PKK Aktif	100	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

2. Persentase LSM yang aktif

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya.



Tabel 2.79
Jumlah LSM
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah LSM	-	5	8	3	3

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Besarnya jumlah LSM aktif juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan daerah.

2.4.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Berikut ini adalah tabel rasio akseptor KB.

Tabel 2.80
Rasio Akseptor KB
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

Indikator	2013	2014	2015	2016
Persentase PUS yang aktif ber -KB	84,71	87,68	87,64	82,43

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio akseptor KB semakin menurun. Kondisi ini menandakan kurang berfungsinya para penggiat Keluarga Berencana.

2.4.15 Perhubungan

1. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Terminal merupakan salah satu komponen prasarana dalam transportasi, terminal berfungsi sebagai titik tempat masuk dan keluarnya penumpang dan barang dalam sistem angkutan. Terminal dapat dibedakan menjadi dua yaitu terminal penumpang dan terminal barang. Terminal



penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Sedangkan terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

Tabel 2.81
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Jumlah pelabuhan laut	-	-	-	-	-
2.	Jumlah pelabuhan udara	-	-	-	-	-
3.	Jumlah terminal bis	2	2	2	2	2
	Jumlah	2	2	2	2	2

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, tidak ada penambahan sarana dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Selama tahun 2012 sampai dengan 2016 jumlah terminal bis tetap yaitu 2 unit.

2. Angkutan Darat

Di dalam hal angkutan darat akan ditunjukkan persentase jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat. Persentase tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Persentase Angkutan Darat
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

URAIAN	2013	2014	2015	2016
Persentase Angkutan Darat	11,35	11,38	15,64	2,28

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum

Pelaksanaan Pengujian kendaraan bermotor di Unit PKB dan pemeriksaan dilakukan oleh Penguji yang memenuhi persyaratan yang



ditetapkan oleh pemerintah, bagi kendaraan yang memenuhi kelaikan akan disahkan oleh pejabat yang ditunjuk akan diberi tanda uji Kir.

Pengujian kir angkutan umum di Kabupaten Tapin terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.83
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum
di Kabupaten Tapin Tahun 2013-2016

No	Jenis	2013	2014	2015	2016
1	Mobil barang				
	Umum	616	616	805	723
	Tidak Umum	1,295	1,295	1,509	1,470
	Dinas	13	13	15	14
2	Mobil Bus				
	Umum	1	1	0	8
	Tidak Umum	22	22	35	31
	Dinas	4	4	1	5
3	Mobil Penumpang				
	Umum	43	43	38	30
	Tidak Umum	0	0	1	0
	Dinas	0	0	0	0
	Total	1.951	1.951	2.365	2.281

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

2.4.16 Komunikasi dan Informatika

1. Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon genggam maupun stasioner. Jaringan komunikasi dihitung dari banyaknya jaringan komunikasi yang berada dalam wilayah suatu pemerintah daerah.

Sebuah operator jasa telekomunikasi dapat memiliki satu (1) jaringan dan sebaliknya beberapa operator dapat menggunakan hanya satu (1) jaringan telekomunikasi di wilayah pemerintah daerah. Untuk menghitung jaringan komunikasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.84
Jaringan Komunikasi
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Pemancar telepon genggam	3	32	32	32	32
2	Pemancar telepon stasioner	1	1	1	1	1
3	Total Pemancar Komunikasi (1+2)	4	33	33	33	33

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2. Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal

Surat kabar merupakan komunikasi massa yang diterbitkan secara berkala dan bersenyawa dengan kemajuan teknologi pada masanya dalam menyajikan tulisan berupa berita, feature, pendapat, cerita rekaan (fiksi), dan bentuk karangan yang lain.

Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	3	3	0	0	0
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	5	5	6	9	6
3	Total jenis surat kabar (1+2)	8	8	6	9	6

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

3. Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk daerah. Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.86
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penyiaran radio lokal	2	2	2	2	2
2	Jumlah penyiaran radio nasional	0	0	0	0	0
3	Jumlah penyiaran TV local	1	1	1	1	1
4	Jumlah penyiaran TV nasional	4	10	10	10	10
5	Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)	7	13	13	13	13

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

1. Persentase koperasi aktif

Pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) indikatornya dapat dilihat dari persentase koperasi yang aktif.

Tabel 2.87
Persentase Koperasi Aktif
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah koperasi aktif	115	116	116	116	116
2	Jumlah koperasi	141	142	142	142	142
3	Persentase koperasi aktif	81,56	81,69	81,69	81,69	81,69

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Berdasarkan tabel di atas, selama periode tahun 2012-2016 tren jumlah koperasi yang aktif tetap stabil setiap tahunnya. Koperasi aktif yang stagnan di 81,69 persen perlu dicari suatu cara agar bisa mencapai tingkat keaktifan 100 persen di masa yang akan datang.

2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah UKM non BPR/LKM di Tapin terus mengalami kenaikan selama periode tahun 2012-2016. Perkembangan jumlah jumlah UKM non BPR/LKM, dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.88
Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun
di Kabupaten Tapin 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah seluruh UKM	7,405	7,521	7,616	7,737	7,941

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

3. Jumlah BPR/LKM

Berdasarkan data dari SIPD Kabupaten Tapin, jumlah BPR/LKM tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2013-2016 yaitu sebanyak 12 BPR dan LKM. Sementara LKM yang berjumlah 3 unit pada Tahun 2012 pada tahun-tahun berikutnya tidak terbentuk lagi atau 0. Jumlah BPR/LKM dari tahun 2013 sampai dengan 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.89
Jumlah BPR/LKM
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

NO	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah BPR	5	12	12	12	12
2	Jumlah LKM	3	0	0	0	0
3	Jumlah BPR dan LKM	8	12	12	12	12

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.18 Penanaman Modal

1. Jumlah investor berskala nasional

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir (2012-2016), jumlah investor mengalami fluktuasi. Jumlah PMDN yang semula berjumlah 18 pada tahun 2012 mengalami penurunan pada Tahun 2013 dan 2014. Namun pada tahun 2015 kembali meningkat menjadi 12 investor. Sedangkan untuk PMS terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan terakhir pada tahun 2015 sejumlah 18 investor. Berikut ini disajikan jumlah investor PMDN dan PMA di Kabupaten Tapin.



Tabel 2.90
Jumlah Investor PMDN/PMA
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2016

Tahun	PMDN	PMA	Total
2012	0	3	18
2013	0	1	7
2014	2	3	7
2015	6	9	30
2016	7	9	-

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional

Kabupaten Tapin merupakan wilayah yang sangat potensial untuk dikembangkan. Untuk itu dibutuhkan adanya investasi dalam negeri maupun dari asing agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Data tiga tahun mulai tahun 2012 sampai 2014 menunjukkan bahwa nilai PMA sama yaitu U\$ 80.812,80. Sedangkan nilai PMDN mengalami kecenderungan penurunan yaitu dari Tahun 2012 sebesar Rp 569,553,000,000.00 menjadi Rp 313,271,843,891.00 pada tahun 2013 dan 2014. Data investasi tahun 2012-2014 di Kabupaten Tapin dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.91
Jumlah Investasi PMDN/PMA
Kabupaten Tapin Tahun 2012 - 2014

Tahun	Nilai Investasi	
	PMA	PMDN
2012	-	IDR 569,553,000,000.00
2013	U\$ 80.812,80	IDR 313,271,843,891.00
2014	U\$ 80.812,80	IDR 313,271,843,891.00

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.19 Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan,



untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Tabel 2.92
Jumlah Organisasi Pemuda
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Pemuda	12	43	43	43	43

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga.

Jumlah organisasi olahraga dihitung dari jumlah organisasi olahraga yang aktif sampai dengan tahun pengukuran. Untuk menghitung jumlah organisasi olahraga dapat disusun tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.93
Jumlah Organisasi Olahraga
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Organisasi Olahraga	145	35	35	35	35

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016



Banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga.

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “*event*” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis. Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang pemuda. Jumlah kegiatan kepemudaan dihitung dari jumlah kegiatan kepemudaan dalam periode 1 (satu) tahun. Untuk menghitung jumlah kegiatan kepemudaan dapat disusun tabel sebagai berikut.

Tabel 2.94
Jumlah Kegiatan Kepemudaan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	12	10	10	10	10

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah kegiatan kepemudaan menggambarkan tingginya antusiasme pemuda untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan kepemudaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Kegiatan olahraga adalah kegiatan atau “*event*” olahraga yang diselenggarakan baik oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat. Kegiatan olahraga dapat diselenggarakan dalam bentuk pertandingan dan perlombaan serta kejadian atau peristiwa sejenis.

Jumlah kegiatan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.95
Jumlah Kegiatan Olahraga
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Kegiatan Olahraga	65	29	29	29	29

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Banyaknya jumlah kegiatan olahraga menggambarkan tingginya antusiasme organisasi olahraga di daerah untuk berperan serta dalam pembangunan daerah. Dengan jumlah kegiatan olah raga yang tinggi merupakan indikator efektifitas keberadaan organisasi olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.4.20 Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan seperti:

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “PDRB Kabupaten”

Kedua dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin, disusun oleh Badan Pusat Statistik. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

1. Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Tapin terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

2. Buku PDRB Kabupaten

Untuk mengetahui sejauh mana hasil pencapaian pembangunan perekonomian Kabupaten Tapin, BPS Kabupaten Tapin mengeluarkan secara



resmi Buku PDRB Kabupaten yang berisi informasi-informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Per Kapita, Inflasi, Ketimpangan (Distribusi) Pendapatan, dan lain-lain.

2.4.21 Persandian

Persandian terkait dengan:

1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.

2.4.22 Kebudayaan

Di dalam urusan Kebudayaan, pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan kegiatan:

1. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya
2. Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan

Pencapaian atas kegiatan kebudayaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.96
Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Tapin 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	-	11	12	15	16

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, penyelenggaraan seni dan budaya terus meningkat selama periode tahun 2012-2016. Jumlah penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 11 kali di tahun 2013 dan meningkat menjadi 16 kali di tahun 2016.



Tabel 2.97
Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	-	4	4	4	5

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, sarana penyelenggaraan seni dan budaya hanya bertambah 1 sarana selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.98
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	-	22	22	22	22

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Berdasarkan tabel di atas, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan tidak mengalami perubahan selama periode tahun 2012-2016.

2.4.23 Perpustakaan

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, yang bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pendidikan.

1. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun

Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu (1) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung.



Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagaipenunjang kelangsungan pelayanan pendidikan.

Berdasarkan data periode 2012-2016, pengunjung perpustakaan terendah sebesar 12,391 orang di tahun 2012, tertinggi sebesar 40,426 orang di tahun 2013.

Tabel 2.99
Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah pengunjung perpustakaan milik Pemerintah Daerah	12,391	40,426	13,336	17,234	20,337

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2. Jumlah Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Untuk menghitung jumlah perpustakaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.100
Jumlah Perpustakaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012 -2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Perpustakaan	46	88	88	88	88

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013,2014, 2015, 2016



Data jumlah perpustakaan beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang sama selama periode 2014 sampai dengan 2016, yaitu 88 perpustakaan. Jumlah perpustakaan terendah sebanyak 46 unit di tahun 2012.

2.4.24 Kearsipan

Pengelolaan Arsip secara baku adalah pengelolaan arsip yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku yang bertujuan:

1. menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan, serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai penyelenggara nasional;
2. menyediakan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan aturan yang ada;
4. melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. menciptakan penyelenggaraan kearsipan nasional yang dinamis sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan
8. meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.



C. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.25 Kelautan dan Perikanan

1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Produksi yang dicatat tidak hanya yang dijual saja tetapi termasuk juga yang dikonsumsi oleh rumah tangga atau yang diberikan kepada nelayan/pekerja sebagai upah. Tidak termasuk ikan yang diperoleh dalam rangka olah raga atau rekreasi, juga ikan yang dibuang kembali ke laut setelah ditangkap atau ikan yang dibuang karena terkena racun, pencemaran, atau penyakit. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/budidaya.

Produksi perikanan rawa berdasarkan data BPS menunjukkan kenaikan produksi perikanan dari 1.642,20 ton tahun 2012 menjadi 1.762,90 ton di tahun 2016. Adapun untuk perikanan sungai mengalami kenaikan dari 2.892,10 ton di tahun 2012 menjadi 3.272,90 ton di tahun 2016. Produksi perikanan di Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 dapat dilihat di tabel berikut ini.

Tabel 2.101
Produksi Perikanan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Produksi Ikan (ton)					
-Perikanan Rawa	1,642.20	1,694.30	1,717.70	1,730.20	1,762.90
-Perikanan Sungai	2,892.10	2,970.60	2,997.40	3,063.50	3,272.90
Total	4,534.30	4,664.90	4,715.10	4,793.70	5,035.80

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

2. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan oleh masyarakat Kabupaten Tapin terbukti cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada tabel 2.92 bahwa persentase konsumsi ikan



terhadap target mampu di atas angka 90 persen selama periode tahun 2012-2016.

Tabel 2.102
Konsumsi Ikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Konsumsi Ikan (kg/kapita)	-	49.58	51.45	51.45	52.73
2	Target Daerah (kg/kapita)	-	49.50	51.25	51.25	53.10
3	Persentase	-	100,16	100,39	100,39	99,30

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

2.4.26 Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi unggulan di Tapin untuk mendorong pembangunan dan perekonomian daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan pariwisata yaitu jumlah kunjungan wisatawan. Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Kunjungan Wisatawan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Wisatawan	350,550	362,563	362,563	428,662	428,662

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2013, 2014, 2015, 2016

Jumlah wisatawan ke Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 masih berfluktuasi. Jumlah wisatawan terendah sebesar 350,550 orang di tahun 2012, tertinggi sebesar 428,662 orang di tahun 2015 dan 2016.

2.4.27 Pertanian

1. Produktivitas Padi

Produktivitas padi menggambarkan tingkat produksi padi dibagi dengan luasan areal tanam padi. Produktivitas menggambarkan upaya pemanfaatan



lahan untuk bercocok tanam padi. Produktivitas padi di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini.

Tabel 2.104
Produktivitas Padi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Padi (ton)	285,410	309,639	287,576	380,340	391,698
2	Luas Panen Padi (ha)	63,665	63,119	60,396	64,206	75,292
3	Rata-rata Produksi (kw/ha)	44,83	47,57	47,62	59,23	52,02

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Berdasarkan tabel di atas rata-rata produksi padi selama periode tahun 2012-2016 mengalami fluktuasi. Produktifitas padi tertinggi sebesar 59,23 kw/ha di tahun 2015, terendah sebesar 44,57 kw/ha di tahun 2013.

2. Produktivitas Karet

Produktivitas karet di Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi turun dan naik. Produktifitas karet tertinggi sebesar 720,40 kg/ha di tahun 2013, terendah sebesar 518,00 kg/ha di tahun 2012. Data series produktivitas Karet di Kabupaten Tapin tahun 2013-2016 disajikan di tabel berikut ini.

Tabel 2.105
Produktivitas Karet
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Karet (kg)	10,038,000	100,382,051	7,470,444	6,814,058	7,881,594
2	Rata-rata Produksi (kg/ha)	518,00	720,40	596,01	530,65	594,50

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka Tahun 2014, 2015, 2016, 2017

2.4.28 Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, definisi dari perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui



batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Sub urusan perdagangan sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen.

2.4.29 Perindustrian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, definisi dari industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Sub urusan perindustrian sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari: perencanaan pembangunan industri, perizinan, sistem informasi industri nasional.

2.4.30 Transmigrasi

Transmigrasi merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk terutama di wilayah Indonesia yang luas. Pemerintah membekali terlebih dahulu para calon transmigran terkait cara mengelola lahan dan mengembangkan wilayah transmigrasi melalui pelatihan/kursus. Kegiatan yang memang ditujukan untuk program transmigrasi adalah kegiatan di sektor pertanian dan dengan sasaran pokok program yaitu pengembangan wilayah dan pembangunan permukiman.

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.31 Perencanaan

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan perencanaan pembangunan berdasarkan lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan:

1. RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA



2. RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
3. RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ketiga dokumen di atas ada di Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dengan PERDA (untuk RPJPD dan RPJMD) dan ditetapkan dengan PERKADA (untuk RKPD setiap tahun).

2.4.32 Keuangan

1. Penetapan APBD

Penetapan APBD Kabupaten Tapin selama tahun 2012-2016 selalu dapat dilakukan secara tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan terbangunnya tertib administrasi dan keuangan di Kabupaten Tapin. Penetapan APBD dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini.

Tabel 2.106
Penetapan APBD
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Penetapan APBD	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.33 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan

Fungsi penunjang terkait Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan antara lain: merumuskan kebijaksanaan serta mengendalikan perencanaan pengembangan kepegawaian daerah, merumuskan kebijaksanaan peningkatan kualitas pegawai negeri sipil daerah.

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Tapin yang memenuhi standar kompetensi untuk eselon IV ke atas dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.107
Persentase ASN yang Memenuhi Standar Kompetensi
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	-	-	98,22	98,29	99

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2017

2.4.34 Penelitian dan Pengembangan

1. Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan

Fungsi penunjang terkait penelitian dan pengembangan akan mempunyai kewenangan antara lain: melakukan penelitian daerah, merumuskan pengembangan dan inovasi daerah.

Persentase penelitian dan pengembangan yang dapat dimanfaatkan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Pemanfaatan Penelitian dan Pengembangan	-	-	-	-	80

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.35 Pengawasan

Fungsi penunjang terkait pengawasan akan mempunyai kewenangan antara lain: pengawasan terhadap pemerintah daerah dan aparatur, pengawasan atas keuangan dan kekayaan daerah, pengawasan atas pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial.

1. Persentase tindak lanjut temuan

Persentase tindak lanjut temuan pengawasan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2.109
Persentase Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti
di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	69,62	69,62	82,61	59,41	85

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.36 Sekretariat Dewan

Fungsi penunjang terkait sekretariat dewan mempunyai kewenangan antara lain: mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan.

Indikator yang akan digunakan atas Sekretariat Dewan adalah lapaoran pertanggungjawaban keuangan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.110
Persentase Laporan Pertanggungjawaban
yang Tepat Waktu di Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	47	93	100	100	100

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2017

2.4.37 Sekretariat Daerah

1. Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Tapin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun hasil penilaian dari laporan LKjIP Pemerintah Kabupaten Tapin beberapa tahun terakhir disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.111
Nilai SAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Nilai SAKIP	C	C	C	CC	CC

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan nilai C dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Sejak tahun 2015 mendapatkan peningkatan menjadi nilai CC. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan target sasaran pembangunan secara akuntabel.

2. Peringkat, Skor dan Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan.

Dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran kinerja dari pemerintahan daerah, baik di level pengambil kebijakan maupun di level pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Hasil EKPPD terhadap LPPD selama beberapa tahun terakhir yang berisi peringkat, skor, dan status kinerja Pemerintah Daerah disajikan pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.112
Peringkat, Skor dan Status Kinerja LPPD
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
Peringkat/Skor /Status LPPD	-	Peringkat 135/Skor: 2,7027/Status : tinggi	-	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	-

Sumber: www.otda.kemendagri.go.id

3. Jumlah Informasi Manajemen Pemda

Jumlah Informasi Manajemen Pemda adalah Jumlah sistem informasi manajemen Pemda yang telah dibuat oleh Pemda yang bersangkutan. Jumlah Informasi Manajemen Pemda di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.113
Jumlah Informasi Manajemen Pemda
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Informasi Manajemen Pemda	4	4	4	4	4

Sumber: LPPD Kabupaten Tapin Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah informasi manajemen Pemda selama tahun 2012-2016 berjumlah tetap sebanyak 4 sistem informasi manajemen Pemda.

4. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap pelayanan publik di Kabupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 2.114
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

INDIKATOR	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	75	75,76	74,39	74,87	75

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terus mengalami peningkatan dengan pencapain akhir di tahun 2016 sebesar 75.

Capaian pembangunan dari beberapa aspek pembangunan telah diuraikan dengan dukungan data beberapa tahun terakhir. Data capaian pembangunan tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.



Tabel 2.115
Capaian Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2017

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1.1	PDRB Atas Dasar Harga Konstan	Rp ribu	4.605.780	4.870.635	5.135.704	5.343.481	5.607.922	5.895.172	1.491.263.	melampaui (>)
1.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	Rp ribu	5.051.452	5.468.824	6.141.945	6.474.845	6.904.693	7.433.274	4.822.249.	melampaui (>)
1.2	Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha	%	6,32	5,75	5,44	4,05	4,95	5,12	5,61	belum tercapai (<)
1.4	Laju Inflasi Kabupaten Tapin	%	5,96	6,98	7,16	5,03	3,68	3,82	4,31	melampaui (>)
1.5	PDRB per kapita (ADHB)	Rp juta	29,05	30,99	34,28	35,61	37,43	39,82	25,76	
1.6	PDRB per kapita (ADHK)	Rp juta	26,49	27,60	28,66	29,40	30,39	31,58	7,8	melampaui (>)
1.7	Indeks Gini/Koefisien Gini	%	0,30	0,28	0,26	0,35	0,32	0,33	0,24	belum tercapai (<)
1.8	Persentase Penduduk Miskin	%	4,99	3,41	3,63	3,88	3,70	3,77	3,03	belum tercapai (<)
1.9	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Jiwa	8,717	6,045	6,518	7,010	6,810	7,011	6.393	belum tercapai (<)
1.10	Garis Kemiskinan	Rp	268.641	295.353	314.696	330.033	369.153	390.488	461.135,2 6	belum tercapai (<)
1.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan	%	0,48	0,34	0,37	0,46	0,25	0,40	0,21	melampaui (>)
1.12	Indeks Keparahan Kemiskinan	%	0,08	0,05	0,06	0,08	0,03	0,08	0,01	belum tercapai (<)
1.13	Indeks Pembangunan Manusia	indeks	65,92	66,48	66,99	67,67	68,05	68,70	69,72	belum tercapai (<)
1.14	Angka Melek Huruf	%	96,87	93,00	93,29	97,10	98,34	98,87	98,50	melampaui (>)
1.15	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	tahun	6,84	6,99	7,17	7,43	7,44	7,53	7,76	belum tercapai (<)
1.16	Angka Harapan Lama Sekolah	tahun	10,74	10,95	11,17	11,21	11,24	11,52	12,60	belum tercapai (<)
1.17	Angka Harapan Hidup	tahun	68,90	68,98	69,02	69,47	69,62	69,77	69,50	melampaui (>)
1.18	Jumlah Balita Gizi Buruk	jumlah	279	268	182	182	175	160	173	melampaui (>)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.19	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	67,52	69,89	71,29	71,75	71,81	71,92	81,15	belum tercapai (<)
1.20	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,69	5,24	1,79	5,14	4,71	4,39	5,48	melampaui (>)
1.21	Rasio Penduduk Yang Bekerja	%	65	94,76	98,21	94,86	95,28	95,61	98,95	belum tercapai (<)
1.22	Indeks Pembangunan gender (IPG)	Poin	71,19	71,86	83,54	83,80	83,82	83,87	82,80	melampaui (>)
1.23	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Poin	75,39	71,60	72,76	72,88	72,91	72,99	72,50	melampaui (>)
1.24	Opini pengawas eksternal (BPK RI)	Predikat	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	sesuai (=)
1.25	Kontribusi Sektor Pertanian/perkebunan terhadap PDRB ADHB	%	18,22	17,39	17,60	18,87	19,58	19,88	19,85	melampaui (>)
1.26	Kontribusi sektor kehutanan PDRB ADHB	%	0,28	0,31	0,29	0,29	0,28	0,28	1	belum tercapai (<)
1.27	Kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHB	%	34,94	36,16	35,25	30,04	27,77	27,79	35,53	belum tercapai (<)
1.28	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB	%	7,83	7,97	8,33	8,99	9,56	9,86	5,45	melampaui (>)
1.29	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB	%	7,79	6,46	6,48	6,85	6,99	7,03	6,76	melampaui (>)
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rp	2,354,7 83.	2,615,6 30.	2,856,6 78.5	3,072,5 56.2	3,319,6 08.5	3,319,60 8.5	2,857,79 2	melampaui (>)
2	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	Rp	1.315.7 15	1.454.6 06	1.584.8 22	1.713.1 70	1.872.0 55	1.931.0 80	1.515.7 30	melampaui (>)
3	Angka Kriminalitas	/10.000	18,53	17,81	16,52	15,62	11,94	16,93	16,50	belum tercapai (<)
4	Rasio Ketergantungan	%	46,72	47,69	47,56	47,43	47,25	47,31	47,30	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
B	ASPEK PELAYANAN UMUM									
I	Fokus Layanan Urusan Wajib									
1	Pendidikan									
1.1	APM:									
1.1.1	APM SD/MI	%	93,16	95,68	97,71	98,76	97,36	99,98	99,77	melampaui (>)
1.1.2	APM SMP/MTs	%	69,81	64,36	72,91	67,63	71,33	72,72	72.5	melampaui (>)
1.1.3	APM SMA/MA/SMK:	%	32,69	44,62	62,05	44,32	48,31	48,73	60.7	belum tercapai (<)
1.2	APK:									
1.2.1	APK SD/MI	%	104,47	108,81	110,52	111,14	111,63	110,30	95,62	melampaui (>)
1.2.2	APK SMP/MTs	%	84,55	79,52	82,45	82,81	85,78	85,70	92.50	belum tercapai (<)
1.2.3	APK SMA/MA/SMK	%	66,75	62,14	71,36	73,88	76,88	77,44	60.70	melampaui (>)
1.3	Angka Partisipasi Sekolah:									
1	Umur 7-12 tahun	%	98,42	98,00	100	98,76	99,98	99,98	105,50	belum tercapai (<)
2	Umur 13-15 tahun	%	63,83	82,06	94,99	87,13	92,02	92,49	87,66	melampaui (>)
1.3.2	Rasio Guru Terhadap Murid	%	99,03	96,91	88,40	91,53	85,70	99,03	44,50	melampaui (>)
1.4	Pendidikan Menengah									
1.4.1	Angka Partisipasi Sekolah									
1	Umur 16-18 tahun	%	38,18	57,84	69,10	54,19	58,86	59,84	39,58	melampaui (>)
1.4.2	Rasio Guru Terhadap Murid	%	65,38	69,67	92,61	77,14	74,25	65,38	13.50	melampaui (>)
2	Kesehatan									
2.1	Angka Kematian Bayi	/1.000	17,8	20	23	18	17	16	16	sesuai (=)
2.2	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	/1.000	982,2	980	977	972	973	873	984	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
2.3	Rasio Posyandu per satuan balita	%	16,42	10,77	10,70	10,77	10,90	10,90	69,83	belum tercapai (<)
2.4	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	/1.000	0,075	0,074	0,073	0,072	0,071	0,070	0,08	melampaui (>)
2.5	Rasio Pustu per satuan penduduk	/1.000	0,270	0,204	0,207	0,204	0,201	0,198	0,27	melampaui (>)
2.6	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	/1.000	0,0058	0,0057	0,0056	0,0055	0,0054	0,0054	0,06	melampaui (>)
2.7	Rasio Dokter per satuan penduduk	/1.000	0,121	0,074	0,128	0,127	0,114	0,145	0,25	melampaui (>)
2.8	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk	/1.000	3,25	2,87	3,02	2,98	2,95	3,40	3,81	melampaui (>)
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
3.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	65	69,66	73,08	50,65	60	65	65	sesuai (=)
3.2	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	%	62	63	46,00	65,00	65,00	65,00	65	sesuai (=)
3.3	Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih	%	40,00	40,00	32,70	32,70	55,48	80	80	sesuai (=)
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	56,00	56,00	29,69	62,76	55,48	80	80	sesuai (=)
3.5	Tempat Pembuangan Sampah Per Satuan Penduduk	%	0,48	0,48	0,79	0,81	1,17	1,17	59,38	belum tercapai (<)
3.6	Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	11,00	11,00	11,00	29,96	29,96	29,96	29	melampaui (>)
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
4.1	Persentase Rumah Layak Huni	%	90,00	90,00	91,57	92,23	97,18	97,18	95	melampaui (>)
4.2	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	%	6,27	6,27	0,24	0,0068	0,0067	0,0067	0,0070	melampaui (>)
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat									



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
5.1	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	/10.000	4,53	4,14	5,92	5,78	5,70	5,70	5,00	melampaui (>)
5.2	Rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk	/10.000	18,83	18,70	16,97	17,05	16,82	16,82	30,00	belum tercapai (<)
6	Sosial									
6.1	Jumlah PMKS penerima bantuan	jumlah	208	870	906	2,108	4,389	4,389	506	melampaui (>)
7	Tenaga Kerja									
7.1	Pencari kerja yang ditempatkan	%	12,21	12,21	30,24	48,41	49,00	49,00	39,6	melampaui (>)
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
8.1	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	%	10,41	10,41	11,18	11,17	9,43	9,43	2,95	melampaui (>)
8.2	Rasio KDRT	%	0,013	0,013	0,002	0,022	0,010	0,010	0,010	sesuai (=)
9	Pangan									
9.1	Ketersediaan Pangan Utama	%	91,19	87,34	112,56	110,94	151,13	152,71	100	melampaui (>)
10	Pertanahan									
10.1	Persentase Lahan Bersertifikat	%	0,40	0,40	0,85	0,85	1,17	1,52	2	belum tercapai (<)
11	Lingkungan Hidup									
11.1	Persentase Penanganan Sampah	%	19,21	19,21	20,28	42,00	47,18	67,02	60,00	melampaui (>)
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
12.1	Persentase Kepemilikan KTP	%	86,68	86,68	85,07	85,07	94,00	95,00	95,00	sesuai (=)
12.2	Kepemilikan akta kelahiran per 1.000	%	26	26,40	36,04	36,04	34,67	95	95,46	belum tercapai (<)
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
13.1	Persentase PKK aktif	%	100	100	100	100	100	100	100	sesuai (=)
13.2	Jumlah LSM Aktif	%	5	5	8	3	3	3	5	belum tercapai (<)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
14.1	Persentase PUS yang aktif ber -KB	%	-	84,71	87,68	87,64	82,43	82,43	82,43	sesuai (=)
15	Perhubungan									
15.1	Persentase Angkutan Darat	%	11,35	11,35	11,38	15,64	16,28	17,35	16,38	melampaui (>)
15.2	Jumlah KIR Angkutan Umum	jumlah	1.951	1.951	1.951	2.365	2.281	2.321	2.300	melampaui (>)
15.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	jumlah	2	2	2	2	2	2	2	sesuai (=)
16	Komunikasi dan Informatika									
16.1	Jumlah Pemancar Komunikasi	jumlah	4	33	33	33	33	33	33	sesuai (=)
16.2	Jumlah surat kabar	jumlah	8	8	6	9	6	6	8	sesuai (=)
16.3	Jumlah penyiaran radio	jumlah	7	13	13	13	13	13	13	sesuai (=)
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
17.1	Persentase Koperasi Aktif	%	81,56	81,69	81,69	81,69	81,69	81,69	83	belum tercapai (<)
17.2	Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM	unit	7.405	7.521	7.616	7.737	7.941	7.941	8.839	belum tercapai (<)
17.3	Jumlah BPR/LKM	unit	8	12	12	12	12	12	8	melampaui (>)
18	Penanaman Modal									
18.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	orang	0	0	2	6	7	2	2	sesuai (=)
18.2	Jumlah investor PMA	orang	3	1	3	9	9	2	2	melampaui (>)
18.3	Jumlah Nilai Investasi PMDN	Rp Juta	0	532	357	242	64	124	120	melampaui (>)
18.4	Jumlah Investasi PMA	Rp Juta	181	54	167	1.198	74	193	100	melampaui (>)
19	Kepemudaan dan Olahraga									
19.1	Jumlah Organisasi Kepemudaan	jumlah	12	43	43	43	43	43	43	sesuai (=)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
19.2	Jumlah Organisasi Olahraga	jumlah	145	35	35	35	35	35	35	sesuai (=)
19.3	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	jumlah	12	10	10	10	10	10	10	sesuai (=)
19.4	Jumlah Kegiatan Olahraga	jumlah	65	29	29	29	29	29	29	sesuai (=)
20	Statistik									
20.1	Buku Kabupaten Dalam Angka	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
20.2	Buku PDRB Kabupaten	Ada/Tidak Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	sesuai (=)
21	Persandian									
21.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	persen	0	0	0	0	0	0	0	sesuai (=)
22	Kebudayaan									
22.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	keg	11	11	12	15	16	16	8	melampaui (>)
22.2	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	keg	4	4	4	4	5	5	4	melampaui (>)
22.3	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	unit	22	22	22	22	22	22	16	melampaui (>)
23	Perpustakaan									
23.1	Jumlah Perpustakaan	Buah	46	88	88	88	88	88	57	melampaui (>)
23.2	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun	orang	12.391	40.426	13.336	17.234	20.337	20.337	18.670	melampaui (>)
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan									
1	Kelautan dan Perikanan									
1.1	Produksi Perikanan:									
1.1.1	Perikanan Rawa	ton	1.170.20	1.694.30	1.717.70	1.730.20	1.762.90	1.762.90	1.650.70	melampaui (>)
1.1.2	Perikanan Sungai	ton	4.534.20	2.970.60	2.997.40	3.063.50	3.272.90	3.272.90	2.772.50	melampaui (>)



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
1.2	Konsumsi Ikan	%	100,16	100,16	100,39	100,39	99,30	99,30	53.45	melampaui (>)
2	Pariwisata									
2.1	Jumlah Wisatawan	orang	350.550	362.563	362.563	428.662	428.662	428.662	364.000	melampaui (>)
3	Pertanian									
3.1	Produktivitas Padi/produksi	ku/ha	44,83	47,57	47,62	59,23	52,02	52,02	44,93	melampaui (>)
3.2	Produktivitas Karet	Kg/ha	518,00	720,40	596,01	530,65	594,50	594,50	0,97	melampaui (>)
III	Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan									
1	Perencanaan									
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	%	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	100,00	100,00	sesuai (=)
2	Keuangan									
2.1	Penetapan APBD	Tepat/tidak tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	sesuai (=)
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan									
3.1	Persentase ASN eselon IV ke atas yang memenuhi standar kompetensi	persen	97,63	98,12	98,22	98,29	99	99	99	sesuai (=)
4	Penelitian dan Pengembangan									



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	persen	80	80	80	80	80	80	80	sesuai (=)
5	Pengawasan									
5.1.	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti	persen	-	69,62	82,61	59,41	85	85	85	sesuai (=)
6	Sekretariat Dewan									
6.1	Persentase laporan pertanggungjawaban Keuangan Sekretariat DPRD yang tepat waktu	persen	47	93	100	100	100	100	100	sesuai (=)
7	Sekretariat Daerah									
7.1	Nilai SAKIP	Nilai	C	C	C	CC	CC	CC	B	
7.2	Peringkat/Skor/Status LPPD	Peringkat/S kor/Status	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 135/Skor: 2,7027/ Status: tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	Peringkat 127 / Skor: 3,0468 /Status: sangat tinggi	sesuai (=)
7.3	Jumlah Informasi Manajemen Pemda	jumlah	4	4	4	4	4	4	4	sesuai (=)
7.4	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks	75	75,76	74,39	74,87	75	76	76	sesuai (=)



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan. Sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Daerah berkewajiban untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Keuangan daerah mengalami peningkatan di setiap tahunnya yang berakibat pada meningkatnya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tapin. Keuangan daerah itu sendiri yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan setiap tahun pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Kinerja keuangan masa lalu pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas keuangan daerah atau



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi 5 (lima) tahun kedepan, untuk penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Gambaran kinerja keuangan masa lalu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tapin, dijabarkan sebagai berikut:

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Berdasarkan regulasi yang berlaku, kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dinilai melalui aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung), pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan mencerminkan perkembangan dari kondisi aset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis kinerja pelaksanaan APBD dilakukan terhadap APBD serta analisis kinerja pelaksanaan APBD yang pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya, secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan Daerah

Secara umum komponen pendapatan terdiri dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah yang disajikan secara beberapa tahun terakhir menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN	829.461.453.751	937.151.136.913	1.173.544.232.220	1.128.327.657.014	996.083.590.562	5,7%
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	37.272.418.207	55.569.634.311	61.674.874.249	57.163.594.658	84.828.562.754	25,3%
1.1.1.	Pendapatan Pajak daerah	8.209.996.415	16.832.594.123	13.614.263.374	11.436.782.853	18.143.603.420	32,1%
1.1.2.	Hasil Retribusi daerah	3.390.031.841	2.658.110.678	3.082.012.953	3.887.662.145	3.175.353.080	0,5%
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	3.231.357.211	4.730.429.355	6.319.470.012	5.165.507.637	5.585.203.169	17,5%
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	22.441.032.740	31.348.500.155	38.798.403.767	36.673.642.024	57.924.403.085	29,0%
1.2	Dana Perimbangan	652.903.226.661	739.453.661.580	984.678.706.830	881.541.819.384	735.933.122.095	4,9%
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	232.539.265.661	283.342.914.580	423.958.329.830	219.401.104.353	169.876.191.085	0,2%
1.2.2	Dana Alokasi Umum	383.383.301.000	416.564.087.000	414.358.027.000	451.047.893.000	443.124.432.000	3,8%
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	36.980.660.000	39.546.660.000	146.362.350.000	211.092.822.031	122.932.499.010	69,9%
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	139.285.808.883	142.127.841.023	180.285.163.476	184.622.242.973	175.321.905.713	6,6%
1.3.1	Pendapatan Hibah	15.236.017.048	6.866.501.137	11.919.109.083	6.852.151.875	6.543.407.061	-7,1%
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.623.841.544	71.611.533.066	64.214.182.393	54.259.824.796	62.335.212.702	0,4%
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	46.087.163.000	-	-
1.3.4.1	- Tunjangan Profesi Pendidik/Guru	-	-	67.718.564.000	-	-	-
1.3.4.2	- Tambahan Penghasilan Guru	-	-	2.425.250.000	-	-	-
1.3.4.3	- Dana Insentif Daerah	-	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	-	-
	Dana Desa Yang Bersumber dari APBN	-	-	-	76.292.716.000	96.938.641.000	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	7.268.671.291	8.868.682.820	34.008.058.000	1.130.387.302	2.004.644.950	71,5%
	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	5.000.000.000	7.500.000.000	-
	Total Pendapatan	829.461.453.751	937.151.136.913	1.173.544.232.220	1.128.327.657.014	996.083.590.562	5,7%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013-2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Berdasarkan Tabel 3.1, diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan daerah cenderung meningkat yaitu periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dengan rata-rata tingkat pertumbuhan pendapatan sebesar 5,7%. Pendapatan Asli Daerah rata-rata per tahun cenderung meningkat dari periode tahun 2013-2017 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 25,3%. Secara persentase, pertumbuhan masing-masing komponen PAD berbeda-beda.

Sumber utama pendapatan Kabupaten Tapin berasal dari dana perimbangan yang sebagian besar berasal dari Dana Alokasi Umum. Dana Perimbangan setiap tahun mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan periode 2013-2017 terakhir sebesar 4,9%. Tingkat pertumbuhan tertinggi berasal dari Dana Alokasi Khusus sebesar 69,9%, Selain dari PAD dan Dana Perimbangan, sumber utama pendapatan daerah adalah Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata pertumbuhan 71,5%.

b) Belanja Daerah

Selain mengukur kinerja APBD dari sumber pendapatan, juga dilakukan pada sisi realisasi belanja pemerintah daerah. Secara umum komponen belanja terdiri dari:

- 1) Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan
- 2) Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.

Berdasarkan Tabel 3.2 diperoleh gambaran periode tahun 2013-2017 bahwa realisasi belanja mengalami pertumbuhan rata rata sebesar 6,46%, Belanja Tidak Langsung mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 12,00%. Belanja Tidak Langsung terbesar digunakan untuk belanja pegawai dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,62%. Sedangkan dari data realisasi Belanja Langsung diperoleh gambaran bahwa realisasi Belanja Langsung juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata kenaikan realisasi sebesar 3,42%. Komponen Belanja Langsung terbesar digunakan untuk belanja modal dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 36,27%.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

Kode	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
	BELANJA	841.882.825.507	892.848.890.983	1.244.530.368.789	1.178.113.475.949	1.047.991.304.652	7,27%
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	366.559.085.332	408.288.800.515	560.085.693.098	567.050.405.024	565.431.664.515	12,38%
2.1.1	Belanja Pegawai	325.567.475.610	357.238.465.424	397.383.804.515	413.968.348.010	386.051.407.431	4,60%
2.1.2	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	12.488.544.000	17.226.798.600	46.070.851.659	7.550.753.000	14.079.897.750	52,06%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	1.990.544.000	2.823.620.000	2.896.660.000	2.855.120.000	3.088.800.000	12,80%
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	783.081.511	851.904.176	1.019.368.499	1.277.198.493	1.532.180.493	18,43%
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Partai Politik	388.850.000	396.304.400	111.999.056.334	141.197.430.771	160.121.191.800	7050,56%
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	383.015.000	287.681.546	715.952.091	201.554.750	558.187.041	57,27%
	Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	24.957.575.211	29.464.026.369	-	-	-	-
	Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	475.323.740.175	484.560.090.468	684.444.675.691	611.063.070.925	482.559.640.137	2,86%
2.2.1	Belanja Pegawai	21.563.507.920	19.859.551.013	27.392.890.139	23.693.511.299	27.814.891.715	8,48%
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	163.120.611.186	210.824.741.328	218.076.617.439	248.998.849.893	261.266.430.175	12,95%
2.2.3	Belanja Modal	290.639.621.069	253.875.798.126	438.975.168.113	338.370.709.733	193.478.318.247	-1,37%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2017

**c) Pembiayaan**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Kabupaten Tapin terdiri dari:

- 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 3) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten Tapin. Memperhatikan Tabel 3.3, diperoleh gambaran bahwa Penerimaan Pembiayaan mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3949,64%. Sedangkan dari data realisasi Pengeluaran Pembiayaan diperoleh gambaran realisasi Pengeluaran Pembiayaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun yaitu dengan rata-rata penurunan sebesar 0,05%. Komponen Pengeluaran Pembiayaan yang penurunannya signifikan dari penyertaan modal dengan rata-rata penurunan sebesar 0,30%.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
PEMBIAYAAN DAERAH (netto)	167.315.308.524	(4.235.543.086)	189.388.213.922	116.623.390.353	64.759.571.419	-1189,21%
Penerimaan Pembiayaan	208.085.008.524	2.032.356.914	196.773.012.724	119.637.390.353	67.851.571.419	2350,13%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (Silpa)	206.128.206.216	-	194.960.639.613	118.402.815.353	66.837.571.419	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.214.100.000	1.103.800.000	1.104.000.000	1.234.575.000	1.014.000.000	-3,78%
Penerimaan Piutang Daerah	32.750.000	63.073.091	-	-	-	-
Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	709.952.308	865.483.823	708.373.111	-	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-	-
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
						-
Pengeluaran Pembiayaan	40.769.700.000	6.267.900.000	7.384.798.802	3.014.000.000	3.092.000.000	-30,85%
Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP					1.014.000.000	-
Pemberian Pinjaman Daerah	1.269.700.000	1.267.900.000	1.392.000.000	1.214.000.000		-25,79%
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	39.500.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1.800.000.000	2.078.000.000	-33,97%
Pembayaran Pokok Hutang	-	-	992.798.802	-	-	-
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	154.893.936.768	40.066.702.845	118.402.815.353	66.837.571.419	12.851.857.329	-0,74%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran 2013-2017



3.1.2. Neraca Daerah

Selain melihat progress pendapatan kinerja keuangan pemerintah daerah dimasa lampau juga dapat dilihat melalui neraca daerah. Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu *entitas* pelaporan mengenai aset, utang dan *ekuitas* dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Tapin serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah, serta analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tahun 2013-2017 dapat disajikan pada Tabel 3.4.

Adapun penjelasan dari komponen yang disajikan pada Tabel 3.4, sebagai berikut:

a) Aset

Aset pemerintah daerah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 0,6%. Aset lancar pemerintah Kabupaten Tapin mengalami tren peurunan dari tahun 2013 sampai dengan 2017 dengan rata-rata kenaikan sebesar 23,6% total aset tetap Kabupaten Tapin pada tahun 2013 adalah Rp. 1.690.846.630.024 dan meningkat menjadi Rp. 1.851.004.610.144 di tahun 2017 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 sebesar 2,9%.

b) Kewajiban

Kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dengan rata-rata 1089,3%, yaitu di tahun 2013 kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 6.752.784.454 dan di periode tahun 2017 kewajiban jangka pendek sebesar Rp. 19.718.436.590.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
ASET						
ASET LANCAR						
Kas Di Kas Daerah	149.937.296.518	189.840.109.643	80.187.067.432	47.128.489.156	2.851.964.582	-41,6%
Kas Di Bendahara Penerimaan	909.091		17.622.000	21.089.500	781.500	
Kas Di Bendahara Pengeluaran						
Kas Di Badan Layanan Umum Daerah	4.956.640.250	4.971.128.414	7.167.227.149	7.975.324.877	7.909.426.688	13,7%
Kas di Bendahara FKTP/Kas Lainnya		149.401.556,00			1.648.099.253	
Kas Lainnya				18.426.221		
Kas Dana Kapitasi/JKN			1.030.898.772	1.712.667.885		
Kas Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)			56.666.152	1.075.435.819	441.585.306	
Investasi Jangka Pendek			30.000.000.000	10.000.000.000		
Piutang Pajak	8.721.299.620	9.977.271.882	29.121.987.955	15.342.080.254		14,7%
Piutang Retribusi	458.246.308	540.390.568				
Piutang Dana Bagi Hasil	17.869.917.548	19.385.615.477				
Piutang Dana Alokasi Umum						
Piutang Dana Alokasi Khusus						
Piutang Lain-lain	1.606.460.695	1.364.848.975	3.435.224.812	19.388.904.638	24.488.304.552	156,8%
Piutang Pendapatan					16.983.612.973	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih			-6.597.717.768	-8.493.926.124	(9.947.951.309)	
Persediaan	8.440.634.614	8.497.824.691	7.235.612.518	6.185.479.153	8.289.300.688	1,3%
Belanja Dibayar Dimuka					14.700.000	
JUMLAH ASET LANCAR	191.991.404.643	234.726.591.206	151.654.589.023	100.353.971.379	52.679.824.232	-23,6%
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen					42.845.000	
Pinjaman Kepada Perusahaan Negara						
Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah						
Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya						
Investasi Dalam Surat Utang Negara						
Investasi Non Permanen Lainnya	54.850.000	54.850.000	47.150.000	49.637.500	42.845.000	-5,6%
Dana Bergulir						



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Jumlah Investasi Non Permanen	54.850.000	54.850.000	47.150.000	49.637.500	42.845.000	-5,6%
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	136.598.292.253	135.420.658.719	131.456.977.752	124.428.620.136	120.972.542.591	-3,0%
Penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan						
Penyertaan Modal Perusahaan Patungan						
Invertasi Permanen Lainnya						
JUMLAH Investasi Permanen	136.598.292.253	135.420.658.719	131.456.977.752	124.428.620.136	120.972.542.591	-3,0%
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG ASET TETAP	136.598.292.253	135.420.658.719	131.504.127.752	124.478.257.636	121.015.387.591	-3,0%
Tanah	271.850.033.511	288.764.693.184	303.612.117.288	326.963.518.285	334.324.807.505	5,3%
Peralatan dan Mesin	153.186.658.131	179.340.341.996	204.158.602.443	242.241.111.597	252.376.705.662	13,4%
Gedung dan Bangunan	555.249.413.137	593.726.114.233	673.115.743.801	738.005.448.963	717.233.910.343	6,8%
Jalan, Jaringan dan Instalasi	651.811.154.824	758.473.841.269	1.037.942.319.983	1.295.513.880.440	1.348.414.431.836	20,5%
Aset Tetap Lainnya	18.827.405.991	20.463.918.093	20.629.810.663	21.794.695.361	21.477.999.175	3,4%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	39.921.964.430	51.051.182.355	90.121.966.216	122.467.586.399	150.142.293.894	40,7%
Akumulasi Penyusutan			-676.569.789.909	-853.252.402.104	(972.965.538.272)	
JUMLAH ASET TETAP	1.690.846.630.025	1.891.820.091.131	1.653.010.770.486	1.893.733.838.942	1.851.004.610.144	2,9%
DANA CADANGAN						
Dana Cadangan						
JUMLAH DANA CADANGAN						
ASET LAINNYA						
Tagihan Jangka Panjang		4.235.348.496	4.235.348.496	4.235.348.496	4.235.348.496	
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran						
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	3.574.456.582					
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	660.891.914					
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga						
Aset Tidak Berwujud	2.407.083.237	2.801.108.537	1.260.938.955	1.234.575.877	1.499.709.223	-4,8%



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata - Rata Pertumbuhan (%)
Aset Lain-lain	27.866.937.667	27.724.829.732	23.888.742.880	23.784.831.130	23.882.058.466	-3,6%
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi						
JUMLAH ASET LAINNYA	34.509.369.400	34.761.286.765	29.385.030.331	29.254.755.503	29.617.116.185	-3,5%
JUMLAH ASET	2.054.000.546.321	2.296.783.477.821	1.965.554.517.592	2.147.820.823.460	2.054.316.938.152	0,6%
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				18.426.221		
Pendapatan Diterima Dimuka			76.866.843	351.848.179	321.789.893	
Utang Beban			232.329.738	34.141.336.144	7.387.940.687	
Utang Jangka Pendek Lainnya	6.752.784.454	1.312.457.101	2.248.546.141	80.323.128.393	12.008.706.010	844,5%
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	6.752.784.454	1.312.457.101	2.557.742.722	114.834.738.937	19.718.436.590	1080,3%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan						
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
JUMLAH KEWAJIBAN	6.752.784.454	1.312.457.101	2.557.742.722	114.834.738.937	19.718.436.590	1080,3%
JUMLAH EKUITAS DANA	2.047.247.761.867	2.295.471.020.720	1.962.996.774.870	2.032.986.084.523	2.034.598.501.562	0,3%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.054.000.546.321	2.296.783.477.821	1.965.554.517.592	2.147.820.823.460	2.054.316.938.152	0,6%

Sumber: Neraca Tahun 2013-2018

**c) Ekuitas Dana**

Perkembangan *ekuitas* dana Kabupaten Tapin selama tahun 2013-2017 tumbuh rata-rata sebesar 0,3 %, dimana pada tahun 2013 sebesar Rp. 2.047.247.761.867 dan tahun 2017 sebesar Rp 2.034.598.501.562, Berdasarkan dari neraca Kabupaten Tapin periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, maka hasil analisa perhitungan rasio *likuiditas* dan rasio *solvabilitas* disajikan pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Analisis Rasio Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio lancar (<i>current ratio</i>)	28,4314	178,845	59,29	0,87	2,67
2	Rasio cepat (<i>quick ratio</i>)	27,1815	172,37	56,5	0,8	2,25
3	Rasio total hutang terhadap total asset	0,00329	0,00057	0,00130	0,05	0,009599
4	Rasio hutang terhadap modal	0,0033	0,00057	0,00130	0,06	0,009692

Sumber: Data diolah

Berdasarkan Tabel 3.5 hasil perhitungan rasio keuangan menunjukkan bahwa kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin dalam kondisi sehat sebagaimana ditunjukkan oleh rasio *likuiditas* dan *solvabilitas* yang positif.

A. Rasio Likuiditas

Rasio *likuiditas* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan merupakan suatu indikator mengenai kemampuan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Rasio *likuiditas* yang digunakan dalam analisis kondisi keuangan Kabupaten Tapin yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar merupakan perbandingan antara aktiva lancar dan kewajiban lancar yang merupakan ukuran paling umum digunakan untuk mengetahui kesanggupan memenuhi kewajiban jangka pendek.

Rasio lancar menunjukkan sejauh mana akitva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dan kewajiban lancar semakin tinggi kemampuan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Berdasarkan tabel diatas, rasio lancar pada tahun 2013 adalah sebesar 28,4



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

dan tahun 2017 sebesar 2,67. Hal ini berarti menunjukkan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 kemampuan membayar hutang pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 2 kali lebih.

2. *Quicks Rasio*

Quick rasio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penghitungan *quick rasio* dengan mengurangi aktiva lancar dengan persediaan, hal ini dikarenakan persediaan merupakan unsur aktiva lancar yang *likuiditasnya* rendah dan sering mengalami fluktuasi harga serta menimbulkan kerugian jika terjadi *likuiditas*. Jadi rasio ini merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling *likuid* mampu menutupi hutang lancar. *Quick rasio* menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih *likuid*. Berdasarkan tabel diatas, *quick rasio* pada tahun 2013 sebesar 27,8 serta periode tahun 2016 *quick rasio* sebesar 2,25 hal ini berarti kemampuan pemerintah Kabupaten Tapin dalam membayar kewajiban jangka pendeknya sangat baik.

B. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas menunjukkan kemampuan daerah untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvable* berarti mempunyai aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya, jadi rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio *solvabilitas* terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio total hutang terhadap total aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar resiko yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Besar rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2013 sebesar 0,003 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0095 Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio hutang terhadap modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Pada tahun 2013 rasio hutang terhadap modal pemerintah Kabupaten Tapin sebesar 0,0617 serta periode tahun 2017 sebesar 0,00969. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai total hutang masih jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Tapin, dan semakin mandiri serta tidak tergantung pada hutang.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan agar lebih fokus dalam penanaan isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang terpetakan akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dalam penyajian laporan keuangannya mengacu pada



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

A) Kebijakan Pendapatan Daerah

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Sedangkan komponen Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak dan Bantuan Keuangan Provinsi adalah unsur penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan.

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan sumber-sumber penerimaan yang ada pada saat ini. Prioritas pembangunan Kabupaten Tapin harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tapin dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat.

Dalam mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Tapin tahun 2016, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah, akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah sebagai berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- a. Intensifikasi Pengelolaan Sumber PAD
 - Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutakhiran data objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah di Kabupaten Tapin.
 - Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
 - Mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pencapaian target dan realisasi PAD.
- b. Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD
 - Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah.
 - Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjaring sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dana Perimbangan
 - c. Mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, 25, 29;
 - d. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan; dan
 - e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan ini tergantung pada persentase penerimaan dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan maupun pendapatan hibah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan intensitas dan kualitas hubungan kerja/kerjasama antara perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tapin.

B) Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah pada tahun 2016 diarahkan pada pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif yang meliputi:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- a. Belanja Tidak Langsung diarahkan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung meliputi belanja non urusan dan belanja urusan yang dikelompokkan kedalam tiga jenis belanja yaitu untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang diarahkan sebagai berikut:
 - Alokasi belanja kegiatan sebagian besar dialokasikan kepada kepentingan publik.
 - Alokasi belanja diupayakan agar terjadi pemerataan dan keadilan di seluruh wilayah Kabupaten Tapin dengan memperhatikan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan masing-masing wilayah.
 - Alokasi belanja pada program dan kegiatan dilaksanakan secara efisien dan efektif, serta memiliki manfaat jangka panjang.
 - Alokasi belanja berpedoman kepada ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat secara sinergis.

C) Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 adalah semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD surplus maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila APBD defisit maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Suatu kinerja pemerintah yang baik, dapat dilihat juga melalui proporsi penggunaan anggaran. Proporsi penggunaan anggaran yang memenuhi aturan adalah persentase untuk layanan publik harus lebih besar daripada belanja aparatur ataupun kebutuhan pemerintah itu sendiri.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Kabupaten Tapin bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Tapin pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang, analisis proporsi penggunaan anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis proporsi realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 secara serial menginformasikan mengenai tingkat realisasi belanja Kabupaten Tapin. Berdasarkan Tabel 3.6, dari data realisasi Belanja Tidak Langsung terlihat mengalami kenaikan periode tahun 2013 sebesar Rp. 366.559 juta hingga pada Tahun 2017 sebesar Rp. 565.431 juta. Selain itu, penyerapan Belanja Tidak Langsung dari Tahun 2013 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan. Rata-rata tingkat realisasi Belanja Tidak langsung terhadap anggaran mencapai 94%.

Persentase realisasi Belanja Langsung selama periode 2013 sampai dengan 2017 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2013, persentase realisasi belanja langsung sebesar 80%, mengalami penurunan pada tahun berikutnya menjadi 76%. Tahun 2015 kembali meningkat mencapai 86%, namun turun menjadi 74% pada Tahun 2016. Realisasi belanja langsung Tahun 2017 sebesar Rp 482.559.640.137 atau mencapai 81% dari APBD Tahun 2017.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.6
Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

Uraian	2013			2014			2015			2016			2017		
	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)	Anggaran	Realisasi	(%)
BELANJA	989.330.0 29.230	841.882.8 25.507	85 %	1.064.556.6 01.402	892.848.8 90.983	84 %	1.275.650.3 60.255	1.131.131.1 17.382	89 %	1.432.105.9 48.908	1.178.113.4 75.949	82%	1.207.016.5 71.803	1.047.991.3 04.652	87%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	396.749.2 71.496	366.559.0 85.332	92 %	425.706.96 9.017	408.288.8 00.515	96 %	556.859.88 1.792	527.409.01 4.865	95 %	604.759.78 9.862	567.050.40 5.024	94%	609.590.87 6.525	565.431.66 4.515	93%
Belanja Pegawai	352.564.9 85.846	325.567.4 75.610	92 %	370.607.33 1.084	357.238.4 65.424	96 %	424.314.14 5.442	397.383.80 4.515	94 %	438.262.38 0.540	413.968.34 8.010	94%	420.421.99 3.975	386.051.40 7.431	92%
Belanja Bunga															#DIV /0!
Belanja Hibah	12.699.28 5.000	12.488.54 4.000	98 %	17.746.804. 000	17.226.79 8.600	97 %	14.672.380. 000	13.756.600. 000	94 %	8.459.170.0 00	7.550.753.0 00	89%	14.684.885. 750	14.079.897. 750	96%
Belanja Bantuan Sosial	3.291.510. 000	1.990.544. 000	60 %	5.500.000.0 00	2.823.620. 000	51 %	2.836.200.0 00	2.759.860.0 00	97 %	3.205.600.0 00	2.855.120.0 00	89%	3.640.660.0 00	3.088.800.0 00	85%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	829.000.0 00	783.081.5 11	94 %	977.714.43 3	851.904.1 76	87 %	1.060.000.0 00	1.019.368.4 99	96 %	1.695.156.8 22	1.277.198.4 93	75%	2.291.304.0 00	1.532.180.4 93	67%
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	406.741.5 00	388.850.0 00	96 %	406.741.50 0	396.304.4 00	97 %	112.977.15 6.350	112.076.65 6.334	99 %	150.637.48 2.500	141.197.43 0.771	94%	165.237.69 7.800	160.121.19 1.800	97%
Belanja Tidak Terduga	2.000.000. 000	383.015.0 00	19 %	1.000.000.0 00	287.681.5 46	29 %	1.000.000.0 00	412.725.51 7	41 %	2.500.000.0 00	201.554.75 0	8%	3.314.335.0 00	558.187.04 1	17%
Belanja Alokasi Dana Desa (ADD)	24.957.74 9.150	24.957.57 5.211	10 0%	29.468.378. 000	29.464.02 6.369	10 0%									#DIV /0!
BELANJA LANGSUNG	592.580.7 57.734	475.323.7 40.175	80 %	638.849.63 2.385	484.560.0 90.468	76 %	831.574.21 7.804	716.818.12 7.350	86 %	827.346.15 9.046	611.063.07 0.925	74%	597.425.69 5.278	482.559.64 0.137	81%
Belanja Pegawai	27.447.11 2.205	21.563.50 7.920	79 %	23.938.326. 600	19.859.55 1.013	83 %	7.283.384.0 74	4.967.304.8 39	68 %	27.388.016. 000,00	23.693.511. 299,00	87%	31.119.819. 000	27.814.891. 715	89%
Belanja Barang dan Jasa	198.239.1 40.463	163.120.6 11.186	82 %	276.806.80 1.577	210.824.7 41.328	76 %	313.032.86 1.485	272.875.65 4.398	87 %	312.993.66 4.723	248.998.84 9.893	80%	310.630.87 7.872	261.266.43 0.175	84%
Belanja Modal	366.894.5 05.066	290.639.6 21.069	79 %	338.104.50 4.208	253.875.7 98.126	75 %	511.257.97 2.245	438.975.16 8.113	86 %	292.280.00 0	338.370.70 9.733	1157 69%	255.674.99 8.406	193.478.31 8.247	76%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Tapin Tahun 2012-2016

**b. Proporsi Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**

Pada bagian ini disajikan proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. Belanja aparatur terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapin ditampilkan pada Tabel 3.7 sebagai berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.7
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
A.	Belanja Tidak Langsung	325.567.475.610	357.238.465.424	397.383.804.515	413.968.348.010	386.051.407.431
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	229.663.200.890,00	246.029.530.907	269.463.769.456	283.627.447.479	259.636.661.422
2	Belanja Tambahan Penghasilan	93.100.482.874,00	108.100.559.650	127.014.911.360	129.414.714.006	125.129.166.759
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KKDH/WKDH	1.654.150.000,00	2.479.760.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	789.803.780,00	628.614.867	501.900.000	505.715.000	-
5	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	254.243.750,00	-	103.223.699	-	870.750.000
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.594.316,00	-	-	120.471.525	114.829.250
B.	Belanja Langsung	51.604.993.958	58.616.441.804	85.598.567.538	99.758.765.024	102.776.410.507
1	Belanja Honorarium PNS	4.719.476.100,00	4.037.820.000	11.774.300.487	12.435.459.850	11.934.391.650
2	Belanja Uang Lembur	2.576.120.200,00	2.141.897.840			
3	Belanja Pegawai Operasional BLUD	2.241.543.413,00	3.717.204.273	4.967.304.839	6.186.791.449	9.537.950.065
4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	870.210.000,00	278.180.000	28.000.000	20.500.000	-



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
5	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.217.221.450,00	1.753.691.820	67.300.000	60.472.500	-
6	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	348.100.000,00	-	-	-	10.000.000
7	Belanja Makanan dan Minuman Pegawai	1.857.858.930,00	2.244.152.790	2.783.585.662	2.826.142.407	2.205.156.561
8	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.962.351.685,00	1.530.025.002	2.831.127.482	3.113.031.440	1.753.282.302
9	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	2.219.703.950,00	2.138.932.455	3.913.364.547	1.951.994.001	2.351.156.846
10	Belanja Pakaian Kerja	736.736.615,00	1.079.391.273	692.874.090	719.110.626	584.358.050
11	Belanja Perjalanan Dinas	25.753.804.875,00	35.555.722.257	40.582.776.159	50.528.023.780	49.006.547.923
12	Belanja Modal (Kantor, Mobil Dinas, Meubelair, Peralatan dan Perlengkapan)	7.101.866.740	4.139.424.094	17.957.934.272	21.917.238.971	25.393.567.110
TOTAL		377.172.469.568	415.854.907.228	482.982.372.053	513.727.113.034	488.827.817.938

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013-2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017 mengalami peningkatan, baik Belanja Tidak Langsung maupun Belanja Langsung. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur diharapkan sebisa mungkin tidak lebih besar dari belanja untuk masyarakat. Untuk mengetahui proporsi ini, maka pada tabel dibawah ini disajikan Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin terhadap Total Pengeluaran Tahun 2013-2017.

Tabel 3.8
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100%
1	2013	377.172.469.568	882.652.525.507	42,73%
2	2014	415.854.907.228	1.181.127.475.949	35,21%
3	2015	482.982.372.053	1.131.131.117.382	42,70%
4	2016	513.727.113.034	1.181.127.475.949	43,49%
5	2017	488.827.817.938	1.051.083.304.652	46,51%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013-2017

Data menunjukkan bahwa pada periode 2013 sampai dengan 2017, proporsi proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur kurang dari 50% atau lebih kecil dari belanja untuk masyarakat/pembangunan. Angka tertinggi pada Tahun 2017 yaitu 46,51%.

c. Analisis Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran Wajib dan Mengikat dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.9
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2013-2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	Rata2 Pertumbuhan (%)
A	Belanja Tidak Langsung	325.956.325.610	357.634.769.824	509.460.460.849	555.165.778.781	546.172.599.231	14,88%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	229.663.200.890	246.029.530.907	269.463.769.456	283.627.447.479	259.636.661.422	3,36%
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	93.100.482.874	108.100.559.650	127.014.911.360	129.414.714.006	125.129.166.759	8,05%
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasioanal KDH/Wakil KDH	1.654.150.000	2.479.760.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-9,50%
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	-	-	111.710.936.334	140.453.110.771	160.121.191.800	-
5	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	388.850.000	396.304.400	365.720.000	744.320.000	-	-0,57%
6	Belanja Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan	789.803.780	628.614.867	-	-	-	-
7	Belanja Insentif Pemungutan Pajak Daerah	254.243.750	-	501.900.000	505.715.000	870.750.000	-
8	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	105.594.316	-	103.223.699	120.471.525	114.829.250	-
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	39.500.000.000	5.000.000.000	-	1.800.000.000	3.092.000.000	-
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	39.500.000.000	5.000.000.000	-	1.800.000.000	2.078.000.000	-
2	Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	1.014.000.000	-
	TOTAL A+B+C	365.456.325.610	362.634.769.824	509.460.460.849	556.965.778.781	549.264.599.231	11,91%

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013- 2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Total pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada tabel di atas menunjukkan bahwa pengeluaran terbesar pada komponen gaji dan tunjangan PNS, hal tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat ditunda dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

a. Sumber Penutup Defisit Riil

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, maka pemerintah Kabupaten Tapin harus memanfaatkannya untuk penambahan program prioritas dalam upaya pencapaian target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Pada Tabel 3.10 terlihat pembiayaan kabupaten Tapin bersifat sangat fluktuatif, dimana pada Tahun 2012 Kabupaten Tapin mampu untuk menekan pembiayaan sehingga kas daerah dapat menyimpan sisa anggaran (SILPA) sampai sebesar Rp. 87.931.654 juta dan pada tahun 2016 sebesar Rp. 66.837 juta. Gambaran defisit riil dan Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) serta dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada berikut ini:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.10
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Pendapatan Daerah	829.461.453.75₁	937.151.136.91₃	1.173.544.232.22₀	1.128.327.657.01₄	996.083.590.562
2	Belanja Daerah	841.882.825.50₆	892.848.890.98₃	1.131.131.117.38₂	1.178.113.475.94₉	1.047.991.304.65₂
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	40.769.700.000	6.267.900.000	-	3.014.000.000	3.092.000.000
A.	Defisit Riil	(53.191.071.755)	38.034.345.930	42.413.114.838	(52.799.818.934,47)	(54.999.714.090)
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:						
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA)	206.128.206.215	-	-	118.402.815.353	66.837.571.419
	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.214.100.000	1.103.800.000	-	1.234.575.000	1.014.000.000
2	Penerimaan Piutang Daerah/Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	32.750.000	63.073.091	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan atas Investasi	709.952.308	865.483.823	-	-	-
B.	Total Realisasi Penerimaan	208.085.008.524	2.032.356.914	-	119.637.390.353	67.851.571.419
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		154.893.936.76₈	40.066.702.844	42.413.114.838	66.837.571.418	12.851.857.329

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013- 2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.11
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Periode Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	(%)	2014	(%)	2015	(%)	2016	(%)	2017	(%)
	Defisit Ril	-53.191.071.756	-	38.034.345.931		42.413.114.838		-52.799.818.934		(54.999.714.090)	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	206.128.206.216	387,5	-	-	194.960.639.613	459,7	118.402.815.353	224,2	66.837.571.419	121,5
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	1.214.100.000	-2,3	1.103.800.000	2,9	1.104.000.000	2,6	1.234.575.000	-2,3	1.014.000.000	-1,8
5	Penerimaan Kembali Pemberiaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	32.750.000	-0,1	63.073.091	0,2	-	-	-	-	-	-
7	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun berkenaan	154.893.936.768	291,2	40.066.702.845	105,3	118.402.815.353	279,2	66.837.571.419	126,6	12.851.857.329	-23,4

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013- 2017



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

b. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran defisit riil anggaran periode dan realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.12 berikut ini:

Tabel 3.12
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tapin
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	% dar i SiL PA	(Rp)	% dar i SiL PA	(Rp)	% dar i SiL PA	(Rp)	% dar i SiL PA	(Rp)	% dar i SiL PA
	Jumlah SILPA	154.893. 936.768		40.066.7 02.845		118.402. 815.353		66.837.5 71.419		12.851.8 57.329	
1	Pelampauan penerimaan PAD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	154.893. 936.768	10 0	40.066.7 02.845	10 0	118.402. 815.353	10 0	66.819.1 45.197	99, 9	12.851. 857.329	10 0
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	18.426.2 21	0,0 28	-	-
6	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SILPA RIIL (1-2-3)	154.893. 936.768		40.066.7 02.845		118.402. 815.353		66.837.5 71.419		12.851.8 57.329	

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013-2017

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Analisis Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan guna memberikan gambaran secara riil sisa lebih pembiayaan anggaran Kabupaten Tapin yang dapat dipergunakan untuk perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan disajikan pada tabel 3.13 sebagai berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.13
Sisa Lebih (riil) Pembiayaan Anggaran Kabupaten Tapin
Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Saldo Kas Neraca Daerah	154.894.845.859	194.960.639.613	88.459.481.505	57.931.433.459	12.851.857.329
	Dikurangi					
2	Kewajiban kepada pihak ketiga samapi dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	18.426.221	-
3	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-
	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran	154.894.845.859	194.960.639.611	88.459.481.505	57.913.007.238	12.851.857.329

Sumber: Diolah dari Laporan Keuangan Kabupaten Tapin 2013- 2017

3.3. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah

Proyeksi pendapatan Belanja daerah menggunakan rata-rata pertumbuhan APBD pendapatan kurun waktu 2013-2017 serta dengan menggunakan tahun dasar APBD Tahun 2018 maka proyeksi pendapatan



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

daerah 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2018 sampai dengan 2023 sebagaimana Tabel 3.14 sebagai berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.14
Proyeksi Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

URAIAN	APBD	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
PENDAPATAN	1.123.648.313.301	1.144.111.283.653	1.189.763.663.875	1.239.606.097.627	1.293.642.026.138	1.352.478.061.300	4,28%
Pendapatan Asli Daerah	80.502.959.043	64.678.719.888	70.773.389.257	77.555.037.337	85.131.446.643	93.707.291.403	9,71%
Pendapatan Pajak Daerah	15.005.000.000	16.515.250.000	18.172.388.750	19.998.074.444	22.069.744.861	24.402.774.026	10,25%
Hasil Retribusi Daerah	3.135.063.000	3.078.373.786	3.155.333.130	3.234.216.459	3.315.071.870	3.397.948.667	2,50%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.585.203.169	5.585.203.169	5.640.791.703	5.697.040.731	5.753.957.804	5.811.497.382	1,00%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	56.777.692.874	39.499.892.933	43.804.875.673	48.625.705.704	53.992.672.108	60.095.071.327	11,06%
DANA PERIMBANGAN	777.412.071.000	860.039.444.450	897.094.977.583	937.280.005.618	980.601.629.923	1.027.437.106.477	4,56%
Dana Bagi Hasil Pajak / Sumber Daya Alam	188.267.186.000	216.795.171.800	226.844.435.690	238.348.571.172	251.486.766.550	266.471.364.246	5,29%
Dana Alokasi Umum	448.697.311.000	476.931.529.650	500.611.544.033	525.475.559.134	551.582.774.991	578.995.351.640	5,00%
Dana Alokasi Khusus	140.447.574.000	166.312.743.000	169.638.997.860	173.455.875.312	177.532.088.382	181.970.390.591	2,28%
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	265.733.283.258	219.393.119.315	221.895.297.036	224.771.054.672	227.908.949.572	231.333.663.420	1,33%
Pendapatan Hibah	84.000.000.000	23.283.200.000	23.535.366.400	23.856.543.232	24.208.037.666	24.600.135.989	1,39%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	85.168.242.258	87.297.448.315	89.043.397.281	91.091.395.418	93.368.680.304	95.889.634.672	2,38%
Dana Desa Yang Bersumber Pada APBN	88.565.041.000	100.812.471.000	101.316.533.355	101.823.116.022	102.332.231.602	102.843.892.760	0,50%
Dana Insentif Daerah	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	0,00%



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

URAIAN	APBD	Proyeksi					Rata-rata Pertumbuhan (%)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
BELANJA	1.228.077.951.405	1.313.931.178.276	1.355.338.061.132	1.401.041.134.953	1.451.041.187.530	1.505.942.243.658	3,47%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	611.438.593.564	589.806.433.959	594.532.083.525	604.954.978.750	616.029.801.110	627.406.648.784	1,56%
Belanja Pegawai	415.913.542.514	415.993.837.329	420.544.680.650	430.777.294.452	441.644.990.231	452.796.374.904	2,14%
Belanja Hibah	34.376.093.050	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000	0,00%
Belanja Bantuan Sosial	3.509.180.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000	0,00%
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.814.006.300	1.974.595.930	2.149.402.175	2.339.683.598	2.546.810.179	2.772.273.180	8,85%
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	153.005.810.700	153.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700	0,00%
Belanja Tidak Terduga	2.819.961.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00%
BELANJA LANGSUNG	616.639.357.841	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874	4,95%
Belanja Pegawai	30.838.145.510	36.213.491.644	38.047.920.789	39.812.283.162	41.758.934.634	43.935.581.091	4,95%
Belanja Barang dan Jasa	325.446.729.584	382.174.810.693	401.534.242.198	420.154.232.306	440.697.988.898	463.668.970.427	4,95%
Belanja Modal	260.354.482.747	305.736.441.979	321.223.814.620	336.119.640.735	352.554.462.888	370.931.043.356	4,95%

Sumber: Hasil pengolahan data



3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi SiLPA

Berdasarkan data beberapa tahun yang lalu, diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif dan efisien serta sesuai dengan perencanaan, maka pertumbuhan SiLPA direncanakan setiap tahun sebesar sebagai berikut:

Tabel 3.15
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Uraian	APBD	Proyeksi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	104.429.638.104	169.819.894.623	165.574.397.257	161.435.037.326	157.399.161.392	153.464.182.358

Sumber: Hasil pengolahan data

b. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi kebutuhan belanja wajib dan mengikat dianalisis berdasarkan rata-rata tingkat realisasi pengeluaran wajib dan mengikat. Adapun hasil proyeksi untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana disajikan melalui Tabel 3.16 berikut ini:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.16
Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023

No.	Uraian	APBD	Proyeksi				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Belanja Tidak Langsung	570.733.359.514	520.675.507.090	588.185.083.379	598.777.294.452	609.644.990.231	620.796.374.903
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	272.741.710.364	251.967.966.673	258.267.165.840	264.723.844.986	271.341.941.111	278.125.489.638
2	Tambahan Penghasilan PNS	141.312.029.000	156.481.834.689	160.393.880.557	164.403.727.571	168.513.820.760	172.726.666.279
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.814.006.300	1.815.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa Lainnya	153.005.810.700	109.000.000.000	166.000.000.000	166.000.000.000	166.000.000.000	166.000.000.000,
6	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	652.800.000					
7	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	750.250.000	907.646.250	1.000.687.438	1.104.054.072	1.219.011.264	1.346.998.565
8	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	156.753.150	203.059.478	223.349.544	245.667.823	270.217.096	297.220.421
B	Pengeluaran Pembiayaan	1.600.000.000	-	-	-	-	-
1	Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
2	Pemberian Pinjaman Daerah kepada LUEP	1.600.000.000					
	TOTAL BELANJA WAJIB DAN PENGELUARAN YANG WAJIB MENGIKAT A (A+B)	572.333.359.514	520.675.507.090	588.185.083.379	598.777.294.452	609.644.990.231	620.796.374.903

Sumber: Hasil pengolahan data



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

c. Proyeksi Kapasitas Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), maka dapat diproyeksikan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Tapin dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tahun 2018 sampai dengan tahun 2023. Lebih lanjut, berdasarkan data-data historis sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tapin untuk mendanai pembangunan dalam jangka waktu lima tahun 2018-2023, disajikan sebagai berikut:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.17
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Urain	APBD	Proyeksi				
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan	1.123.648.313.301	1.144.111.283.653	1.189.763.663.875	1.239.606.097.627	1.293.642.026.138	1.352.478.061.300
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran	104.429.638.104	169.819.894.623	165.574.397.257	161.435.037.326	157.399.161.392	153.464.182.358
Penerimaan Pinjaman	1.600.000.000					
Total penerimaan	1.229.677.951.405	1.313.931.178.276	1.355.338.061.132	1.401.041.134.953	1.451.041.187.530	1.505.942.243.658
Dikurangi						
Pengeluaran pembiayaan	1.600.000.000	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Langsung	611.438.593.564	589.806.433.959	594.532.083.525	604.954.978.750	616.029.801.110	627.406.648.784
Kapasitas riil kemampuan keuangan	616.639.357.841	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874

Sumber: Hasil pengolahan data



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

d. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang ditetapkan oleh para aparatur pengelola keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tapin sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat. Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, selanjutnya perlu ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tersebut kedalam beberapa kelompok prioritas.

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan. Disamping itu keluaran dari belanja daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga secara berangsur-angsur tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin semakin menurun. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pencapaian efektifitas program, mengingat keterbatasan anggaran maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas program (*money follow program*). Untuk itu ditetapkan proyeksi alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut prioritas, sebagai berikut:

- a. **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
- b. **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan penerapan pelayanan dasar dan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka alokasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menurut kelompok prioritas Tahun Anggaran 2018 sampai dengan Tahun Anggaran 2023 disajikan pada Tabel 3.18. Hasil proyeksi lima tahun kedepan menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan untuk belanja langsung sebesar 5,00 persen.



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Tabel 3.18
Proyeksi Alokasi Kapasitas Keuangan Daerah Menurut Kelompok Prioritas
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	Proyeksi				
	2019	2020	2021	2022	2023
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874
BELANJA LANGSUNG	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874
- PRIORITAS I	59,942,403,697	62,978,843,636	65,899,305,510	69,121,501,522	72,724,396,872
- PRIORITAS II	490,592,717,365	525,213,776,884	524,854,979,026	561,913,828,160	585,900,607,440
- PRIORITAS III	173,589,623,255	172,613,357,087	205,331,871,667	203,976,056,738	219,910,590,562

Sumber: Hasil pengolahan data



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (*gap*) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, maka dipetakan menjadi masalah pokok, masalah, dan akar masalah.

Masalah pokok pembangunan di Kabupaten Tapin dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Perekonomian.
3. Infrastruktur yang belum memadai.
4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal.

Uraian lebih rinci atas masalah pokok di Kabupaten Tapin akan dijelaskan pada bagian berikut ini.

4.1.1. Sumber Daya Manusia yang masih rendah

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) suatu daerah dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan data, pencapaian IPM Kabupaten Tapin masih berada di bawah target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin. Target IPM ditetapkan sebesar 77 pada tahap III RPJPD tahun 2015-2019. Adapun pencapaian IPM tahun 2017 sebesar 68,70, yang berarti masih di bawah target tahap III RPJPD tahun 2015-2019.

Beberapa masalah terkait masalah pokok masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Tapin, antara lain:



1. Angka harapan lama sekolah yang masih rendah, yaitu: 11,52. Angka harapan lama sekolah masih berada di bawah angka harapan lama sekolah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 12,46.
2. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012, angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,48 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 6,84. Data tahun 2016 angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 7,99 sedangkan Kabupaten Tapin sebesar 7,53.
3. APM SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2017 masih rendah di angka 48,31%.
4. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih berfluktuasi.
5. Angka kelangsungan hidup bayi masih berfluktuasi naik dan turun. AKB tertinggi sebesar 23 di tahun 2014, dan AKB terendah sebesar 17 di tahun 2016.
6. Jumlah puskesmas dan pustu yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2012-2016. puskesmas sebanyak 13 puskesmas dan jumlah pustu sebanyak 37 pustu.
7. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan dari 0,128 tahun 2014 menjadi 0,114 tahun 2016.

4.1.2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Untuk Pengembangan Perekonomian

Kondisi perekonomian di Kabupaten Tapin 5 (lima) tahun terakhir khususnya periode 2013-2015 mengalami pelambatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend penurunan. Tercatat laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,32 persen mengalami penurunan sampai pada 4,05 persen pada Tahun 2015. Namun kondisi mulai membaik dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2016 mencapai 4,85 persen.

Bila ditinjau dari penyumbang PDRB, maka perekonomian di Kabupaten Tapin masih bertumpu pada sektor pertambangan dan sektor



pertanian. Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tapin sebesar 27,77 persen. Lalu pada urutan berikutnya terdapat sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 21,71 persen. Perekonomian Kabupaten Tapin akan sangat rentan jika terjadi gejolak harga komoditas pertanian dan komoditas pertambangan.

Beberapa masalah penyebab masalah pokok belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan perekonomian, diidentifikasi sebagai berikut:

1. PDRB ADHB yang belum mencapai target RPJPD

Target Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) untuk tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019 ditetapkan sebesar 7.549.606 juta rupiah. Adapun pencapaian PDRB ADHB sampai tahun 2016 sebesar 6,900,018.89 juta rupiah yang masih di bawah target tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019.

2. Masih tingginya dominasi sektor pertanian yang belum diikuti oleh sektor perdagangan dan industri untuk peningkatan nilai tambah pertanian

Pada dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025, dinyatakan bahwa kontribusi sektor pertanian PDRB ADHB ditargetkan di bawah 10,55 persen untuk tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019. Sementara berdasarkan data dari BPS, kontribusi sektor pertanian PDRB ADHB pada Tahun 2016 sebesar 21,71 persen. Ketergantungan Kabupaten Tapin atas sektor pertanian masih belum bisa diubah.

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB Kabupaten Tapin masih berada di bawah target tahap III RPJPD Kabupaten Tapin tahun 2015-2019 yang ditetapkan sebesar 12,99 persen. Pada tahun 2016 tercatat kontribusi sektor industri pengolahan hanya sebesar 6,99 persen. Sementara itu, sektor perdagangan menyumbang sebanyak 9,56 persen terhadap PDRB pada tahun 2016.

Diharapkan kedua sektor tersebut dapat lebih berkembang pada tahun-tahun yang akan datang agar dapat mengolah dan



memperdagangkan hasil olahan dari produk pertanian baik dalam bentuk barang jadi atau setengah jadi. Dengan demikian, diharapkan produk pertanian memiliki nilai tambah yang semakin besar.

3. Masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan

Sebagaimana diketahui, sektor pertambangan di Kabupaten Tapin masih menjadi primadona. Tercatat sektor yang paling besar kontribusinya terhadap PDRB selama beberapa tahun terakhir adalah sektor perdagangan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tapin sebesar 27,77 persen pada Tahun 2016. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan ini berangsur-angsur harus dikurangi dan mulai beralih ke sektor lain yang lebih ramah lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang digagas Pemerintah Indonesia perlu menjadi perhatian dan untuk itu upaya pengembangan perekonomian Tapin perlu diarahkan untuk mendorong sektor lain yang hanya bertumpu pada kekayaan alam tak terbarukan.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan ini telah dilakukan, yang dibuktikan dengan adanya penurunan kontribusi sektor pertambangan. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB tertinggi sebesar 36,16 persen di tahun 2013 mengalami penurunan sehingga mencapai 27,77 persen di tahun 2016.

4.1.3. Infrastruktur yang belum memadai

Infrastruktur yang terdiri dari: jalan, jembatan, irigasi, dan air bersih merupakan hal yang mendasar untuk mendukung kehidupan dan kegiatan di Kabupaten Tapin. Infrastruktur yang tidak memadai dapat menjadi penghambat laju perekonomian daerah serta aktifitas lainnya.

Beberapa masalah penyebab dari masalah pokok infrastruktur yang belum memadai, antara lain:

1. Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 60,25 persen tahun 2013 menjadi 44,47 persen tahun 2016. Penurunan ini perlu segera mendapatkan solusi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Dengan buruknya kondisi jalan, maka



akan mempengaruhi kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

2. Persentase irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan dari 82,63 persen tahun 2013 menjadi 65 persen tahun 2016. Penurunan ini sangat mempengaruhi produksi pertanian khususnya sawah. Petani di Tapin pada umumnya masih mengusahakan pertanian dalam bentuk tradisional. Indeks pertanaman saat ini baru mencapai 2x setahun, sebab keterbatasan pengairan dari irigasi. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan layanan irigasi untuk mendukung pertanian.
3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2015 belum optimal yaitu 55,48 persen. Ini berarti hamper setengah (44,52 persen) penduduk Tapin belum mendapatkan pelayanan air bersih.

4.1.4. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang Belum Optimal

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business process*) dan sumber daya manusia aparatur.

Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mewujudkan visi dan misi pembangunan.

Beberapa masalah terkait pelaksanaan reformasi birokrasi yang belum optimal, yaitu:

1. Belum optimalnya kinerja pemda yang dicerminkan dari indikator Nilai SAKIP. Nilai SAKIP Kabupaten Tapin mendapatkan peningkatan menjadi nilai CC di tahun 2015 dan tahun berikutnya masih pada



angka yang sama. Ini menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan pemerintahan cukup baik, namun belum optimal. Nilai CC tersebut berarti masih banyak aspek yang perlu dibenahi sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tapin dapat memberikan kinerja yang terbaik dan akuntabel.

2. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) belum optimal. Walaupun kualitas LPPD Kabupaten Tapin semakin membaik, namun masih berada pada peringkat 127 pada Tahun 2015. Posisi ini mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2013 yang berada di peringkat 135.
3. Pelayanan publik kepada masyarakat belum optimal. Salah satu indikator yang umum dipakai untuk mengukur kualitas pelayanan publik adalah Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan dan posisi terakhir pada tahun 2016 mencapai 75. Prestasi ini tentu masih sangat perlu ditingkatkan untuk lebih memberikan pelayanan publik yang baik.

Penyajian masalah pokok dan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, perlu dilengkapi dengan akar masalah. Akar masalah memberikan gambaran penyebab dari timbulnya masalah pembangunan. Hal ini disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Masalah Pokok, Masalah, dan Akar Masalah Pembangunan di Kabupaten Tapin

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah	Pendidikan: 1. Angka harapan lama sekolah yang masih rendah. 2. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Tapin selama periode tahun 2013-2017 masih lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Selatan.	1. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kompetensi, kualifikasi dan sebaran geografis sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Dasar (SD/SMP/Sederajat), dan



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		<ol style="list-style-type: none"> 3. APM SLTA/MA/SMK Kabupaten Tapin tahun 2017 masih rendah. 4. Rasio guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs masih berfluktuasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan Menengah (SMA/SMK/Sederajat) 2. Belum meratanya kapasitas pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang dimiliki aparat pengelola perencanaan, pelaksana, serta pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan 3. Kualifikasi tenaga kependidikan masih ada yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu 4. Sarana dan prasarana pendidikan terbatas 5. Kurang maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar
		Kesehatan:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Angka kelangsungan hidup bayi masih berfluktuasi. 2. Jumlah puskesmas dan pustu yang tidak mengalami penambahan selama periode tahun 2012-2016. 3. Rasio dokter per satuan penduduk mengalami penurunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terpenuhinya jumlah, jenis, kualitas serta penyebaran SDM kesehatan 2. Belum optimalnya ketersediaan alat kesehatan yang memadai di sarana fasilitas kesehatan 3. Belum optimalnya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 4. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan 5. Terbatasnya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas 6. Belum terpenuhinya jumlah tempat tidur ideal di RSUD Datu Sanggul, sarana prasarana kurang dan perlu penambahan/perluasan gedung RSUD Datu Sanggul
2	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam untuk pengembangan perekonomian	<ol style="list-style-type: none"> 1. PDRB ADHB yang belum mencapai target RPJPD 2. Masih tingginya dominasi sektor pertanian yang belum diikuti oleh sektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Postur ekonomi Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sektor primer (pertambangan, pertanian). 2. Belum berkembangnya sektor lain diluar



NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
		perdagangan dan industri untuk peningkatan nilai tambah pertanian 3. Masih tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan	pertambangan dan pertanian. 3. SDM Kabupaten Tapin belum mendukung untuk diluar sektor pertanian. 4. Masih pada taraf produksi langsung jual, belum ada pengolahan. Industri pengolahan hasil pertanian lebih lanjut belum berkembang. 5. Sarana dan prasarana belum mendukung.
3	Infrastruktur yang belum memadai	1. Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan 2. Persentase irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih di tahun 2015 belum optimal	1. Terbatasnya alokasi dana anggaran kegiatan pembangunan infrastruktur 2. Lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian terhadap kualitas bangunan infrastruktur 3. Belum optimalnya pengetahuan aparatur dalam menyusun dan melaksanakan rencana dengan baik. 4. Terbatasnya personil yang berkualitas yang menguasai bidang pekerjaan yang ditangani.
4	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang belum optimal	1. Belum optimalnya kinerja pemda yang dicerminkan dari indicator Nilai SAKIP 2. Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) belum optimal 3. Pelayanan publik belum optimal	1. Perangkat daerah masih belum mampu melaporkan hasil evaluasi capaian pembangunan secara benar dan baik. 2. Kinerja pelayanan publik masih belum memuaskan para pengguna jasa publik, terutama warga masyarakat, pelaku bisnis dan para investor. Hal ini terkait dengan prosedur dan tata cara pelayanan yang belum mengarah kepada penerapan konsep "One-Stop Service" karena memang dalam pelaksanaannya masih terkesan birokratis, persyaratan yang berbelit-belit dan lamanya waktu yang diperlukan tidak tetap

Sumber: hasil analisis



4.2. Isu Strategis

4.2.1 Penelaahan Isu Internasional dan Isu/Kebijakan Nasional

Penentuan isu strategis didahului dengan *review* terhadap isu internasional dan kebijakan pembangunan nasional yang relevan dalam memberi arah bagi pembangunan Kabupaten Tapin. Hasil *review* akan melengkapi isu strategis yang diperoleh dari kajian terhadap kondisi Kabupaten Tapin.

a. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pada tahun 2003, para pemimpin ASEAN sepakat bahwa Masyarakat ASEAN harus terbentuk pada tahun 2020. Pada tahun 2007, para pemimpin menegaskan komitmen kuat mereka untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN dan mempercepat target waktunya menjadi tahun 2015. Masyarakat ASEAN terdiri dari tiga pilar yang terkait satu dengan yang lain: Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) memiliki karakteristik utama sebagai berikut: (a) pasar tunggal dan basis produksi; (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang merata; dan (d) kawasan yang secara penuh terintegrasi ke dalam perekonomian global.

1) Pasar Tunggal dan Basis Produksi

Pasar tunggal dan basis produksi ASEAN terdiri dari atas lima elemen inti: (i) arus barang yang bebas; (ii) arus jasa yang bebas; (iii) arus investasi yang bebas; (iv) arus modal yang lebih bebas; dan (v) arus tenaga kerja terampil yang bebas. Komponen dalam pasar tunggal dan basis produksi adalah termasuk 12 (dua belas) sektor-sektor prioritas. Adapun 12 sektor-sektor prioritas yang dibagi dalam dua bagian yaitu tujuh sektor barang industri dan lima sektor jasa.

**Tabel 4.2 Sektor Prioritas MEA**

NO	SEKTOR BARANG INDUSTRI	NO	SEKTOR JASA
1	produk berbasis pertanian	1	transportasi udara
2	Elektronik	2	e-asean
3	Perikanan	3	pelayanan kesehatan
4	produk berbasis karet	4	Turisme
5	Tekstil	5	jasa logistic
6	otomotif,		
7	produk berbasis kayu		

2) Kawasan Ekonomi Yang Berdaya Saing Tinggi

Perwujudan kawasan ekonomi yang stabil, makmur, dan berdaya saing tinggi merupakan tujuan dari integrasi ekonomi ASEAN. Terdapat enam elemen inti bagi kawasan ekonomi yang berdaya saing ini, yaitu: (i) kebijakan persaingan; (ii) perlindungan konsumen; (ii) Hak Kekayaan Intelektual (HKI); (iv) pembangunan infrastruktur; (v) perpajakan; (vi) *ecommerce*.

Negara-negara anggota ASEAN telah berkomitmen untuk memperkenalkan kebijakan dan hukum persaingan usaha secara nasional untuk menjamin tingkat kesetaraan dan menciptakan budaya persaingan usaha yang sehat untuk meningkatkan kinerja ekonomi regional dalam jangka panjang.

3) Kawasan Pengembangan Ekonomi Yang Merata

Hal ini meliputi: (i) Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan (ii) Inisiatif untuk Integrasi ASEAN. Kedua inisiatif ini diarahkan untuk menjembatani jurang pembangunan baik pada tingkat UKM maupun untuk memperkuat integrasi ekonomi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam agar semua anggotadapat bergerak maju secara serempak dan meningkatkan daya saing ASEAN sebagai kawasan yang memberikan manfaat dari proses integrasi kepada semua anggotanya.



4) Kawasan Yang Secara Penuh Terintegrasi ke dalam Perekonomian Global

ASEAN bergerak di sebuah lingkungan yang makin terhubung dalam jejaring global yang sangat terkait satu dengan yang lain, dengan pasar yang saling bergantung dan industri yang mendunia. Agar pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara global, untuk menjadikan ASEAN lebih dinamis sebagai *mainstream* pemasok dunia, dan untuk memastikan bahwa pasar domestik tetap menarik bagi investasi asing, maka ASEAN harus lebih menjangkau melampaui batas-batas MEA.

Dua pendekatan yang ditempuh ASEAN dalam berpartisipasi dalam proses integrasi dengan perekonomian dunia adalah: (i) pendekatan koheren menuju hubungan ekonomi eksternal melalui Perjanjian Perdagangan Bebas (*Free Trade Area/FTA*) dan kemitraan ekonomi yang lebih erat (*Closer Economic Partnership/CEP*), dan (ii) partisipasi yang lebih kuat dalam jejaring pasokan global.

b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*)

Sampai pada tahun 2015 diyakini bahwa MDG's belum tercapai secara tuntas, oleh karena itu perlu dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan, dan mengatasi perubahan iklim. Program SDGs aktif mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan, yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.



3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan-kan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.



c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan ditelaah adalah periode 2015-2019. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden yang penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.

Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: **TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG.**

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Adapun prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA, yaitu:



1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

d. Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, terdapat satu proyek strategis nasional di Kabupaten Tapin, yaitu proyek Bendungan Tapin. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin.



e. Penelaahan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024

Tema rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024, yaitu:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan”

Pembangunan periode 2020-2024 diarahkan pada beberapa fokus dalam rangka menjawab isu-isu strategis. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Teknokratik RPJMN 2020-2024, meliputi:

1. Arah Kebijakan Pembangunan manusia, dengan fokus: a. Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial, dan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.
2. Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi, dengan fokus: Pangan dan Pertanian; Energi, Mineral, dan Pertambangan; Kelautan dan Kemaritiman; Pariwisata; Ekonomi Kreatif dan Digital; dan Industri Manufaktur.
3. Arah Kebijakan Pembangunan infrastruktur
4. Arah Kebijakan Pembangunan politik, hukum, pertahanan, dan keamanan.
5. Arah Kebijakan Pembangunan kewilayahan.

Arah kebijakan pembangunan wilayah yang direncanakan oleh Bappenas untuk Pulau Kalimantan, dijelaskan sebagai berikut:

Tema Pembangunan Wilayah Kalimantan yaitu: Pusat produksi dan pengolahan hasil tambang, kehutanan, dan lumbung energi nasional.

Pusat-pusat pertumbuhan yang utama, diarahkan untuk:

- a. Operasionalisasi KEK MBTK, KI Landak, Batulicin dan Jorong.
- b. Peningkatan investasi di KI Ketapang.
- c. Pengembangan kawasan metropolitan Banjarbakula (Kota Banjarmasin dan sekitarnya).
- d. Pengembangan jalur kereta api Kalimantan.

Sektor utama pendukung pembangunan Wilayah Kalimantan 2020-2024 yaitu:

- a. Industri Manufaktur



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- Sub sektor industri batu bara dan pengilangan migas
- Sub sektor industri kayu, barang dari kayu, dan gabus, dan lain-lain
- b. Pertanian, kehutanan, perikanan
 - Sub sub sektor tanaman perkebunan
- c. Pertambangan dan Penggalian
 - Sub sektor pertambangan batu bara
- d. Transportasi dan pergudangan
 - Sub sektor angkutan sungai, danau, dan penyebrangan

Perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk Pulau Kalimantan adalah 2020: 4,6% dan 2024: 5,2%. Target ini akan menjadi pertimbangan untuk penentuan target pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan, termasuk Kabupaten Tapin.

Rancangan teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024 juga menyajikan proyeksi target indikatif pembangunan pada periode berkenaan. Beberapa indikator kinerja makro diproyeksikan sampai 2024, sebagai berikut:

Tabel 4.3 Proyeksi Target Indikatif Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024

Uraian	Pertumbuhan Ekonomi	Kemiskinan	Pengangguran	Ketimpangan
Kondisi Saat Ini (2018)	5,27%*	9,82%	5,13%	0,389
Sasaran dalam RKP 2019	5,2-5,6%	8,5-9,5%	4,8-5,2%	0,38-0,39
Sasaran dalam RPJPN 2005-2025	4,5-5,5%**	≤5%	≤5%	0,36
Proyeksi Baseline SDGs 2024	4,2 %***	8,21%	5,02%	0,387
Sasaran Dalam RPJMN 2020-2024****	5,7%	5,0-5,7%	4,0-4,6%	0,371-0,373

Sumber: Bappenas, 2018

Keterangan:

*) Kuartal II 2018

**) Tertulis: setara negara berpendapatan menengah

***) Laju pertumbuhan PDB per kapita

****) Skenario moderat

Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 disajikan secara komprehensif pada gambar berikut ini.



Gambar 4.1 Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024

**f. Penelaahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021**

Visi Pembangunan dalam lima tahun kedepan yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih yang ditetapkan sebagai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan) Tahun 2016 – 2021 yaitu: **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”**.

Visi “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing” tersebut mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil). Kondisi Pembangunan yang mapan di suatu daerah/wilayah, adalah pembangunan yang dapat memenuhi keperluan generasi masa kini tanpa mengabaikan untuk generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. dengan demikian pembangunan yang mapan terkait dengan penekanan pada daya tampung dan daya dukung. Dengan demikian definisi di atas dapat dilihat dari faktor lingkungan, masa depan dan keadilan, sedangkan aspek-aspek kemapanan tersebut dapat dilihat dari segi: Kemapanan Ekonomi, kemapanan Ekologi, Kemapanan Sosial, Kemapanan Budaya, Kemapanan Pertanian, Kemapanan dalam berpolitik, Kemapanan dalam kehidupan beragama, dan sebagainya. Diharapkan Kemandirian dan keterdepanan dimaksud, akhirnya akan berdampak terhadap perwujudan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Visi tersebut secara umum mengandung pengertian **“Pembangunan Biru (*blue development*) Menuju Kedaulatan dan Kemapanan Berkelanjutan”**, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pembangunan Biru (*blue development*) adalah pembangunan yang memperhatikan keberadaan sumberdaya, mempertahankan keragaman (*biodiversity*), inovasi dan penciptaan lapangan kerja sekaligus melakukan upaya-upaya penyelamatan lingkungan (konservasi) dan meningkatkan jasa-jasa lingkungan.
2. Ekonomi biru (*blue economy*) yaitu sistem ekonomi berbasis inovasi yang memanfaatkan SDA secara produktif dan efisien, tidak menghasilkan limbah dan emisi; dan pada saat yang sama mampu



menciptakan lapangan kerja, menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan tidak memerlukan biaya tinggi.

3. Kedaulatan dan Kemampuan Berkelanjutan; yaitu Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang memperhatikan keseimbangan antara pencapaian aspek pertumbuhan ekonomi (*economy growth*), sekaligus memperhatikan pemerataan kesejahteraan (*social equity*) dan kelestarian dan keberlanjutan lingkungan (*ecological sustainability*) yang dikenal dengan *the living triangle*.
4. Ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi daerah sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan dan energi yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Berdasarkan visi dijelaskan sebelumnya, maka ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021 sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang agamis, sehat, cerdas dan terampil;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang professional dan berorientasi pada pelayanan publik;
3. Memantapkan kondisi sosial budaya daerah yang berbasis kearifan lokal;
4. Mengembangkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pengembangan ekonomi dan sosial budaya; dan
5. Mengembangkan daya saing ekonomi daerah yang berbasis sumberdaya lokal, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Dalam mendukung perwujudan visi dan misi diatas, ditetapkan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Agar Pembangunan Kalimantan Selatan dalam 5 tahun kedepan dapat lebih terarah dan lebih fokus, maka ditetapkan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah yang akan menjadi acuan, yaitu:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. Kalsel Cerdas
2. Kalsel Sehat
3. Kalsel Terampil
4. Kalsel Beriman
5. Kalsel Dengan Pemda Berkinerja Baik
6. Kalsel Berbudaya
7. Kalsel Aman
8. Kalsel Menuju Tuan Rumah PON
9. Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas
10. Kalsel Sentra Pangan
11. Kalsel Menuju Salah Satu Destinasi Wisata Nasional
12. Kalsel Menuju Daerah Industri, Perdagangan Dan Jasa
13. Kalsel Menuju Lingkungan Berkualitas

4.2.2 Kebijakan Pembangunan Daerah Lainnya

Di dalam rangka penyelarasan pelaksanaan pembangunan antar daerah dalam Provinsi Kalimantan Selatan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Tapin meninjau kebijakan pembangunan daerah sekitarnya melalui dokumen RPJMD masing-masing kabupaten/kota. Berikut ini disajikan telaahan RPJMD beberapa kabupaten/kota tetangga Kabupaten Tapin.

Tabel 4.4 Telaahan RPJMD Daerah Sekitar Tapin

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
1	Kabupaten Barito Kuala	2017-2022	RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 masih dalam proses penetapan.
2	Kabupaten Banjar	2016-2021	Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera Dan Barokah
			Misi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial 3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

NO	NAMA DAERAH LAIN	PERIODE RPJMD	KEBIJAKAN TERKAIT
			dengan pendekatan bisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan 4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah 5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan amanah
3	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2014-2018	Visi: Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Sejahtera, Agamis Dan Produktif (SEHATI)
			Misi: 1. Meningkatkan Kehidupan Beragama. 2. Meningkatkan dan Mengembangkan Potensi Daerah. 3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat dan Pendapatan Daerah. 4. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi dan Informatika.

Sumber:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018.

4.2.3 Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tapin

a. RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin 2005-2025. Di dalam dokumen ini mengatur tentang rencana pembangunan selama 20 tahun dengan beberapa tahapan pembangunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 merupakan tahapan ketiga (2015-2019) dan keempat (2020-2025) pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025.

Berdasarkan Bab III RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, isu strategis yang perlu diatasi secara bertahap dan berkesinambungan dalam 20 tahun mendatang di Kabupaten Tapin, yaitu:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana;
2. Kelestarian sumber daya Alam dan lingkungan hidup;
3. Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
4. Optimalisasi pengembangan sektor industri unggulan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
5. Pengangguran dan ketenagakerjaan;
6. Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan;
7. Kualitas pembangunan manusia dilihat dari indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli;
8. Besarnya aspirasi pengalaman nilai dan norma agama dalam berbagai dimensi kehidupan pada tatanan sosial;
9. Peran serta masyarakat terhadap budaya daerah;
10. Kualitas kehidupan berdemokrasi dan berpolitik;
11. Peran serta pemerintah dan masyarakat terhadap penanganan masalah sosial;
12. Kuantitas dan kualitas jaringan infrastruktur wilayah;
13. Kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengairan dan sumberdaya air;
14. Kualitas birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
15. Kualitas profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
16. Kualitas pelayanan publik;
17. Optimalisasi pendelegasian kewenangan ke Kecamatan; dan
18. Penguatan otonomi desa dan keberdayaan tatanan masyarakat.

Visi Kabupaten Tapin 2005-2025, yaitu: **Tapin Yang Religius dan Sejahtera.**

Dalam mewujudkan visi, maka ditetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya



- 2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing
- 3) Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan
- 4) Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan
- 5) Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (*Good Governance*)

Perwujudan visi dan misi jangka panjang pembangunan daerah ditempuh dengan arah kebijakan pembangunan yang fokus per tahapan. Berikut ini disajikan arah kebijakan per periode/tahapan Kabupaten Tapin.



Gambar 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025



Tabel 4.5 Arah Kebijakan Tahap Ketiga dan Keempat RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025

MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
1. Mewujudkan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya	<p>Peningkatan Masyarakat Tapin yang Religius, Berakhlak dan Berbudaya:</p> <p>a. Peningkatan peran multipihak dalam pemenuhan kebutuhan sarana peribadahan</p> <p>b. Pendidikan agama mulai dari pembelajaran alquran anak usia dini hingga majelis ta'lim dan pengajian</p> <p>c. Pemeliharaan dan peningkatan toleransi kehidupan beragama</p> <p>d. Penyadaran serta keteladanan etika kerja, etika bisnis dan etika sosial yang berlandaskan pada kebijakan yang bersumber dari pemahaman dan pengamalan ajaran agama</p>	<p>Pada periode ini, momentum perubahan yang telah diakselerasi pada periode kedua dimanfaatkan untuk memantapkan pencapaian dalam kualitas manusia, namun prioritas-prioritas baru dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah serta landasan kebersamaan dan nafas keagamaan juga ditangani sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis. Fokus pembangunan pada tahap ini adalah memantapkan pembangunan SDM menjadi peningkatan kualitas manusia, dimana hasil dari pembangunan pendidikan dan kesehatan tidak hanya diarahkan bagi lahirnya SDM berkualitas guna mendukung kemajuan daerah, tetapi mulai bergeser pada makna lahirnya manusia berkualitas yang memiliki pilihan luas dalam kehidupannya. Peningkatan kualitas manusia pada periode ini diharapkan berjalan seiring dengan praktek demokrasi yang semakin substantif. Fokus lainnya adalah pemantapan sistem agribisnis</p>	<p>Periode ini merupakan momentum untuk pencapaian kualitas manusia dan memantapkan berbagai pencapaian dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan daya saing daerah dan landasan kebersamaan serta nafas keagamaan dalam tatanan sosial. Periode ini juga merupakan peletakan dasar sekaligus transisi untuk memasuki periode pembangunan jangka panjang berikutnya.</p> <p>Pada periode ini peningkatan kualitas manusia yang telah dicapai melalui tiga periode RPJM Daerah sebelumnya diorientasikan untuk terciptanya tatanan yang membuka ruang bagi warganya untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam kehidupannya serta menyuarkan secara demokratis pilihan-pilihan tersebut. Artinya, kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat telah mengalami akselerasi untuk</p>
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Tapin yang Berdaya Saing	<p>Peningkatan Sumber Daya Tapin yang Berdaya Saing:</p> <p>a. Pembangunan pendidikan diarahkan pada (1) menurunnya angka buta huruf secara signifikan, (2) meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar anak usia SD, SLTP dan SLTA, (3) meningkatnya kecakapan hidup remaja/pemuda putus sekolah, (4) meningkatnya kualitas guru, sarana-prasarana dan proses belajar-mengajar SD, SLTP dan SLTA; melalui (1) percepatan penghapusan buta huruf, (2) penuntasan wajib belajar bagi seluruh anak usia wajib belajar 12 tahun dan pencegahan putus sekolah, (3) pengembangan pusat kegiatan belajar masyarakat untuk kecakapan hidup (life</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>skills) dan kewirausahaan inovatif pemuda putus sekolah, dan (4) peningkatan kualitas guru, peningkatan kecukupan dan kualitas sarana-prasarana pendidikan, peningkatan kualitas proses belajar-mengajar, dan peningkatan pencapaian nilai dan kelulusan ujian nasional pada tingkat SD, SLTP dan SLTA, dengan prioritas pada wilayah dengan angka buta huruf dan putus sekolah yang tinggi, serta mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi.</p> <p>b. Pembangunan kesehatan dan keluarga berencana diarahkan pada (1) termanifestasikannya pola hidup, lingkungan hidup dan perilaku hidup sehat masyarakat dengan mengutamakan pencegahan dari pengobatan, (2) meningkatnya efektivitas pelayanan perawatan dan pengobatan penyakit, (3) menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan, (4) terkendalikannya pertumbuhan penduduk, (5) terpenuhinya kebutuhan peralatan, teknologi, obat-obatan, dokter dan paramedis, (6) meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, flu-burung dan sejenisnya serta potensi penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global; melalui (1) promosi hidup sehat, penyediaan air bersih, sanitasi lingkungan, dan perbaikan gizi</p>	<p>yang menghubungkan perkembangan ibukota kecamatan dengan desa-desa sekitarnya kearah terpenuhinya unsur-unsur sebagai kawasan agropolitan. Interkoneksi antara kegiatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan pada desa-desa dengan ibukota kecamatan sebagai terminal pemasaran hasil agribisnis dan pusat fasilitas serta sarana produksi bagi agribisnis, dan dimantapkan melalui dukungan infrastruktur wilayah dalam hal transportasi, komunikasi dan informasi, ketersediaan listrik dan air bersih serta mendorong kemajuan dalam inovasi teknologi baik budidaya maupun pengolahan hasil. Pada tahapan ini pula terbangun dan terpeliharanya kawasan rantau baru, terbangunnya kawasan margasari baru dan proses pengembangan pembangunan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin. Pencapaian kualitas manusia pada tahap ini direncanakan mencapai nilai IPM sekitar 77</p>	<p>pemanusiaan manusia itu sendiri, bukan hanya sekedar melahirkannya sebagai sumberdaya handal untuk perekonomian, perpolitikan atau sosial budaya, tetapi untuk kemanusiaan itu sendiri. Pada periode 2020-2025 ini, tatanan dengan manusia berkualitas secara individual, diharapkan didukung penuh oleh landasan kebersamaan dan nafas keagamaan pada tingkat struktur sosial, sehingga kesejahteraan mewujudkan sebagai bagian dari kemanusiaan dan dalam tatanan sosial yang baik. Program pembangunan dalam perekonomian yang sebelumnya difokuskan pada akselerasi agribisnis, pada periode ini difokuskan pada terbentuknya kawasan agropolitan. Program diarahkan untuk mensinergikan desa-desa agribisnis dengan ibukota kecamatan sehingga interkoneksi keduanya melahirkan kawasan agropolitan. Karakteristik program pada periode ini adalah pengkondisian</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>khususnya pada masyarakat miskin, wilayah pegunungan dan wilayah kumuh, (2) peningkatan efektivitas pelayanan kesehatan gratis/ jaminan kesehatan masyarakat dengan prioritas pada keluarga miskin disertai peningkatan kemampuan pelayanan dari institusi kesehatan beserta jaringannya, (3) peningkatan efektivitas peran sarana pelayanan kesehatan serta pemberdayaan posyandu dalam penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, serta pemantauan pertumbuhan balita, (4) revitalisasi gerakan keluarga berencana dan pelebagaan norma keluarga kecil dan sejahtera, (5) penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta SDM kesehatan, (6) pengembangan sistem antisipasi penyakit spesifik dan dampak kesehatan dari pemanasan global sesuai karakteristik wilayah Kabupaten Tapin.</p> <p>c. Penguatan daya beli masyarakat diarahkan untuk tersedianya alternatif pilihan masyarakat dalam mengakses barang/komoditas yang menjadi kebutuhan pokok dengan pendapatan yang layak dan harga yang terjangkau; melalui upaya penciptaan kondisi bagi meningkatnya pendapatan masyarakat, regulasi yang menjamin suplai barang/komoditas kebutuhan pokok masyarakat, intervensi pasar atas komoditas yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat, serta pengaturan yang ketat bagi berjalannya etika bisnis</p>	<p>dengan indikator pendidikan tercapainya wajib belajar 12 tahun dan peningkatan mutu pendidikan sedangkan untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 68 tahun dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan dan peningkatan mutu kesehatan Pada periode ini kontribusi sektor primer pertanian terhadap struktur perkonomian diproyeksikan dibawah 10,55 persen, sementara sektor manufaktur meningkat hingga diatas 12,99 persen dan sektor keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 21,70 persen. Pergeseran ini diharapkan diikuti pula oleh pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor pertanian diharapkan menampung dibawah 40 persen dan dua gabungan sektor lainnya diatas 60 persen. Nilai PDRB ADHB pada akhir tahap ini diproyeksi diatas Rp. 7.549.606.309.000 dengan pertumbuhan rata-rata 13,49 persen, nilai PDRB perkapita diatas Rp.7.932.340 dengan rata-rata pertumbuhan 2,03 persen dan pertumbuhan ekonomi daerah sekitar 4,66</p>	<p>peradaban kota ditengah lingkungan pertanian pada ibukota-ibukota kecamatan dimana ibukota kabupaten merupakan sentrum dari peradaban tersebut. Hal ini didukung dengan program-program yang memendorong kemajuan masyarakat dalam bentuk olahraga dan kepemudaan, apresiasi seni-budaya, apresiasi pengetahuan/intelektualitas. Program pembangunan dalam pelayanan diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan sehingga indeks kepuasan masyarakat dapat mencapai titik maksimal. Program peningkatan kualitas SDM pemerintah diarahkan pada terwujudnya pelayan masyarakat yang memadukan teknokratisme dengan humanisme. Program penguatan kelembagaan pemerintah diarahkan pada terposisikannya birokrasi dari Kabupaten hingga desa dan kelurahan sebagai teladan manifestasi akuntabilitas dan transparansi serta membangun kebersamaan dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	pengusaha kebutuhan pokok.	<p>persen. Angka kemiskinan diharapkan dipertahankan dibawah 5 persen dan angka pengangguran dibawah 6 persen.</p> <p>Pelayanan umum pada periode ini ditargetkan semakin prima membenahi administrasi kependudukan ditandai rasio penduduk yang memiliki KTP per satuan penduduk semakin tinggi. Selain itu pendidikan gratis diharapkan semakin efektif meningkatkan angka partisipasi sekolah dan menekan angka putus sekolah orang miskin, begitu pula layanan kesehatan gratis diharapkan efektif menjangkau perawatan orang miskin. Terkait dengan daya saing daerah, pelayanan investasi diharapkan terakselerasi khususnya dengan pemanfaatan potensi pertambangan.</p> <p>Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan pada periode ini diharapkan telah mewujudkan modal sosial yang kuat bagi terwujudnya Kabupaten Tapin yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. Modal sosial tersebut ditandai oleh tingginya saling-percaya, kerjasama timbal-balik</p>	<p>dunia usaha dalam mengusung kemajuan agropolitan bagi kemajuan Kabupaten Tapin.</p> <p>Program pembangunan dalam daya saing daerah diarahkan pada terciptanya kualitas lingkungan hidup yang memiliki daya adaptasi tinggi terhadap berbagai goncangan ekologis khususnya dampak pemanasan global. Keterpeliharaan ruang terbuka hijau serta keseimbangan proporsi kawasan budidaya dengan kawasan lindung, ditata melalui implementasi program yang tetap konsisten dan patuh pada arahan RTRW. Dalam hal sarana dan prasarana transportasi darat, pelabuhan, perhubungan, komunikasi-informasi serta kelistrikan dan energi, program-program pada tahapan ini lebih bersifat pemeliharaan.</p> <p>Program yang terkait dengan landasan kebersamaan difokuskan pada signifikansi upaya revitalisasi, reaktualisasi dan manifestasi</p>
3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan	<p>Peningkatan Perekonomian Daerah yang Sejahtera, Mandiri dan Berkelanjutan:</p> <p>a. Pengembangan struktur perekonomian diarahkan untuk berlangsungnya transformasi struktur perekonomian sehingga menjelang tahun 2025 kontribusi sektor primer (pertanian secara umum) terus berkurang dan semakin berimbang dengan sektor sekunder (industri pengolahan hasil produk primer) dan tersier (jasa perdagangan dan keuangan serta informasi dan komunikasi) baik dalam nilai PDRB maupun dalam penyerapan tenaga kerja; melalui perbaikan pada kegiatan agronomis kearah peningkatan produksi yang ramah lingkungan serta akselerasi pengembangan rantai nilai produk primer dalam kerangka agribisnis, agroindustri secara terpadu dan bersimbiosis dengan pengembangan sektor industri dan sektor jasa dengan berbasis pada interkoneksi desa-desa dengan ibu kota kecamatan.</p> <p>b. Pembangunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan diarahkan pada meningkatnya produksi dan produktivitas dengan rantai nilai yang menekankan kualitas dari segi ekologis/organik, rasa dan aroma, nilai</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>tambah pengolahan hasil, serta efektivitas dan efisiensi usahatani dengan didukung oleh kemampuan teknis-agronomis dan kekuatan kelembagaan pada petani guna tercapainya pendapatan rumah tangga petani yang tinggi, perdagangan komoditas yang memantapkan sistem agrisbisnis dan ketahanan pangan secara berkelanjutan; melalui (1) optimalisasi penggunaan lahan, penggunaan bibit bermutu yang adaptif terhadap perubahan iklim, inovasi pemupukan dan pengendalian hama kearah praktek organik, perbaikan jaringan irigasi usahatani dan jaringan irigasi desa, pompanisasi dan pembangunan embung, peningkatan kualitas pengolahan hasil dan pengemasan, pengembangan jaringan pemasaran, serta pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani, (2) penjaminan ketersediaan pangan, pengembangan diversifikasi pangan, perlindungan keamanan pangan dan fasilitasi kemandirian pangan tingkat desa/kelurahan, (3) pemberdayaan SDM dan kelembagaan penyuluhan; dalam kerangka untuk berkembangnya sistem agribisnis dan agroindustri yang efektif-efisien serta mendukung simbiosis desa-desa dengan ibukota kecamatan dalam suatu sistem konektivitas.</p> <p>c. Pembangunan peternakan diarahkan pada (1) meningkatnya populasi ternak besar yang perkembangannya bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan dalam</p>	<p>dan kepatuhan kepada norma diantara kelompok, golongan dan lapisan dalam masyarakat, dunia pemerintah dan dunia usaha disertai dengan sinergitas diantara ketiga pihak secara transparan, berakuntabilitas dan saling memberdayakan. Berbagai pencapaian tersebut diharapkan tetap bernafaskan keagamaan. Pada periode ini pencapaian dalam keterpenuhan sarana peribadahan, pendidikan keagamaan, penyelenggaraan ibadah, manifestasi ajaran agama sebagai etos kerja, serta manifestasi ajaran agama dalam perilaku akhlak mulia, secara kualitatif diharapkan semakin meningkat dibanding periode RPJM Daerah sebelumnya.</p>	<p>kearifan lokal, tata nilai dan norma serta adat-istiadat setempat dalam menjadikan potensi pariwisata sekaligus bagian dari upaya merespons secara kreatif unsur budaya yang datang dari luar akibat keterbukaan informasi dan komunikasi. Bersamaan dengan itu interkoneksitas internal antar unsur tatanan Kabupaten Tapin dan interkoneksitas eksternalnya pada level provinsi dan nasional diupayakan semakin intensif dan meluas guna menunjang keberadaan dari jalinan titik-titik agropolitan. Program terkait dengan keagamaan difokuskan pada pemahaman dan pengamalan agama yang semakin terpatrikan dalam etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum. Manifestasinya adalah berkembangnya kualitas akhlak mulia setiap unsur tatanan Kabupaten Tapin. Pencapaian IPM pada periode 2020-2025 diproyeksikan sekitar 79 dengan indikator pendidikan tercapainya</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>mewujudkan kesejahteraan peternak, kemajuan sistem agribisnis; melalui optimalisasi hasil inseminasi buatan dan kawin alami, penyediaan bibit dan pejantan yang memenuhi standar teknis serta berkelanjutan, fasilitasi pemantauan, pengawasan dan penanganan penyakit ternak, dukungan regulasi dan sumberdaya bagi pengembangan lahan penggembalaan, pembinaan teknologi, pengembangan kelembagaan yang mengakselerasi keterlibatan swasta, serta dukungan sarana/prasarana, (2) meningkatnya produksi ternak unggas dan kesejahteraan peternak unggas; melalui dukungan kelembagaan yang menjamin perkembangan inovasi dan relasi saling memberdayakan antar pelaku dalam agribisnis peternakan unggas.</p> <p>d. Pembangunan perikanan diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan budi daya perikanan dalam dukungan peralatan dan perahu penangkapan yang memungkinkan jangkauan penangkapan yang lebih luas serta meningkatnya produksi budidaya tambak dengan senantiasa memperhatikan keberlanjutan produksi secara ekologis; melalui (1) modernisasi teknologi penangkapan dan akses sarana penangkapan, (2) penguatan kelembagaan masyarakat budi daya ikan kearah pengembangan inovasi, (3) dukungan bagi inovasi berkelanjutan dalam budidaya tambak bagi ketersediaan bibit, teknologi budidaya, pola tebar, pengaturan ruang,</p>		<p>wajib belajar 12 tahun dengan meningkatnya mutu pendidikan dan kemudahan akses pendidikan bagi masyarakat untuk dibidang kesehatan meningkatnya usia harapan hidup mencapai 70 tahun dan kemudahan akses kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pada indikator pendidikan lain yakni rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah, rasio guru dan murid, prestasi ujian nasional dan persentase tamatan perguruan tinggi terhadap total penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan. dan untuk indikator kesehatan lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, dan tingkat pertumbuhan penduduk diharapkan terus menurun dan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Kalimantan Selatan. Begitu pula dengan rasio posyandu per satuan balita, rasio</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>serta pengendalian penyakit.</p> <p>e. Pengembangan industri, usaha kecil, dan usaha menengah diarahkan pada peningkatan produksi dan penyerapan tenaga kerja terkait posisinya sebagai sektor tujuan dalam transformasi perekonomian; melalui (1) pengembangan peluang dan dorongan realisasi investasi bagi pemilik modal dan pelaku usaha, (2) peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan kelembagaan pelaku usaha untuk menghasilkan produk unggul spesifik, (3) pengembangan jaringan pasar dengan orientasi pada pemerataan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan sub-sub wilayah kearah agroindustri</p> <p>f. Pemanfaatan potensi pertambangan diarahkan pada eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi dengan mempertimbangkan secara hati-hati konsistensi dengan RTRW Kabupaten Tapin dan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, hubungannya dengan kelestarian ekologi dan sumberdaya alam, dan dampaknya pada komunitas lokal dimana potensi tersebut berada; melalui pelibatan peran serta investasi swasta dibawah kordinasi dan pengawasan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.</p> <p>g. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan, dan kerentanan untuk miskin; melalui (1) intervensi langsung atau perlindungan</p>		<p>puskesmas/poliklinik/pustu per satuan penduduk, rasio rumah sakit per satuan penduduk, rasio dokter per satuan penduduk, rasio tenaga medis per satuan penduduk ditargetkan berada pada posisi sejajar dengan kabupaten dan kota yang maju di Provinsi Kalimantan Selatan.</p> <p>Pencapaian kesejahteraan pada periode 2020-2025 ditandai oleh struktur perekonomian dimana diharapkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dibawah 10,72 persen, manufaktur diatas 12,19 persen dan keuangan, persewaan & jasa-jasa diatas 24,28 persen; nilai PDRB ADHB sekitar Rp. 14.764.180.006.000 dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut sekitar 14,36 persen; nilai PDRB perkapita ADHK diproyeksikan diatas Rp.9.365.050, dengan pertumbuhan rata-rata pada periode tersebut diatas 3,38 persen; dan pertumbuhan ekonomi sekitar 4,48 persen.</p> <p>Pencapaian dalam pelayanan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>sosial dalam pemenuhan hak-hak dasar pada level rumah tangga miskin, (2) pemberdayaan secara partisipatoris pada level komunitas sebagai wadah bagi rumah tangga miskin dalam mengakses sumberdaya dan penciptaan pendapatan dalam mekanisme kolektivitas, (3) pengembangan usaha kecil dan menengah yang menempatkan rumah tangga miskin sebagai pelaku dan penerima manfaat, serta (4) memastikan efek pertumbuhan ekonomi bagi penyerapan tenaga kerja dari rumah tangga miskin; dengan memperhatikan secara cermat karakteristik rumah tangga dan kespesifikan wilayah dari kemiskinan; dalam suatu kebijakan anggaran yang menunjukkan keberpihakan pada masyarakat miskin.</p> <p>h. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan untuk semakin tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani mulai dari penampungan hingga pemberdayaan sesuai tingkat keparahan masalah kesejahteraan sosial yang disandang; melalui (1) penyediaan/dukungan sarana dan prasarana penanganan pada penampungan, (2) penyadaran, pembinaan, pengasuhan dan pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta (3) mendorong kedermawanan sosial dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penanganan penyandang masalah</p>		<p>pada periode tersebut ditargetkan menyajikan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, dimana pelayanan pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan dan administrasi perizinan memenuhi standar pelayanan prima. SDM dan kelembagaan pemerintah pada periode ini diproyeksikan berada dalam kinerja optimum dalam menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Pencapaian dalam daya saing daerah diproyeksikan pada tertatanya ruang wilayah secara konsisten dengan RTRW, dimana proporsi kawasan lindung dan kawasan budidaya terpelihara keseimbangan proporsionalnya, serta kawasan perkotaan, kawasan industri, serta kawasan rawan banjir dan rawan kekeringan terkelola dengan baik. Pada tahap ini, infrastruktur wilayah mencapai optimalisasi kemanfaatannya dalam mendorong daya saing wilayah, dimana</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>kesejahteraan sosial.</p> <p>i. Pembangunan pemuda, olah raga, seni-budaya dan kepariwisataan diarahkan pada berkembangnya kegiatan kepemudaan untuk pematangan kepribadian dan keluasan wawasan, kegiatan olah raga untuk prestasi maupun kesehatan, meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah serta teraktulisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli, berkembangnya destinasi dan even wisata; melalui (1) dukungan sarana/prasarana kepemudaan, olah raga dan kesenian serta pariwisata, (2) pembinaan kelompok/organisasi kepemudaan, olah raga dan kesenian, (3) pelaksanaan even dan kompetisi bagi pengembangan sportivitas dan prestasi; (4) penyelenggaraan even pengenalan dan pelestarian karya budaya, situs budaya dan pengetahuan asli bagi pariwisata.</p> <p>j. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diarahkan pada berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan serta berkurangnya kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak dengan tetap berlandaskan pada tata nilai dan norma yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat; melalui (1) pengarusutamaan gender dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi pembangunan, (2) pengembangan sistem</p>		<p>sarana/prasarana transportasi, perhubungan, komunikasi dan informasi, serta energi dan ketenagalistrikan optimal mendukung fungsi-fungsi bagi kemandirian wilayah. Pada tahapan ini pula Kabupaten Tapin memiliki tiga kawasan strategis yaitu kawasan rantau baru, kawasan margasari baru dan binuang baru sebagai kawasan penting yang tentunya akan memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan pembangunan manusia di Kabupaten Tapin. Pencapaian dalam kebersamaan antar unsur tatanan daerah diproyeksikan mewujudkan modal sosial yang tinggi bagi lancarnya upaya pembangunan. Adat-istiadat, tata nilai dan norma setempat serta kearifan-kearifan lokal, diprediksikan teraktualisasikan dengan baik dalam berperan sebagai acuan kehidupan secara umum. Pencapaian dalam hal keagamaan pada fase ini diproyeksikan mewujudkan</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>rekrutmen dan pencapaian karir pro-gender, (3) pembukaan ruang partisipasi politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang pro-gender, (4) pemihakan dan bantuan kepada perempuan kepala rumah tangga, (5) regulasi dan perlindungan bagi kekerasan terhadap anak.</p> <p>k. Pembangunan koperasi diarahkan pada berkembangnya koperasi sebagai bagian dari gerakan sosial masyarakat dan menempatkannya sebagai soko-guru perekonomian yang mengandalkan kerjasama dan kolektivisme untuk bersinergi dengan lembaga perusahaan yang mengandalkan persaingan dan individualisme dalam perkembangan perekonomian daerah; melalui (1) pemantapan ideologi berkoperasi, (2) pemberdayaan SDM dan kelembagaan koperasi, (3) penguatan teknologi dan manajemen koperasi, (4) penguatan jaringan koperasi sebagai gerakan sosial mandiri khususnya pada komunitas petani, peternak, nelayan dan pelaku UKM.</p> <p>l. Pengembangan iklim berinvestasi diarahkan pada berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam negeri dan asing untuk perkembangan sektor-sektor perekonomian; melalui (1) keterlibatan pemerintah dan masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan, (2) ketersediaan fasilitas dan sarana/prasarana, kemudahan perizinan investasi, dan regulasi yang memudahkan</p>		<p>rasio sarana peribadahan per satuan penduduk yang tinggi, pengamalan agama semakin efektif dalam berfungsi mewujudkan etika kerja, etika usaha, etika birokrasi dan etika kehidupan secara umum.</p>



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	investasi.		
4. Mewujudkan Ketersediaan Infrastruktur di Berbagai Bidang dan Kawasan	<p>Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur Diberbagai Bidang dan Kawasan:</p> <p>a. Pengembangan sarana dan prasarana bagi aksesibilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan bagi angkutan dan perlintasan orang dan barang yang memenuhi tuntutan akselerasi kemajuan wilayah; melalui pengembangan moda transportasi darat dan sarananya yang seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi wilayah serta dukungan bagi percepatan optimalisasi dan efektivitas.</p> <p>b. Pengembangan fasilitas wilayah diarahkan pada terpenuhinya fasilitas yang bisa mengakselerasi pertumbuhan dan transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah; melalui dukungan dan fasilitasi bagi ketersediaan bank, ketersediaan energi dan listrik, ketersediaan air bersih, ketersediaan telekomunikasi dan informatika, ketersediaan restoran dan hotel dengan prioritas pada ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, selanjutnya menjangkau desa-desa sesuai tingkat perkembangannya.</p> <p>c. Pemanfaatan ruang diarahkan pada terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya, berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri,</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	dan kawasan strategis yang proporsional dalam akselerasi kemajuan wilayah, serta tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan pada tingkat yang menjamin keselamatan masyarakat; melalui pemanfaatan ruang yang konsisten dan patuh pada arahan RTRW serta terakselerasi dalam memenuhi tuntutan kebutuhan daerah.		
5. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>)	<p>Peningkatan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa (<i>Good Governance</i>):</p> <p>a. Perencanaan, implementasi, evaluasi dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan diarahkan pada tercapainya efektivitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan dengan dukungan sistem administrasi dan keuangan yang memenuhi kaidah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi; melalui (1) dukungan legislasi dan regulasi yang memberi kerangka legal, (2) peningkatan kapabilitas SDM secara kontinyu sesuai tuntutan profesionalisme, (3) pemberlakuan sistem dan prosedur secara kontinyu sesuai tuntutan kebutuhan, dan (4) pemberian teladan dan kepemimpinan.</p> <p>b. Peningkatan kualitas pelayanan umum diarahkan pada berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektivitas, efisiensi dan kepuasan konsumen; melalui (1) pengembangan sistem pelayanan terpadu, (2) optimalisasi dalam aplikasi teknologi informasi elektronika dalam pelayanan, dan (3) penerapan standar</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>operasional dalam penyelenggaraan pelayanan prima.</p> <p>c. Pengembangan SDM pemerintah diarahkan untuk meningkatnya kapasitas secara kontinyu dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan guna mengakselerasi pencapaian kinerja pada tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan dinamika lingkungan strategis; melalui (1) pengkondisian organisasi pembelajar, (2) peningkatan jenjang pendidikan formal, serta (3) pendidikan dan pelatihan yang menunjang langsung pada perwujudan kompetensi.</p> <p>d. Pengembangan organisasi dan kelembagaan pemerintah diarahkan pada tercapainya kapasitas yang senantiasa bersesuaian dengan tuntutan perwujudan pemerintahan yang baik dan relasi saling memberdayakan dengan kelembagaan masyarakat dan kelembagaan swasta; melalui (1) penataan struktur organisasi yang fungsional, (2) peneladanan kepemimpinan, (3) penanaman nilai dan norma profesionalisme, (4) perwujudan tatakelola yang memanasifestasikan akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, serta (5) pendelegasian kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>e. Pemeliharaan ketertiban dan keamanan serta kepatuhan pada hukum diarahkan pada semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan kepada</p>		



MISI	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	TAHAPAN PEMBANGUNAN	
		KETIGA (2015-2019)	KEEMPAT (2020-2025)
	<p>hukum sehingga angka kriminalitas terus berkurang, pertentangan dan konflik terjaga pada tingkat yang tetap memelihara kohesi sosial, serta Kabupaten Tapin senantiasa tercitrakan sebagai daerah yang aman dan damai; melalui (1) penyadaran hukum dan keamanan, (2) mendorong masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan secara swadaya, (3) peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan serta peranan satuan polisi pamong praja dan aparat penegak hukum lainnya dengan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penanganan kejadian-kejadian konflik dan gangguan ketertiban/keamanan.</p>		



b. RTRW Kabupaten Tapin 2014-2034

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034 disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2014. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin 2014-2034, kebijakan penataan ruang wilayah daerah terdiri atas:

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhirarki;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah;
- c. peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan;
- d. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung;
- e. pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat;
- f. pengembangan wisata berbasis lingkungan;
- g. pengembangan kawasan strategis kabupaten; dan
- h. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara.

Strategi untuk peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah terdiri atas:

- a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya;
- b. menetapkan kegiatan utama pada pusat-pusat kegiatan agar masing-masing dapat berkembang sesuai potensinya;
- c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan eksisting;
- d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal;
- e. menjaga interkoneksi antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antarkawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya;
- f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya;



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata;
- h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang; dan
- i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan hirarki pelayanannya.

Strategi untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana terdiri atas:

- a. meningkatnya kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat;
- b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis;
- c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten.
- d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang masih terisolir;
- e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa-desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan;
- f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru;
- g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air;
- h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah; dan
- i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan.

Strategi untuk peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan terdiri atas:

- a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek

**RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023**

- pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
- b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
 - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian.

Strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung terdiri atas:

- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
- b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
- d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya;
- e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan;
- f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan legal formal otonom dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat;
- h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan;
- i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
- k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana;
- l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung;
- m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung; dan
- n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan.

Strategi pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)/pertambangan rakyat terdiri atas:

- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah;
- b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
- c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah;
- d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat;
- e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang; dan



- f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang.

Strategi untuk pengembangan wisata berbasis lingkungan terdiri atas:

- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas;
- b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata;
- c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata;
- d. melakukan diversifikasi program dan produk wisata;
- e. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal;
- f. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan; dan
- g. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal.

Strategi untuk pengembangan kawasan strategis kabupaten terdiri atas:

- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten;
- b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah; dan
- c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis.

Strategi untuk peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara terdiri atas:

- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan TNI.



c. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD 2018-2023

KLHS RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Tapin yang telah dilakukan, disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1.1.1 Berdasarkan hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Tapin hanya melaksanakan 16 tujuan yang terbagi dalam 220 indikator, yaitu :

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin dan sudah mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu : pilar sosial 37, ekonomi 6, lingkungan 2, hukum dan tata kelola 12.
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 17, pilar ekonomi 4, pilar lingkungan 2 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
3. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 0, pilar ekonomi 4, pilar lingkungan 0 dan pilar hukum, tata kelola adalah 0.
4. Indikator TPB yang belum dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin tetapi tidak ada data sehingga belum mencapai target nasional berdasarkan 4 pilar pembangunan yaitu pilar sosial 62, pilar ekonomi 40, pilar lingkungan 26 serta pilar hukum dan tata kelola adalah 37.

1.1.2 Dari hasil FGD para pemangku kepentingan diperoleh isu strategis pilar sosial, ekonomi dan pilar lingkungan sejumlah 31 isu strategis



dan 6 isu prioritas, sedangkan isu sesuai TPB prioritas sebanyak 6 sebagai berikut :

1. Nomor TPB 1 : Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Nomor TPB 3 : Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia.
3. Nomor TPB 4 : Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua.
4. Nomor TPB 6 : Menjamin Ketersediaan dan Pengelolaan Air Bersih serta Sanitasi layak yang Berkelanjutan.
5. Nomor TPB 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
6. Nomor TPB 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi.
7. Nomor TPB 11: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (pencemaran lingkungan)
8. Nomor TPB 12 : Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan; termasuk pencemaran lingkungan yang disebabkan karena lahan/hutan gambut dan kebakaran hutan dan lahan.
9. Nomor TPB 15: Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (pencemaran lingkungan).

1.1.3 Berdasarkan kategori pencapaian TPB diperoleh sebagai berikut :



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1. OPD yang sudah melaksanakan dan sudah mencapai target nasional sebanyak 14 OPD dengan total 28 indikator.
2. OPD yang sudah melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 7 OPD dengan total 23 indikator.
3. OPD yang belum melaksanakan dan belum mencapai target nasional sebanyak 2 OPD dengan total 4 indikator
4. OPD yang datanya belum tersedia sebanyak 21 OPD dengan total 165 indikator.

1.1.4 Hasil perumusan skenario pencapaian TPB untuk 10 indikator yang terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan 22 indikator yang tidak terkait langsung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup perlu adanya upaya tambahan untuk pencapaian TPB.

Berdasarkan hasil perumusan skenario pencapaian indikator TPB, maka direkomendasikan indikator TPB dan target berupa Program dan Kegiatan yang akan diintegrasikan kedalam dokumen RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023, adapun indikator dan targetnya disajikan pada Tabel 4.5.



Tabel 4.6

Permasalahan, Isu dan Alternatif Skenario KLHS RPJMD 2018 – 2023 Kabupaten Tapin

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang terkait langsung DDDT-LH				
1	1.4.1.(d)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Meningkat 100 %	Perlu upaya tambahan
2	1.4.1.(e)	Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Menjadi 100 %	Perlu upaya tambahan
3	6.2.1.(c)	Indikator jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	menjadi 45.000	Perlu upaya tambahan
4	6.2.1.(d)	Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	meningkat	Perlu upaya tambahan



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

No	Kode Indikator	Indikator TPB	Target PEPRES 59	Skenario
Indikator yang tidak terkait langsung DDDT-LH				
1	1.3.1.(a)	Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Meningkat menjadi 100%	Perlu upaya tambahan
2	1.3.1.(c)	Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
3	1.3.1.(d)	Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan	Menurunkan	Perlu upaya tambahan
4	1.4.1.(h)	Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	meningkat menjadi 82,2%	Perlu upaya tambahan
5	2.1.1.(a)	Indikator Prevalensi Kekurangan Gizi (underweight) pada Anak Balita	Menurun	Perlu upaya tambahan
6	2.2.2.(c)	Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Meningkat menjadi 92,5%	Perlu upaya tambahan
7	3.1.2.(a)	Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	meningkat menjadi 85%	Perlu upaya tambahan
8	3.4.1.(a)	Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun	menurun 5,4%.	Perlu upaya tambahan
9	3.7.1.(b)	Angka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Cara Modern	Meningkat menjadi 23,5%	Perlu upaya tambahan
10	3.8.2.(a)	Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	meningkat menjadi minimal 95%	Perlu upaya tambahan
11	4.1.1.(a)	Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	meningkat menjadi 84,2%	Perlu upaya tambahan
12	4.1.1.(b)	Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	meningkat menjadi 81%	Perlu upaya tambahan
13	4.1.1.(d)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	meningkat menjadi 114,09%	Perlu upaya tambahan
14	4.1.1.(e)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat	meningkat menjadi 106,94%	Perlu upaya tambahan
15	4.1.1.(g)	Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat	Perlu upaya tambahan
16	4.2.2.(a)	Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Meningkat menjadi 77,2	Perlu upaya



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

				tambahan
17	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal	Meningkat menjadi 51%	Perlu upaya tambahan
18	8.3.1.(b)	Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian	Meningkat	Perlu upaya tambahan
19	9.2.1.(a)	Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur	Meningkat	Perlu upaya tambahan



1. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Terkait DDTLH

1.1. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.2. Indikator Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
- c. Outcome/Program:
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.3. Indikator jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
 - Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai



- Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
 - Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif
 - Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa
- c. Outcome/Program:
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan
 - Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

1.4. Indikator Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
 - Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
 - Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik
 - Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif
 - Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa
- c. Outcome/Program:
- Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)
 - Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)
 - Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan
 - Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
 - Persentase cakupan area pelayanan (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
 - Dinas lingkungan hidup

2. Skenario dan Rekomendasi Indikator TPB yang Tidak Terkait DDTLH

2.1. Indikator Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan



Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.2. Indikator Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya
 - Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Sosial

2.3. Indikator Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS



- Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS
- c. Outcome/Program:
- Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
 - Persentase penyandang cacat fisik dan mental yang telah menerima jaminan sosial
 - Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya
 - Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Sosial

2.4. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.5. Indikator Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
 - Prevalensi balita gizi kurang (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Kesehatan



2.6. Indikator Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Terjaganya kemandirian pangan daerah
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kemandirian pangan
 - Peningkatan produksi dan ketersediaan pangan berkelanjutan
- c. Outcome/Program:
 - Program Ketersediaan Dan Distribusi Pangan
 - Ketersediaan Pangan Utama (Ton)
 - Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan
 - Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi (Skor)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Ketahanan Pangan

2.7. Indikator Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
 - Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.8. Indikator Persentase merokok pada penduduk umur ≤ 18 tahun

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:



- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
- Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
 - Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Persentase penyakit menular dan tidak menular yang ditangani (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Kesehatan

2.9. Indikator Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
- Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - Persentase Peningkatan Kepesertaan ber-KB (CPR) (%)
 - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - Persentase Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.10. Indikator Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas kesehatan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan



- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan
- c. Outcome/Program:
 - Program Bebas Berobat
 - Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin (%)
- d. Instansi pelaksana:
 - Dinas Kesehatan

2.11. Indikator Persentase SD/MI berakreditasi minimal B

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.12. Indikator Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan



2.13. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.14. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
 - Dinas Pendidikan

2.15. Indikator Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
 - Meningkatkan pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
 - Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:



- Program Pembinaan SD
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)
 - Program Pembinaan SMP
 - Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)
 - Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.16. Indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Meningkatnya pelayanan dan aksesibilitas pendidikan masyarakat
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat
 - Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan
- c. Outcome/Program:
- Program Pendidikan Anak Usia Dini
 - Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD
- d. Pelaksana Kegiatan :
- Dinas Pendidikan

2.17. Indikator Persentase tenaga kerja formal

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
 - Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro
 - Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro
 - Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah
- c. Outcome/Program:
- Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)
 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan



- Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
 - Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pertumbuhan Wirausaha Terlatih (%)
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian

2.18. Indikator Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian

Rekomendasi:

- a. Sasaran:
- Menurunnya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial
 - Meningkatnya produktivitas koperasi dan usaha mikro
- b. Strategi dan arah kebijakan:
- Percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan PMKS
 - Peningkatan pemberdayaan perempuan dan ekonomi keluarga
 - Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja
 - Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro
 - Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro
 - Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah
- c. Outcome/Program:
- Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
 - Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)
 - Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
 - Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin
 - Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)
 - Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
 - Pertumbuhan Wirausaha Terlatih (%)
 - Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)
- d. Instansi pelaksana:
- Dinas Tenaga Kerja
 - Dinas Perindustrian



2.19. Indikator Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur

Rekomendasi:

a. Sasaran:

- Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan infrastruktur dasar
- Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan irigasi untuk mendukung pengembangan pertanian

b. Strategi dan arah kebijakan:

- Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai
- Peningkatan kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan
- Optimalisasi dukungan infrastruktur bagi pembangunan pertanian
- Meningkatkan cakupan layanan irigasi untuk pertanian

c. Outcome/Program:

- Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan
- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik/ sedang (%)
- Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan
- Persentase panjang Jalan dan jembatan Kabupaten dalam kondisi baik (%)
- Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.
- Persentase sawah yang terlayani Jaringan Irigasi (%)

d. Instansi pelaksana:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



4.2.4 Penetapan Isu Strategis

Telaahan yang dilakukan dari aspek internal maupun eksternal sebagaimana diuraikan di subbab sebelumnya, memberikan masukan bagi perumusan isu strategis Kabupaten Tapin. Mempertimbangkan permasalahan serta tantangan yang ada, maka dengan kekuatan dan memanfaatkan peluang, dirumuskan isu strategis untuk Kabupaten Tapin periode 2018-2023 sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat.
- 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya.
- 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing.
- 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
- 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyanggah kesejahteraan sosial.
- 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.
- 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
- 8) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima.



BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi dan Misi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Suatu pernyataan visi dibuat dengan menggunakan bahasa yang singkat, lugas, dan jelas serta memenuhi kriteria atau karakteristik visi sebagaimana telah dijelaskan di awal. Suatu pernyataan visi dapat berupa satu atau lebih pernyataan atau kalimat yang merangkum atau menggabungkan berbagai pokok visi terpilih. Dengan kesederhanaan kalimat, diupayakan visi merupakan satu kalimat dengan pokok-pokok visi dapat lebih dari satu.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini.



**Tabel 5.1. Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023**

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
<p>Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing</p>	<p>Tapin Yang Religius dan Sejahtera</p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyandang kesejahteraan social. 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 8) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	<p>BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS</p>



VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
	penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.			



Dengan penjelasan diatas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Tabel 5.2. Penyusunan Penjelasan Visi

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniah, akal sehat dan fitrah.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi kedalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 5.3. Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)

Berdasarkan proses perumsuan misi sebagaimana disajikan pada tabel diatas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018-2023, sebagai berikut:



1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
3. **Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
5. **Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).**

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023:

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
 - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
 - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
 - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.
 - e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.



2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

- a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
- b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
- c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
- d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

- a. **Infrastruktur** meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.
- b. **Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan** berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.



4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (*Good and Clean Government*).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.

Sasaran:

- a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
- b. Meningkatnya Sektor Pariwisata
- c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meningkatnya kemandirian pangan daerah
- f. Menurunnya Pengangguran

Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
- e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatnya investasi.

Sasaran: Meningkatnya keamanan daerah.

Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (*Good and Clean Government*)

Tujuan 5.1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas ASN
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel 5.4. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.



**Tabel 5.4. Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672	0.002677	0.002679	0.002685	0.002691	0.002691
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	1,141,745	1,141,745	1,176,000	1,211,280	1,274,615	1,285,045	1,323,595	1,323,595
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
Sasaan 1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
Sasaan 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
Sasaan 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
Sasaan 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD Target
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
Sasaan 5: Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85

Sumber: hasil analisis



BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan setiap tahun memberikan arahan konkrit bagi penentuan program-program pembangunan untuk menterjemahkan strategi yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian dan arti penting strategi dan arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, maka strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Tapin untuk periode lima tahun ke depan disajikan pada Tabel 6.1 berikut ini.



Tabel 6.1.
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Kabupaten Tapin 2018-2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN	
VISI: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS					
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					
1.1. Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	1.1.1 Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat	Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan.	2021-2023	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan	2021-2023	
	1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan	2021-2023	
			Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan	2021-2023	
	1.1.3 Meningkatnya daya beli Masyarakat		Pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat	2021-2023	
			1.1.4 Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Peningkatan pembinaan keagamaan	2021-2023
	1.1.5 Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender			Pengaruhutamaan gender dalam pembangunan	Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
			Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan		2021-2023
	Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup		2021-2023		
				Peningkatan perlindungan perempuan dan anak	2021-2023
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agribisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa					
2.1. Meningkatnya kemandirian dan	2.1.1. Meningkatnya Sektor Agribisnis	Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya	Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah	2019-2023	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN
VISI: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS				
pemerataan ekonomi daerah		saing		
	2.1.2. Meningkatnya Sektor Pariwisata		Peningkatan penataan destinasi/obyek dan promosi pariwisata	2019-2023
	2.1.3. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro	Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro	2019-2023
			Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah	2019-2023
	2.1.4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif	Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa	2019-2023
	2.1.5. Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Peningkatan kemandirian pangan	Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan berkelanjutan yang aman	2019-2023
	2.1.6. Menurunnya Kemiskinan	Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja	2019-2023
	2.1.7. Menurunnya Pengangguran		Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS	2019-2023
Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan				
3.1. Meningkatkan kualitas infrastruktur	3.1.1. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi	2019-2023
				2019-2023
				2019-2023
	3.1.2. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik	2019-2023
	3.1.3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi		Peningkatan cakupan layanan irigasi untuk pertanian	2019-2023
	3.1.4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik		Peningkatan kualitas gedung kantor dan gedung pelayanan publik	2019-2023

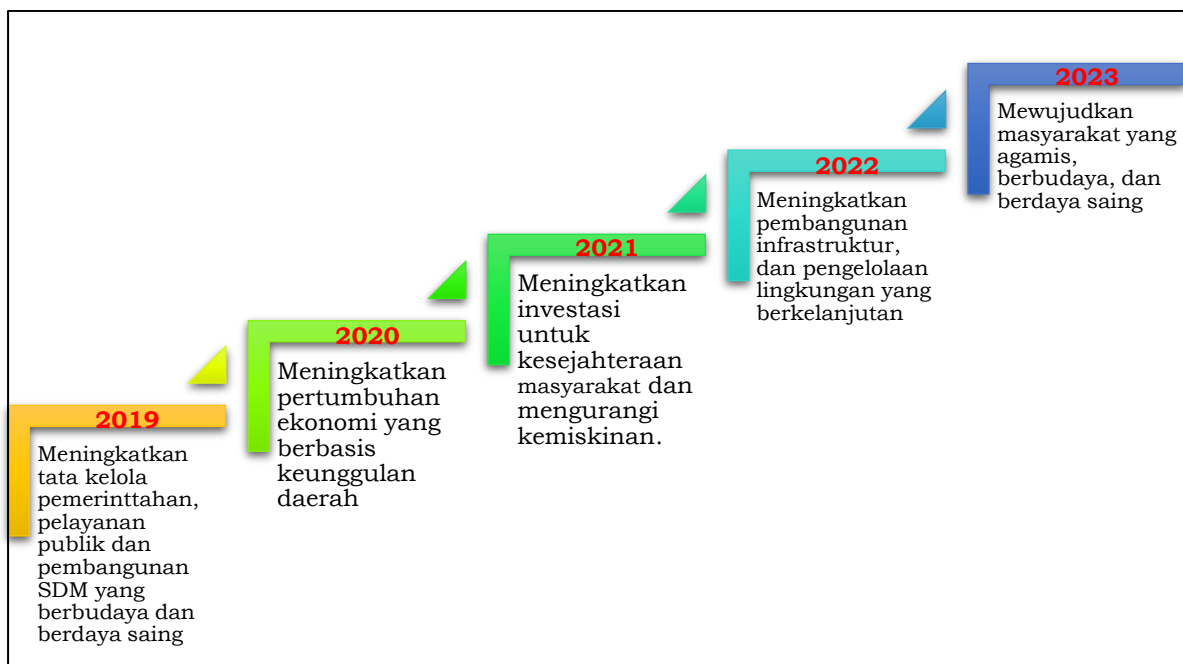


TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	TAHUN
VISI: BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS				
	3.1.5. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi		Peningkatan cakupan layanan jaringan komunikasi	2019-2023
3.2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	3.2.1. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan	Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan	2021-2023
			Penerapan instrumen pengendalian RTRW	2019-2023
			Peningkatan perumahan yang layak huni	2019-2023
	Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan			
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat				
4.1. Meningkatnya investasi	4.1.1. Meningkatnya keamanan daerah	Peningkatan daya tarik investasi daerah	Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha	2019-2023
			Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah	2019-2023
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (<i>Good and Clean Government</i>)				
5.1. Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	5.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima	Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah	2019-2022
			Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik	2019-2022
	Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan		2019-2022	
	Pengembangan kapasitas aparatur		2019-2022	
	5.1.2. Meningkatnya kualitas ASN			
	5.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat		Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	2019-2022



Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun fokus atau tema pembangunan tahunan Kabupaten Tapin untuk 5 (lima) tahun kedepan disajikan pada gambar di bawah.



Gambar 6.1. Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Tapin 2019-2023

6.2. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Dengan mempertimbangkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah, maka dipilih



beberapa program perangkat daerah untuk menjadi program pembangunan daerah.

Penyajian secara sistematis dari misi, tujuan dan sasaran hingga ke program pembangunan daerah untuk pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, ditampilkan pada Tabel 6.2. Program yang disajikan merupakan sekumpulan program prioritas pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

Lebih lanjut, program pembangunan daerah juga memuat program dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, maka dalam RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dimuat program untuk penerapan SPM. Hal ini disajikan pada Tabel 6.3.



Tabel 6.2
Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Misi 1: Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing					102,589,329,881		106,843,265,817		124,735,937,639		134,372,840,908		143,448,318,662		616,180,092,907	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	102,589,329,881	69.7	106,843,265,817	70.2	124,735,937,639	70.7	134,372,840,908	71.2	143,448,318,662	71.2	616,180,092,907	
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	30,228,456,500	8.3	31,640,440,253	8.72	36,949,628,011	9.15	39,477,305,991	9.61	42,244,182,891	9.61	180,540,013,646	
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1		12.7		13.34		13.74		14		14		
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672		0.002677		0.002679		0.002685		0.002691		0.002691		
Program:																
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	64	67	74	882,758,500	77	923,100,563	80	1,078,366,078	84	1,151,155,789	88	1,231,161,116	88	5,266,542,046	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	0	15	30		45		60		75		90		90		
Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	0,075	0,039	0,034	20,619,402,650	0,029	21,561,709,351	0,024	25,188,388,864	0,019	26,888,605,112	0,014	28,757,363,168	0,014	123,015,469,145	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	0,023	0,021	0,020		0,015		0,010		0,005		0,002		0,002		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	72	90	82		95		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	78	89	90		91		92		93		94		94		
Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	0,43	0,40	0,38	7,315,40 4,450	0,30	7,649,71 8,433	0,25	8,936,40 1,074	0,20	9,539,60 8,146	0	10,202,6 10,913	0	43,643,7 43,016	DINAS PENDIDIKAN
	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	1,29	1,31	1,12		1,01		0,72		0,33		0		0		
	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	62	63	70		80		90		95		100		100		
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	72,89	73,07	76,92		84,60		92,31		96,15		100		100		
Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	0,0049	0,0050	0,0051	752,533, 900	0,0053	786,924, 699	0,0055	919,285, 434	0,0057	981,337, 200	0,0059	1,049,54 0,136	0,0060	4,489,62 1,369	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)		7,69	19,20		30,70		42,30		57,60		76,90		76,90		
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	74	74	79	446,022, 000	84	466,405, 205	89	544,854, 561	94	581,632, 244	100	622,055, 685	100	2,660,96 9,695	DINAS PENDIDIKAN
	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	82,15	82,15	85,70		89,25		92,80		96,35		100		100		
Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	3,98		3,98	95,200,0 00	4,48	119,000, 000	4,97	148,750, 000	5,47	185,937, 500	5,97	232,421, 875	5,97	781,309, 375	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	30	33.33	100	117,135,000	100	133,582,000	50	133,582,000	33.33	149,030,000	25	149,030,000	25	682,359,000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	30	33.33	100		100		50		33.33		25		25		
	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	4.17	0	3.84		4.23		4.06		4.39		4.20		4.20		
Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	67,875,050,516	71.12	68,997,768,128	71.83	81,560,641,383	72.55	87,411,416,231	73.28	93,879,838,855	73.28	403,915,115,114	
Program:																
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	76,25	82,28	100	762,309,600	100	820,220,000	100	861,234,000	100	733,267,000	100	931,746,000	100	4,108,776,600	DINAS KESEHATAN
Program Bebas Berobat	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	79,54	95,89	100	13,069,000,000	100	18,069,000,000	100	23,069,000,000	100	23,412,500,000	100	23,412,500,000	100	101,032,000,000	DINAS KESEHATAN
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	58,13	89,72	100	40,798,000	82	716,080,000	86	733,580,000	90	751,080,000	92	766,580,000	92	3,008,118,000	DINAS KESEHATAN
Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	31,17	86,12	100	148,300,000	54	557,750,000	63	562,750,000	72	567,750,000	81	562,750,000	81	2,399,300,000	DINAS KESEHATAN
Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	78,04	92,14	43.00	335,185,000	47.00	624,885,000	50.00	641,725,000	55.00	659,405,000	60.00	667,925,000	60.00	2,929,125,000	DINAS KESEHATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	81,09	84,88	92,5	889,969,000	100	954,467,450	100	1,002,190,823	100	1,052,300,366	100	1,104,915,383	100	5,003,843,022	DINAS KESEHATAN
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	47,34	92,61	100	17,195,778,734	100	11,039,498,153	100	12,479,355,857	100	15,085,649,156	100	18,036,456,732	100	73,836,738,632	DINAS KESEHATAN
Program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	2	2,05	2,11	1,159,250,000	2,1	1,326,598,750	2,09	1,424,269,938	2,08	1,535,753,434	2,07	1,679,099,356	2,07	7,124,971,478	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase penyediaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan (%)	71,43	71,43	77,14	723,600,000									85	4,914,000,000	RSUD DATU SANGGUL
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar (%)	39,54	50	59,55	4,517,987,776	68,64	4,724,310,305	77,27	5,518,759,327	86,82	5,891,431,700	92,72	6,300,614,945	92,72	26,953,104,052	RSUD DATU SANGGUL
Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat (nilai)	A	A	A	29,032,872,406	A	30,164,958,471	A	35,267,776,438	A	37,722,279,575	A	40,417,251,440	A	172,605,138,329	RSUD DATU SANGGUL
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita (Rp)	11.417.450	11.417.450	11.760.000	502.064.241	12.112.800	524.991.962	12.746.150	613.275.611	12.850.450	654.689.063	13.235.950	700.159.809	13.235.950	2.995.180,686	
Program:																
Program Perumusan Kebijakan Perekonomian	- Persentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	80	80	85	502,064,241	90	524,991,962	95	613,275,611	100	654,689,063	100	700,159,809	100	2,995,180,686	Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	3,193,42 5,425	80	4,367,68 9,759	85	4,283,77 9,353	80	5,347,95 5,016	86.67	4,902,01 5,045	86.67	22,094,8 64,598	
Program:																
Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman Dan Taqwa	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	40.38	53.84	65	3,014,69 0,425	68	4,104,55 4,759	71	3,970,50 4,353	74	4,987,19 5,016	77	4,533,01 5,045	77	20,609,9 59,598	Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	40	50	80	51,350,0 00	80	99,400,0 00	80	115,350, 000	80	129,450, 000	80	132,500, 000	80	528,050, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase kasus/kejadian potensi konflik yang ditangani (%)	80	80	80	65,735,0 00	80	86,585,0 00	80	93,725,0 00	80	122,310, 000	80	124,000, 000	80	492,355, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Ormas yang terdata (%)	100	100	80	61,650,0 00	85	77,150,0 00	85	104,200, 000	90	109,000, 000	90	112,500, 000	90	464,500, 000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	790,333, 200	84.73	1,312,37 5,715	84.92	1,328,61 3,282	85.11	1,481,47 4,606	85.3	1,722,12 2,061	85.3	6,634,91 8,864	
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17		73.25		73.32		73.39		73.47		73.47		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perlindungan Hak Perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	120,120,000	90	236,920,605	90	260,612,665	90	286,673,931	90	315,341,323	90	1,219,668,524	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	51,710,100	90	179,295,605	90	192,225,165	90	231,447,681	90	247,092,448	90	901,770,999	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Program Kualitas Hidup Perempuan	- Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	2	0.01	2,1	454,228,100	2,2	476,939,505	2,3	524,633,452	2,4	577,096,794	2,5	634,806,470	2,5	2,667,704,321	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	- Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah (%)	51.6	52	53		54		55		56		57		57	-	
	- Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	13	15	17		18		19		20		22		22	-	
Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	8.33	8.33	8.3	164,275,000	8.3	419,220,000	8.3	351,142,000	8.3	386,256,200	8.3	524,881,820	8.3	1,845,775,020	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	1.69	1.69	1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	8	8	8.33		7.69		7.69		7.69		7.69		7.69	-	
	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	75	75	75		50		50		50		50		50	-	
	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	75	75	38.46		38.46		46.15		53.84		61.53		61.53	-	
Misi 2: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa					52,303,139,441		50,309,619,240		54,451,738,567		56,743,949,202		58,458,505,772		272,266,952,222	
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	52,303,139,441	5	50,309,619,240	5.2	54,451,738,567	5.4	56,743,949,202	5.6	58,458,505,772	5.6	272,266,952,222	
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3		0.3		0.29		0.29		0.28		0.28		
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31		0.3		0.29		0.28		0.27		0.27		
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5895173	6072028.2	6254189.036		6441814.707		6635069.1		6834121.2		7039144.9		7039144.9		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7433273	7656271.2	7885959.326		8122538.105		8366214.2		8617200.7		8875716.7		8875716.7		
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	19,975,933,231	23.15	20,529,170,010	23.53	22,498,674,793	23.91	23,398,136,830	24.3	24,353,520,677	24	110,755,435,541	
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5		2.6		2.7		2.8		2.9		3		
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4		1.5		1.6		1.7		1.8		2		
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2		7.4		7.6		7.8		8		8		
Program:																
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	48.25	48.50	49.23	5,974,014,614	49.97	6,018,494,849	50.72	6,189,766,883	51.48	6,270,109,805	52.25	6,358,323,957	52.25	30,810,710,108	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	46.75	47.33	48.04	-	48.76	-	49.49	-	50.23	-	50.99	-	50.99	-	
	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	8.76	9.05	9.19	-	9.32	-	9.46	-	9.61	-	9.75	-	9.75	-	
	- Luas Panen Padi (Ha)	75,302	78,966.39	79,899.98		80,844.61		81,800.41		82,767.51		83,746.04		488024.96		
	- Luas Panen Jagung (Ha)	1,038	1,691.11	1,749.42		1,809.74		1,872.15		1,936.71		2,003.49		11062.61		
	- Luas Panen Kedelai (Ha)	77	104.97	108.59		112.34		116.21		120.22		124.36		686.69		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik (%)	2.50	3.35	5.00	4,068,534,611	10.00	4,071,664,374	15.00	4,083,715,592	20.00	4,089,368,763	25.00	4,095,575,777	25.00	20,408,859,116	DINAS PERTANIAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura Berkelanjutan	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	111	111.55	112.10	1,020,42 2,489	112.66	1,067,02 2,028	113.21	1,246,45 4,486	113.77	1,330,62 5,424	114.34	1,423,04 2,625	677.64	6,087,56 7,051	DINAS PERTANIAN
	- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	111	149.13	151.29		153.48		155.71		157.97		160.25		927.84		
	- Luas Panen Jeruk (Ha)	464	464.18	468.83		473.51		478.25		483.03		487.86		2855.6 7		
	Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	7.97	8,55	8.64		8.72		8.81		8.90		8.99		8.99		
	Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	6.96	6,67	6.87		7.08		7.29		7.51		7.73		7.73		
	Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	0.89	1.99	0.91		0.94		0.97		1.00		1.03		1.03		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	2.50	5.00	7.50	265,819, 995	10.00	277,959, 172	12.50	324,701, 316	15.00	346,627, 840	17.50	370,702, 515	17.50	1,585,81 0,838	DINAS PERTANIAN
	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	621.18	603.09	613.88	936,073, 914	632.30	978,821, 514	651.27	1,143,42 2,005	670.80	1,220,63 5,336	690.93	1,305,41 3,290	690.93	5,584,36 6,059	DINAS PERTANIAN
	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	1,878.70	1,789.24	3,239.35	-	3,336.5 3	-	3,436. 63	-	3,539.7 3	-	3,645. 92	-	3645.9 2	-	
	- Luas Tanaman Karet (Ha)	399.27	13,309.0 0	14,118.2 1		14,541. 76		14,978 .01		15,427. 35		15,890 .17		15890. 17		
	- Luas Tanaman Sawit (Ha)	2248.05	44,961.0 0	3,239.35		3,336.5 3		3,436. 63		3,539.7 3		3,645. 92		3645.9 2		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	5.00	5.00	4.50		4.00		3.50		3.00		2.50		2.50		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	9.38	12.50	15.63	62,041,181	18.17	64,874,410	21.88	75,783,815	25.00	80,901,366	28.18	86,520,286	28.18	370,121,057	DINAS PERTANIAN
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	- Populasi sapi (ekor)	6751	6,900	7,015	4,184,419,866	7,132	4,375,509,379	7,251	5,111,303,374	7,372	5,456,460,943	7,495	5,835,433,748	7495	24,963,127,309	DINAS PERTANIAN
	- Populasi kambing (ekor)	4526	4,585	4,650		4,716		4,783		4,851		4,920		4920		
	- Populasi unggas (ekor)	2281314	2,301,089	2,315,533		2,330,206		2,346,072		2,364,135		2,364,135		2364135		
	- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	3.8	3.80	3.84		3.89		3.94		4.00		4.05		4.05		
	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	2.00	2.00	2.00	198,881,268	2.00	207,963,560	2.00	242,935,109	2.00	259,340,101	2.00	277,352,297	2.00	1,186,472,335	DINAS PERTANIAN
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	100.09	100	100	2,031,303,280	100	2,124,066,619	100	2,481,253,708	100	2,648,808,525	100	2,832,778,759	100	12,118,210,890	DINAS PERIKANAN
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	98.29	100	100	618,529,189	100	646,775,504	100	755,538,506	100	806,558,728	100	862,577,423	100	3,689,979,350	DINAS PERIKANAN
Program Pembinaan, Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.2	0.25	0.30	615,892,825	0.33	696,018,600	0.37	843,800,000	0.38	888,700,000	0.41	905,800,000	0.41	3,950,211,425	DINAS PERINDUSTRIAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0.15	0.20	0,23		0,25		0,26		0,27		0,29		0,29		
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	2,019,81 9,982	3.2	2,112,05 7,914	3.5	2,467,22 6,766	3.7	2,633,83 4,367	4	2,816,76 4,586	4	12,049,7 03,615	
Program:																
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	68.18	70	70	1,003,21 1,982	73	1,078,21 2,914	75	1,305,25 7,166	78	1,366,00 1,047	80	1,513,13 3,266	80	6,265,81 6,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	15	20	20	175,400, 000	25	281,340, 000	35	295,150, 000	40	336,180, 000	55	336,180, 000	55	1,424,25 0,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	20	25	30	822,208, 000	33	677,555, 000	35	791,819, 600	40	835,653, 320	50	858,251, 320	50	3,985,48 7,240	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	15	25	30	19,000,0 00	35	74,950,0 00	40	75,000,0 00	45	96,000,0 00	50	109,200, 000	50	374,150, 000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	100,187, 363	1.4	123,782, 648	1.4	133,257, 711	1.6	137,982, 996	1.7	143,146, 892	1.7	638,357, 610	
Program:																
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	82.39	83	86.96	51,137,3 63	87	53,472,6 48	87	62,464,7 11	88	66,682,8 46	88	71,314,2 34	87.84	305,071, 802	DINAS PERINDUSTRIAN
	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat			100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	21	17	14.80	9,200,000	26	9,660,000	34	10,143,000	41	10,650,150	47	11,182,658	46.51	50,835,808	DINAS PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	4.49	4.50	14.02	39,850,000	15	60,650,000	16	60,650,000	17	60,650,000	18	60,650,000	17.88	282,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	22,048,450,839	0.57	22,293,568,041	0.58	23,925,539,263	0.59	24,706,497,127	0.6	25,179,980,156	0.6	118,154,035,427	
Program:																
Program Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan	- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten (%)	56	68	74	190,821,958	76	199,536,206	79	233,090,595	81	248,830,804	84	266,113,088	84	1,138,392,651	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase BUMDES yang aktif (%)	30	35	78		80		81		83		85		85		
	- Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)	0.80	0.90	1.00		1.70		1.85		2.00		2.10		2.10		
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar (%)	30	35	40	980,357,130	43	1,025,127,008	47	1,197,514,319	67	1,278,380,412	70	1,367,168,990	70	5,848,547,859	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	78	83	85	963,810,586	89	1,007,824,835	91	1,177,302,579	93	1,256,803,808	94	1,344,093,806	94	5,749,835,614	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	- Persentase PKK aktif (%)	88	89	91		92		94		95		97		97		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	- Persentase posyandu aktif (%)	78	80	82		84		87		88		90		90		
Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja (%)	15	20	30	2,016,17 0,000	35	2,031,47 8,500	40	2,778,56 6,718	45	3,144,43 0,046	50	3,162,15 1,549	50	13,132,7 96,813	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,65	55.00	58.00	17,897,2 91,165	62.00	18,029,6 01,492	67.00	18,539,0 65,052	70.00	18,778,0 52,058	75.00	19,040,4 52,724	75	92,284,4 62,491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	512,422, 400	86	538,043, 520	87	564,945, 696	88	593,192, 981	90	622,852, 630	90	2,831,45 7,227	
Program:																
Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	15,286,0 00 (Kg/kapita/tahun)	12000 (Kg/kapita/tahun)	14,368,8 40 (Kg/kapita/tahun)	212,639, 000	14,656, 216 (Kg/kapita/tahun)	223,270, 950.00	14,949 ,341 (Kg/kapita/tahun)	234,434, 498	15,248, 327 (Kg/kapita/tahun)	246,156, 222	15,553 ,294 (Kg/kapita/tahun)	258,464, 033	15,553 ,294 (Kg/kapita/tahun)	1,174,96 4,703	DINAS KETAHANAN PANGAN
Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	100	80	100	299,783, 400	100	314,772, 570.00	100	330,511, 199	100	347,036, 758	100	364,388, 596	100	1,656,49 2,523	DINAS KETAHANAN PANGAN
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	7,212,86 7,993	3.65	4,260,37 0,770	3.55	4,388,14 4,309	3.45	4,782,65 2,293	3.35	4,830,20 5,728	3.35	25,474,2 41,092	
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42		0.43		0.44		0.45		0.46		0.46		
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07		0.06		0.05		0.04		0.03		0.03		
Program:																



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	54.2	55	55	398,604,300	55.05	512,761,795	55.1	538,399,885	55.12	565,319,879	55.14	593,585,873	55.16	2,608,671,732	DINAS SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	1.4	2.26	23.00	4,024,579,700	2.27	398,000,000	2.28	417,900,000	2.29	438,795,000	2.3	460,734,750	2.3	5,740,009,450	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	23.3	35	35	559,698,100	35.05	619,295,600	35.10	625,260,380	35.12	631,523,399	35.14	638,099,569	35.14	3,073,877,048	DINAS SOSIAL
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	2.9	3	3	471,125,000	3.02	486,424,000	3.04	490,745,200	3.06	495,282,460	3.08	500,046,583	3.08	2,443,623,243	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	55.1	56.1	56.1	682,968,000	56.15	1,126,492,500	56.16	1,182,817,125	56.17	1,241,957,981	56.18	1,304,055,880	56.18	5,538,291,487	DINAS SOSIAL
Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	222,612,000	100	223,742,600	100	224,929,730	100	226,176,217	100	227,485,027	100	1,124,945,574	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	-	-	10	291,975,500	10.05	306,574,275	10.10	321,902,989	10.12	337,998,138	10.14	354,898,045	10.14	1,613,348,947	DINAS SOSIAL
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	433,457,633	3.8	452,626,337	3.6	473,950,030	3.4	491,652,608	3.2	512,035,103	3.2	2,363,721,711	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	18,74	50	50	137,482,500	50	137,482,500	50	137,482,500	60	137,482,500	50	137,482,500	50	687,412,500	DINAS TENAGA KERJA
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)			60		60		60		60		60		60		
	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)			45		45		45		45		45		45		
	- Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)		4,03	10		10		10		10		10		10		
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	60,75	66,93	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000		63,050,000	75	63,050,000	75	315,250,000	DINAS TENAGA KERJA
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	12,600,000	70	15,000,000	75	17,000,000	80	20,000,000	85	25,000,000	100	89,600,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	- Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	16,500,000	100	16,500,000	100	22,000,000	100	25,000,000	100	27,000,000	100	107,000,000	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	15,000,000	43	25,000,000	45	25,550,000	48	25,550,000	50	26,550,000	50	117,650,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Desa																
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	13,095,725	100	13,693,767	100	15,996,537	100	17,076,755	100	18,262,804	100	78,125,587	KECAMATAN SALAM BABARIS
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	40	40	40	21,000,000	43	21,840,000	45	21,840,000	48	23,150,400	50	24,539,424	50	112,369,824	KECAMATAN PIANI
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	16,700,000	70	17,327,920	75	17,452,681	80	18,555,690	85	19,759,955	85	89,796,246	KECAMATAN LOKPAIKAT
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	13,000,000	70	13,000,000	75	16,000,000	80	17,000,000	85	17,000,000	85	76,000,000	KECAMATAN HATUNGUN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	16,240,000	76	16,240,000	77	16,240,000	78	17,052,000	80	17,904,600	80	83,676,600	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	65	65	65	17,425,000	70	17,875,000	75	17,875,000	80	18,875,000	85	20,875,000	85	92,925,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	75	75	75	33,804,407	76	35,348,150	77	41,292,362	78	44,080,765	80	47,142,348	80	201,668,033	KECAMATAN BINUANG
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	80	80	80		82		85		87		90		90	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	29,180,000	100	30,639,000	100	32,170,950	100	33,779,498	100	35,468,472	100	161,237,920	KECAMATAN BAKARANGAN
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	100	100	100	18,380,000	100	19,630,000	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,000,000	100	101,010,000	KECAMATAN BUNGUR
	Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 3: Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan					314,412,353,788		345,364,181,250		319,903,378,569		343,370,381,568		354,821,705,897		1,677,872,001,071	
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	304,565,776,123	52.33	335,067,799,311	55.33	307,975,152,916	60.67	330,416,837,372	64.33	341,121,516,227	67.67	1,619,147,081,950	
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	196,286,541,018	63	213,757,506,762	55.333	195,132,338,809	70	212,133,978,072	75	216,868,266,095	75	1,034,178,630,756	
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52		55		55.333		60		65		65		
Program:																
Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	44,69	45,55	48	133,491,541,018	50	139,898,256,762	52	119,784,701,309	55	129,155,744,947	57	125,182,003,001	57	647,512,247,037	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	9.62	9,25	12		13		14		15		18		18		
	- Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	47.00	49	52		55		58		60		65		65		
Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	- Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	4,5	10	12	51,965,000,000	15	61,946,250,000	20	62,243,337,500	21	68,563,503,125	25	75,830,060,094	25	320,548,150,719	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	- Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	0	3	10		12		15		20		22		22		
Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	10	5	8	10,830,000,000	15	11,913,000,000	20	13,104,300,000	25	14,414,730,000	30	15,856,203,000	35	66,118,233,000	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	10,734,022,502	58	11,132,878,298	60	12,668,680,514	62	13,389,118,251	64	14,180,137,582	64	62,104,837,146	
Program:																
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	51.36	60.00	70.00	10,734,022,502	75.00	11,132,878,298	80.00	12,668,680,514	85.00	13,389,118,251	90.00	14,180,137,582	90	62,104,837,146	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)															
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	85,007,753,201	69	97,063,118,091	71	84,977,341,703	73	88,689,867,500	75	92,766,111,045	75	448,504,191,539	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan irigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang	45.17	50	55	85,007,753,201	57	97,063,118,091	60	84,977,341,703	65	88,689,867,500	70	92,766,111,045	70	448,504,191,539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	35.15	40	45		48		50		52		55		55		
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	12,424,740,327	44	12,996,429,553	48	15,059,104,610	60	16,056,888,483	64	17,149,807,745	64	73,686,970,718	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase sarana dan prasarana olahraga yang memenuhi standar (%)	95	95	96	243,555,433	96	254,677,857	96	297,504,970	96	317,594,972	96	339,653,200	96	1,452,986,432	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	70	75	80	990,000,000	85	1,039,500,000	90	1,091,475,000	95	1,146,048,750	100	1,203,351,188	100	5,470,374,938	DINAS PERHUBUNGAN
Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	40.00	45.00	50.00	11,191,184,894	55.00	11,702,251,697	60.00	13,670,124,639	65.00	14,593,244,761	70.00	15,606,803,358	70	66,763,609,349	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaan 5: Meningkatkan ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	112,719,075	92	117,866,607	94	137,687,280	96	146,985,067	98	157,193,761	98	672,451,790	
Program:																
Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin	55.09	57.33	57.33	112,719,075	59.67	117,866,607	0.62	137,687,280	0.6467	146,985,067	0.6467	157,193,761	1	672,451,790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	9,846,577,664	0.11	10,296,381,939	2.69	11,928,225,653	0.01	12,953,544,196	0.32	13,700,189,669	0.32	58,724,919,121	
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53,329	9,285,272,271	53	9,709,301,939	55	11,342,036,653	55	12,107,944,977	55	12,948,889,669	55	55,393,445,509	
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48		57		63		69		75		75		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Program:																	
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	- Status Mutu Air (status)	CemarSedang	CemarSedang	CemarSedang	3,150,247,189	CemarSedang	3,294,109,235	CemarSedang	3,848,052,921	CemarSedang	4,107,905,349	CemarSedang	4,393,215,631	CemarSedang	18,793,530,324		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	80	80	80		80		80		80		80		80			
	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku	0	60	60		60		60		60		60		60			
Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keaneekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	0	0	20	4,195,344,428	40	4,386,932,833	60	5,124,647,817	80	5,470,706,514	100	5,850,668,730	100	25,028,300,322		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	25	25	25	150,454,686	50	157,325,487	75	183,781,640	100	196,192,100	100	209,818,417	100	897,572,330		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0	0	12.50	868,416,237	25	908,074,121	37.50	1,060,777,596	50&	1,132,410,091	62.50	1,211,060,453	62.50	5,180,738,498		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Penaatan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29	20	24	327,830,169	28	342,801,159	32	400,447,255	36	427,488,773	40	457,179,560	40	1,955,746,917		DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19,35	36	24		28		32		36		40		40		
	- Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Kajian Dampak Lingkungan	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	30	20	40	360,613,186	50	377,081,275	55	440,491,981	60	470,237,651	65	502,897,516	65	2,151,321,609	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	7,69	23,08	38,46	39,073,743	53,86	40,858,120	69,22	47,728,900	84,60	50,951,951	100	54,490,765	100	233,103,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	5,24	12,8	30,24	19,717,917	47,68	20,618,374	65,12	24,085,599	82,56	25,712,058	100	27,497,862	100	117,631,809	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	62,73	88,53	90	173,574,714	90	181,501,335	90	212,022,945	90	226,340,491	90	242,060,734	90	1,035,500,219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	98	561,305,393	98	587,080,000	98	586,189,000	98	845,599,219	98	751,300,000	98	3,331,473,612	
Program:																
Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 4: Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat					2,479,954,429		2,593,206,278		3,029,284,786		3,233,847,204		3,458,450,689		14,794,743,386	
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	2,479,954,429	5.2	2,593,206,278	5.5	3,029,284,786	5.7	3,233,847,204	6	3,458,450,689	6	14,794,743,386	
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	2,479,954,429	0.5	2,593,206,278	0.51	3,029,284,786	0.52	3,233,847,204	0.53	3,458,450,689	0.53	14,794,743,386	
Program:																
Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	0	0	100	351,707,277	100	367,768,661	100	429,613,340	100	458,624,393	100	490,477,672	100	2,098,191,344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	0	0	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	0	0	100	10,500,925	100	10,980,470	100	12,826,967	100	13,693,150	100	14,644,193	100	62,645,706	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	0	0	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan penanaman modal (%)	-90	57.7	5	73,677,921	5	77,042,564	5	89,998,188	5	96,075,612	5	102,748,443	5	439,542,727	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Persentase dokumen RUPM yang tersedia			-		50		-		50		-		100		
	Persentase rekomendasi PM (investor baru)			100		100		100		100		100		100		
Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	99.41	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	50	50	50	112,509,914	60	117,647,894	70	137,431,788	80	146,712,321	80	156,902,073	80	671,203,990	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80	80	80	365,227,941	80	381,906,771	80	446,128,941	80	476,255,265	80	509,333,078	80	2,178,851,996	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	99.77	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 5: Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).					18,807,939,826		20,103,504,299		22,734,639,464		24,192,809,279		25,713,626,421		111,552,519,281	
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	-	-	C	18,807,939,826	CC	20,103,504,299	CC	22,734,639,464	B	24,192,809,279	BB	25,713,626,421	BB	111,552,519,281	
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	12,879,546,819	B	13,932,592,470	B	15,819,185,563	BB	16,816,349,607	BB	17,901,480,062	BB	77,349,154,521	
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		
Program:																
Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	100	100	100	116,301,391	100	121,612,516	100	142,063,108	100	151,656,387	100	162,189,523	100	693,822,925	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,166,654	100	2,801,515,909	100	3,272,624,163	100	3,493,618,872	100	3,736,264,527	100	15,983,190,125	INSPEKTORAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	70.22	60.92	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
Program Penunjang dan Pendukung <i>Good Governance</i>	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951,682	80	808,249,995	85	944,166,854	90	1,007,924,826	95	1,077,929,194	95	4,611,222,552	INSPEKTORAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase <i>Self Assesment</i> Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100		
Program Penatausahaan Keuangan	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	556,800,000	100	864,640,000	100	907,872,000	100	953,265,600	100	1,000,928,880	100	4,283,506,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Penyusunan Anggaran	Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	1,146,500,000	100	1,203,825,000	100	1,264,016,250	100	1,327,217,063	100	1,393,577,916	100	6,335,136,228	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Peningkatan Pengelolaan Aset	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	97,57	97,57	100	1,287,46 7,600	100	1,522,64 0,480	100	1,598,77 2,504	100	1,678,71 1,129	100	1,762,64 6,686	100	7,850,23 8,399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	11,58	11,58	100		100		100		100		100		100		
	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perbendaharaan	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D (%)	0	0	0	257,970,000	0	270,868,500	0	284,411,925	0	298,632,521	0	313,564,147	0	1,425,447,094	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	2,406,741,792	100	2,516,650,246	100	2,939,854,946	100	3,138,378,319	100	3,356,351,113	100	14,357,976,416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	- Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:															
	a. sasaran	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	b. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah															
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	99,094,446	100	103,619,783	100	121,044,683	100	129,218,624	100	138,193,368	100	591,170,905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)															
	a. kinerja	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	104,434,917	100	109,204,137	100	127,568,112	100	136,182,569	100	145,640,987	100	623,030,721	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)															
	a. program	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. kegiatan	100	100	100		100		100		100		100		100		
	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)															



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	a. kinerja	100	100	100		100		100		100		100		100		
	b. anggaran	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	2,679,16 6,654	100	2,801,51 5,909	100	3,272,62 4,163	100	3,493,61 8,872	100	3,736,26 4,527	100	15,983,1 90,125	INSPEKTORAT
	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
Program Penunjang dan Pendukung <i>Good Governance</i>	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76.97	70	75	772,951, 682	80	808,249, 995	85	944,166, 854	90	1,007,92 4,826	95	1,077,92 9,194	95	4,611,22 2,552	INSPEKTORAT
	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	0	100	100		100		100		100		100		100		
	- Persentase <i>Self Assesment</i> Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60		70		80		90		100		100		
Sasaran 2: Meningkatkan kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	-	-	99	916,038, 319	99	957,870, 956	99	1,118,94 8,362	99	1,194,50 9,029	99	1,277,47 2,408	99	5,464,83 9,075	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program:																
Program Kinerja, Pengembangan karier dan Disiplin Aparatur	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment (%)	98	99	99	310,024,347	99	324,182,200	99	378,697,297	99	404,270,077	99	432,348,234	99	1,849,522,156	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan (%)			90		90		90		90		90		90		
Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentasi ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	90.01	99	70	606,013,972	75	633,688,756	80	740,251,065	85	790,238,952	90	845,124,175	90	3,615,316,920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	5,012,354,687	79	5,213,040,872	81	5,796,505,540	83	6,181,950,642	85	6,534,673,951	85	28,738,525,685	
Program:																
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	0	0	100	618,873,105	100	647,135,126	100	755,958,602	100	807,007,192	100	863,057,035	100	3,692,031,061	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2. Persentase perizinan yang diterbitkan	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	87.34	87	88	838,845,803	89	877,153,297	89	1,024,657,066	89	1,093,850,404	89	1,169,822,644	89	5,004,329,214	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	87.34	87	88	223,037,194	89	233,222,612	89	272,441,771	89	290,839,298	89	311,039,238	89	1,330,580,113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara (poin)	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah (poin)	85	85	86.40	183,429,651	86.50	195,094,333	86.6	181,009,425	86.80	188,078,887	86.80	198,212,534	86.80	945,824,831	KECAMATAN TAPIN TENGAH
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)														-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan (poin)	77.17	85	86.40	386,770,199	86.50	395,122,473	86.60	401,088,793	86.70	425,044,055	86.80	446,773,898	87	2,054,799,418	KECAMATAN TAPIN SELATAN



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Salam Babaris (poin)	78	85	78.25	146,690,640	78.50	153,389,548	79.11	179,183,827	79.56	191,283,804	80.00	204,569,221	80.00	875,117,041	KECAMATAN SALAM BABARIS
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani (poin)	87.32	85	86.50	183,584,995	86.60	190,928,395	86.70	193,416,790	86.80	207,400,677	87	223,033,765	87	998,364,622	KECAMATAN PIANI
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Lokpaikat (poin)	86.31	85	86.4	304,120,600	86.5	315,555,535	86.6	317,827,534	86.7	337,914,235	86.8	359,844,868	86.8	1,635,262,772	KECAMATAN LOKPAIKAT
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Hatungun (poin)	86.23	85	86	154,650,000	87	157,650,000	87	167,369,156	87	178,031,601	87	193,571,400	87	851,272,157	KECAMATAN HATUNGUN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan (poin)	80	85	85	196,650,000	86	196,650,000	87	196,650,000	88	206,482,500	89	236,806,625	89	1,033,239,125	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara (poin)	86,3	86,3	86.4	171,179,900	86.5	172,449,804	86.6	174,363,866	86.7	178,409,226	86.8	193,152,554	86.8	889,555,350	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Binuang (poin)	78.11	85	85	312,973,202	86	336,399,102	87	426,600,997	88	468,914,290	89	415,373,034	89	1,960,260,625	KECAMATAN BINUANG
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100		
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	82	85	86,4	189,228,500	85	198,689,925	85	208,624,421	85	219,055,642	85	230,008,424	86,8	1,045,606,913	KECAMATAN BAKARANGAN
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	76	76	86	221,224,684	86.5	222,267,570	87	221,047,000	87.5	240,694,119	88	260,665,241	88	1,165,898,614	KECAMATAN BUNGUR
	Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	-	-	100	16,158,567	100	16,896,478	100	19,737,823	100	21,070,684	100	22,534,126	100	96,397,678	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	80	80	100	864,937,645	100	904,436,672	100	1,056,528,466	100	1,127,874,026	100	1,206,209,340	100	5,159,986,150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (%)	80	80	80	100		100		100		100		100		100	



Misi/Tujuan/Sasaran /Program /Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
		2017	2018	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	80	80	80%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
	JUMLAH				490,592,717,365		525,213,776,884		524,854,979,026		561,913,828,160		585,900,607,440		2,692,666,308,867		

Sumber: hasil analisis



Tabel 6.3
Integrasi SPM dalam RPJMD Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SPM PENDIDIKAN				
1	Pendidikan anak usia dini	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%) Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	Dinas Pendidikan
2	Pendidikan dasar	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	
			Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	
			Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	
		Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	Dinas Pendidikan
			Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	
Program Pembinaan SMP	Persentase sekolah yang terkreditasi jenjang SMP			
	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)			
3	Pendidikan kesetaraan	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%) Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	Dinas Pendidikan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SPM KESEHATAN				
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM				
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	
SPM PERUMAHAN RAKYAT				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
SPM KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Program peningkatan keamanan, ketentraman, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	BPBD
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	Satpol PP
SPM SOSIAL				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	Dinas Sosial
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	Dinas Sosial
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Dinas Sosial
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Dinas Sosial

Sumber: hasil analisis

**BAB VII****KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program perangkat daerah merupakan program yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dan/atau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Pada prinsipnya, program perangkat daerah pada RPJMD sama dengan program perangkat daerah pada Renstra Perangkat Daerah. Rancangan program perangkat daerah Kabupaten Tapin untuk Tahun 2019 sampai dengan 2023 terbagi kedalam 2 (dua) jenis program, yaitu: 1) Program generik: yaitu program yang digunakan oleh seluruh perangkat daerah untuk menunjang operasional dan kelembagaan perangkat daerah, dan 2) Program Teknis: yaitu program yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum daerah. Adapun rancangan program pembangunan daerah Kabupaten Tapin disajikan pada tabel di bawah.



Tabel 7.1.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Kabupaten Tapin

Uraian	APBD			Proyeksi		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BELANJA	1.228.077.951.405	1.313.931.178.276	1.355.338.061.132	1.401.041.134.953	1.451.041.187.530	1.505.942.243.658
BELANJA TIDAK LANGSUNG	611.438.593.564	589.806.433.959	594.532.083.525	604.954.978.750	616.029.801.110	627.406.648.784
Belanja Pegawai	415.913.542.514	415.993.837.329	420.544.680.650	430.777.294.452	441.644.990.231	452.796.374.904
Belanja Hibah	34.376.093.050	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000	12.400.350.000
Belanja Bantuan Sosial	3.509.180.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000	4.059.680.000
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.814.006.300	1.974.595.930	2.149.402.175	2.339.683.598	2.546.810.179	2.772.273.180
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	153.005.810.700	53.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700	153.377.970.700
Belanja Tidak Terduga	2.819.961.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
BELANJA LANGSUNG	616.639.357.841	724.124.744.317	760.805.977.607	796.086.156.203	835.011.386.420	878.535.594.874
Belanja Pegawai	30.838.145.510	36.213.491.644	38.047.920.789	39.812.283.162	41.758.934.634	43.935.581.091
Belanja Barang dan Jasa	325.446.729.584	382.174.810.693	401.534.242.198	420.154.232.306	440.697.988.898	463.668.970.427
Belanja Modal	260.354.482.747	305.736.441.979	321.223.814.620	336.119.640.735	352.554.462.888	370.931.043.356

Sumber: hasil proyeksi



Tabel 7.2.
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
1									503,309,126,523		538,839,726,169		541,829,784,869		563,462,964,123		589,746,659,551		2,737,188,261,237	
1	1								34,626,048,381		36,208,458,792		42,298,721,560		45,153,885,264		48,292,080,288		206,579,194,287	
1	1								34,626,048,381		36,208,458,792		42,298,721,560		45,153,885,264		48,292,080,288		206,579,194,287	
1	1	1						100	1,363,876,881	100	1,426,206,054	100	1,666,093,912	100	1,778,555,250	100	1,902,164,838	100	8,136,896,937	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1						100	435,000,000	100	454,879,500	100	531,390,232	100	567,259,073	100	606,683,578	100	2,595,212,383	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1						100	64,976,000	100	67,945,403	100	79,373,820	100	84,731,553	100	90,620,396	100	387,647,172	DINAS PENDIDIKAN
1	1	1						64	882,758,500	77	923,100,563	80	1,078,366,078	84	1,151,155,789	88	1,231,161,116	88	5,266,542,046	DINAS PENDIDIKAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
		baik (%)																		
		Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	Jumlah PAUD yang terakreditasi / jumlah PAUD x 100%	0	15	30		45		60		75		90		90				
1	1	1	Program Pembinaan SD	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama	0,057	0,039	0,034	20,619,402,650	0,029	21,561,709,351	0,024	25,188,388,864	0,019	26,888,605,112	0,014	28,757,363,168	0,014	123,015,469,145	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	Jumlah mengulang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama	0,023	0,021	0,020		0,015		0,010		0,005		0,002		0,002		
				Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	Jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang SD / jumlah seluruh sekolah x 100%	72	82	82		95		100		100		100		100		
				Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD	Jumlah sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD / jumlah seluruh sekolah x 100%	78	89	90		91		92		93		94		94		
1	1	1	Program Pembinaan SMP	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	Jumlah putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tahun sebelumnya	0,43	0,40	0,38	7,315,404,450	0,30	7,649,718,433	0,25	8,936,401,074	0,20	9,539,608,146	0	10,202,610,913	0	43,643,743,016	DINAS PENDIDIKAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
			pada jenjang pendidikan yang sama																	
		Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	Jumlah mengulang sekolah pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tahun sebelumnya pada jenjang pendidikan yang sama	1,29	1,31	1,12		1,01		0,72		0,33		0		0				
		Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	Jumlah sekolah yang terakreditasi jenjang SD / jumlah seluruh sekolah x 100%	62	63	70		80		90		95		100		100				
		Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	Jumlah sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD / jumlah seluruh sekolah x 100%	72,89	73,07	76,92		84,60		92,31		96,15		100		100				
1	1	1	Program Pendidikan Non Formal	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang mengikuti program pendidikan kesetaraan dibagi jumlah warga negara usia 7-18 tahun x 100%	0,49	0,50	0,51	752,533,900	0,53	786,924,699	0,55	919,285,434	0,57	981,337,200	0,59	1,049,540,136	0,60	4,489,621,369	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	jumlah pendidikan non formal yang terakreditasi / jumlah pendidikan non formal x 100%	6,69	7,69	19,20		30,70		42,20		57,60		76,90		76,90				



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1 1 1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV / jumlah guru x 100%	74	74	79	446,022,000	84	466,405,205	89	544,854,561	94	581,632,244	100	622,055,685	100	2,660,969,695	DINAS PENDIDIKAN
		Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	Jumlah pemenuhan guru pada satuan pendidikan SD dan SMP x Jumlah pemenuhan guru 100%	82,15	82,15	85,70		89,25		92,80		96,35		100		100		
1 1 1	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan (%)	Jumlah jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan dibagi Jumlah jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan x 100%	93,09	82,87	100	2,746,074,000	100	2,871,569,582	100	3,354,567,585	100	3,581,000,897	100	3,829,880,460	100	16,383,092,525	DINAS PENDIDIKAN
1 2	BIDANG KESEHATAN						76,463,304,176		79,955,146,794		93,400,556,625		99,707,736,369		106,632,833,222		456,159,577,186	
1 2	DINAS KESEHATAN						39,020,049,359		40,801,974,333		47,663,312,081		50,881,933,975		54,415,885,639		232,783,155,387	
1 2 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	4,003,193,195	100	4,839,155,712	100	4,984,330,383	100	5,133,860,295	100	5,287,876,104	100	24,248,415,689	DINAS KESEHATAN
1 2 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	204,880,500	100	612,704,018	100	655,904,018	100	699,104,018	100	742,304,018	100	2,914,896,572	DINAS KESEHATAN
1 2 1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur sesuai kompetensinya (%)	Jumlah aparatur sesuai kompetensinya dibagi jumlah aparatur x 100%	100	100	100	43,550,000	100	51,900,000	100	53,457,000	100	54,526,140	100	55,071,402	100	258,504,542	DINAS KESEHATAN



KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	1		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	34,111,330	100	60,150,000	100	60,150,000	100	62,150,000	100	62,150,000	100	278,711,330	DINAS KESEHATAN
1	2	1		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan (%)	Jumlah Sarana Yankes dengan ketersediaan obat yang cukup untuk pelayanan Kesehatan/ Jumlah Seluruh Sarana Pelayanan Kesehatan yang ada x100%	100	100	100	2,199,454,000	100	2,297,990,000	100	2,392,996,000	100	2,492,752,000	100	2,597,496,000	100	11,980,688,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi / Jumlah Seluruh Puskesmas di Tapin x 100%	76,25	82,28	100	762,309,600	100	820,220,000	100	861,234,000	100	733,267,000	100	931,746,000	100	4,108,776,600	DINAS KESEHATAN
1	2	1		Program Bebas Berobat	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	Jumlah masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan / Jumlah seluruh masyarakat miskin di Tapin x 100%	79,54	95,89	100	13,069,000,000	100	18,069,000,000	100	23,069,000,000	100	23,412,500,000	100	23,412,500,000	100	101,032,000,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1		Program Pengawasan Obat	Persentase kasus obat yang tidak aman yang ditangani (%)	Jumlah kasus obat tidak yang ditangani / Jumlah seluruh kejadian kasus obat tidak aman x 100%	85	88,93	100	21,700,000	100	23,184,000	100	24,374,000	100	25,550,000	100	26,800,000	100	121,608,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1		Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa yang melakukan STBM (%)	Jumlah desa yang melakukan STBM / Jumlah seluruh desa di Tapin	78,11	62,55	100	71,820,000	71	134,990,000	79	142,265,000	86	152,040,000	94	161,315,000	94	662,430,000	DINAS KESEHATAN



KODE			URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
1	2	1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	Jumlah pelayanan gizi masyarakat / Jumlah masyarakat x 100%	58,13	89,72	100	40,798,000	82	716,080,000	86	733,580,000	90	751,080,000	92	766,580,000	92	3,008,118,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	Program Kesehatan Keluarga	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) n - peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) n-1 / peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) n-1x 100%	31,17	86,12	100	148,300,000	54	557,750,000	63	562,750,000	72	567,750,000	81	562,750,000	81	2,399,300,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	Jumlah rumah tangga ber-PHBS / Jumlah rumah tangga yang dipantau x 100%	78,04	92,14	43.00	335,185,000	47.00	624,885,000	50.00	641,725,000	55.00	659,405,000	60.00	667,925,000	60.00	2,929,125,000	DINAS KESEHATAN
1	2	1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	Jumlah masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular / Jumlah masyarakat yang mengalami penyakit menular dan tidak menular (%)	81,09	84,88	92,5	889,969,000	100	954,467,450	100	1,002,190,823	100	1,052,300,366	100	1,104,915,383	100	5,003,843,022	DINAS KESEHATAN
1	2	1	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/p	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk / Jumlah	47,34	92,61	100	17,195,778,734	100	11,039,498,153	100	12,479,355,857	100	15,085,649,156	100	18,036,456,732	100	73,836,738,632	DINAS KESEHATAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		uskesmas pembantu dan jaringannya		penduduk Kab Tapin																
1	2	RSUD DATU SANGGUL						37,443,254,817		39,153,172,461		45,737,244,544		48,825,802,394		52,216,947,583		223,376,421,799		
1	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	3,000,264,377	100	4,087,677,172	100	4,744,847,679	100	4,992,328,571	100	5,264,055,272	100	22,089,173,072		RSUD DATU SANGGUL
1	2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	168,530,258	100	176,226,514	100	205,861,100	100	219,762,548	100	235,025,926	100	1,005,406,346		RSUD DATU SANGGUL
1	2	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase penyediaan jasa kebersihan, keamanan, pemeliharaan (%)	jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor terealisasi dibagi jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor sesuai standar x 100%	71,43	71,43	77,14	723,600,000										723,600,000		RSUD DATU SANGGUL
1	2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana dan prasarana RS sesuai standar (%)	Jumlah sarana dan prasarana RS sesuai standar dibagi Jumlah seluruh sarana dan prasarana RS x 100 %	39.54	50	59.55	4,517,987,776	68,64	4,724,310,305	77.27	5,518,759,327	86.82	5,891,431,700	92.72	6,300,614,945	92.72	26,953,104,052		RSUD DATU SANGGUL
1	2	Program penyelenggaraan BLUD RSUD Datu Sanggul	Indeks Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan	Survei Kinerja keuangan, operasional, mutu pelayanan dan pemanfaatan bagi masyarakat	A	A	A	29,032,872,406	A	30,164,958,471	A	35,267,776,438	A	37,722,279,575	A	40,417,251,440	A	172,605,138,329		RSUD DATU SANGGUL



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
		an bagi masyarakat (nilai)																			
1	3							370,718,780,774		403,250,128,713		384,068,805,793		395,201,873,014		409,962,235,753		1,963,201,824,046			
1	3							370,718,780,774		403,250,128,713		384,068,805,793		395,201,873,014		409,962,235,753		1,933,201,824,046			
1	3	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x100%	98	100	100	2,885,882,273	100	3,017,671,591	100	3,525,128,995	100	3,763,174,924	100	4,024,542,314	100	17,216,400,096	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	97	100	100	34,440,859,675	100	35,559,334,127	100	41,291,302,366	100	43,714,689,926	100	46,424,483,021	100	201,430,669,115	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1		Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	7,430,232	100	7,769,548	100	9,076,090	100	9,688,983	100	10,361,921	100	44,326,774	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	1		Program Pembangunan Turap / Talud / Bronjong	Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana (%)	Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana dibagi Panjang Tebing Sungai Rawan Bencana x 100%	20.19	37	41	10,085,449,439	45	10,272,019,279	47	10,990,410,181	49	11,327,404,040	50	11,697,413,332	50	24,372,696,273	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1 3 1	Program Pengembangan dan Pengelolaan jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang	Panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/ sedang dibagi panjang saluran irigasi dan irigasi rawa kewenangan kabupaten x 100%	45.17	50	55	85,007,753,201	57	97,063,118,091	60	84,977,341,703	65	88,689,867,500	70	92,766,111,045	70	448,504,191,539	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik	Jumlah pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik dibagi Jumlah pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya x 100%	35.15	40	45		48	50		52		55		55			
1 3	Program Pembangunan Jalan Dan Jembatan	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik dibagi Panjang Jalan Kabupaten x100%	44,69	45,55	48	133,491,541,018	50	139,898,256,762	52	119,784,701,309	55	129,155,744,947	57	125,182,003,001	57	647,512,247,037	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang dibagi Panjang Jalan Kabupaten x100%	9.62	9.25	12		13	14		15		18		18			
		- Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan kabupaten x 100%	47.00	49	52		55	58		60		65		65			
	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	- Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara dibagi Panjang panjang Jalan Kabupaten	Panjang panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara dibagi Panjang panjang Jalan Kabupaten	4,5	10	12	51,965,000,000	15	61,946,250,000	20	62,243,337,500	21	68,563,503,125	25	75,830,060,094	25	320,548,150,719	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
			x100%																
		- Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	Jumlah Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara dibagi jumlah jembatan kabupaten x 100%	2	3	10		12		15		20		22		22			DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	3	Program Pembangunan Sistem Informasi / Database Jalan Dan Jembatan	- Persentase data jalan yang dimutakhirkan (%)	100	100	100	150,000,000	100	165,000,000	100	181,500,000	100	199,650,000	100	219,615,000	100	915,765,000		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		- Persentase data jembatan yang dimutakhirkan (%)	Jumlah data jembatan yang dimutakhirkan dibagi jumlah data jembatan x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100			
1	3	Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - Gorong	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik	10	5	8	10,830,000,000	15	11,913,000,000	20	13,104,300,000	25	14,414,730,000	30	15,856,203,000	35	66,118,233,000		
1	3	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	51.36	60.00	70.00	10,734,022,502	75.00	11,132,878,298	80.00	12,668,680,514	85.00	13,389,118,251	90.00	14,180,137,582	90	62,104,837,146		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	Jumlah rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah dibagi Jumlah rumah tangga x 100%	73,18	78.00	83.00		88.00		90.00		93.00		95.00		95			



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1 3	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	Jumlah Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik dibagi Jumlah Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan yang diperlukan x 100%	50,65	55,00	58,00	17,897,291,165	62,00	18,029,601,492	67,00	18,539,065,052	70,00	3,778,052,058	75,00	4,040,452,724	75	62,284,462,491	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3	Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun yang dibutuhkan x 100%	40,00	45,00	50,00	11,191,184,894	55,00	11,702,251,697	60,00	13,670,124,639	65,00	14,593,244,761	70,00	15,606,803,358	70	66,763,609,349	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3	Program Peningkatan Perizinan, Sarana dan Prasarana Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK (%)	Jumlah jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK dibagi Jumlah jasa konstruksi x 100%	60	60	60	1,000,000,000	60	1,500,000,000	60	2,000,000,000	60	2,500,000,000	60	3,000,000,000	60	10,000,000,000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3	Program Perencanaan Tata Ruang	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	Jumlah kawasan yang memiliki rencana tata ruang dibagi jumlah kawasan yang ditargetkan memiliki rencana tata ruang x 100%	7,69	23,08	38,46	539,073,743	53,86	540,858,120	69,22	547,728,900	84,60	550,951,951	100	554,490,765	100	2,733,103,480	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	Luas lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana ruang dibagi luas lahan kawasan budidaya x 100%	5,24	12,8	30,24	319,717,917	47,68	320,618,374	65,12	324,085,599	82,56	325,712,058	100	327,497,862	100	1,617,631,809	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 3	Program Pemanfaatan Ruang	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi	Jumlah permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi dibagi jumlah permohonan	62,73	88,53	90	173,574,714	90	181,501,335	90	212,022,945	90	226,340,491	90	242,060,734	90	1,035,500,219	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp			
		asi (%)	pemanfaatan ruang x 100%																		
1	4						5,300,687,615		5,542,753,624		6,474,833,635		6,912,068,070		7,392,138,549				31,622,481,493		
1	4						5,300,687,615		5,542,753,624		6,474,833,635		6,912,068,070		7,392,138,549				31,622,481,493		
1	4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	500,432,222	100	660,159,624	100	563,852,572	100	876,491,659	100	894,200,000	100	3,495,136,077	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1		Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	40,150,000	100	42,150,000	100	44,150,000	100	65,150,000	100	54,150,000	100	245,750,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1		Program peningkatan pengembangan sistem laporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	12,000,000	100	14,000,000	100	56,000,000	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1		Program Pengembangan Perumahan	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani / Jumlah seluruh rumah tidak layak	0.29	0.17	0.50	561,305,393	0.63	587,080,000	0.88	586,189,000	1.45	845,599,219	4.24	751,300,000	7.70	3,331,473,612	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
			huni x 100%																	
1	4	1	Program Pembangunan Dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Umum	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam prasarana lingkungan Kawasan x 100 %	42.78	50	60.56	3,428,800,000	61.67	3,392,164,000	62.78	1,940,178,920	63.89	4,075,527,992	65.00	4,623,322,725	65.00	17,459,993,637	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	4	1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	Jumlah RTH dan Taman yang dikelola / Jumlah seluruh RTH dan Taman x 100%	100	90	100	760,000,000	100	851,200,000	100	3,330,463,143	100	1,037,299,200	100	1,055,165,824	100	7,034,128,167	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1	5		BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT						8,630,215,458		9,093,176,810		10,622,302,749		11,339,608,674		12,127,189,370		51,812,493,062	
1	5		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN						5,482,156,577		5,732,509,712		6,696,499,468		7,148,702,617		7,645,208,303		32,705,076,677	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	99.05	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	99.18	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	95.34	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Program peningkatan keamanan, ketertarikan, ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (%)	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran K3 dibagi Jumlah Pelanggaran K3 x 100%	99.41	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Program peningkatan penegakan Perda dan Perkada	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan (%)	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan dibagi Jumlah Peraturan Perundang-Undangan Daerah x 100%	99.99	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	Jumlah Pelayanan Bencana Kebakaran / Jumlah Bencana Kebakaran yang terjadi x 100%	99.77	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
		Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas	- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dibagi Jumlah Seluruh Anggota Satpol PP dan Damkar x 100%	99.78	100	100	783,165,225	100	818,929,959	100	956,642,781	100	1,021,243,231	100	1,092,172,615	100	4,672,153,811	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN
			- Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih (%)	Jumlah Anggota Satlinmas yang terlatih dibagi Jumlah Seluruh Anggota	99.78	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
			Satlinmas x 100%																	
1	5		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH				2,363,28,543		2,471,149,882		2,886,703,155		3,081,637,278		3,295,669,182				14,098,388,040	
1	5		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	90	90	90	741,468,451	90	775,329,022	90	905,709,828	90	966,870,862	90	1,034,023,870	90	4,423,402,032	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5		Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	90	90	90	1,101,782,801	90	1,152,097,814	90	1,345,836,778	90	1,436,718,832	90	1,536,504,640	90	6,572,940,866	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	90	90	90	8,572,184	90	8,963,649	90	10,470,993	90	11,178,082	90	11,954,444	90	51,139,352	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5		Program pencegahan dini dan kesiapsiagaan	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	Jumlah Desa Tangguh Bencana dibagi jumlah desa rawan bencana x 100%	50	50	50	112,509,914	60	117,647,894	70	137,431,788	80	146,712,321	80	156,902,073	80	671,203,990	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	5		Program penanganan bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	Jumlah daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan dibagi Jumlah daerah terdampak bencana x 100%	80	80	80	365,227,941	80	381,906,771	80	446,128,941	80	476,255,265	80	509,333,078	80	2,178,851,996	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	5			Program Pasca Bencana	Persentase daerah terdampak bencana yang pulih (%)	Jumlah daerah terdampak bencana yang pulih jumlah daerah terdampak bencana x 100%	70	70	70	33,667,252	70	35,204,732	70	41,124,826	80	43,901,916	80	46,951,077	80	200,849,804	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
																				-	
1	5			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					784,830,338		889,517,216		1,039,100,126		1,109,268,779		1,186,311,886		5,009,028,345		
1	5			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	440,465,338	100	423,282,216	100	504,325,126	100	515,208,779	100	535,111,886	100	2,418,393,345	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	5			Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	59,000,000	100	63,000,000	100	85,000,000	100	90,300,000	100	106,000,000	100	403,300,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	5			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	31,500,000	100	31,500,000	100	32,000,000	100	33,000,000	100	35,000,000	100	163,000,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	5			Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	Jumlah kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan dibagi Jumlah masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan	40	50	80	51,350,000	80	99,400,000	80	115,350,000	80	129,450,000	80	132,500,000	80	528,050,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			Kebangsaan x 100%																	
1	5		Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan sesuai ketentuan dan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	Jumlah Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku / Jumlah Seluruh Parpol penerima Bantuan Keuangan x 100%	100	100	100	75,130,000	100	76,200,000	100	70,000,000	100	73,000,000	100	102,200,000	100	396,530,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	5		Program Pemeliharaan Kamtibmas	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani (%)	Jumlah potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani / Jumlah seluruh potensi kasus/kejadian konflik x 100%	80	80	80	65,735,000	80	86,585,000	80	93,725,000	80	122,310,000	80	124,000,000	80	492,355,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	5		Program Peningkatan dan Pembinaan Organisasi Masyarakat	Persentase Ormas yang terdata (%)	Jumlah Ormas yang terdata dibagi Jumlah Seluruh Ormas x 100%	100	100	80	61,650,000	85	77,150,000	85	104,200,000	90	109,000,000	90	112,500,000	90	464,500,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Program Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi	- Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya (%)	Jumlah masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya / Jumlah masyarakat yang diundang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya x 100%	80	80	80		80	32,400,000	80	34,500,000	80	37,000,000	80	39,000,000	90	142,900,000	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp	
		-	Jumlah masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	85	85	85		85		90		90		90		90	-		
		Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) x 100%															-		
1	6		BIDANG SOSIAL				7,570,090,119		4,790,061,435		4,964,564,508		5,147,792,732		5,340,182,369		27,812,691,162		
1	6		DINAS SOSIAL				7,570,090,119		4,790,061,435		4,964,564,508		5,147,792,732		5,340,182,369		27,812,691,162		
1	6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100	100	100	654,142,819	100	790,212,915	100	829,723,561	100	871,209,739	100	914,770,226	100	4,060,059,260	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100	100	100	59,555,000	100	111,557,750	100	117,135,638	100	122,992,419	100	129,142,040	100	540,382,847	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100	100	100	4,829,700	100	15,000,000	100	15,750,000	100	16,537,500	100	17,364,375	100	69,481,575	DINAS SOSIAL



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
			x 100%																	
1	6	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan PMKS lainnya	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	Jumlah PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 1 tahun x 100%	54.2	55	55	398,604,300	55.05	512,761,795	55.1	538,399,885	55.12	565,319,879	55.14	593,585,873	55.16	2,608,671,732	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan dibagi jumlah Rumah Tidak Layak Huni x 100%	1.4	2.26	23.00	4,024,579,700	2.27	398,000,000	2.28	417,900,000	2.29	438,795,000	2.3	460,734,750	2.3	5,740,009,450	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Pembinaan Anak Terlantar dan Lanjut Usia	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	Jumlah anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan dibagi jumlah anak terlantar dan lanjut usia x 100%	23.3	35	35	559,698,100	35.05	619,295,600	35.10	625,260,380	35.12	631,523,399	35.14	638,099,569	35.14	3,073,877,048	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang menerima pembinaan dibagi jumlah penyandang cacat dan trauma x 100%	2.9	3	3	471,125,000	3.02	486,424,000	3.04	490,745,200	3.06	495,282,460	3.08	500,046,583	3.08	2,443,623,243	DINAS SOSIAL
1	6	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	Jumlah PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS dibagi jumlah PSKS x 100%	55.1	56.1	56.1	682,968,000	56.15	1,126,492,500	56.16	1,182,817,125	56.17	1,241,957,981	56.18	1,304,055,880	56.18	5,538,291,487	DINAS SOSIAL



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
1 6	Program Pemberdayaan Panti Asuhan/ Panti Jompo	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial / Jumlah panti asuhan dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial x 100%	Jumlah panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial / Jumlah panti asuhan dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial x 100%	100	100	100	222,612,000	100	223,742,600	100	224,929,730	100	226,176,217	100	227,485,027	100	1,124,945,574	DINAS SOSIAL
1 6 1	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	Jumlah PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dibagi jumlah PMKS x 100%	-	-	10	491,975,500	10.05	506,574,275	10.10	521,902,989	10.12	537,998,138	10.14	554,898,045	10.14	2,613,348,947	DINAS SOSIAL
2	URUSAN WAJIB TIDAK TERKAIT PELAYANAN DASAR						60,871,638,112		64,656,526,506		74,645,133,012		79,898,244,854		85,727,017,692		365,798,560,176	
2 1	BIDANG TENAGA KERJA						679,090,286		710,102,239		829,514,385		885,530,072		947,033,639		4,051,270,621	
2 1	DINAS TENAGA KERJA						679,090,286		710,102,239		829,514,385		885,530,072		947,033,639		4,051,270,621	
2 1 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	85.72	100	100	370,875,547	100	370,875,547	100	385,875,547	100	391,891,234	100	403,394,801	100	1,922,912,676	DINAS TENAGA KERJA
2 1 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	66.68	100	100	65,877,239	100	78,889,192	100	183,301,338	100	233,301,338	100	283,301,338	100	844,670,445	DINAS TENAGA KERJA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2 1 1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	2,700,000	100	2,700,000	100	2,700,000	50	2,700,000	100	2,700,000	100	13,500,000	DINAS TENAGA KERJA
2 1 1	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	- Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	18.74	50	50	137,482,500	50	137,482,500	50	137,482,500	60	137,482,500	50	137,482,500	50	687,412,500	DINAS TENAGA KERJA
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dibagi jumlah tenaga kerja x 100%	60	60	60		60		60		60		60		60		
		- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dibagi jumlah tenaga kerja x 100%	45	45	45		45		45		45		45		45		
		- Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)	Jumlah lowongan terjadi bagi Jumlah pencari kerja di Tapin x 100%	3.85	4.03	10		10		10		10		10		10		
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	- Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) dibagi Jumlah seluruh kasus seluruh kasus PHI x 100%	85.71	50	50	39,105,000	50	57,105,000	50	57,105,000	50	57,105,000	50	57,105,000	50	267,525,000	DINAS TENAGA KERJA
		- Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek dibagi Jumlah pekerja/buruh	99.53	50	50		50		50		75		50		50		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		(%)	di Tapin x 100%																	
2	1	1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja LLK Tapin	- Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dibagi jumlah tenaga kerja x 100%	60,75	66,93	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000	75	63,050,000	75	315,250,000	DINAS TENAGA KERJA
2	2		BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK						2,898,939,860		3,929,771,285		4,165,785,575		4,602,364,123		5,149,174,024		20,746,034,867	
2	2		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2,898,939,860		3,929,771,285		4,165,785,575		4,602,364,123		5,149,174,024		20,746,034,867	
2	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100	1,480,265,760	100	1,655,457,325	100	1,786,840,555	100	1,965,524,609	100	2,162,077,068	100	9,050,165,317	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	85	100	100	75,800,000	100	121,642,500	100	133,806,750	100	147,187,425	100	161,979,668	100	640,416,343	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan yang tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan	95	100	100	12,174,200	100	12,782,910	100	14,061,201	100	15,467,321	100	17,014,053	100	71,499,685	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		tepat waktu (%)	yang disusun dan dilaporkan x 100%																	
2	2	1				94	90	90	120,120,000	90	236,920,605	90	260,612,665	90	286,673,931	90	315,341,323	90	1,219,668,524	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	1				94	90	90	51,710,100	90	179,295,605	90	192,225,165	90	231,447,681	90	247,092,448	90	901,770,999	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2	2	1				2	0.01	2,1	454,228,100	2,2	476,939,505	2,3	524,633,452	2,4	577,096,794	2,5	634,806,470	2,5	2,667,704,321	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
						51.6	52	53		54		55		56		57		57	-	
						13	15	17		18		19		20		22		22	-	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
2	2	1						Program Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak (%)	Jumlah perkawinan usia anak dibagi jumlah perkawinan x 100%	2.5	2.7	3	478,837,700	2.5	655,779,885	2.3	718,057,542	2.2	789,863,293	2.1	868,849,620	2.1	3,511,388,040	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
									Persentase keluarga pelaku usaha (%)	jumlah keluarga pelaku usaha dibagi jumlah keluarga x 100%	0.65	0.71	0.76		0.81		0.86		0.91		0.96		0.96			
2	2	1						Program Sistem Data Gender dan Anak	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	Jumlah data SIMFONI dan SIGA yang terinput dibagi jumlah data SIMFONI dan SIGA x 100%	80	85	90	61,529,000	90	171,732,950	90	184,406,245	90	202,846,869	90	217,131,555	90	837,646,619	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
2	2	1						Program Pemenuhan Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	Jumlah Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan dibagi jumlah kecamatan x 100%	8.33	8.33	8.3	164,275,000	8.3	419,220,000	8.3	351,142,000	8.3	386,256,200	8.3	524,881,820	8.3	1,845,775,020	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
									Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	Jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan dibagi Jumlah Sekolah x 100%	1.69	1.69	1.69		1.69		1.69		1.69		1.69		1.69	-		
									Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	Jumlah Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan dibagi Jumlah Puskesmas x 100%	8	8	8.33		7.69		7.69		7.69		7.69		7.69	-		
									Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	Jumlah Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA dibagi Jumlah Gugus Tugas KLA x 100%	75	75	75		50		50		50		50		50	-		



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	Jumlah Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan dibagi Jumlah Forum Anak Daerah x 100%	75	75	38.46		38.46		46.15		53.84		61.53		61.53	-			
2	3						1,221,883,895		1,282,978,090		1,347,126,994		1,414,483,344		1,485,207,511		6,751,679,834			
2	3						1,221,883,895		1,282,978,090		1,347,126,994		1,414,483,344		1,485,207,511		6,751,679,834			
2	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x100%	100	90	100	539,747,870	100	566,735,264	100	595,072,027	100	624,825,628	100	656,066,909	100	2,982,447,698	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	3	1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	80	100	95,415,025	100	100,185,776.25	100	105,195,065	100	110,454,818	100	115,977,559	100	527,228,244	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	3	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	74,298,600	100	78,013,530.00	100	81,914,207	100	86,009,917	100	90,310,413	100	410,546,666	DINAS KETAHANAN PANGAN
2	3	1	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per Tahun (kg) dibagi jumlah penduduk x 100%	15,286,000	12000	14,368,840	212,639,000	14,656,216	223,270,950.00	14,949,341	234,434,498	15,248,327	246,156,222	15,553,294	258,464,033	1,174,964,703	DINAS KETAHANAN PANGAN	



KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
2 3 1	Program Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi sesuai standar yang berlaku dalam kurun waktu tertentu dibagi jumlah sampel yang diuji x 100%	100	80	100	299,783,400	100	314,772,570.00	100	330,511,199	100	347,036,758	100	364,388,596	100	1,656,492,523	DINAS KETAHANAN PANGAN
																	-	
2 4	BIDANG PERTANAHAN						258,331,121		270,128,304		315,553,594		336,862,389		360,258,815		1,541,134,222	
1 4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN						258,331,121		270,128,304		315,553,594		336,862,389		360,258,815		1,541,134,222	
2 4 1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan (%)	Jumlah kecamatan yang terdata dibagi Jumlah seluruh kecamatan x 100%	8.33	50	18.18	107,641,600	18.18	114,438,783	18.18	129,350,000	18.18	140,362,389	27.27	154,758,815	100.00	646,551,586	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
2 4 1	Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	Jumlah advokasi pertanahan yang berhasil dibagi Jumlah seluruh advokasi pertanahan yang dilakukan x 100%	100.00	90	100.00	150,689,521	100	155,689,521	100.00	186,203,594	100.00	196,500,000	100.00	205,500,000	100.00	894,582,636	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
																	-	
2 5	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						16,391,508,468		17,140,057,965		20,022,362,770		21,374,438,662		22,858,978,010		97,787,345,875	
2 5	DINAS LINGKUNGAN HIDUP						16,391,508,468		17,140,057,965		20,022,362,770		21,374,438,662		22,858,978,010		97,787,345,875	
2 5 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	75	75	100	1,564,670,961	100	1,636,124,645	100	1,911,258,483	100	2,040,322,497	100	2,182,030,969	100	9,334,407,555	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		an (%)																		
2	5	1				75	75	100	65,050,018	100	68,020,651	100	79,459,133	100	84,824,872	100	90,716,296	100	388,070,970	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	5	1				75	100	100	6,532,900	100	6,831,237	100	7,979,991	100	8,518,866	100	9,110,535	100	38,973,530	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	5	1				41.67	50	50	5,358,127,015	58.33	5,602,816,104	58.33	6,544,996,335	66.67	6,986,968,737	66.67	7,472,241,364	66.67	31,965,149,555	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
						42.19	45.25	46.5		48.18		50.5		54.4		58.25		58.25		
						70	75	75		80		85		90		95		95		
2	5	1				Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	3,150,247,189	Cemar Sedang	3,294,109,235	Cemar Sedang	3,848,052,921	Cemar Sedang	4,107,905,349	Cemar Sedang	4,393,215,631	Cemar Sedang	18,793,530,324	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
		Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu	Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu / Parameter Pencemar Udara x 100%	80	80	80		80		80		80		80		80				
		Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Krriteria Baku	Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Krriteria Baku / Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji x 100%	0.6	0.6	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6		0.6				
2	5	1	Program Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Keanekaragaman Hayati	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	jumlah kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati / target kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati x 100%	18	20	20	4,195,344,428	40	4,386,932,833	60	5,124,647,817	80	5,470,706,514	100	5,850,668,730	100	25,028,300,322	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2	5	1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	Jumlah dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah dibagi jumlah dokumen lingkungan yang disusun x 100%	25	25	25	150,454,686	50	157,325,487	75	183,781,640	100	196,192,100	100	209,818,417	100	897,572,330	DINAS LINGKUNGAN HIDUP


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2	5	1				10	12	12.50	868,416,237	25	908,074,121	37.50	1,060,777,596	50&	1,132,410,091	62.50	1,211,060,453	62.50	5,180,738,498	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
2	5	1				29	20	24	327,830,169	28	342,801,159	32	400,447,255	36	427,488,773	40	457,179,560	40	1,955,746,917	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
						19	36	24		28		32		36		40		40			
2	5	1				38	87	43	344,221,678	57	359,941,217	64	420,469,618	71	448,863,212	79	480,038,538	79	2,053,534,263	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
2 6 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan yang dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	98.21	99	100	1,701,750	100	1,779,464	100	2,078,702	100	2,219,073	100	2,373,196	100	10,152,184	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 6 1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	Survei IKM	87.34	87	88	838,845,803	89	877,153,297	89	1,024,657,066	89	1,093,850,404	89	1,169,822,644	89	5,004,329,214	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 6 1	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	Survei IKM	87.34	87	88	223,037,194	89	233,222,612	89	272,441,771	89	290,839,298	89	311,039,238	89	1,330,580,113	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 6 1	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat Akurasi Data Penduduk (%)	Jumlah Data Kependudukan yang sesuai dibagi Jumlah Seluruh Data Kependudukan x 100%	88	1	90	70,137,609	90.1	73,340,577	90.2	85,673,668	90.3	91,459,064	90.4	97,811,258	90.4	418,422,175	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 6 1	Program Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	Jumlah Data Kependudukan yang dimanfaatkan dibagi Jumlah Seluruh Data Kependudukan x 100%	82.35	83	81	133,873,768	82	139,987,369	83	163,527,912	84	174,570,672	85	186,695,296	85	798,655,017	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2 7	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,167,965,499		4,358,303,593		5,091,204,230		5,435,004,538		5,812,487,111		24,864,964,971	
2 7	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4,167,965,499		4,358,303,593		5,091,204,230		5,435,004,538		5,812,487,111		24,864,964,971	


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
2	7	1				97	98	98	1,982,836,367	98	2,073,386,372	98	2,422,050,975	98	2,585,607,932	98	2,765,188,634	98	11,829,070,280	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2	7	1				97	98	98	38,420,511	98	40,175,057	98	46,930,971	98	50,100,140	98	53,579,792	98	229,206,472	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2	7	1				89	91	93	11,718,947	95	12,254,115	95	14,314,790	97	15,281,444	98	16,342,800	98	69,912,096	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
2	7	1				56	68	74	190,821,958	76	199,536,206	79	233,090,595	81	248,830,804	84	266,113,088	84	1,138,392,651	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA
						30	35	78		80		81		83		85		85		
						0.80	0.90	1.00		1.70		1.85		2.00		2.10		2.10		
2	7	1				30	35	40	980,357,130	43	1,025,127,008	47	1,197,514,319	67	1,278,380,412	70	1,367,168,990	70	5,848,547,859	DINAS PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DAN DESA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
		h desa sesuai standar (%)	jumlah desa x 100%																	
2	7	1	Program Keberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pedesaan	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	Jumlah kelompok binaan PKK dibagi jumlah PKK x 100%	78	83	85	963,810,586	89	1,007,824,835	91	1,177,302,579	93	1,256,803,808	94	1,344,093,806	94	5,749,835,614	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
				- Persentase PKK aktif (%)	Jumlah PKK aktif dibagi jumlah PKK x 100%	88	89	91		92		94		95		97		97		
				- Persentase posyandu aktif (%)	Jumlah posyandu aktif dibagi jumlah posyandu x 100%	78	80	82		84		87		88		90		90		
																		-		
2	8		BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5,989,722,268		6,263,254,359		7,316,495,146		7,810,565,542		8,353,040,226		35,733,077,540	
2	8		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						5,989,722,268		6,263,254,359		7,316,495,146		7,810,565,542		8,353,040,226		35,733,077,540	
2	8	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	98.40	100	100	1,479,053,618	100	1,516,935,526	100	1,621,931,327	100	1,632,530,692	100	1,955,064,883	100	8,205,516,045	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	98.07	100	100	234,635,000	100	246,366,750	100	258,685,088	100	271,619,342	100	285,200,309	100	1,296,506,488	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp						
2	8	1				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	335,390,000	100	335,390,000	100	335,390,000	100	335,390,000	100	335,390,000	100	1,676,950,000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1				Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	jumlah kelahiran total (TFR) per WUS / kelahiran total x 100%	2	2.05	2,11	1,159,250,000	2,1	1,326,598,750	2,09	1,424,269,938	2,08	1,535,753,434	2,07	1,679,099,356	2,07	7,124,971,478	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1				Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase peserta KB aktif MKJP (%)	Jumlah peserta KB aktif / jumlah seluruh peserta x 100%	7.35	7.58	8.90	57,115,000	8.88	62,970,750	8.87	76,962,288	8.86	71,117,752	8.83	75,423,640	8.83	343,589,430	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
2	8	1				Program Generasi Berencana (Genre)	- Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	Jumlah Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif dibagi Jumlah Seluruh Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) x 100%	74.12	66.07	66.12	120,609,500	67.02	126,639,975	68.02	152,971,974	79.52	139,620,572	71.12	146,601,601	71.12	686,443,622	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
							- Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	Jumlah Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja dibagi Jumlah Seluruh Keluarga yang ber-KB x 100%	67.01	90.02	91.10		92.28		92.36		92.56		92.80		92.80			
2	8	1				Program Pembangunan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	Jumlah keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS dibagi Jumlah seluruh keluarga ber KB x 100%	76.48	91.99	92.04	540,783,150	92.07	567,822,308	92.09	606,213,423	92.14	626,024,094	92.19	657,325,299	92.19	2,998,168,274	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	Jumlah keluarga ber KB yang aktif dalam BKB dibagi Jumlah seluruh keluarga ber KB x 100%	83.86	83.83	83.88		83.93		83.98		84.02		84.07		84.07			
		Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	Jumlah keluarga ber KB yang aktif dalam BKL dibagi Jumlah seluruh keluarga ber KB x 100%	71.81	71.86	71.91		72.11		73.61		73.11		73.66		73.66			
2	8	1	Program Pengendalian Penduduk	Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	55	60	65	14,640,000	70	15,372,000	75	16,140,600	80	16,947,630	85	17,795,012	85	80,895,242	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	Program Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (%)	58	60	65	32,076,000	70	33,679,800	75	45,363,790	80	37,131,980	85	38,988,578	85	187,240,148	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	8	1	Program Advokasi dan Penggerakan	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja / Jumlah seluruh kegiatan x 100%	15	20	30	2,016,170,000	35	2,031,478,500	4000	2,778,566,718	45	3,144,430,046	50	3,162,151,549	50	13,132,796,813	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	9		BIDANG PERHUBUNGAN				2,168,176,000		2,276,584,800		2,390,414,040		2,509,934,742		2,635,431,479		11,980,541,061		
2	9		DINAS PERHUBUNGAN				2,168,176,000		2,276,584,800		2,390,414,040		2,509,934,742		2,635,431,479		11,980,541,061		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	84,49	100,00	100,00	718,716,000	100,00	754,651,800	100,00	792,384,390	100,00	832,003,610	100,00	873,603,790	100,00	3,971,359,589	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	96,48	100,00	100,00	44,600,000	100,00	46,830,000	100,00	49,171,500	100,00	51,630,075	100,00	54,211,579	100,00	246,443,154	DINAS PERHUBUNGAN
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100,00	100,00	100,00	5,000,000	100,00	5,250,000	100,00	5,512,500	100,00	5,788,125	100,00	6,077,531	100,00	27,628,156	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	Jumlah Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar dibagi Jumlah Seluruh Prasarana Perhubungan x 100%	70	75	80	990,000,000	85	1,039,500,000	90	1,091,475,000	95	1,146,048,750	100	1,203,351,188	100	5,470,374,938	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Pelayanan Lalu-Lintas dan Angkutan	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek (%)	Jumlah angkutan umum yang memiliki izin trayek dibagi Jumlah seluruh angkutan umum x 100%	91,71	100,00	100,00	123,760,000	100,00	129,948,000	100,00	136,445,400	100,00	143,267,670	100,00	150,431,054	100,00	683,852,124	DINAS PERHUBUNGAN
	Program Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalulintas darat terhadap jumlah	rasio n - rasio n-1 / RASIO N-1 x 100%	40	40	45	186,100,000	55	300,405,000	65	315,425,250	75	331,196,513	85	347,756,338	85	1,580,883,101	DINAS PERHUBUNGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		kendaraan bermotor (%)																		
	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Persentase Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji KIR (%)	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Yang Lolos Uji KIR dibagi Jumlah Seluruh Kendaraan Wajib Uji x 100%	97	99	100,00	100,000,000												DINAS PERHUBUNGAN	
2	#						1,687,076,262		1,764,119,817		2,060,777,567		2,199,938,349		2,352,732,773		10,064,644,767			
2	#						1,687,076,262		1,764,119,817		2,060,777,567		2,199,938,349		2,352,732,773		10,064,644,767			
2	10	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100	606,417,558	100	634,110,773	100	740,744,048	100	790,765,226	100	845,687,000	100	3,617,724,606	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	10	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	78,784,192	100	82,382,022	100	96,235,540	100	102,734,161	100	109,869,455	100	470,005,370	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	10	1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	24,217,791	100	25,323,743	100	29,582,232	100	31,579,869	100	33,773,216	100	144,476,851	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab									
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD										
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp								
2	10	1					Program Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Teknologi dan E-Government	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki izin	Jumah sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki izin dibagi sarana dan prasarana telekomunikasi x 100%	55.09	57.33	57.33	112,719,075	59.67	117,866,607	62	137,687,280	64.67	146,985,067	64.67	157,193,761	100	672,451,790	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
2	10	1				Program Pengembangan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	Jumlah Layanan Informasi Berbasis TI dibagi Jumlah Layanan Informasi x 100%	80	100	100	864,937,645	100	904,436,672	100	1,056,528,466	100	1,127,874,026	100	1,206,209,340	100	5,159,986,150	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
								Persentase penyebaran Informasi melalui media massa (%)	jumlah penyebaran Informasi melalui media massa / jumlah informaasi x 100%	80	80	100		100			100		100			100				
								Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	jumlah Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online dibagi jumlah opini dan aspirasi x 100%	80	80	100		100			100		100			100				
2	11						BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
3	7	1					DINAS PERINDUSTRIAN																			
								Persentase Koperasi Aktif (%)	Jumlah koperasi aktif / Jumlah seluruh koperasi x 100%	82.39	83	86.96	51,137,363	87	53,472,648	87	62,464,711	88	66,682,846	88	71,314,234	87.84	305,071,802	DINAS PERINDUSTRIAN		
								Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat/ seluruh koperasi x 100%	10	12	40.00		50		60		70		80		80				



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	(Jumlah Wirausaha Terlatih tahun n+1) - (Jumlah Wirausaha Terlatih tahun n) dibagi (Jumlah Wirausaha Terlatih tahun n) x 100%	21	17	14.80	9,200,000	26	9,660,000	34	10,143,000	41	10,650,150	47	11,182,658	46.51	50,835,808	DINAS PERINDUSTRIAN		
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	Jumlah UMKM Yang Memiliki Izin Usaha Seluruh UMKM x 100%	4.49	4.50	14.02	39,850,000	15	60,650,000	16	60,650,000	17	60,650,000	18	60,650,000	17.88	282,450,000	DINAS PERINDUSTRIAN		
							-										-			
2	#		BIDANG PENANAMAN MODAL				1,726,949,604		1,805,814,051		2,109,483,183		2,251,932,972		2,408,338,628		10,302,518,438			
2	#		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU				1,726,949,604		1,805,814,051		2,109,483,183		2,251,932,972		2,408,338,628		10,302,518,438			
2	1 2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	90	90	100	524,491,646	100	548,443,557	100	640,670,871	100	683,934,278	100	731,436,220	100	3,128,976,572	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 2	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	90	90	100	140,840,982	100	147,272,754	100	172,038,421	100	183,655,881	100	196,411,509	100	840,219,547	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2	1 2	1	Program peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	6,857,747	100	7,170,919	100	8,376,795	100	8,942,465	100	9,563,555	100	40,911,481	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
2	1 2	1				Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	Jumlah pelaku usaha yang memiliki izin dibagi Jumlah seluruh pelaku usaha x 100%	100	100	100	351,707,277	100	367,768,661	100	429,613,340	100	458,624,393	100	490,477,672	100	2,098,191,344	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	Jumlah perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu dibagi Jumlah seluruh perusahaan pemilik izin x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
2	1 2	1				Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	Jumlah jenis investasi/promosi yang dipublikasikan dibagi Jumlah seluruh jenis investasi/promosi x 100%	100	100	100	10,500,925	100	10,980,470	100	12,826,967	100	13,693,150	100	14,644,193	100	62,645,706	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan dibagi jumlah seluruh stakeholder	100	100	100		100		100		100		100		100		
2	1 2	1				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pertumbuhan penanaman modal (%)	(Jumlah penanaman modal tahun n+1) - (Jumlah penanaman modal tahun n) dibagi Jumlah penanaman modal tahun n dikali 100%	-90	57.7	5	73,677,921	5	77,042,564	5	89,998,188	5	96,075,612	5	102,748,443	5	439,542,727	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
							Persentase dokumen RUPM yang tersedia	jumlah dokumen RUPM / target x 100%	0	0	-		50		-	50		-		-			
							Persentase rekomendasi PM (investor baru)	jumlah rekomendasi PM (investor baru) / jumlah rekomendasi x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD								
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp						
2	1	1				Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	Jumlah terlaksananya SOP Pelayanan / Jumlah seluruh SOP Pelayanan x 100%	100	100	100	618,873,105	100	647,135,126	100	755,958,602	100	807,007,192	100	863,057,035	100	3,692,031,061	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
							2. Persentase perizinan yang diterbitkan	Jumlah perizinan yang diterbitkan / jumlah perizinan x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100			
2	#					BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						18,150,338,309		18,979,208,125		22,170,787,926		23,667,943,292		25,311,775,612		108,280,053,265		
2	#					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						18,150,338,309		18,979,208,125		22,170,787,926		23,667,943,292		25,311,775,612		108,280,053,265		
2	1	3	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100	1,870,684,041	100	1,956,112,395	100	2,285,055,983	100	2,439,361,903	100	2,608,785,240	100	11,159,999,563	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	1	3	1			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	111,438,391	100	116,527,438	100	136,122,914	100	145,315,061	100	155,407,767	100	664,811,571	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	1	3	1			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	34,717,345	100	36,302,779	100	42,407,523	100	45,271,231	100	48,415,497	100	207,114,374	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
2	1	3	1			Program Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga Prestasi	jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh	Jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi	8	7	10	1,945,210,802	12	2,034,042,563	14	2,376,091,036	16	2,536,544,397	18	2,712,717,443	20	11,604,606,242	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2	1	1				100	100	100	14,115,472	100	14,760,082	100	17,242,166	100	18,406,500	100	19,684,904	100	84,209,125	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#								10,102,319		10,563,660		12,340,066		13,173,369		14,088,312		60,267,726	
2	#								10,102,319		10,563,660		12,340,066		13,173,369		14,088,312		60,267,726	
2	1	1				0	50	50	10,102,319	50	10,563,660	50	12,340,066	100	13,173,369	100	14,088,312	100	60,267,726	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2	#								2,421,097,517		2,531,661,553		2,957,284,584		3,157,098,109		3,376,371,065		14,443,512,828	
2	#								2,421,097,517		2,531,661,553		2,957,284,584		3,157,098,109		3,376,371,065		14,443,512,828	
2	1	1				82	90	92	1,151,321,617	95	1,107,094,708	96	1,151,321,239	98	1,151,322,364	100	1,151,322,020	100	5,712,381,948	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	1	1				80	90	92	185,892,000	95	85,120,000	96	143,120,000	98	94,720,000	100	143,120,000	100	651,972,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
2	1	1				100	100	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	18,000,000	100	90,000,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	1	1				90	98.57	83	312,924,000	85	365,835,000	90	365,835,000	95	415,835,000	100	415,835,000	100	1,876,264,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	1	1				100	100	100	556,321,900	100	664,434,245	100	738,236,245	100	816,841,245	100	822,841,245	100	3,598,674,880	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	1	1				20	30	40	78,493,000	50	140,007,500	45	177,102,000	75	196,709,400	80	241,981,680	80	834,293,580	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
2	1	1				20	30	35	118,145,000	40	151,170,100	50	363,670,100	45	463,670,100	80	583,271,120	80	1,679,926,420	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
																			-	
2	#								678,812,000		838,349,400		986,731,630		1,181,360,494		1,397,910,264		5,083,163,788	
2	#								678,812,000		838,349,400		986,731,630		1,181,360,494		1,397,910,264		5,083,163,788	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	415,077,000	100	498,092,400	100	597,710,880	100	717,253,056	100	860,703,667	100	3,088,837,003	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	70	80	90	38,500,000	90	66,600,000	90	79,920,000	90	95,904,000	90	115,084,800	90	396,008,800	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100		100	3,000,000	100	8,700,000	100	11,300,000	100	13,900,000	100	16,500,000	100	53,400,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Pelayanan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	Jumlah Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka dibagi Jumlah Seluruh Perpustakaan x 100%	3.98		3.98	95,200,000	4.48	119,000,000	4.97	148,750,000	5.47	185,937,500	5.97	232,421,875	5.97	781,309,375	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Survei IKM	70.83	71	72		73		74		75		76		76		
	Program Promosi Perpustakaan	Angka rata-rata pemanfaatan Perpustakaan	Jumlah pemanfaatan Perpustakaan dibagi Jumlah Seluruh Perpustakaan	5.005		2.99	9,900,000	2.29	12,375,000	1.08	15,468,750	0.37	19,335,938	0.56	24,169,922	0.56	81,249,609	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Pengembangan Budaya Baca & Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	(Jumlah Perpustakaan yang aktif sesuai SNP tahun n+1) - (Jumlah Perpustakaan yang aktif sesuai SNP tahun n) dibagi (Jumlah Perpustakaan yang aktif sesuai SNP tahun n) x 100%	30	33.33	100	117,135,000	100	133,582,000	50	133,582,000	33.33	149,030,000	25	149,030,000	25	682,359,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil	(Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil tahun n+1) - (Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil tahun n) dibagi (Jumlah tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil tahun n) x 100%	30	33.33	100		100		50		33.33		25		25		
		Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	(Jumlah koleksi bahan perpustakaan tahun n+1) - (Jumlah koleksi bahan perpustakaan tahun n) dibagi (Jumlah koleksi bahan perpustakaan tahun n) x 100%	4.17	0	3.84		4.23		4.06		4.39		4.20		4.20		
2	#		BIDANG KEARSIPAN				119,660,000		69,500,000		46,500,000		48,500,000		50,500,000		334,660,000	
2	#		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				119,660,000		69,500,000		46,500,000		48,500,000		50,500,000		334,660,000	


RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase jumlah perangkat daerah dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah dan Unit Kerja x 100%	Jumlah perangkat daerah dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK dibagi Jumlah seluruh perangkat daerah dan Unit Kerja x 100%	46.68	48.89	51.11	35,475,000	53.33	49,500,000	55.55	25,500,000	57.78	26,500,000	60	27,500,000	60	164,475,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase pengelola arsip yang terampil (%)	Jumlah pengelola arsip yang terampil dibagi Jumlah seluruh pengelola arsip x 100%	46.68	48.89	51.11	84,185,000	53.33	20,000,000	55.55	21,000,000	57.78	22,000,000	60	23,000,000	60	170,185,000	
																	-	
3							58,627,895,983		49,490,691,057		55,974,700,636		59,016,038,581		62,355,362,038		285,464,688,295	
3	1						3,747,916,887		3,919,072,660		4,578,111,386		4,887,263,413		5,226,703,197		22,359,067,544	
3	1						3,747,916,887		3,919,072,660		4,578,111,386		4,887,263,413		5,226,703,197		22,359,067,544	
3	1	1				100	775,125,245	100	810,522,818	100	946,821,879	100	1,010,759,141	100	1,080,960,363	100	4,624,189,446	DINAS PERIKANAN
3	1	1				70	63,249,859	70	66,138,285	70	77,260,225	70	82,477,475	70	88,205,862	70	377,331,706	DINAS PERIKANAN
3	1	1				100	6,454,855	100	6,749,628	100	7,884,658	100	8,417,095	100	9,001,696	100	38,507,932	DINAS PERIKANAN

BAB VII-KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
			x 100%																	
3	1	1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	Jumlah Realisasi Produksi Perikanan Budidaya dibagi Jumlah Target Produksi Perikanan Budidaya x 100%	100.09	100	100	2,031,303,280	100	2,124,066,619	100	2,481,253,708	100	2,648,808,525	100	2,832,778,759	100	12,118,210,890	DINAS PERIKANAN
3	1	1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	Jumlah Realisasi Produksi Perikanan Tangkap dibagi Jumlah Target Produksi Perikanan Tangkap x 100%	98.29	100	100	618,529,189	100	646,775,504	100	755,538,506	100	806,558,728	100	862,577,423	100	3,689,979,350	DINAS PERIKANAN
3	1	1	Program Peningkatan Kualitas Sdm, Kelembagaan Dan Optimalisasi Produksi Perikanan	Presentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas (%)	jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas / target jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas x 100%	0	100	100	253,254,459	100	264,819,807	100	309,352,410	100	330,242,449	100	353,179,094	100	1,510,848,220	DINAS PERIKANAN
3	2		BIDANG PARIWISATA						2,019,819,982		2,112,057,914		2,467,226,766		2,633,834,367		2,816,764,586		12,049,703,615	
2	#		DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA						2,019,819,982		2,112,057,914		2,467,226,766		2,633,834,367		2,816,764,586		12,049,703,615	
3	2	1	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	Jumlah destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik dibagi Jumlah seluruh destinasi wisata x 100%	68.18	70	70	1,003,211,982	73	1,078,212,914	75	1,305,257,166	78	1,366,001,047	80	1,513,133,266	80	6,265,816,375	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
3 2 1	Program Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	Jumlah kelompok sadar wisata yang aktif dibagi Jumlah seluruh kelompok sadar wisata x 100%	15	20	20	175,400,000	25	281,340,000	35	295,150,000	40	336,180,000	55	336,180,000	55	1,424,250,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3 2 1	Program Promosi dan Pemasaran Pariwisata	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	Jumlah destinasi wisata yang dipasarkan dibagi Jumlah seluruh destinasi wisata x 100%	20	25	30	822,208,000	33	677,555,000	35	791,819,600	40	835,653,320	50	858,251,320	50	3,985,487,240	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3 2 1	Program Pengembangan Usaha Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	Jumlah pelaku usaha pariwisata yang dibina dibagi Jumlah seluruh pelaku usaha pariwisata x 100%	15	25	30	19,000,000	35	74,950,000	40	75,000,000	45	96,000,000	50	109,200,000	50	374,150,000	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
3 3	BIDANG PERTANIAN						43,745,662,193		33,947,852,713		37,806,807,350		39,617,025,173		41,604,590,814		196,721,938,243	
3 3	DINAS PERTANIAN						43,745,662,193		33,947,852,713		37,806,807,350		39,617,025,173		41,604,590,814		195,921,938,243	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	2,727,916,836	100	2,852,492,361	100	3,332,172,911	100	3,557,188,845	100	3,804,249,687	100	16,274,020,640	Dinas Pertanian
	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	2,132,922,235	100	2,230,326,196	100	2,605,382,099	100	2,781,319,093	100	2,974,492,711	100	12,724,442,334	Dinas Pertanian
	Program Peningkatan pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan	100	100	100	7,001,160	100	7,320,881	100	8,551,974	100	9,129,475	100	9,763,553	100	41,767,043	Dinas Pertanian



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
			x 100%															
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Berkelanjutan	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	Jumlah produksi padi dibagi luas lahan tanam padi x 100%	48.25	48.50	49.23	5,974,014,614	49.97	6,018,494,849	50.72	6,189,766,883	51.48	6,270,109,805	52.25	6,358,323,957	52.25	30,810,710,108	Dinas Pertanian
		- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	Jumlah produksi jagung dibagi luas lahan tanam padi x 100%	46.75	47.33	48.04	-	48.76	-	49.49	-	50.23	-	50.99	-	50.99	-	
		- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	Jumlah produksi kedelai dibagi luas lahan tanam padi x 100%	8.76	9.05	9.19	-	9.32	-	9.46	-	9.61	-	9.75	-	9.75	-	
		- Luas Panen Padi (Ha)	Luas Panen Padi	75,302	78,966.39	79,899.98		80,844.61		81,800.41		82,767.51		83,746.04		488,024.96		
		- Luas Panen Jagung (Ha)	Luas Panen Jagung	1,038	1,691.11	1,749.42		1,809.74		1,872.15		1,936.71		2,003.49		11,062.61		
		- Luas Panen Kedelai (Ha)	Luas Panen Kedelai	77	104.97	108.59		112.34		116.21		120.22		124.36		686.69		
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik dibagi jumlah mutu baik (%)	Jumlah RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik dibagi jumlah RMU x 100%	2.50	3.35	5.00	4,068,534,611	10.00	4,071,664,374	15.00	4,083,715,592	20.00	4,089,368,763	25.00	4,095,575,777	25.00	20,408,859,116	Dinas Pertanian
		- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	1.00	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00		
	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hortikultura	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	Luas Panen Cabe Rawit Hiyung	111	111.55	112.10	1,020,422,489	112.66	1,067,022,028	113.21	1,246,454,486	113.77	1,330,625,424	114.34	1,423,042,625	677.64	6,087,567,051	Dinas Pertanian



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Berkelanjutan																	
		- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	Luas Panen Bawang Merah	111	149.13	151.29		153.48		155.71		157.97		160.25		927.84			
		- Luas Panen Jeruk (Ha)	Luas Panen Jeruk	464	464.18	468.83		473.51		478.25		483.03		487.86		2855.67			
		Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	Jumlah produksi cabe rawit dibagi luas lahan tanam padi x 100%	7.97	8,55	8.64		8.72		8.81		8.90		8.99		8.99			
		Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	Jumlah produksi bawang merah dibagi luas lahan tanam padi x 100%	6.96	6,67	6.87		7.08		7.29		7.51		7.73		7.73			
		Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	Jumlah produksi jeruk dibagi luas lahan tanam padi x 100%	0.89	1.99	0.91		0.94		0.97		1.00		1.03		1.03			
		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	Jumlah Kelompok tani yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura dibagi jumlah kelompok tani hortikultura x 100%	2.50	5.00	7.50	265,819,995	10.00	277,959,172	12.50	324,701,316	15.00	346,627,840	17.50	370,702,515	17.50	1,585,810,838	Dinas Pertanian
		- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pemasaran Hasil Hortikultura (%)	Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	1.00	1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		6.00			
		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	- Persentase lahan sawah fungsional yang terairi dibagi luas lahan sawah fungsional	Jumlah lahan sawah fungsional yang terairi dibagi luas lahan sawah fungsional	15.18	15.22	15.26	18,084,728,839	15.30	8,453,933,401	15.35	9,875,562,949	15.40	10,542,442,814	15.45	11,274,657,186	15.45	58,231,325,189	Dinas Pertanian



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pra panen (%)	Jumlah ketersediaan alat mesin pertanian pra panen dibagi jumlah kebutuhan alat mesin pertanian pra panen x 100%	26.56	26.89	27.16		27.43		27.71		27.98		28.26		28.26		
		- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pasca panen (%)	Jumlah ketersediaan alat mesin pertanian pasca panen dibagi jumlah kebutuhan alat mesin pertanian pasca panen x 100%	2.32	2.41	2.43		2.46		2.48		2.51		2.53		2.53		
		- Jumlah luas lahan fungsional (Ha)	Jumlah luas lahan fungsional (Ha)	63.038	63.038.00	63.063.00		63.088.00		63.113.00		63.138.00		63.163.00		63.163.00		
		Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Perkebunan Berkelanjutan	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	621.18	603.09	613.88	936,073,914	632.30	978,821,514	651.27	1,143,422,005	670.80	1,220,635,336	690.93	1,305,413,290	690.93	5,584,366,059	Dinas Pertanian
		- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	Jumlah produksi karet dibagi luas lahan tanam sawit x 100%	1,878.70	1,789.24	3,239.35	-	3,336.53	-	3,436.63	-	3,539.73	-	3,645.92	-	3,645.92	-	
		- Luas Tanaman Karet (Ha)	Luas Tanaman Karet (Ha)	399.27	13.309.00	14,118.21		14,541.76		14,978.01		15,427.35		15,890.17		15,890.17		
		- Luas Tanaman Sawit (Ha)	Luas Tanaman Sawit (Ha)	2248.05	44.961.00	3,239.35		3,336.53		3,436.63		3,539.73		3,645.92		3,645.92		
		- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	intensitas serangan OPT Perkebunan dibagi intensitas serangan x 100%	5.00	5.00	4.50		4.00		3.50		3.00		2.50		2.50		
		Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik dibagi jumlah kelompok tani RPBSK x 100%	9.38	12.50	15.63	862,041,181	18.17	64,874,410	21.88	75,783,815	25.00	80,901,366	28.18	86,520,286	28.18	370,121,057	Dinas Pertanian



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Peternakan Berkelanjutan	- Populasi sapi (ekor)	Populasi sapi (ekor)	6751	6,900	7,015	4,184,419,866	7,132	4,375,509,379	7,251	5,111,303,374	7,372	5,456,460,943	7,495	5,835,433,748	7495	24,963,127,309	Dinas Pertanian
		- Populasi kambing (ekor)	Populasi kambing (ekor)	4526	4,585	4,650		4,716		4,783		4,851		4,920		4920		
		- Populasi unggas (ekor)	Populasi unggas (ekor)	2281314	2,301,089	2,315,533		2,330,206		2,346,072		2,364,135		2,364,135		2364135		
		- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	Jumlah konsumsi daging dibagi jumlah penduduk x 100%	3.8	3.80	3.84		3.89		3.94		4.00		4.05		4.05		
		- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	Jumlah penyakit hewan yang tertangani dibagi jumlah kasus penyakit hewan yang ditemukan x 100%	100	100.00	100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		100.00		
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	Jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina dibagi jumlah kelompok pengolahan hasil peternakan x 100%	2.00	2.00	2.00	198,881,268	2.00	207,963,560	2.00	242,935,109	2.00	259,340,101	2.00	277,352,297	2.00	1,186,472,335	Dinas Pertanian
	Program Pemberdayaan Penyuluhan	- Persentase Kelas kelompok tani Madya (%)	Jumlah Kelas kelompok tani Madya dibagi jumlah kelompok tani x 100%	25	25.00	13.00	3,282,885,188	16.00	3,341,470,587	19.00	3,567,054,837	22.00	3,672,875,368	25.00	3,789,063,182	50.00	17,653,349,163	Dinas Pertanian
		- Persentase penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis (%)	Jumlah penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis dibagi jumlah penyuluh x 100%	25	25.00	35.00		45.00		55.00		65.00		75.00		75.00		
3	6		BIDANG PERDAGANGAN				7,612,190,491		7,959,815,688		9,298,353,461		9,926,255,357		10,615,673,071		45,412,288,068	
3	6		DINAS															



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
3 6 1	Program Promosi dan Informasi Daerah	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan (%)	Jumlah Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan dibagi Jumlah Seluruh Jenis Produk Lokal x 100%	100	100	100	270,400,000	100	300,000,000	100	300,000,000	100	310,000,000	100	325,000,000	100	1,505,400,000	DINAS PERDAGANGAN
3 6 1	Program Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (indeks)	Survei IKM	71.06	73	75	5,208,440,000	76	3,065,000,000	76	6,164,000,000	78	6,480,000,000	79	7,108,000,000	79	28,025,440,000	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat (%)	Jumlah informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat dibagi Jumlah seluruh informasi harga Barang Pokok dan Penting x 100%	100	102,08	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase pasar tradisional yang dibangun	jumlah pasar tradisional yang dibangun dibagi jumlah target pembangunan pasar	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
		Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi	jumlah pasar tradisional yang direvitalisasi dibagi jumlah target revitalisasi pasar	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
3 6 1	Program Pengembangan Usaha Perdagangan	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan (%)	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan dibagi Jumlah Seluruh Rekomendasi Izin Usaha yang diajukan x 100%	100	100	100	368,650,000	100	521,300,000	100	451,000,000	100	520,000,000	100	456,000,000	100	2,316,950,000	DINAS PERDAGANGAN
		Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang	Jumlah Petani yang mendapat Resi Gudang dibagi Jumlah Seluruh Petani x 100%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	DINAS PERDAGANGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp			
		(%)																			
3	7						1,502,306,429		1,551,892,082		1,824,201,673		1,951,660,271		2,091,630,370				8,921,690,825		
3	7						1,502,306,429		1,551,892,082		1,824,201,673		1,951,660,271		2,091,630,370				8,921,690,825		
2	1	1	1				100	100	100	627,924,047	100	603,218,565	100	721,811,266	100	754,866,693	100	835,968,807	100	3,543,789,378	DINAS PERINDUSTRIAN
2	1	1	1				96.99	100	100	49,450,000	100	112,450,000	100	58,450,000	100	109,450,000	100	60,450,000	100	390,250,000	DINAS PERINDUSTRIAN
2	1	1	1				100	100	100	3,428,873	100	3,585,460	100	4,188,396	100	4,471,233	100	4,781,777	100	20,455,739	DINAS PERINDUSTRIAN
							0.85	0.98	1.03	205,610,684	1.43	136,619,457	2.01	195,952,011	2.37	194,172,345	3.08	284,629,786	3.08	1,016,984,283	DINAS PERINDUSTRIAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri logam dan aneka / aneka (%)	jumlah bertambahnya pelaku usaha industri logam dan aneka / jumlah seluruh pelaku usaha industri logam dan aneka x 100%	1	1.2	1,33		1,73		2,31		2,67		3,38		3,38			
	Program Pembinaan, Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Berbasis Agro Dan Kimia	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	jumlah bertambahnya usaha industri agro dan kimia / jumlah seluruh usaha industri agro dan kimia x 100%	0.2	0.25	0.30	615,892,825	0.33	696,018,600	0.37	843,800,000	0.38	888,700,000	0.41	905,800,000	0.41	3,950,211,425		DINAS PERINDUSTRIAN
		Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	jumlah bertambahnya pelaku usaha industri agro dan kimia / jumlah seluruh pelaku usaha industri agro dan kimia x 100%	0.15	0.20	0.23		0.25		0.26		0.27		0.29		0.29	-		
4		FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN					101,316,083,700		107,819,033,875		123,636,537,687		132,634,138,862		140,706,555,592		606,112,349,716		
4	3	PERENCANAAN					4,328,802,102		4,526,485,107		5,287,667,467		5,644,734,602		6,036,783,757		25,824,473,034		
4	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					4,328,802,102		4,526,485,107		5,287,667,467		5,644,734,602		6,036,783,757		25,824,473,034		
4	3	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	1,328,925,188	100	1,389,613,091	100	1,623,293,076	100	1,732,911,280	100	1,853,268,826	100	7,928,011,461		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 3 1	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	366,460,863	100	383,195,997	100	447,634,967	100	477,862,990	100	511,052,465	100	2,186,207,282	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 3 1	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	23,144,897	100	24,201,852	100	28,271,682	100	30,180,820	100	32,276,998	100	138,076,249	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
4 3 1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	- Persentase perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah x 100%	100	100	100	2,406,741,792	100	2,516,650,246	100	2,939,854,946	100	3,138,378,319	100	3,356,351,113	100	14,357,976,416	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		- Persentase sasaran dan program RKPd yang konsisten dengan RPJMD:		100	100	100		100		100		100		100		100		
		a. sasaran	Jumlah sasaran RKPd yang konsisten dengan RPJMD dibagi jumlah sasaran di RKPd x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		b. program	Jumlah program RKPd yang konsisten dengan RPJMD dibagi jumlah program di RKPd x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD		100	100	100		100		100		100		100		100		
		a. program	Jumlah program dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD dibagi jumlah program dalam KUA PPAS x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		b. kegiatan	Jumlah kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD dibagi jumlah kegiatan dalam KUA PPAS x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah		100	100	100		100		100		100		100		100		
		a. kinerja	Persentase pencapaian kinerja seluruh program perangkat daerah dibagi jumlah program	100	100	100		100		100		100		100		100		
		b. anggaran	Persentase pencapaian anggaran seluruh program perangkat daerah dibagi jumlah program	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD							
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp						
4	3	1				Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD dibagi jumlah program RENSTRA PD x 100% (%)	Jumlah program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD dibagi jumlah program RENSTRA PD x 100%	100	100	100	99,094,446	100	103,619,783	100	121,044,683	100	129,218,624	100	138,193,368	100	591,170,905	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
							2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)		100	100	100		100		100		100		100		100		
							a. program	Jumlah program RENJA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang konsisten dengan RENSTRA PD dibagi jumlah program RENJA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		b. kegiatan	Jumlah kegiatan RENJA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang konsisten dengan RENSTRA PD dibagi jumlah kegiatan RENJA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)		100	100	100		100		100		100		100		100		
		a. kinerja	Persentase pencapaian kinerja seluruh program perangkat daerah Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dibagi jumlah program Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
		b. anggaran	Persentase pencapaian anggaran seluruh program perangkat daerah Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dibagi jumlah	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			program Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur																	
4	3	1	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	Jumlah program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD dibagi jumlah program RENSTRA PD x 100%	100	100	100	104,434,917	100	109,204,137	100	127,568,112	100	136,182,569	100	145,640,987	100	623,030,721	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
				2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)		100	100	100		100		100		100		100		100		
				a. program	Jumlah program RENJA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM yang konsisten dengan RENSTRA PD dibagi jumlah program RENJA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		b. kegiatan	Jumlah kegiatan RENJA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM yang konsisten dengan RENSTRA PD dibagi jumlah kegiatan kegiatan RENJA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)		100	100	100		100		100		100		100		100		
		a. kinerja	Persentase pencapaian kinerja seluruh program perangkat daerah Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM dibagi jumlah program Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	100	100	100		100		100		100		100		100		
		b. anggaran	Persentase pencapaian anggaran seluruh program perangkat daerah Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDMr dibagi jumlah program Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM	100	100	100		100		100		100		100		100		
4	4	KEUANGAN					8,088,180,573		8,932,002,903		9,703,280,111		10,244,706,313		10,823,601,506		47,791,771,405	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
4	4							5,460,450,451		6,184,272,474		6,493,486,097		6,818,160,402		7,159,068,422		32,115,437,846		
4	4					100	100	100	1,902,652,851	100	1,997,785,494	100	2,097,674,768	100	2,202,558,507	100	2,312,686,432	100	10,513,358,051	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4					97,05	100	100	299,295,000	100	314,259,750	100	329,972,738	100	346,471,374	100	363,794,943	100	1,653,793,805	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4					100	100	100	9,765,000	100	10,253,250	100	10,765,913	100	11,304,208	100	11,869,419	100	53,957,789	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4					100	100	100	1,146,500,000	100	1,203,825,000	100	1,264,016,250	100	1,327,217,063	100	1,393,577,916	100	6,335,136,228	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4					0	0	0	257,970,000	0	270,868,500	0	284,411,925	0	298,632,521	0	313,564,147	0	1,425,447,094	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
4	4					100	100	100	556,800,000	100	864,640,000	100	907,872,000	100	953,265,600	100	1,000,928,880	100	4,283,506,480	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
4	4					100	100	100	1,287,467,600	100	1,522,640,480	100	1,598,772,504	100	1,678,711,129	100	1,762,646,686	100	7,850,238,399	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
						97,57	93,03	100		100		100		100		100		100		
						100	100	100		100		100		100		100		100		
						100	100	85		87		90		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	Jumlah dokumen RKBU SKPD yang terverifikasi dibagi jumlah RKBU SKPD yang diusulkan x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100			
4	4						2,627,730,122		2,747,730,429		3,209,794,014		3,426,545,910		3,664,533,083		15,676,333,559		
4	4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	1,135,271,324	100	1,187,115,654	100	1,386,743,284	100	1,480,387,685	100	1,583,206,468	100	6,772,724,414	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	291,338,958	100	304,643,507	100	355,872,940	100	379,904,430	100	406,290,296	100	1,738,050,131	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
4	4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	200	100	100	3,428,874	100	3,585,460	100	4,188,397	100	4,471,233	100	4,781,777	100	20,455,741	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
4	4	Program Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase peningkatan objek an objek (OP)	(Jumlah objek pajak tahun n) - (Jumlah objek pajak tahun n-1) dibagi (Jumlah objek pajak tahun n-1) x 100%	99.81		0.05	967,262,948	0.05	1,011,434,855	0.05	1,181,519,667	0.05	1,261,305,668	0.05	1,348,908,338	0.05	5,770,431,476	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp				
	A MANUSIA																					
4	5																					
4	5																					
4	5																					
4	5																					
4	5																					
4	5																					



KODE		URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
					2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
4	5			Program Peningkatan Kapasitas SDM	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal dibagi jumlah ASN di Pemda Tapin x 100%	90.01	99	70	606,013,972	75	633,688,756	80	740,251,065	85	790,238,952	90	845,124,175	90	3,615,316,920	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
4	5			Program Pengelolaan dan Informasi Kepegawaian	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (%)	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian dibagi jumlah ASN di Pemda Tapin x 100%	98	99	99	448,842,465	99	469,339,713	99	548,264,773	99	585,288,155	99	625,938,733	99	2,677,673,839	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
					Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja (%)	Jumlah pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja dibagi pemenuhan kebutuhan pegawai x 100%	95	95	95		95		95		95		95		95		
4	7			PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
4	3			BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																	
4	7	1		Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (%)	Jumlah rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan dibagi jumlah rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan x 100%	100	100	100	128,582,759	100	134,454,736	100	157,064,901	100	167,671,224	100	179,316,655	100	767,090,275	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD									
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp							
4	1							81,212,904,726		86,323,344,755		99,256,837,945		106,721,939,418		113,127,291,558		486,642,318,402							
4	1							46,076,781,477		49,561,607,011		57,703,624,475		62,514,077,999		66,110,507,981		281,966,598,944							
								Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100	1,929,855,769	100	Rp2,017,986,314	100	Rp2,357,334,737	100	Rp2,516,521,518	100	Rp2,691,303,895	100	11,513,002,233	Bagian Perengkapan, Sekretariat Daerah
4	1							Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100	11,346,800,845	100	11,914,140,887	100	15,166,042,255	100	16,190,179,133	100	17,314,651,141	100	71,931,814,261	Bagian Umum, Sekretariat Daerah	
4	1							Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	94.7	94.7	95	15,425,296,022	95	16,072,633,492	96	18,958,401,963	96	20,142,751,886	97	21,442,533,811	97	92,041,617,175	Bagian Perengkapan Sekretariat Daerah
4	1							Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	72,200,000									100	72,200,000	Bagian Umum, Sekretariat Daerah
4	1							Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan kinerja dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan	100	100	100	70,540,000	100	74,067,000	100	77,770,350	100	81,658,868	100	85,741,811	100	389,778,028	Bagian Umum, Sekretariat Daerah



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			x 100%																	
4	1		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	90	90	95	45,905,588	100	48,001,954	100	56,074,054	100	59,860,639	100	64,018,197	100	273,860,433		Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah
4	1		Program Peningkatan Kinerja Aparatur Daerah	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten (point)	2,9	3,0	3,0	445,600,000	3,0	731,200,709	3,0	854,160,813	3,0	911,840,831	3,0	975,171,785	3,0	3,917,974,138		Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah
4	1		Program Fasilitasi dan Penataan Batas Wilayah	Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan (%)	100	100	100	45,000,000	100	49,500,000	100	52,400,000	100	54,000,000	100	57,500,000	100	258,400,000		Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah
4	1		Program Peningkatan Kesadaran Luhur Perjuangan Bangsa	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu (%)	100	100	100	249,987,000	100	220,014,875	100	233,649,746	100	249,427,714	100	266,751,455	100	1,219,830,790		Bagian Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah
4	1		Program Pembinaan Kehidupan Beragama Untuk Meningkatkan Iman Dan Taqwa	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	40.38	54	65	3,014,690,425	68	4,104,554,759	71	3,970,504,353	74	4,987,195,016	77	4,533,015,045	77	20,609,959,598		Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
4	1				95.92	78	79	809,503,899	83	834,851,327	88	975,241,517	93	1,041,097,907	98	1,113,406,277	98	4,774,100,927	Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Sekretariat Daerah
4	1				100	100	100	2.998.038.267	100	3.134.949.402	100	3.562.128.467	100	3.909.425.735	100	4.180.950.824	100	17.785.492.695	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protikol, Sekretariat Daerah
4	1				100	100	100	450,725,431	100	471,308,608	100	550,564,831	100	587,473,532	100	628,564,646	100	2,688,637,048	Bagian Hubungan Masyarakat dan Protikol, Sekretariat Daerah
4	1				80		85	42,003,701	90	43,921,880	95	51,307,868	100	54,772,600	100	58,576,774	100	250,582,823	Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah
4	1				80	80	85	502,064,241	90	524,991,962	95	613,275,611	100	654,689,063	100	700,159,809	100	2,995,180,686	Bagian Ekonomi dan Pembangunan, Sekretariat Daerah

BAB VII-KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi	Jumlah kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi kerjasama (MoU) x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
4	1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100	100	100	2,440,230,000	100	2,684,253,000	100	2,952,678,300	100	3,247,946,130	100	3,572,740,743	100	14,897,848,173	Bagian Perlengkapan, Sekretariat Daerah
4	1	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100	100	100	4,389,196,008	100	4,608,655,808	100	4,977,348,273	100	5,375,536,134	100	5,805,579,025	100	25,156,315,248	Bagian Umum, Sekretariat Daerah
4	1	Program Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase paket pekerjaan yang diselesaikan proses lelangnya dibagi jumlah paket pekerjaan yang diajukan perangkat daerah untuk diproses lelang x 100%	80	100	100	648,063,600	100	643,073,000	90	678,586,966	90	724,410,782	95	774,723,978	95	3,468,858,326	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	1			Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Usulan Raperda/Perbup yang diharmonisasi (%)	Jumlah Usulan Raperda/Perbup yang diharmonisasi dibagi jumlah usulan Raperda/Perbup x 100%	89,29	100	100	687,146,800	100	898,381,727	100	1,049,455,310	100	1,120,323,232	100	1,198,134,113	100	4,953,441,183	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
4	1			Program peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	Jumlah perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	100	100	100	116,301,391	100	121,612,516	100	142,063,108	100	151,656,387	100	162,189,523	100	693,822,925	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
4	1			Program Penataan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	Jumlah Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	100	100	100	148,813,113	100	155,608,948	100	181,776,445	100	194,051,497	100	207,529,141	100	887,779,144	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
4	1			Program Peningkatan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan (%)	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	100	100	100	182,660,810	100	191,002,364	100	223,121,686	100	238,188,711	100	254,731,860	100	1,089,705,431	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
4	1			Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	Hasil Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin	100	100	100	16,158,567	100	16,896,478	100	19,737,823	100	21,070,684	100	22,534,126	100	96,397,678	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah
4	1			SEKRETARIAT DPRD						18,103,738,963		18,930,480,731		22,113,866,441		23,607,177,996		25,246,789,926		108,002,054,058	
4	1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	84,26	100	90	2,155,254,615	90	2,253,678,428	90	2,632,661,286	90	2,810,440,397	90	3,005,636,604	90	12,857,671,330	SEKRETARIAT DPRD



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	1					80,99	90	90	446,853,376	90	467,259,787	90	545,835,084	90	582,694,393	90	623,164,824	90	2,665,807,464	SEKRETARIAT DPRD
4	1					90,16	90	90	1,341,546,786	90	1,402,811,078	90	1,638,710,462	90	1,749,369,775	90	1,870,870,429	90	8,003,308,531	SEKRETARIAT DPRD
4	1					95,47	100	100	53,820,457	100	56,278,271	100	65,742,132	100	70,181,586	100	75,055,974	100	321,078,419	SEKRETARIAT DPRD
4	1					89,06	90	90	12,967,060,484	90	13,559,226,033	90	15,839,371,318	90	16,908,976,955	90	18,083,372,317	90	77,358,007,107	SEKRETARIAT DPRD
4	1					65,99	80	80	1,047,872,336	80	1,095,725,425	80	1,279,984,700	80	1,366,419,877	80	1,461,323,144	80	6,251,325,483	SEKRETARIAT DPRD
4	1					-	70	80	91,330,909	80	95,501,709	80	111,561,459	80	119,095,013	80	127,366,633	80	544,855,724	SEKRETARIAT DPRD



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			pengawasan DPRD x 100%																	
4	2		PENGAWASAN				5,111,314,084		5,344,731,991		6,243,512,306		6,665,126,007		7,128,045,383		30,492,729,771			
4	2		INSPEKTORAT				5,111,314,084		5,344,731,991		6,243,512,306		6,665,126,007		7,128,045,383		30,492,729,771			
4	2	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100	1,004,795,862	100	1,050,681,782	100	1,227,366,432	100	1,310,248,387	100	1,401,250,322	100	5,994,342,785	INSPEKTORAT
4	2	1	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	208,550,434	100	218,074,288	100	254,746,075	100	271,948,642	100	290,836,551	100	1,244,155,990	INSPEKTORAT
4	2	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	156,255,165	100	163,390,855	100	190,866,973	100	203,755,893	100	217,907,546	100	932,176,432	INSPEKTORAT
4	2	1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu / Jumlah seluruh obyek pemeriksaan x 100%	Jumlah obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu / Jumlah seluruh obyek pemeriksaan x 100%	100	100	100	2,679,166,654	100	2,801,515,909	100	3,272,624,163	100	3,493,618,872	100	3,736,264,527	100	15,983,190,125	INSPEKTORAT



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
		- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu / Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler x 100%	70.22	60.92	80	-	85	-	90	-	95	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
		- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	Jumlah perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu / Jumlah seluruh perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP x 100%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
		- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu / Jumlah seluruh aduan masyarakat x 100%	Jumlah aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu / Jumlah seluruh aduan masyarakat x 100%	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	INSPEKTORAT
4	2	1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	Jumlah Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat / Jumlah seluruh Aparat pengawas fungsional pemerintah x 100%	100	135,654,811	100	141,849,746	100	165,703,470	100	176,893,142	100	189,179,071	100	809,280,240	INSPEKTORAT
4	2	1	Program Penunjang dan Pendukung Good Governance	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu / Jumlah seluruh	76.97	772,951,682	80	808,249,995	85	944,166,854	90	1,007,924,826	95	1,077,929,194	95	4,611,222,552	INSPEKTORAT



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
			rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI x 100%																	
		- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3	Jumlah SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3 / Jumlah seluruh SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3 dikali 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		100		
		- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	Jumlah Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 dibagi Jumlah seluruh Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 dikali 100%	50	50	60		70		80		90		100		100		100		
4	2	1	Program Peningkatan Informasi Bidang Pengawasan	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu (%)	Jumlah laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu / Jumlah seluruh laporan ikhtisar hasil pengawasan x 100%	100	100	100	153,939,475	100	160,969,415	100	188,038,339	100	200,736,246	100	214,678,173	100	918,361,648	INSPEKTORAT
4	1		KECAMATAN TAPIN UTARA						3,394,904,452		3,568,113,025		3,752,693,676		3,944,278,360		4,145,792,278		18,805,781,790	
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Utara (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	50,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apartur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	97.38	80	80	62,323,000	80	64,000,000	80	66,000,000	80	68,000,000	80	70,000,000	80	330,323,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	7,050,000	100	7,500,000	100	10,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000	100	50,550,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	- Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	55	60	65	12,600,000	70	15,000,000	75	17,000,000	80	20,000,000	85	25,000,000	100	89,600,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
		- Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		-		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
					100	100	100	53,300,000	100	55,000,000	100	58,000,000	100	60,000,000	100	65,000,000	100	291,300,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
					100	100	100	10,000,000	100	15,000,000	100	20,000,000	100	23,000,000	100	25,000,000	100	93,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
4	1				100	100	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	2,500,000,000	100	12,500,000,000	KECAMATAN TAPIN UTARA
4	1				100	100	100	739,631,452	100	901,613,025	100	1,071,693,676	100	1,250,278,360	100	1,437,792,278	100	5,401,008,790	KECAMATAN TAPIN UTARA
4	1																		
4	1							298,429,651		310,094,333		312,009,425		333,078,887		356,212,534		1,609,824,831	
4	1				85	85	86.40	183,429,651	86.50	195,094,333	86.6	181,009,425	86.80	188,078,887	86.80	198,212,534	86.80	945,824,831	KECAMATAN TAPIN TENGAH
					100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	-		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Diselesaikan (%)	100%																	
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100					-	
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	38,000,000	100	38,000,000	100	43,000,000	100	49,000,000	100	55,000,000	100	223,000,000		KECAMATAN TAPIN TENGAH
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	7,500,000	100	7,500,000	100	9,500,000	100	34,500,000		KECAMATAN TAPIN TENGAH
4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	100	100	100	16,500,000	100	16,500,000	100	22,000,000	100	25,000,000	100	27,000,000	100	107,000,000		KECAMATAN TAPIN TENGAH
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100				-		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD										
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp									
4	1			Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	42,500,000	100	42,500,000	100	45,500,000	100	50,500,000	100	52,500,000	100	233,500,000	KECAMATAN TAPIN TENGAH					
4	1			Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang kecamatan (%)	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang Kecamatan x 100%	100	100	100	13,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000	100	13,000,000	100	14,000,000	100	66,000,000	KECAMATAN TAPIN TENGAH					
																				-						
4	1			KECAMATAN TAPIN SELATAN																1,561,281,562	1,635,009,404	1,716,620,071	1,811,524,397	1,912,850,757	8,637,286,191	
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Selatan (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	77.17	85	86.40	386,770,199	86.50	395,122,473	86.60	401,088,793	86.70	425,044,055	86.80	446,773,898	87	2,054,799,418	KECAMATAN TAPIN SELATAN					
					Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat yang diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-						
					Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-						



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	94,9	95	80	20,000,000	80	20,000,000	80	25,000,000	80	35,000,000	80	41,750,000	80	141,750,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	10,000,000	100	36,000,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN
	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	55	60	65	15,000,000	70	25,000,000	75	25,550,000	80	25,550,000	85	26,550,000	85	117,650,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		-		
	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	55,900,000	100	235,900,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN
	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang	100	100	100	7,000,000	100	8,000,000	100	8,000,000	100	9,000,000	100	10,000,000	100	42,000,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		kecamatan (%)	Kecamatan x 100%																
4	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan x 100%	100	100	100	980,000,000	100	1,040,000,000	100	1,090,000,000	100	1,150,000,000	100	1,220,000,000	100	5,480,000,000	KECAMATAN TAPIN SELATAN
4	1	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan (%)	Jumlah penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan dibagi Jumlah penduduk di kelurahan x 100%	100	100	100	107,511,363	100	101,886,931	100	108,981,278	100	108,930,342	100	101,876,859	100	529,186,773	KECAMATAN TAPIN SELATAN
4	1	KECAMATAN SALAM BABARIS					253,072,300		264,629,329		309,129,902		330,004,915		352,925,062		1,509,761,509		
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Salam Babaris (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	78	85	78.25	146,690,640	78.50	153,389,548	79.11	179,183,827	79.56	191,283,804	80.00	204,569,221	80.00	875,117,041	KECAMATAN SALAM BABARIS
			Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat yang diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		-		
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		-		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	80	100	80	35,488,841	80	37,109,507	80	43,349,913	80	46,277,258	80	49,491,397	80	211,716,916	KECAMATAN SALAM BABARIS
4 1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	4,543,257	100	4,750,734	100	5,549,626	100	5,924,383	100	6,335,855	100	27,103,856	KECAMATAN SALAM BABARIS
4 1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	100	100	100	13,095,725	100	13,693,767	100	15,996,537	100	17,076,755	100	18,262,804	100	78,125,587	KECAMATAN SALAM BABARIS
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		-		
4 1	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	45,693,169	100	47,779,835	100	55,814,583	100	59,583,646	100	63,721,966	100	272,593,200	KECAMATAN SALAM BABARIS
4 1	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang	100	100	100	7,560,666	100	7,905,938	100	9,235,416	100	9,859,068	100	10,543,819	100	45,104,908	KECAMATAN SALAM BABARIS



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		kecamatan (%)	Kecamatan x 100%																
4	1						301,689,995		313,503,567		315,991,962		337,330,359		360,759,287		1,629,275,170		
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Piani (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	87.32	85	86.50	183,584,995	86.60	190,928,395	86.70	193,416,790	86.80	207,400,677	87	223,033,765	87	998,364,622	KECAMATAN PIANI
			Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat yang diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100	100		100		100			
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100	100		100		100			
4	1	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	84.13	100	100	36,430,000	100	37,633,172	100	37,633,172	100	39,891,162	100	42,284,631	100	193,872,137	KECAMATAN PIANI
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	3,000,000	100	3,120,000	100	3,120,000	100	3,307,200	100	3,505,632	100	16,052,832	KECAMATAN PIANI



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	1					35	38	40	21,000,000	43	21,840,000	45	21,840,000	48	23,150,400	50	24,539,424	50	112,369,824	KECAMATAN PIANI
						100	100	100		100		100		100		100		100		
4	1					100	100	100	47,675,000	100	49,582,000	100	49,582,000	100	52,556,920	100	55,710,335	100	255,106,255	KECAMATAN PIANI
4	1					93	100	100	10,000,000	100	10,400,000	100	10,400,000	100	11,024,000	100	11,685,500	100	53,509,500	KECAMATAN PIANI
4	1								1,506,888,645		1,577,675,862		1,637,963,592		1,727,556,380		1,823,050,830		8,273,135,308	
4	1					86.31	85	86.4	304,120,600	86.5	315,555,535	86.6	317,827,534	86.7	337,914,235	86.8	359,844,868	86.8	1,635,262,772	KECAMATAN LOKPAIKAT
						100	100	100		100		100		100		100		100		



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp	
		Diselesaikan (%)	100%																
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100			
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	98.88	80	80	24,836,682	80	26,413,604	80	26,659,485	80	30,244,407	80	34,341,372	80	142,495,549	KECAMATAN LOKPAIKAT
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	3,470,000	100	3,600,472	100	3,626,395	100	3,855,584	100	4,105,811	100	18,658,262	KECAMATAN LOKPAIKAT
4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	55	60	65	16,700,000	70	17,327,920	75	17,452,681	80	18,555,690	85	19,759,955	85	89,796,246	KECAMATAN LOKPAIKAT
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		100			



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	1					100	100	100	62,400,000	100	64,746,240	100	65,212,413	100	69,333,837	100	73,833,603	100	335,526,094	KECAMATAN LOKPAIKAT	
4	1					100	100	100	7,850,000	100	8,145,160	100	8,203,805	100	8,722,286	100	9,288,362	100	42,209,613	KECAMATAN LOKPAIKAT	
4	1					100	100	100	987,511,363	100	1,041,886,931	100	1,098,981,278	100	1,158,930,342	100	1,221,876,859	100	5,509,186,772	KECAMATAN LOKPAIKAT	
4	1					100	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	100	500,000,000	KECAMATAN LOKPAIKAT	
																				-	
4	1								235,804,152		240,971,131		257,183,763		274,454,077		294,808,254		1,303,221,377		
4	1					86.23	85	86	154,650,000	87	157,650,000	87	167,369,156	87	178,031,601	87	193,571,400	87	851,272,157	KECAMATAN HATUNGUN	
						100	100	100		100		100		100		100		100			



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		an (%)																		
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100		100		
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	61.53	95	80	29,000,000	80	30,000,000	80	29,000,000	80	30,000,000	80	31,000,000	80	149,000,000		KECAMATAN HATUNGUN
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	3,600,000	100	3,600,000	100	3,600,000	100	5,100,000	100	5,600,000	100	21,500,000		KECAMATAN HATUNGUN
4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	55	60	65	13,000,000	70	13,000,000	75	16,000,000	80	17,000,000	85	17,000,000	85	76,000,000		KECAMATAN HATUNGUN
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		100				



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	1		Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	25,554,152	100	26,721,131	100	31,214,607	100	33,322,476	100	35,636,854	100	152,449,220	KECAMATAN HATUNGUN
4	1		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang kecamatan (%)	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang Kecamatan x 100%	100	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	10,000,000	100	11,000,000	100	12,000,000	100	53,000,000	KECAMATAN HATUNGUN
																			-	
4	1		KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN						327,403,000		327,420,000		342,823,464		365,973,746		391,392,071		1,755,012,281	
4	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Selatan (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	80	85	85	196,650,000	86	196,650,000	87	196,650,000	88	206,482,500	89	236,806,625	89	1,033,239,125	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
				Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat yang diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
				Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4 1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	69	80	80	32,280,000	80	32,280,000	80	47,780,000	80	55,919,000	80	45,834,588	80	214,093,588	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
4 1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dan dilaporkan x 100%	100	100	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,000,000	100	5,250,000	100	5,512,500	100	25,762,500	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
4 1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	70	73	75	16,240,000	76	16,240,000	77	16,240,000	78	17,052,000	80	17,904,600	80	83,676,600	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	75	78	80		82		85		87		90		90	-	
4 1	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	66,250,000	100	66,250,000	100	66,250,000	100	70,262,500	100	73,775,625	100	342,788,125	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
4 1	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang	100	100	100	10,983,000	100	11,000,000	100	10,903,464	100	11,007,746	100	11,558,133	100	55,452,343	KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023			Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp		
		kecamatan (%)	Kecamatan x 100%																	
4	1						324,504,900		337,874,804		339,788,866		362,734,226		387,927,554				-	1,752,830,350
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Candi Laras Utara (point)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	86.1	86.2	86.4	171,179,900	86.5	172,449,804	86.6	174,363,866	86.7	178,409,226	86.8	193,152,554	86.8	889,555,350		KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
			Persentase Penyelesaian pengaduan masyarakat yang diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-		
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-		
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	80	80	80	57,000,000	80	65,000,000	80	65,000,000	80	80,000,000	80	85,000,000	80	352,000,000		KECAMATAN CANDI LARAS UTARA



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
4	1			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang dilaporkan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	3,200,000	100	3,200,000	100	3,200,000	100	4,100,000	100	4,100,000	100	17,800,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
4	1			Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	55	60	65	17,425,000	70	17,875,000	75	17,875,000	80	18,875,000	85	20,875,000	85	92,925,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
					Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
4	1			Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	60,700,000	100	64,350,000	100	64,350,000	100	64,350,000	100	66,800,000	100	320,550,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
4	1			Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang Kecamatan x 100%	100	100	100	15,000,000	100	15,000,000	100	15,000,000	100	17,000,000	100	18,000,000	100	80,000,000	KECAMATAN CANDI LARAS UTARA
4	1			KECAMATAN BINUANG						3,075,878,361		3,241,523,572		3,523,172,456		3,719,742,827		3,843,800,020		17,404,117,235	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		Rp		
4	1					78.11	85	85	342,973,201	86	366,399,101	87	476,598,996	88	518,914,289	89	475,373,037	89	2,180,258,624	KECAMATAN BINUANG
						100	100	100		100		100		100		100		100		
						100	100	100		100		100		100		100		100		
4	1					69	80	80	96,290,383	80	105,407,835	80	137,866,043	80	139,217,336	80	158,105,439	80	636,887,036	KECAMATAN BINUANG
4	1					100	100	100	7,300,000	100	8,030,000	100	10,500,000	100	13,061,000	100	13,367,000	100	52,258,000	KECAMATAN BINUANG
4	1					71	73	75	33,804,407	76	35,348,150	77	41,292,362	78	44,080,765	80	47,142,348	80	201,668,033	KECAMATAN BINUANG



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		100		90	-	
4	1	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	62,752,280	100	66,967,492	100	64,125,511	100	72,140,416	100	71,491,725	100	337,477,424		KECAMATAN BINUANG
4	1	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang Kecamatan x 100%	100	100	100	10,500,000	100	11,000,000	100	12,000,000	100	12,500,000	100	12,500,000	100	58,500,000		KECAMATAN BINUANG
4	1	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Persentase sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan dalam kondisi baik dibagi Jumlah sarana dan prasarana kelurahan x 100%	100	100	100	2,222,258,089	100	2,318,370,994	100	2,435,789,543	100	2,559,829,021	100	2,675,820,471	100	12,212,068,118		KECAMATAN BINUANG
4	1	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan (%)	Jumlah penduduk di kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan dibagi Jumlah penduduk di kelurahan x 100%	100	100	100	300,000,000	100	330,000,000	100	345,000,000	100	360,000,000	100	390,000,000	100	1,725,000,000		KECAMATAN BINUANG
4	1	KECAMATAN BAKARANGA N					314,078,500		329,782,425		346,271,546		363,585,124		381,764,380		1,735,481,975			
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	82	85	86,4	189,228,500	85	198,689,925	85	208,624,421	85	219,055,642	85	230,008,424	86,8	1,045,606,913		KECAMATAN BAKARANGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		n Bakarang (poin)																		
		Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		100	-	
		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dibagi jumlah unit kerja x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100		100	-	
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	100	100	100	27,880,000	100	29,274,000	100	30,737,700	100	32,274,585	100	33,888,314	100	154,054,599		KECAMATAN BAKARANGAN
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	4,250,000	100	4,462,500	100	4,685,625	100	4,919,906	100	5,165,902	100	23,483,933		KECAMATAN BAKARANGAN
4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	100	100	100	29,180,000	100	30,639,000	100	32,170,950	100	33,779,498	100	35,468,472	100	161,237,920		KECAMATAN BAKARANGAN



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100		100		-	
4	1	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	53,750,000	100	56,437,500	100	59,259,375	100	62,222,344	100	65,333,461	100	297,002,680	KECAMATAN BAKARANGAN
4	1	Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Persentase usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir dalam musrenbang kecamatan (%)	Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diakomodir / Jumlah usulan masyarakat (RKPDes) yang diusulkan pada musrenbang Kecamatan x 100%	100	100	100	9,790,000	100	10,279,500	100	10,793,475	100	11,333,149	100	11,899,806	100	54,095,930	KECAMATAN BAKARANGAN
																		-	
4	1	KECAMATAN BUNGUR					327,134,684		339,927,570		342,186,000		365,294,119		390,665,241		1,765,207,614		
4	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Bakarang (poin)	Survei Tingkat Kepuasan Pelayanan	76	76	86	221,224,684	86.5	222,267,570	87	221,047,000	87.5	240,694,119	88	260,665,241	88	1,165,898,614	KECAMATAN BUNGUR
			Persentase Penyelesaian pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan (%)	Jumlah pengaduan yang diselesaikan / Jumlah pengaduan yang masuk x 100%	100	100	100		100		100		100		100		100	-	
			Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	Jumlah unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi dibagi jumlah unit kerja	100	100	100		100		100		100		100		100	-	



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		perkantoran (%)	x100%																
4	1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	Jumlah sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana aparatur yang ada x 100%	75	80	80	16,180,000	80	24,180,000	80	25,439,000	80	26,300,000	80	28,500,000	80	120,599,000	KECAMATAN BUNGUR
4	1	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan x 100%	100	100	100	2,400,000	100	2,500,000	100	2,700,000	100	2,800,000	100	3,000,000	100	13,400,000	KECAMATAN BUNGUR
4	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Keagamaan dan Ekonomi Masyarakat Desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan (%)	Jumlah lomba MTQ/STQ yang diikuti masyarakat/ Jumlah cabang lomba MTQ/STQ x 100%	100	100	100	18,380,000	100	19,630,000	100	20,000,000	100	21,000,000	100	22,000,000		101,010,000	KECAMATAN BUNGUR
		Tingkat partisipasi pelaku usaha kecamatan (%)	Jumlah pelaku usaha yang hadir dalam kegiatan koordinasi ekonomi / Jumlah pelaku usaha yang diundang x100%	100	100	100		100		100		100		100				-	
4	1	Program Pembinaan Pelaksanaan Pemerintahan Umum, Kamtibmas dan Organisasi Kecamatan	Persentase desa dengan administrasi yang baik (%)	Jumlah desa yang melaksanakan administrasi sesuai ketentuan / Jumlah seluruh desa se-Kecamatan X 100%	100	100	100	60,800,000	100	62,800,000	100	64,000,000	100	65,000,000	100	66,000,000	100	318,600,000	KECAMATAN BUNGUR



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Rumus Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja Akhir RPJMD				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
4	1					100	100	100	8,150,000	100	8,550,000	100	9,000,000	100	9,500,000	100	10,500,000	100	45,700,000	KECAMATAN BUNGUR
			Jumlah		-				724,124,744,317		760,805,977,607		796,086,156,203		835,011,386,420		878,535,594,874		3,994,563,859,424	

Sumber: hasil analisis



BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja daerah Kabupaten Tapin pada periode 2018-2023, disajikan dalam Tabel 8.1. Pada tabel ini memuat indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran sebagaimana telah ditetapkan pada Bab V RPJMD Kabupaten Tapin.

Sedangkan indikator kinerja kunci yang bertujuan untuk memberi tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel 8.2. Pada tabel tersebut disajikan indikator kinerja *impact* dan indikator kinerja *outcome*. Indikator kinerja *impact* termuat dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek Daya Saing Daerah, sementara indikator kinerja *outcome* disajikan pada Aspek Pelayanan Umum. Lebih lanjut, Aspek Kesejahteraan Masyarakat dan Aspek daya Saing memuat indikator kinerja sasaran RPJMD (*impact*) dan indikator kinerja sasaran perangkat daerah (*impact*). Sementara Aspek Pelayanan Umum memuat indikator kinerja program (*outcome*).



Tabel 8.1.
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
2	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
3	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
4	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672	0.002677	0.002679	0.002685	0.002691	0.002691
5	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
6	Pengeluaran per kapita (Rp)	11.417.450	11.417.450	11.760.000	12.112.800	12.746.150	12.850.450	13.235.950	13.235.950
7	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47
10	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6
11	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
12	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				Target	Target	Target	Target	Target	
13	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
14	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
15	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
16	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
17	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
18	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8
19	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
20	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
21	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
22	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
23	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
25	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
26	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
27	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
28	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
29	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
30	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
31	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
32	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64
33	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98
34	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
35	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015



No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
36	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
37	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
38	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
39	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53
40	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
41	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
42	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
43	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
44	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85

Sumber: Hasil pengolahan data



Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
2	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
3	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (poin)	70.05	74.69	75	76.69	77	78.69	79	79
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A (poin)	103.08	106.15	106.25	106.5	106.75	107	107.05	107.05
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B (poin)	87.84	93.95	94	94.5	95	95.5	96	96
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A (poin)	91.32	91.65	91.96	92.06	93.24	94.88	96	96
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B (poin)	78.42	79.06	79.5	80	80.15	80.45	81	81
9	Angka Melanjutkan Sekolah SD/MI ke SMP/MTs (poin)	87.61	86.99	87.25	87.85	88.54	89.45	90	90
10	Angka Melanjutkan Sekolah SMP/MTs ke SMA/MA/SMK (poin)	91.86	91.87	91.91	91.96	92.01	92.06	92.11	92.11
11	Rata-Rata Nilai Hasil US/UN SD/MI (poin)	68.7	62.03	63.64	64.28	65.92	66.56	67	67
12	Rata-Rata Nilai Hasil US/UN SMP/MTs (poin)	61.04	53.58	60.9	61.08	62.7	63.6	64	64
13	Persentase Angka Kelulusan SD/MI (%)	99.43	97.64	98.54	98.65	99.76	99.87	99.98	99.98
14	Persentase Angka Kelulusan SMP/MTs (%)	98.72	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Guru yang Profesional (Bersertifikasi) (%)	0.5238	0.5376	0.5777	0.6112	0.6448	0.6783	0.7119	0.002691
16	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
17	Angka Kematian Ibu Per 100.000 KH (poin)	35/100000	186	155	124	93	62	31	31
18	Angka kematian Bayi Per 1.000 KH (poin)	11/1000	13	10	8	6	4	2	2



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
19	Persentase Balita dengan Status Gizi Baik (%)	54	74.7	78	82	86	90	92	92
20	Persentase Puskesmas yang Terakreditasi (%)	0.53	53	100	100	100	100	100	100
21	Rasio Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk (poin)	1	23/7	43/13	44/14	45/15	46/16	46/17	46/17
22	Rasio Tenaga Paramedis dengan Jumlah Penduduk								
23	a. Bidan	161	242	242	246	250	255	261	261
24	b. Perawat	165	163	340	345	354	361	368	368
25	Persentase Rumah Tangga ber PHBS (%)	74.07	93.3	95	97	100	100	100	100
26	Prosentase Desa yang melaksanakan STBM (%)	84	94	100	100	100	100	100	100
27	Persentase desa/ kelurahan yang mencapai UCI (%)	96.3	96.3	93	93.5	94	94.5	95	95
28	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
29	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
30	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47
31	Persentase perkawinan usia anak (%)	0	2.7	3	2.5	2.3	2.2	2.1	2.1
32	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	0.033	0.033	0.033	0.032	0.031	0.030	0.029	0.029
33	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	90	90	90	90	90
34	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	90	90	90	90	90
35	Tingkat Kategori Kabupaten Layak Anak (predikat)	0	0	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
36	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	0	8.33	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3
37	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	0	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69	1.69
38	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	0	8	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69
39	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6
40	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
41	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
42	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
43	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
44	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
45	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
46	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
47	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8
48	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
49	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
50	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
51	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90
52	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
53	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
54	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
55	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
56	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
57	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
58	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
59	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
60	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
61	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64
62	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
63	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
64	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015
65	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
66	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
67	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
68	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
69	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
71	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85
B	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
2	Pengeluaran per kapita (Rp)	11.417.450	11.417.450	11.760.000	12.112.800	12.746.150	12.850.450	13.235.950	13.235.950
3	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53
C	ASPEK PELAYANAN UMUM								
I	Fokus Layanan Urusan Wajib								
1	Pendidikan								
1.1	Persentase sarana dan prasarana PAUD dalam kondisi baik (%)	64	67	74	77	80	84	88	88
1.2	Persentase PAUD yang terakreditasi (%)	0	15	30	45	60	75	90	90
1.3	Angka Putus Sekolah Dasar (%)	0.00057	0,039	0,034	0,029	0,024	0,019	0,014	0,014
1.4	Angka Mengulang Sekolah Dasar (%)	0,023	0,021	0,020	0,015	0,010	0,005	0,002	0,002
1.5	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SD	72	82	82	95	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.6	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SD (%)	78	89	90	91	92	93	94	94
1.7	Angka Putus Sekolah Menengah Pertama (%)	0,43	0,40	0,38	0,30	0,25	0,20	0	0
1.8	Angka Mengulang Sekolah Menengah Pertama (%)	1,29	1,31	1,12	1,01	0,72	0,33	0	0
1.9	Persentase sekolah yang terakreditasi jenjang SMP	62	63	70	80	90	95	100	100
1.10	Persentase sekolah yang melaksanakan program pembangunan karakter jenjang SMP (%)	72,89	73,07	76,92	84,60	92,31	96,15	100	100
1.11	Persentase Warga negara usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 yang mengikuti program Pendidikan Non Formal (%)	0,49	0,50	0,51	0,53	0,55	0,57	0,59	0,60
1.12	Persentase pendidikan non formal yang terakreditasi (%)	0	7,69	19,20	30,70	42,20	57,60	76,90	76,90
1.13	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%)	74	74	79	84	89	94	100	100
1.14	Persentase pemenuhan jumlah guru pada satuan pendidikan SD dan SMP (%)	82,15	82,15	85,70	89,25	92,80	96,35	100	100
1.15	Persentase jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diterapkan (%)	93,09	83	100	100	100	100	100	100
2	Kesehatan								
2.1	Persentase obat dan Perbekalan Kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan (%)	0	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase Puskesmas yang terakreditasi madya (%)	76,25	82,28	100	100	100	100	100	100
2.3	Persentase masyarakat miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan (%)	79,54	95,89	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.4	Persentase kasus obat yang tidak aman yang ditangani (%)	0	88,93	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase desa yang melakukan STBM (%)	78,11	62,55	100	71	79	86	94	94
2.6	Persentase pelayanan gizi masyarakat (%)	58,13	89,72	100	82	86	90	92	92
2.7	Persentase peningkatan kesehatan ibu bayi baru lahir dan anak balita (KIBLA, KESPRO LANSIA) (%)	31,17	86,12	100	54	63	72	81	81
2.8	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tatanan Rumah Tangga (%)	78,04	92,14	43	47	50	55	60	60
2.9	Persentase masyarakat yang terlayani sesuai standar pelayanan penyakit menular dan tidak menular (%)	81,09	84,88	92,5	100	100	100	100	100
2.10	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk (poin)	47,34	92,61	100	100	100	100	100	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
3.1	Persentase Panjang Tebing Sungai Yang Bebas Rawan Bencana (%)	20.19	36.75	40.75	45	47	49	50	50
3.2	- Persentase panjang saluran pada jaringan irigasi dan rigasi rawa dalam kondisi baik/sedang (%)	45.17	50.25	55	57	60	65	70	70
3.3	- Persentase pintu air, waduk/situ/embung serta bangunan air lainnya yang berfungsi baik (%)	35.15	40	45	48	50	52	55	55
3.4	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (%)	44,69	45,55	48	50	52	55	57	57
3.5	- Persentase Ruas Jalan Kabupaten dalam kondisi sedang (%)	9.62	9,25	12	13	14	15	18	18
3.6	- Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik (%)	47	49	52	55	58	60	65	65
3.7	- Persentase panjang Jalan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	4,5	10	12	15	20	21	25	25
3.8	- Persentase Jembatan Kabupaten yang direhabilitasi/dipelihara (%)	0	3	10	12	15	20	22	22



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.9	- Persentase data jalan yang dimutakhirkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.10	- Persentase data jembatan yang dimutakhirkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.11	Persentase drainase jalan kabupaten dalam kondisi baik (%)	10	5	8	15	20	25	30	35
3.12	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air bersih (%)	51,36	60	70	75	80	85	90	90
3.13	Persentase rumah tangga yang Mendapatkan Akses Air limbah (%)	73,18	78	83	88	90	93	95	95
3.14	Persentase Infrastruktur Perdesaan dan Lingkungan dalam kondisi baik (%)	50,65	55	58	62	67	70	75	75
3.15	Persentase sarana dan prasarana pemerintahan yang dibangun (%)	40	45	50	55	60	65	70	70
3.16	Persentase jasa konstruksi yang telah memiliki SIUJK (%)	0	0	60	60	60	60	60	60
3.17	Persentase kawasan yang memiliki rencana tata ruang (%)	7,69	23,08	38,46	53,86	69,22	84,60	100	100
3.18	Persentase lahan yang pemanfaatannya sesuai dengan rencana tata ruang (%)	5,24	12,8	30,24	47,68	65,12	82,56	100	100
3.19	Persentase permohonan pemanfaatan ruang yang diberikan rekomendasi (%)	62,73	88,53	90	90	90	90	90	90
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman								
4.1	Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani (%)	0.28985507	0.17	0.5	0.63	0.88	1.45	4.24	7.7
4.2	Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	42.77	50	60.55	61.66	62.77	63.88	65	65
4.3	Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100	90	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat								
5.1	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang disosialisasikan (%)	99.99	100	100	100	100	100	100	100
5.2	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (%)	99.77	100	100	100	100	100	100	100
5.3	- Persentase Anggota Satpol PP dan Damkar yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (%)	99.78	100	100	100	100	100	100	100
5.4	- Persentase Anggota Satlinmas yang terlatih (%)	99.78	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Desa Tangguh Bencana (%)	50	50	50	60	70	80	80	80
5.6	Persentase daerah terdampak bencana yang dilakukan penanganan (%)	80	80	80	80	80	80	80	80
5.7	Persentase daerah terdampak bencana yang pulih (%)	70	70	70	70	70	80	80	80
5.8	Persentase kehadiran masyarakat yang diundang dalam mengikuti Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (%)	0	50	80	80	80	80	80	80
5.9	Persentase Parpol penerima Bantuan Keuangan yang menyelesaikan administrasi sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.10	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang ditangani (%)	0	80	80	80	80	80	80	80
5.11	Persentase Ormas yang terdata (%)	100	100	80	85	85	90	90	90
5.12	- Persentase masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya (%)	0	0	80	80	80	80	80	90
5.13	- Persentase masyarakat yang mengikuti Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (%)	0	0	85	85	90	90	90	90



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
6	Sosial								
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	54,2	55	55	55,05	55,1	55,12	55,14	55,16
6.2	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapatkan perbaikan (%)	1,4	2,26	23	2,27	2,28	2,29	2,3	2,3
6.3	Persentase anak terlantar dan lanjut usia yang memperoleh pembinaan	23,3	35	35	35,05	35,1	35,12	35,14	35,14
6.4	Persentase penyandang cacat dan trauma yang telah menerima pembinaan	2,9	3	3	3,02	3,04	3,06	3,08	3,08
6.5	Persentase PSKS yang terlibat dalam penanganan PMKS (%)	55,1	56,1	56,1	56,15	56,16	56,17	56,18	56,18
6.6	Persentase panti asuhan dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6.7	Persentase PMKS yang memperoleh Rehabilitasi Sosial (%)	0	0	10	10,05	10,1	10,12	10,14	10,14
7	Tenaga Kerja								
7.1	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan (%)	18,74	50	50	50	50	60	50	50
7.2	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat (%)	60	60	60	60	60	60	60	60
7.3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan (%)	45	45	45	45	45	45	45	45
7.4	Rasio lowongan kerja dengan pencari kerja (%)	3,85	4,03	10	10	10	10	10	10
7.5	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) (%)	85,71	50	50	50	50	50	50	50
7.6	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek (%)	99,53	50	50	50	50	75	50	50
7.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	60,75	66,93	75	75	75	-	75	75



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
8.1	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	90	90	90	90	90
8.2	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang ditindaklanjuti (%)	94	90	90	90	90	90	90	90
8.3	- Persentase Analisis Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD (%)	2	0,01	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
8.4	- Persentase perempuan yang terlibat di pemerintahan daerah (%)	51,6	52	53	54	55	56	57	57
8.5	- Persentase pelaku usaha rumahan perempuan (%)	13	15	17	18	19	20	22	22
8.6	Persentase perkawinan usia anak (%)	0	2,7	3	2,5	2,3	2,2	2,1	2,1
8.7	Persentase keluarga pelaku usaha (%)	0	71	76	81	86	91	96	96
8.8	Persentase data SIMFONI dan SIGA yang terinput	0	85	90	90	90	90	90	90
8.9	Persentase Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan (%)	0	8,33	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
8.10	Persentase Sekolah Ramah Anak (SRA) yang dikembangkan (%)	0	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
8.11	Persentase Puskesmas Ramah Anak (PRA) yang dikembangkan (%)	0	8	8,33	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
8.12	Persentase Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian KLA (%)	75	75	75	50	50	50	50	50
8.13	Persentase Forum Anak Daerah yang aktif sebagai pelopor dalam pembangunan (%)	75	75	38,46	38,46	46,15	53,84	61,53	61,53



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
9	Pangan								
9.1	Ketersediaan Pangan Utama (kg/kapita)	15,286,000 (Kg/kapita/tahun)	12000 (Kg/kapita/tahun)	14,368,840 (Kg/kapita/tahun)	14,656,216 (Kg/kapita/tahun)	14,949,341 (Kg/kapita/tahun)	15,248,327 (Kg/kapita/tahun)	15,553,294 (Kg/kapita/tahun)	15,553,294 (Kg/kapita/tahun)
9.2	Persentase pangan yang aman dikonsumsi (%)	100	80	100	100	100	100	100	100
10	Pertanahan								
10.1	Persentase cakupan data penguasaan, pemilikan, penggunaan dan informasi pertanahan (%)	8,33	50	18,18	18,18	18,18	18,18	27,27	100
10.2	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%)	100	90	100	100	100	100	100	100
11	Lingkungan Hidup								
11.1	Persentase cakupan area pelayanan (%)	41,67	50	50	58,33	58,33	66,67	66,67	66,67
11.2	Persentase volume sampah yang tertangani (%)	42,19	45,25	46,5	48,18	50,5	54,4	58,25	58,25
11.3	Persentase perusahaan yang melaksanakan pengelolaan limbah B3 sesuai ketentuan (%)	70	75	75	80	85	90	95	95
11.4	- Status Mutu Air (status)	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang	Cemar Sedang
11.5	Persentase Parameter Pencemar Udara yang diuji Tidak Melebihi Baku Mutu (%)	80	80	80	80	80	80	80	80



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
11.6	Persentase Parameter Kerusakan Tanah Yang Diuji Tidak Melebihi Kriteria Baku (%)	0	60	60	60	60	60	60	60
11.7	Persentase kawasan yang ditingkatkan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi SDA dan keanekaragaman hayati (%)	0	0	20	40	60	80	100	100
11.8	Persentase dokumen lingkungan yang digunakan untuk kebijakan daerah (%)	25	25	25	50	75	100	100	100
11.9	Persentase MHA yang ditetapkan haknya (%)	0	0	13	25	38	50	63	63
11.10	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas air (%)	29	20	24	28	32	36	40	40
11.11	Persentase pemegang izin lingkungan yang memenuhi ketentuan terhadap pengelolaan kualitas udara (%)	19	36	24	28	32	36	40	40
11.12	- Tingkat kasus lingkungan hidup yang diverifikasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
11.13	Persentase parameter pengujian yang menghasilkan data valid dan akurat sesuai SNI dan ISO 17025 (%)	38	87	43	57	64	71	79	79
11.14	Persentase perusahaan yang beroperasi sesuai dengan dokumen lingkungan (%)	30	20	40	50	55	60	65	65
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil								
12.1	IKM terhadap pelayanan KTP & Kartu Keluarga (Poin)	87,34	87	88	89	89	89	89	89
12.2	IKM terhadap pelayanan Akta kelahiran, akta kematian dan Akta Perkawinan (Poin)	87,34	87	88	89	89	89	89	89
12.3	Tingkat Akurasi Data Penduduk (%)	88,21	89	90	90,1	90,2	90,3	90,4	90,4
12.4	Persentase Data Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	82,35	83	81	82	83	84	85	85



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
13.1	- Persentase desa dengan dokumen perencanaan desa yang konsisten (%)	56	68	74	76	79	81	84	84
13.2	- Persentase BUMDES yang aktif (%)	30	35	78	80	81	83	85	85
13.3	- Persentase BUMDES menghasilkan laba (%)	80	90	100	170	185	200	210	210
13.4	Persentase desa yang melaksanakan administrasi pemerintah desa sesuai standar (%)	30	35	40	43	47	67	70	70
13.5	- Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	78	83	85	89	91	93	94	94
13.6	- Persentase PKK aktif (%)	88	89	91	92	94	95	97	97
13.7	- Persentase posyandu aktif (%)	78	80	82	84	87	88	90	90
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana								
14.1	Persentase kelahiran total (TFR) per WUS (15-49 tahun) (%)	0	0	2,11	2,1	2,09	2,08	2,07	2,07
14.2	Persentase peserta KB aktif MKJP (%)	0	8	9	9	9	9	9	9
14.3	- Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) yang aktif (%)	74	66	66	67	68	80	71	71
14.4	- Persentase Keluarga yang ber-KB aktif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (%)	67	90	91	92	92	93	93	93
14.5	Persentase keluarga ber KB yang aktif dalam UPPKS (%)	76	92	92	92	92	92	92	92
14.6	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKB (%)	84	84	84	84	84	84	84	84
14.7	Persentase keluarga berKB yang aktif dalam BKL (%)	72	72	72	72	74	73	74	74
14.8	Persentase sekolah di Kabupaten Tapin yang dibina oleh koalisi kependudukan (%)	0	60	65	70	75	80	85	85



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
14.9	Persentase data yang dimanfaatkan dalam kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (%)	0	60	65	70	75	80	85	85
14.10	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok kerja kampung KB dan mitra kerja (%)	0	20	30	35	4000	45	50	50
15	Perhubungan								
15.1	Persentase Pemenuhan Prasarana Perhubungan Yang Sesuai Standar (%)	70	75	80	85	90	95	100	100
15.2	Persentase angkutan umum yang memiliki izin trayek (%)	91,71	100	100	100	100	100	100	100
15.3	Persentase penurunan rasio kecelakaan lalu-lintas darat terhadap jumlah kendaraan bermotor (%)	40	40	45	55	65	75	85	85
16	Komunikasi dan Informatika								
16.1	Persentase sarana dan prasarana telekomunikasi yang memiliki Izin	55,09	57,33	57,33	59,67	62	64,67	64,67	100
16.2	Persentase Layanan Informasi Berbasis TI (%)	80	100	100	100	100	100	100	100
16.3	Persentase penyebarluasan Informasi melalui media massa (%)	80	80	100	100	100	100	100	100
16.4	Persentase Opini dan Aspirasi Publik yang dipublikasikan melalui media online (%)	80	80	100	100	100	100	100	100
17	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah								
17.1	Persentase Koperasi Aktif (%)	82,39	83	86,96	87,23	87,41	87,59	87,84	87,84
17.2	Persentase Koperasi yang dibina dengan SHU yang meningkat	0	1,2	40	50	60	70	80	80
17.3	Persentase bertambahnya pelaku usaha mikro (%)	21	17	14,8	25,81	34,28	41,02	46,51	46,51



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
17.4	Persentase UMKM Yang Memiliki Izin Usaha (%)	4,49	4,5	14,02	14,98	15,95	16,91	17,88	17,88
18	Penanaman Modal								
18.1	1. Persentase pelaku usaha yang memiliki izin	0	0	100	100	100	100	100	100
18.2	2. Persentase perusahaan pemilik izin yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu	0	0	100	100	100	100	100	100
18.3	Persentase jenis investasi/promosi yang dipublikasikan (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
18.4	Persentase stakeholder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang dipublikasikan	0	0	100	100	100	100	100	100
18.5	Pertumbuhan penanaman modal (%)	-90	57,7	5	5	5	5	5	5
18.6	Persentase dokumen RUPM yang tersedia	0	0	0	50	0	50	0	0
18.7	Persentase rekomendasi PM (investor baru)	0	0	100	100	100	100	100	100
18.8	1. Persentase terlaksananya SOP Pelayanan	0	0	100	100	100	100	100	100
18.9	2. Persentase perizinan yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Kepemudaan dan Olahraga								
19.1	jumlah Cabang Olahraga Prestasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional (cabor)	8	7	10	12	14	16	18	20
19.2	jumlah Cabang Olahraga Khusus, Tradisional dan Rekreasi yang memperoleh Prestasi di tingkat Provinsi dan Nasional (cabor)	7	13	14	18	21	24	27	27
19.3	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik(%)	0,95	0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,96	0,96
19.4	Persentase calon pemuda pelopor yang memenuhi kualifikasi (%)	37	48	58	68	78	88	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
19.5	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif (%)	33	42	58	75	83	92	100	100
20	Statistik								
20.1	Persentase data statistik sektoral yang disajikan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
21	Persandian								
21.1	Persentase aparaturnya persandian yang memahami standar persandian (%)	0	0	50	50	50	100	100	100
22	Kebudayaan								
22.1	Persentase sanggar/group seni budaya daerah yang tampil pada event seni budaya daerah (%)	90	98,57	83	85	90	95	100	100
22.2	Persentase benda cagar budaya (BCB) / situs yang terawat dengan baik (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
22.3	Persentase sanggar seni budaya daerah yang dibina (%)	20	30	40	50	45	75	80	80
22.4	Persentase sanggar seni budaya daerah yang aktif (%)	20	30	35	40	50	45	80	80
23	Perpustakaan								
23.1	Persentase Perpustakaan yang dapat diakses pemustaka (%)	4	0	4	4	5	5	6	6
23.2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan (poin)	70,83	71	72	73	74	75	76	76
23.3	Persentase rata - rata pemanfaatan Perpustakaan (%)	5	2,99	3	2	1	1	1	1
23.4	Persentase peningkatan Perpustakaan yang aktif sesuai SNP (%)	30	33	100	100	50	33	25	25



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
23.5	Persentase peningkatan tenaga pengelola Perpustakaan yang terampil (%)	30	33	100	100	50	33	25	25
23.6	Persentase peningkatan jumlah koleksi bahan perpustakaan (%)	4	5	4	4	4	4	4	4
23.7	Persentase jumlah perangkat daerah dan Unit Kerja yang melakukan penataan arsip sesuai NSPK (%)	47	49	51	53	56	58	60	60
23.8	Persentase pengelola arsip yang terampil (%)	47	49	51	53	56	58	60	60
II	Fokus Layanan Urusan Pilihan								
1	Kelautan dan Perikanan								
1.1	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Budidaya (%)	100,09	100	100	100	100	100	100	100
1.1.1	Persentase Realisasi Produksi Perikanan Tangkap (%)	98,29	100	100	100	100	100	100	100
1.1.2	Persentase jumlah kelompok usaha perikanan yang naik kelas (%)	0	100	100	100	100	100	100	100
2	Pariwisata								
2.1	Persentase destinasi wisata yang telah dikelola dengan baik (%)	68,18	69,57	70	73	75	78	80	80
2.2	Persentase kelompok sadar wisata yang aktif (%)	15	20	20	25	35	40	55	55
2.3	Persentase destinasi wisata yang dipasarkan (%)	20	25	30	33	35	40	50	50
2.4	Persentase pelaku usaha pariwisata yang dibina (%)	15	25	30	35	40	45	50	50
3	Pertanian								
3.1	- Produktivitas Padi (Ku/Ha)	48,25	48,5	49,2275	49,96	50,71	51,47	52,24	52,24
3.2	- Produktivitas Jagung (Ku/Ha)	46,75	47,33	48,03	48,76	49,49	50,23	50,98	50,98



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.3	- Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)	8,76	9,05	9,18575	9,32353625	9,46338929	9,60534013	9,74942024	9,749420235
3.4	- Luas Panen Padi (Ha)	75302	78966,39	79899,98	80844,61	81800,41	82767,51	83746,04	488024,96
3.5	- Luas Panen Jagung (Ha)	1038	1691,10	1749,41	1809,74	1872,14	1936,70	2003,48	11062,61
3.6	- Luas Panen Kedelai (Ha)	77	104,97	108,59	112,33	116,21	120,21	124,36	686,69
3.7	- Persentase RMU yang menghasilkan beras dengan mutu baik (%)	2,5	3,35	5	10	15	20	25	25
3.8	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil tanaman pangan	0	1	1	1	1	1	1	6
3.9	- Luas Panen Cabe Rawit Hiyung (Ha)	111	111,54	112,10	112,65	113,21	113,77	114,33	677,63
3.10	- Luas Panen Bawang Merah (Ha)	111	149,13	151,29	153,48	155,70	157,96	160,25	927,83
3.11	- Luas Panen Jeruk (Ha)	464	464,18	468,82	473,51	478,24	483,03	487,86	2855,66
3.12	Produktivitas Cabe Rawit (Ku/Ha)	7,97	8,55	8,63	8,72	8,80	8,89	8,98	8,98
3.13	Produktivitas Bawang Merah (Ku/Ha)	6,96	6,67	6,87	7,07	7,28	7,50	7,73	7,73
3.14	Produktivitas Jeruk (Ku/Ha)	0,88	1,99	0,91	0,94	0,97	0,99	1,02	1,02
3.15	- Persentase Kelompok tani Yang Melaksanakan Pengolahan Hasil Hortikultura (%)	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	17,5
3.16	- Jumlah kemitraan pemasaran hasil hortikultura	1	1	1	1	1	1	1	6
3.17	- Persentase lahan sawah fungsional yang Terairi (%)	15,18	15,22	15,26	15,3	15,35	15,4	15,45	15,45
3.18	- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pra panen (%)	0	26,89	27,16	27,43	27,70	27,98	28,26	28,26
3.19	- Rasio ketersediaan alat mesin pertanian pasca panen (%)	0	2,40	2,43	2,45	2,48	2,50	2,53	2,53
3.20	- Jumlah luas lahan fungsional (Ha)	63038	63038	63063	63088	63113	63138	63163	63163
3.21	- Produktivitas Tanaman Karet (Ku/Ha)	621,18	603,08	613,88	632,29	651,26	670,80	690,92	690,92
3.22	- Produktivitas Tanaman Sawit (Ku/Ha)	1878,69	1789,23	3239,35	3336,53	3436,62	3539,72	3645,91	3645,91
3.23	- Luas Tanaman Karet (Ha)	399,27	13309	14118,21	14541,75	14978,009	15427,34	15890,16	15890,16
3.24	- Luas Tanaman Sawit (Ha)	2248,05	44961	3239,35	3336,53	3436,62	3539,72	3645,91	3645,91



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3.25	- Persentase intensitas serangan OPT Perkebunan	0	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2,5
3.26	Persentase kelompok tani RPBSK kategori baik (%)	9,38	12,5	15,63	18,17	21,88	25	28,18	28,18
3.27	- Populasi sapi (ekor)	6751	6900	7015	7132	7251	7372	7495	7495
3.28	- Populasi kambing (ekor)	4526	4585	4650	4716	4783	4851	4920	4920
3.29	- Populasi unggas (ekor)	2281314	2301089	2315533	2330206	2346072	2364135	2364135	2364135
3.30	- Angka konsumsi daging per kapita (kg/kapita)	3,8	3,8	3,84	3,89	3,94	4	4,05	4,05
3.31	- Persentase penyakit hewan yang tertangani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
3.32	Persentase kelompok pengolahan hasil peternakan yang teregister dan dibina (%)	0	2	2	2	2	2	2	2
3.33	- Persentase Kelas kelompok tani Madya (%)	25	25	13	16	19	22	25	50
3.34	- Persentase penyuluh yang bersertifikat kompetensi teknis (%)	25	25	35	45	55	65	75	75
4	Perdagangan								
4.1	- Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan Barang Beredar yang tidak Sesuai SNI (%)	90	90	90	90	95	95	95	95
4.2	- Persentase alat ukur timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah (%)	0	100	100	100	100	100	100	100
4.3	Persentase Jenis Produk Lokal Yang Dipasarkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4.4	Survey Kepuasan Masyarakat (Pedagang) terhadap Kenyamanan Pasar (indeks)	71,06	73	75	76	76	78	79	79
4.5	Persentase informasi harga Barang Pokok dan Penting yang akurat (%)	0	102,08	100	100	100	100	100	100
4.6	Persentase pasar tradisional yang dibangun (%)	0	0	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
4.7	Persentase pasar tradisional yang direvitalisasi	0	0	100	100	100	100	100	100
4.8	Persentase Rekomendasi Izin Usaha yang diterbitkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
4.9	Persentase Petani yang mendapat Resi Gudang (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Perindustrian								
5.1	Persentase Bertambahnya Usaha Industri logam dan aneka (%)	0	0	1,03	1,43	2,01	2,37	3,08	3,08
5.2	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industrilogam dan aneka (%)	0	0	1,33	1,73	2,31	2,67	3,38	3,38
5.3	Persentase Bertambahnya Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0	0	30	33	37	38	41	41
5.4	Persentase Bertambahnya Pelaku Usaha Industri Agro dan Kimia (%)	0	0	0,23	0,25	0,26	0,27	0,29	0,29
III	Fungsi Penunjang dan Pendukung Urusan Pemerintahan								
1	Perencanaan								
1.1	- Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2	- Persentase sasaran dan program RKPD yang konsisten dengan RPJMD:								
1.2.1	a. sasaran	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.2	b. program	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3	- Persentase program dan kegiatan dalam KUA PPAS yang konsisten dengan RKPD								
1.3.1	a. program	100	100	100	100	100	100	100	100
1.3.2	b. kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.4	- Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pembangunan daerah								
1.4.1	a. kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
1.4.2	b. anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
1.5	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)								
1.6.1	a. program	100	100	100	100	100	100	100	100
1.6.2	b. kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Bidang Ekonomi dan Infrastruktur (%)								
1.7.1	a. kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
1.7.2	b. anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
1.8	1. Persentase program RENSTRA PD mitra Bidang Sosial dan SDM yang selaras dengan program RPJMD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9	2. Persentase program dan kegiatan RENJA PD yang konsisten dengan program dan kegiatan RENSTRA PD Mitra Kerja Bidang Sosial dan SDM (%)								
1.9.1	a. program	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.2	b. kegiatan	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10	3. Persentase pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran pembangunan daerah mitra Sosial dan SDM (%)								



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.10.1	a. kinerja	100	100	100	100	100	100	100	100
1.10.2	b. anggaran	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Keuangan								
2.1	Persentase Perda, Perbup dan Pedoman yang disahkan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100
2.2	Persentase komplain terhadap penerbitan SP2D (%)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan penggunaan APBD sesuai standar dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
2.4	Persentase barang milik daerah yang tercatat di Pemerintah Kabupaten Tapin	100	100	100	100	100	100	100	100
2.5	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang digunakan	97,57	93,03	100	100	100	100	100	100
2.6	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dimanfaatkan	100	100	100	100	100	100	100	100
2.7	Persentase barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang dihapuskan	100	100	85	87	90	100	100	100
2.8	Persentase usulan rencana kebutuhan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Tapin yang terverifikasi	100	100	100	100	100	100	100	100
2.9	Persentase peningkatan objek pajak baru (OP)	4,85	4,85	4,90	5,00	5,20	5,40	5,60	5,60
2.10	- Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.	80	130,5	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.11	- Persentase Penerimaan Piutang daerah	0	80	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
2.12	- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0	83	80	80	80	80	80	80



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2.13	Persentase Ketersediaan laporan penerimaan pajak daerah/retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang wajib disusun	100	0	100	100	100	100	100	100
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan								
3.1	Persentase Pejabat pemimpin tinggi berdasarkan hasil assessment (%)	0	0	99	99	99	99	99	99
3.2	Persentase Pejabat administrator yang memenuhi syarat jabatan (%)	0	0	90	90	90	90	90	90
3.3	Persentase Pejabat fungsional tertentu yang memenuhi syarat jabatan (%)	0	0	90	90	90	90	90	90
3.4	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal (%)	90,01	99	70	75	80	85	90	90
3.5	Persentase ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegawaian (%)	98	99	99	99	99	99	99	99
3.6	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja (%)	0	0	95	95	95	95	95	95
4	Penelitian dan Pengembangan								
4.1	Persentase rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Pengawasan								
5.1.	- Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.2	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan Reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	70,22	60,92	80	85	90	95	100	100
5.3	- Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
5.4	- Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.5	Persentase Aparat pengawas fungsional pemerintah yang bersertifikat (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
5.6	- Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu (%)	76,97	70	75	80	85	90	95	95
5.7	- Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPIP dengan hasil minimal level 3 (%)	0	100	100	100	100	100	100	100
5.8	- Persentase Self Assesment Per Elemen dengan kesimpulan elemen level 3 (%)	0	50	60	70	80	90	100	100
5.9	Persentase laporan ikhtisar hasil pengawasan yang wajib dibuat dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Sekretariat Dewan								
6.1	Persentase kegiatan Dewan yang terfasilitasi dalam meningkatkan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD (%)	89,06	90	90	90	90	90	90	90
6.2	Persentase risalah rapat Dewan yang terselesaikan tepat waktu (%)	65,99	80	80	80	80	80	80	80
6.3	Persentase pembahasan Penganggaran dan pengawasan DPRD yang terselesaikan tepat waktu (%)	-	70	80	80	80	80	80	80
7	Sekretariat Daerah								
7.1	Nilai hasil evaluasi terhadap LPPD Kabupaten (poin)	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
7.2	Persentase batas wilayah yang telah ditetapkan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.3	Persentase hari besar yang diperingati tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7.4	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	40,38	53,84	65	68	71	74	77	77
7.5	Persentase kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan secara efektif dan akuntabel (%)	95,92	78	79	83	88	93	98	98
7.6	Tingkat Pelayanan Kehumasan (%)	98.86	98.86	85	85	85	85	85	85
	Tingkat Pelayanan Keprotokolan (%)	96.17	52.31	85	85	85	85	85	85
7.7	Persentase kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilayani (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.8	Persentase perangkat daerah yang melaporkan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu (%)	80	80	85	90	95	100	100	100
7.9	- Persentase BUMD yang sehat dan profitable (%)	80	80	85	90	95	100	100	100
7.10	- Persentase kesepakatan kerjasama (MoU) dibidang perekonomian yang difasilitasi (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
7.11	Cakupan pemenuhan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7.12	Persentase kegiatan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah yang dilayani dengan baik dan tepat waktu (%)	100	100	100	100	100	100	100	100



No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
7.13	Persentase paket pekerjaan yang dapat diselesaikan proses selangnya (%)	80	100	100	100	90	90	95	95
7.14	Persentase Usulan Raperda/Perbup/Kepbup yang diharmonisasi (%)	89,29	100	100	100	100	100	100	100
7.15	Persentase perangkat daerah yang menyusun SAKIP dengan benar dan tepat waktu (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
7.16	Persentase Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
7.17	Persentase perangkat daerah yang memiliki Standar Operasional Pelayanan (%)	0	0	100	100	100	100	100	100
7.18	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kabupaten Tapin (nilai)	0	0	100	100	100	100	100	100

Sumber: Hasil pengolahan data



BAB IX

PENUTUP

9.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, merupakan pedoman bagi pemerintahan Kabupaten Tapin dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan. Sehubungan dengan hal tersebut maka ditetapkan kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 merupakan pedoman dalam melaksanakan Renstra Perangkat Daerah 2018-2023. Oleh karena itu seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin berkewajiban untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah 2018-2023 sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Renja Perangkat Daerah setiap tahun.
- b. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 untuk setiap tahunnya dilakukan melalui penyusunan RKPD Kabupaten Tapin mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
- c. Bupati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode kepemimpinan 5 (lima) tahun berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan secara optimal semua potensi daerah.
- d. Evaluasi hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Kinerja pembangunan daerah akan diukur berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen RPJMD ini.
- e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tapin Tahun



RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

2018-2023 dan mengkoordinasikan hasil evaluasi Renstra PD Tahun 2018-2023.

- f. Bupati Kabupaten Tapin wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
- g. DPRD Kabupaten Tapin melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023.

9.2. Pedoman Transisi

Di dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah setelah RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023 ini berakhir, maka penyusunan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2024 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan RPJPD Kabupaten Tapin 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, dan RKP Tahun 2024.


BUPATI TAPIN,

M. ARIFIN ARPAN